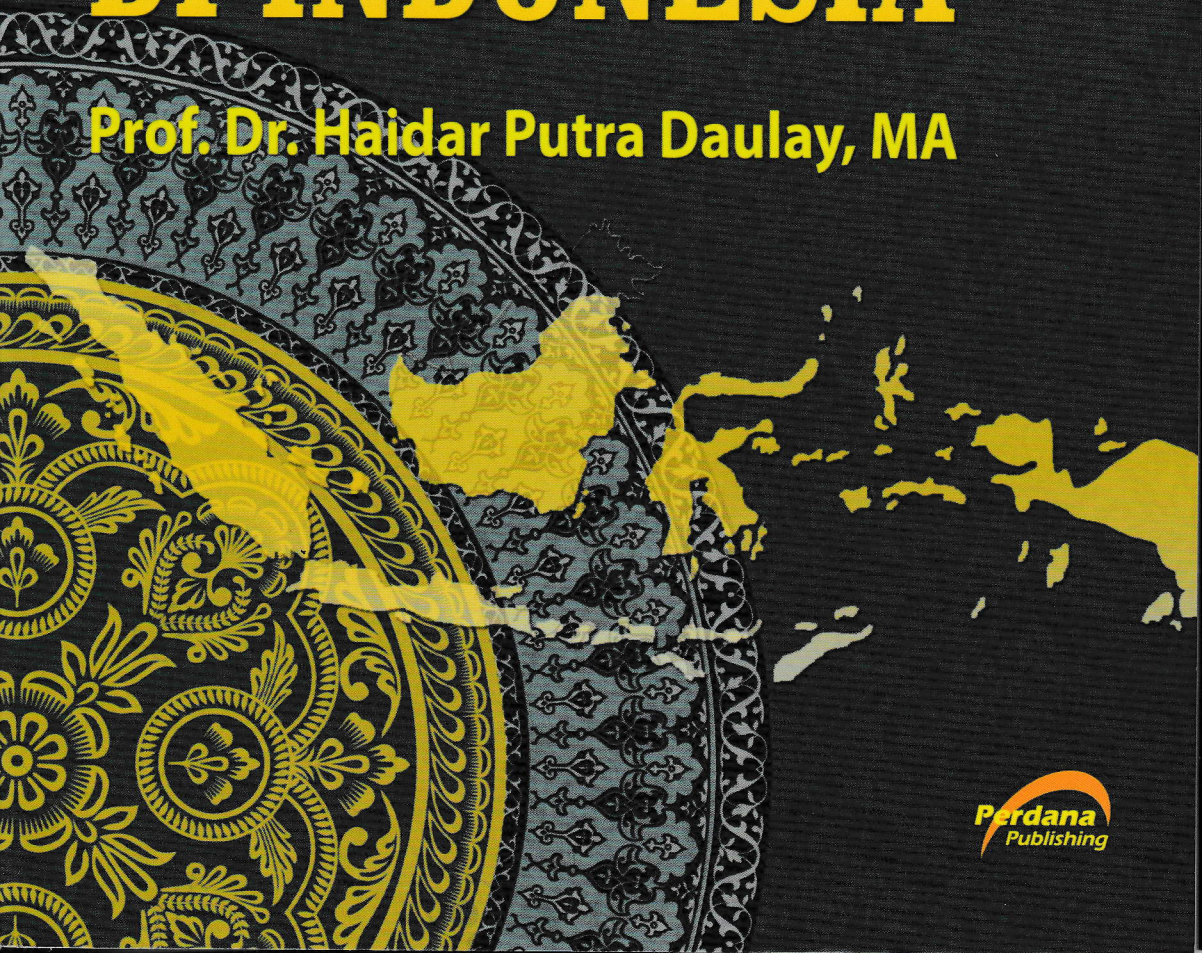


**PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN  
LEMBAGA-LEMBAGA**

# **PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

**Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA**





**PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN  
LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
DI INDONESIA**



# **PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA**

**Nurussakinah Daulay, M.Psi (Ed.)**



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana



**PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN  
LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

Penulis: Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA

Editor: Nurussakinah Daulay, M.Psi

Copyright © 2016, pada penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Samsidar  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:  
**PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana  
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756  
E-mail: [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)  
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: November 2016

**ISBN 978-602-6462-25-1**

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian  
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau  
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis



## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur penulis haturkan Kehadirat Allah Swt, atas karunia yang diberikanNya. Atas bantuan Allah Swt jugalah buku yang ada ditangan pembaca ini dapat diterbitkan.

Buku ini diberi judul: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.

Buku ini memuat tentang sejarah pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia: Pesantren, Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 di berbagai Perguruan Tinggi Islam (IAIN, STAIN dan UIN) serta Perguruan Tinggi Islam Swasta.

Kajian yang dimuat dalam buku ini adalah mengenai lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sampai sekarang masih tetap eksis dan mempunyai peranan yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi untuk terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada Nurussakinah Daulay, M.Psi, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU yang telah berkenan mengedit buku ini.

Terakhir, tegur sapa dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Wassalam  
Penulis,

**Haidar Putra Daulay**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II : PESANTREN</b> .....	4
A. Peranan Pendidikan Pesantren dalam Menciptakan Masyarakat Madani .....	4
B. Dinamika Pendidikan Pesantren dan Prospeknya .....	13
C. Peranan Pendidikan Pesantren dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional .....	25
D. Pesantren dan Otonomi Daerah .....	34
<b>BAB III : SEKOLAH</b> .....	43
A. Efektifitas Pendidikan Agama di Sekolah .....	43
B. Integrasi Pendidikan yang Ideal di Sekolah .....	48
C. Implementasi Sumber Daya Pembelajaran dalam Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Ditinjau dari Al Quran Dan Hadits .....	59
D. Memberdayakan Pendidikan Agama di Sekolah .....	67
<b>BAB IV : MADRASAH</b> .....	73
A. Kebijakan Pendidikan Madrasah dan Otonomi Daerah .....	73
B. Profesionalisme Guru Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan .....	79
C. Pembaharuan Madrasah di Indonesia .....	86



D. Merumuskan Pengertian Sekolah yang Berciri Khas Islam .....	110
E. Madrasah: Lembaga Pendidikan yang Perlu Diberdayakan .....	115
<b>BAB V : PENDIDIKAN TINGGI ISLAM .....</b>	<b>121</b>
A. Pengembangan Program Kurikulum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Suatu Respon Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah) .....	121
B. Perguruan Tinggi Islam di Masa Depan (Peluang dan Tantangan) .....	131
C. IAIN Di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan Dari Sudut Pendidikan Islam .....	138
D. Konversi IAIN Menjadi UIN .....	148
E. Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan SDM .....	156
F. Kualitas <i>Input</i> dan <i>Output</i> Perguruan Tinggi Agama .....	162
G. Pembidangan Ilmu Pada Pendidikan Tinggi Islam .....	169
H. Peranan Etika Akademik di Perguruan Tinggi Dalam Membentuk Sikap Ilmiah .....	182
I. Memberdayakan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi .....	189
J. Perguruan Tinggi Islam di Indonesia Perspektif Masa Depan .....	196
K. Majemen Pendidikan dan Pengajaran PTAIS ....	205
<b>BAB VI : PENDIDIKAN ISLAM INFORMAL .....</b>	<b>211</b>
A. Pendidikan Islam di Rumah Tangga .....	211
B. Urgensi Pendidikan Anak di Rumah Tangga ...	214
C. Rumah Tangga Salah Satu Pusat Pendidikan (Tri Pusat Pendidikan) .....	217

<b>BAB VII : PENDIDIKAN ISLAM NONFORMAL .....</b>	<b>220</b>
A. Mengenal Pendidikan Nonformal .....	220
B. Jenis-jenis Pendidikan Islam nonformal .....	222
 DAFTAR PUSTAKA .....	 228
TENTANG PENULIS .....	234
TENTANG EDITOR .....	236



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya terlaksana tanpa memiliki tempat khusus, jadwal waktu tertentu, bahan materi yang tersusun. Pendidikan tersebut hanya bersifat hubungan personal antara pendidik dan peserta didiknya. Kegiatan seperti ini terlaksana ketika pertama sekali Islam masuk ke Indonesia. Para pedagang yang merangkap menjadi muballigh melakukan aktivitas pengenalan dan pendidikan seperti yang disebutkan terdahulu. Setelah priode tersebut berlalu, terutama setelah umat Islam membangun masjid, atau langgar untuk menjadikannya tempat ibadah, maka mulailah difungsikan masjid sebagai tempat pendidikan.

Masjid mempunyai fungsi ganda, sebagai tempat ibadah shalat dan sebagai tempat pendidikan. Oleh karena perkembangan zaman, masjid tidak mungkin lagi menampung anak-anak yang belajar di masjid, maka mulailah muncul lembaga-lembaga pendidikan awal yang bernama pesantren, surau, dan dayah. Pelaksanaan pendidikan pada tahap awal itu adalah bersifat nonformal.

Akan tetapi setelah muncul dan berkembangnya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, maka lembaga pendidikan barupun muncul yaitu, madrasah dan sekolah. Madrasah telah mengalami perkembangan yang pesat sebelum Indonesia merdeka. Lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga pendidikan modern di kala itu. Kemoderenannya dapat dilihat dari sudut melaksanakan pembelajaran yang memiliki bangku, meja, papan tulis dan lain-lainnya. Selain dari itu lembaga lembaga itu juga mengajarkan mata pelajaran umum, terutama sekolah. Di sekolah-sekolah Islam ketika itu, misalnya sekolah Muhammadiyah, mengajarkan mata pelajaran umum di samping mengajarkan mata pelajaran Islam.

Pada tahun 1945, mulai berdiri pendidikan tinggi Islam yang bernama Sekolah Tinggi Islam, yang kemudian karena tuntutan revolusi pindah ke Yogyakarta pada tahun 1946, selanjutnya lembaga ini dikembangkan menjadi Universitas Islam Indonesia pada tahun 1948 berkedudukan di Yogyakarta.

Dinamika pendidikan Islam semakin menguat setelah kemerdekaan. Kementerian Agama yang salah satu tugasnya adalah mengurus masalah lembaga pendidikan Islam. Di tangan Kementerian Agama, lembaga pendidikan Islam semakin berkembang dengan dibangunnya lembaga pendidikan Islam negeri, yaitu menegerikan madrasah, dan memberi bantuan terhadap pesantren-pesantren dan madrasah swasta.

Ada empat lembaga pendidikan Islam formal yang diuraikan dalam buku ini :

1. Pesantren; pesantren telah mengalami dinamika, berkembang dari pesantren salafi (tradisional) menjadi pesantren modern, dan telah memunculkan beberapa pola-pola pesantren.
2. Sekolah; sekolah yang dimaksud ini di sini adalah pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah, disini juga telah terjadi juga dinamika. Pada masa penjajahan Belanda pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah, dan setelah Indonesia merdeka pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajarannya yang diajarkan di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Pendidikan agama di sekolah ini pun telah mengalami dinamika pula, mulai dari kedudukannya kurang penting hingga menduduki posisi penting dan wajib dilaksanakan.
3. Madrasah ; madrasah telah tumbuh di Indonesia sejak awal abad ke 20, tepatnya pada tahun 1909 H. Abdullah Ahmad mendirikan Madrasah Adabiyah di Padang, dan setelah itu mengalami perkembangan di Indonesia. Madrasah juga mengalami dinamika setelah Indonesia merdeka, diawali dengan mata pelajaran yang diajarkan di madrasah lebih terpusat kepada mata pelajaran agama hingga saat sekarang madrasah telah berubah wujud menjadi sekolah yang berciri khas agama Islam. Dan ini bermakna bahwa mata pelajaran umum lebih mendominasi dari mata pelajaran agama.
4. Pendidikan Tinggi; pendidikan tinggi telah berkembang sejak berdirinya STI tahun 1945, kemudian muncul UII (Universitas Islam Indonesia),

dan fakultas agama UII dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) didirikan di Yogyakarta tahun 1951, kemudian di Jakarta didirikan ADIA (Akademiki Dinas Ilmu Agama) tahun 1957. Kedua lembaga ini disatukan pada tahun 1960 dengan nama IAIN (Institut Agama Islam Negeri). IAIN berkembang di daerah-daerah dalam bentuk fakultas cabang, maka pada tahun 1997, fakultas-fakultas IAIN yang ada di daerah daerah itu dijadikan menajadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Dalam rangka untuk menerapkan konsep keilmuan yang utuh dan terintegrited anantara ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari perolehan manusia, maka didirikanlah Universitas Islam Negeri (UIN)

Selain dari lembaga pendidikan formal yang telah diungkapkan terdahulu di dunia pendidikan Islam, ada juga pendidikan Islam informal dan non formal



## **BAB II**

### **PESANTREN**

#### **A. PERANAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DALAM MENCIPTAKAN MASYARAKAT MADANI**

##### **1. Pendahuluan**

**P**esantren adalah lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Di lembaga inilah diajarkan dan dididikkan ilmu dan nilai-nilai agama kepada santri. Pada tahap awal pendidikan di pesantren tertuju semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama saja lewat kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Ilmu-ilmu agama yang terdiri dari berbagai cabang diajarkan di pesantren dalam bentuk wetonan, sorogan, hafalan ataupun musyawarah (*muzakarah*). Pada tahap awal juga sistemnya berbentuk non formal, tidak dalam bentuk klasikal, serta lamanya santri di pesantren tidak ditentukan oleh tahun, tetapi oleh kitab yang dibaca. Biasa juga seorang santri berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya, untuk mendalami ilmu yang lebih spesifik dari pesantren yang bersangkutan, dan biasa juga bagi santri yang memiliki kemampuan ekonomi melanjutkan pelajaran ke Makkah atau ke Mesir (Kairo).

Ciri yang paling menonjol pada pesantren tahap awal tersebut adalah pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama kepada para santri lewat kitab-kitab klasik, selanjutnya setelah masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia, turut serta terjadinya perubahan dalam bidang pendidikan. Pendidikan pesantren yang pada mulanya hanya berorientasi kepada pendalaman ilmu agama semata-mata mulai dimasukkan mata pelajaran umum. Masuknya mata pelajaran umum ini diharapkan untuk memperluas cakrawala pikir para santri dan untuk bisa pula para santri mengikuti ujian negara yang diadakan oleh pemerintah.

Selain dari itu di dunia pesantren juga telah diperkenalkan berbagai bentuk keterampilan. Dengan demikian ada tiga “H” yang dididikkan kepada santri saat sekarang ini, yaitu “H” pertama, *head* artinya kepala, maknanya mengisi otak santri dengan ilmu pengetahuan, “H” kedua, *heart* yang artinya hati, maknanya mengisi hati santri dengan iman dan takwa dan akhlak terpuji “H” yang ketiga, adalah *hand* artinya tangan, pengertiannya adalah keterampilan kecekatan, tangan untuk bekerja

Dengan berdasarkan kemampuan ketiga “H” tersebut pesantren saat sekarang ini akan berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader ulama, bangsa dan negara.

## 2. Pengertian, Ciri-ciri dan Unsur-unsur Pesantren

Pengertian pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe- dan akhiran -an berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja juga menjelaskan pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada juga yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian.

Sesuai dengan arus dinamika zaman, definisi serta persepsi terhadap pesantren menjadi berubah pula. Kalau pada tahap awalnya pesantren diberi makna dan pengertian sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi saat sekarang pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional tidak lagi selamanya benar. Dari pola-pola pesantren yang akan dikemukakan dalam uraian ini akan terlihat bahwa tidak selamanya pendidikan pesantren saat sekarang ini digolongkan kepada pendidikan tradisional. Namun secara umum perlu diberikan suatu keseragaman pengertian tentang pesantren. Untuk itu tentu tidak mudah oleh karena banyaknya pesantren, yang dapat disebutkan hanyalah unsur-unsur pokoknya saja.

Unsur-unsur tersebut menurut Zamakhsyari Dofier ada lima: pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik dan kyai. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan unsur-unsur pokok itu dapat dikemukakan: pondok, masjid, santri, pengajaran ilmu-ilmu agama dan kyai.

Adapun pola-pola pesantren dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **POLA I**

Yang dimaksud dengan pesantren pola I dalam tulisan ini adalah pesantren yang masih terikat kuat dengan sistem pendidikan Islam sebelum zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Ciri-ciri dari pesantren pola I adalah, pertama pengkajian kitab-kitab klasik semata-mata. Kedua, memakai metode sorogan, wetonan dan hafalan didalam berlangsungnya proses belajar mengajar. Ketiga tidak memakai sistem klasikal. Pengetahuan seseorang diukur dari sejumlah kitab-kitab yang telah pernah dipelajarinya dan kepada ulama mana ia berguru. Keempat, tujuan pendidikan adalah untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para santri untuk hidup dan bersih hati.

Sebagian dari pesantren pola I ini ada yang lebih mengkhususkan diri kepada satu bidang tertentu, misalnya keahlian fiqh, hadits, bahasa arab, tasawuf ataupun lainnya. Oleh karena itulah sering seorang santri pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya yang menjadi pola spesifik pesantren yang dituju.

### **POLA II**

Pesantren Pola II adalah merupakan pengembangan dari pesantren Pola I. Kalau pola I inti pelajaran adalah pengajian kitab-kitab klasik dengan menggunakan metode sorogan, wetonan dan hafalan, sedangkan pada pesantren pola II ini lebih luas dari itu. Pada pesantren pola II inti pelajaran tetap menggunakan kitab-kitab klasik yang diajarkan dalam bentuk klasikal dan non klasikal. Disamping itu diajarkan ekstra kurikuler seperti keterampilan dan praktek keorganisasian.

Pada bentuk sistem klasikal, tingkat pendidikan dibagi kepada jenjang pendidikan dasar (ibtidaiyah) 6 tahun, jenjang pendidikan menengah pertama (tsanawiyah) dan jenjang pendidikan atas (Aliyah) 3 tahun. Diluar waktu pengajaran klasikal di pesantren pola II ini diprogramkan pula sistem non klasikal, yakni membaca kitab-kitab klasik dengan metode sorogan dan wetonan. Pimpinan pesantren telah mengatur jadwal pengajian tersebut lengkap dengan waktu, kitab yang akan dibaca dan ustadz yang



akan mengajarkannya. Para santri bebas memilih kitab apa yang diikutinya untuk dibaca.

Selain dari materi pelajaran ilmu agama lewat kitab-kitab klasik, di pesantren ini juga diajarkan sedikit pengetahuan umum, keterampilan, latihan berorganisasi, olahraga, dan lain-lain.

### **POLA III**

Pesantren pola III adalah pesantren yang didalamnya program keilmuan telah diupayakan menyeimbangkan antara ilmu agama dan umum. Ditanamkan sikap positif terhadap kedua jenis ilmu itu kepada santri. Selain dari itu dapat digolongkan kepada ciri pesantren pola III ini adalah penanaman berbagai aspek pendidikan, seperti kemasyarakatan, keterampilan, kesenian, kejasmanian, kepramukaan, dan sebagian dari pesantren pola III telah melaksanakan program pengembangan masyarakat.

Struktur kurikulum yang dipakai pada pesantren pola III ini ada yang mendasarkannya kepada struktur madrasah negeri dengan memodifikasi mata pelajaran agama, dan ada pula yang memakai kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri. Pengajaran ilmu-ilmu agama pada pesantren pola III ini tidak mesti bersumber dari kitab-kitab klasik.

### **POLA IV**

Pesantren pola IV, adalah pesantren yang mengutamakan pengajaran ilmu-ilmu keterampilan disamping ilmu-ilmu agama sebagai mata pelajaran pokok. Pesantren ini mendidik para santrinya untuk memahami dan dapat melaksanakan berbagai kesempatan guna dijadikan bekal hidupnya. Dengan demikian kegiatan pendidikannya meliputi kegiatan kelas, praktek di laboratorium, bengkel, kebun/lapangan.

### **POLA V**

Pesantren pola V adalah pesantren yang mengasuh beraneka ragam lembaga pendidikan yang tergolong formal dan non formal. Pesantren ini juga dapat dikatakan sebagai pesantren yang lebih lengkap dari pesantren yang telah disebutkan di atas. Kelengkapannya itu ditinjau dari segi keanekaragaman bentuk pendidikan yang dikelolanya.

Di pesantren ini ditemukan pendidikan madrasah, sekolah, perguruan tinggi, pengajian kitab-kitab klasik, majelis ta'lim dan pendidikan keterampilan. Pengajian kitab-kitab klasik di pesantren ini dijadikan sebagai materi yang wajib diikuti oleh seluruh santri yang mengikuti pelajaran di madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Sementara itu ada santri yang secara khusus mengikuti pengajian kitab-kitab klasik saja.

## **POLA VI**

Pola VI, adalah sekolah yang di pesantrenkan. Sekolah-sekolah umum (SMP dan SMA) banyak yang berbentuk pesantren, menrapakan sistem pembelajaran pesantren. Kurikulumnya mengacu kepada kurikulum sekolah yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di samping itu dilaksanakan pula program kepesanterenan.

## **POLA VII**

Pola VII, adalah pesantren mahasiswa; mahasiswa yang kuliah diberbagai pendidikan tinggi baik umum maupun agama di pondokkan, dan mereka melaksanakan aktivitas kepesantrenan. Telah diatur jadwal-jadwal dan kegiatan kepesantrena tersebut. Tujuan lembaga ini di samping menguasai pengetahuan yang dituntutnya di perguruan tinggi tertentu dia juga menguasai masalah-masalah keagamaan.

## **3. Hakikat Pendidikan Islam**

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Menumbuhkan suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta. Potensi jasmaniah manusia adalah yang berkenaan dengan seluruh organ-organ fisik manusia. Sedangkan potensi rohaniah manusia itu meliputi kekuatan yang terdapat didalam batin manusia, yakni akal, qalbu, nafsu, ruh, fitrah. Asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia itu memiliki potensi yang meliputi badan, akal dan ruh, ketiga-tiganya persis seperti segi tiga yang sama panjang sisi-sisinya (Asy-Syaibani:92). Sedangkan Hasan Langgulung menyebutkan potensi manusia itu: fitrah, ruh, kemauan bebas dan akal (Hasan Langgulung:57-58).

Potensi ini semua telah ada pada batin manusia sejak manusia itu lahir ke dunia dan ianya telah built in dalam diri pribadi manusia. Atas dasar itulah apabila dikaitkan hakikat pendidikan yang berperan untuk mengembangkan potensi manusia maka sudah pada tempatnyalah seluruh potensi manusia itu dikembangkan semaksimal mungkin. Bertolak dari potensi manusia tersebut di atas maka paling tidak ada beberapa aspek pendidikan yang perlu dididikkan kepada manusia yaitu aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak, pendidikan akal dan ilmu pengetahuan. Pendidikan kejasmanin, kemasyarakatan, kejiwaan, keindahan dan keterampilan. Kesemuanya diaplikasikan secara seimbang. Hal ini sesuai pula dengan hasil konferensi dunia tentang pendidikan Islam, yaitu :

*Education should aim at the balanced growth of the total personality of Man through the training of Man's spirit, intellect, the rational self, feelings and bodily senses. Education should therefor cater for growth of man in all its aspects: Spritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic booth individually and collectively and motivate all These aspects towards goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to Allah. on the level of individual, the community and humanity at large". (First World Conference on Muslim Education: 4).*

#### **4. Masyarakat Madani**

Menurut Nurcholish Madjid, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mengacu kepada masyarakat Madinah yang berada dibawah pimpinan Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau membangun tatanan kehidupan masyarakat yang berperadaban. Jika masyarakat Madinah dibawah pimpinan Rasulullah yang menjadi acuan bagi masyarakat madani itu, maka perlulah diketahui beberapa ciri-ciri dari masyarakat Madinah itu. Pertama, masyarakat Rabbaniyah, semangat berketuhanan yang dilandasi tiga pilar, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Ketiga pilar menyatu menjadi satu ibarat tali berpilin tiga yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya pula. Di zaman Rasulullah setiap pribadi muslim memanifestasikannya dalam pribadi masing-masing.

Masyarakat yang demokratis, dimana Rasul dan para sahabatnya mentradisikan musyawarah dalam segala persoalan dan Rasulullah



tidak berkeberatan menarik pendapatnya apabila ada pendapat yang lebih baik. Masyarakat egalitarian, memandang sama manusia di depan hukum, bahkan beliau pernah bersabda “Seandainya Fatimah mencuri niscaya akan kupotong tangannya”. Masyarakat demokrasi dan egalitarian itu juga tercermin dalam sikap kaum muslimin, dicerminkan dengan pemilihan khalifah yang tidak berdasarkan kepada sistem monarki, tetapi lebih condong kepada sistem demokrasi yang dilakukan oleh negara-negara modern sekarang. Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali terpilih menjadi kepala negara dan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi.

Masyarakat yang toleran, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang plural, dari segi suku mereka terdiri dari berbagai etnik. Qabilah Auz dan Khazraj adalah soko guru dari kelompok Ansor, sedangkan Suku Quraish yang berasal dari Mekkah adalah orang-orang Muhajirin. Dari sisi agama selain dari Islam ada Yahudi dan lain sebagainya. Kehidupan toleran itu diikat oleh Rasulullah dalam satu ikatan yang disebut dengan Konstitution of Madinah (Piagam Madinah atau Mistaqul Madinah). Piagam ini mengatur tentang tanggung jawab seluruh warga Madinah untuk terciptanya persatuan dan kesatuan di kalangan mereka. Piagam Madinah itu adalah :

- a. Nabi Muhammad pemimpin bagi semua penduduk Madinah
- b. Semua penduduk Madinah tidak boleh bermusuhan
- c. Semua penduduk Madinah bebas mengamalkan agamanya masing-masing
- d. Semua penduduk Madinah hendaklah bekerja sama dalam bidang ekonomi dan pertahanan.
- e. Keselamatan orang Yahudi terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat pada Piagam Madinah.

Berkeadilan, Alquran dalam banyak tempat menjelaskan tentang keadilan. Karena begitu pentingnya keadilan sampai-sampai Al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan itu mendekati taqwa (QS. Al-Maidah:8).

Masyarakat berilmu, ilmu merupakan salah satu pilar yang ditegakkan Rasul dalam membangun masyarakat Madinah. Penerapan masyarakat berilmu ini telah dimulai oleh Rasulullah dengan memberantas buta aksara di kalangan kaum muslimin dengan cara membebaskan tawanan

perang yang mampu mengajari kaum muslimin menulis dan membaca sebagai tebusannya.

Semangat kurikulum ini pulalah yang mendorong kaum muslimin yang terdiri dari sahabat-sahabat Rasul untuk menimba ilmu aqliyah (IPTEK) tatkala mereka menaklukkan wilayah-wilayah yang menjadi pusat-pusat peradaban Yunani di Asia, yakni wilayah Syam (Syria), Irak dan Iran. Dari hasil kontak pertama kaum muslimin itu pulalah mulai timbulnya era penterjemahan ilmu pengetahuan aqliyah ke dalam bahasa Arab. Upaya-upaya penterjemahan inilah yang merupakan cikal bakal pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Melihat kepada beberapa indikasi masyarakat Madinah tersebut yang identik dengan masyarakat Madani, maka pantaslah Robert N. Bellah seorang sosiolog agama terkemuka mengatakan: “Masyarakat muslim klasik yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan tempatnya”. Masyarakat ini telah membuat lompatan jauh ke depan kecanggihan sosial dan kapasitas politik, sehingga masih tetap dan sangat aktual untuk menjadi acuan shift paradigma (Siti Nadhrah:151).

## **5. Pesantren dan Pembentukan Masyarakat Madani**

Berdasarkan indikasi masyarakat madani yang telah diutarakan terdahulu dapat dijadikan acuan guna untuk melihat sejauh mana pondok pesantren membentuk masyarakat yang diutarakan ciri-ciri tersebut.

- a. Masyarakat Rabbaniyah, adalah masyarakat yang didasarkan atas dasar ketuhanan yang dilandasi atas tiga pilar aqidah, syariah dan akhlak. Berkenaan dengan ini pesantren titik tumpu utamanya adalah lembaga pendidikan keagamaan baik secara teori maupun praktek. Secara teori para santri diajarkan ilmu-ilmu agama baik yang bersumber dari kitab klasik atau bukan. Secara praktek mereka diwajibkan untuk mempraktekkan kehidupan beragama baik menyangkut aqidah, syariah dan akhlak.
- b. Masyarakat demokratis dan egalitarian, kehidupan santri sangat demokratis dan egalitarian. Mereka hidup tanpa disekat oleh status sosial dan ekonomi. Muzakarah dan musyawarah ilmu pengetahuan



yang dikembangkan di pesantren adalah merupakan perwujudan dari kehidupan demokratis dan egalitarian tersebut.

- c. Hidup toleran, salah satu diantara kehidupan yang dikembangkan adalah hidup bertoleransi sesama mereka, menghargai orang lain, mengembangkan hidup tenggang rasa, mengikis sikap-sikap egois, ditumbuhkan semangat persaudaraan (ukhuwah). Sulit dibayangkan santri yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan di suatu pesantren apabila tidak memiliki sikap hidup tenggang rasa.
- d. Berkeadilan, sikap berkeadilan ini timbul dari sikap kyai yang memberikan pendidikan, perhatian, serta kasih sayang yang sama kepada santri. Santri diberlakukan secara sama, tidak dibedakan dalam pendidikan, pengajaran dan fasilitas, bahkan juga dari segi hukuman yang diberikan tidak membedakan seseorang atas dasar status sosial dan ekonomi orang tuanya. Pendidikan yang seperti ini memiliki pengaruh besar kepada santri dalam menumbuhkan toleran dan adil.
- e. Masyarakat berilmu. Pesantren adalah lembaga untuk menimba ilmu. Tentu saja dapat dipastikan bahwa pesantren tidak dapat dipisahkan dengan ilmu. Pada tahap awal (pesantren Salafi) mengembangkan ilmu-ilmu naqliyah (*perrenial knowledge*) atau pesantren pola I dan II. Tetapi dinamika berikutnya pesantren telah berkembang kepada pola III, IV dan V (pesantren Khalafi), pada pesantren khalafi ini ilmu telah lebih bervariasi dengan diajarkannya ilmu-ilmu aqliyah (*acquired knowledge*) disamping ilmu-ilmu naqliyah.

## 6. Kesimpulan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia yang pada tahap awal sebelum masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia semata-mata mengajarkan kitab-kitab klasik yang bertujuan untuk membentuk ulama, kyai yang kompeten dalam bidang ilmu-ilmu diniyah.

Sesuai dengan arus kemajuan zaman dibarengi pula masuknya ide-ide pembaharuan pemikir Islam ke Indonesia maka pesantren telah mengalami dinamika. Dinamika itu dapat dilihat dari tiga segi, dinamika materi (bahan yang diajarkan), dinamika administrasi dan management, serta dinamika sistem dari non klasikal menjadi klasikal.



Dengan demikian dapat dipahami bahwa pesantren semakin adaptif terhadap kemajuan zaman. Atas dasar itu peluang pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang akan menciptakan manusia seutuhnya akan semakin terbuka. Selain dari itu pesantren juga berperan untuk membentuk masyarakat madani yang bercirikan, masyarakat religius, demokratis, egalitarian, toleran, berkeadilan serta berilmu.

Kesemua ciri-ciri masyarakat madani ini yang ditransformasikan dari sikap hidup masyarakat Madinah yang dipimpin Rasul sangat erat kaitannya dengan output pesantren.

## **B. DINAMIKA PENDIDIKAN PESANTREN DAN PROSPEKNYA**

### **1. Pendahuluan**

Kajian tentang pesanteren di Indonesia sudah cukup banyak, ketertarikan para peneliti tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga orang luar negeripun tidak kalah minat mereka untuk meneliti pesanteren. Tentu ada daya tarik pesantren sehingga sampai hari ini tetap banyak para peneliti yang terjun untuk mengkaji pesantren. Pesantren sesungguhnya dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek pendidikan, kepemimpinan, transformasi kultur, bahkan tidak bisa dilupakan bahwa pesantrenpun terkait dengan politik. Naiknya Gus Dur (Abdur Rahman Wahid) ke kursi Presiden keempat Republik Indonesia juga tidak lepas dai peranan pesantren dalam politik.

Kehadiran pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan Islam sudah cukup lama, boleh dikatakan hampir bersamaan tuanya dengan Islam di Indonesia. Esensi pesentren telah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Masyarakat jawa kuno telah mengenal lembaga pendidikan yang mirip dengan pesentren yang diberi nama dengan *pawiyatan*. Di lembaga ini guru yang disebut Ki ajar hidup dan tinggal bersama dengan muridnya yang disebut Cantrik di pawiyatn, dan hubungan mereka amat akrab bagaikan orang tua dengan anaknya. Di sinilah terjadi proses pendidikan, di mana Ki ajar mentransferkan ilmunya, nilai-nilai kepada cantriknya. Sistem pendidikan pawiyatan ini mirip dengan sistem pesantren sekarang. Dengan demikian boleh jadi sistem pesantren mengambil sistem pawiyatan. Selanjutnya di kalangan agamawan Hindu dan Budha dilakukan pendidikan guru-guru agamanya. Dalam mencetak para pendetanya mereka memakai semacam sistem pesantren (Mastuhu, 1989 : 6).

Sesuai dengan arus dinamika perkembangan zaman sistem pendidikan pesantren telah berkembang. Perubahan dalam sistem pendidikan pesantren adalah merupakan keharusan untuk menjawab perkembangan zaman. Klasifikasi pesantren kepada pesantren salafiah dan pesantren khalafiah adalah merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dimungkiri.

Perubahan-perubahan ke arah pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia di mulai sejak masuknya ide-ide pemaharuan pemikiran Islam dan pemikiran pendidikan Islam ke Indonesia di awal abad kedua puluh. Pada dekade ini ide-ide pembaharuan yang muncul di dunia Islam secara internasional juga masuk ke Indonesia. Dan sebagian pemikir pendidikan Islam pada ketika itu menyuarakan suara pembaharuan itu. Namun perlu juga diketahui bahwa setiap ide yang baru tentu tidak semua masyarakat muslim menerimanya, ada menerimanya dengan sepenuh hati, ada yang ragu dan ada yang menolaknya.

Karena berbagai sikap umat Islam dalam menerima pembaharuan tersebut, maka berbagai pola pesantrenpun muncul saat sekarang ini. Ada pesantren yang masih terikat dengan pola-pola lama(tradisional), ada yang telah menerima sedikit pembaharuan, tetapi ada yang telah menerima pembaharuan secara mutlak.

Bertolak dari kenyataan tersebut, ke arah manakah idealnya pendidikan pesantren itu di bawa? Di arus modernisasi dan globalisasi ini tentu perlu dimunculkan pertanyaan, pesantren yang bagaimanakah yang bisa adaptif terhadap kemajuan zaman.Oleh sebab itu perlu dikaji berkenaan dengan pertanyaan tentang prospek pesantren masa depan. Di dalam mendudukan permasalahan ini, tentu digambarkan kira-kira bagaimana ujud masa depan itu?. Masyarakat yang bagaimana yang akan muncul pada ketika itu, maka dari situlah akan dirumuskan manusia yang ingin dibentuk.

## **2. Dinamika Pendidikan Pesantren**

Pendidikan Islam awal di Indonesia ini dilakukan oleh para muballigh atau pedagang yang merangkap muballigh. Kontak antara mereka dengan penduduk pribumi berlaku secara informal, selanjutnya setelah masyarakat muslim terbentuk di suatu tempat mereka membangun masjid dan masjid ini mereka fungsikan sebagai tempat pendidikan. Selain dari masjid terdapat pula lembaga –lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia, seperti pesantren



yang nama ini termashur di Jawa, di Aceh disebut dengan rangkang, dayah, sedangkan di Sumatera Barat surau. Apabila ditelusuri lembaga-lembaga ini maka pada hakikatnya adalah sama kendatipun berbeda nama.

Sistem pendidikan yang dikembangkan di pesantren pada ketika itu apabila ditinjau dari berbagai segi dapat dikemukakan sebagai berikut, pertama: ditinjau dari segi materi pelajarannya, pesantren mengajarkan mata pelajaran agama semata-mata dengan bertitik tolak kepada kitab-kitab klasik (kitab-kitab kuning). Tinggi rendahnya ilmu seseorang diukur dari kitab yang dipelajarinya. Ditinjau dari segi metodenya adalah sorogan dan wetonan. Sorogan adalah santri membaca kitab dihadapan kiyai dan kiyai mendengarkannya untuk diperbaiki apabila salah. Wetonan kiyai membaca kitab dihadapan santri, dan santri memberi catatan baik mengenai arti maupun harakahnya.

Sistem pembalajaran pada pesantren awal ini adalah non klassikal. Santri tidak dibagi tingkatannya atas dasar kelas-kelas. Para santri boleh saja duduk dalam suatu ruangan yang sama tetapi berbeda kitab yang mereka baca. Tidak dikenal ada kenaikan-kenaikan kelas setiap tahunnya. Tinggi rendahnya ilmu seseorang diukur dari jenis kitab yang mereka baca. Manjamen pendidikannyapun belum dikenal seperti saat sekarang ini, ada nomor induk pelajar, ada rapor ada sertifikat dan lain sebagainya. Santri menetap di pesantren tidak ada batas tahun tertentu bisa setahun atau dua tahun, tetapi juga biasa hanya beberapa bulan saja atau bisa belasan tahun.

Lazim juga dilakukan oleh santri untuk berpindah-pindah tempat. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sebuah pesantren dia pindah ke pesantren lainnya dan begitulah seterusnya. Biasanya perpindahannya dari suatu pesantren ke pesantren lainnya itu adalah karena ingin untuk menuntut ilmu yang lebih spesifik yang dimiliki oleh kiyai di tempat tersebut. Misalnya, keahlian bahasa Arab, hadis, tafsir, tasawwuf, dan lain sebagainya.

Awal abad kedua puluh –lebih kurang seratus tahun yang lalu- adalah awal masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, termasuk pemikiran dalam bidang pendidikan. Ide-ide pembaharuan itu di bawa oleh para pelajar Indonesia yang pulang dari Timur Tengah (Makkah, Madinah, Kairo). Dunia Islam internasional pada ketika itu telah terjadi pergolakan pemikiran dimulai dari Mesir pada abad kesembilan



belas, begitu juga Turki dan India. Ide-ide pembaharuan itu muncul karena tidak puas dengan keadaan yang menimpa umat Islam yang berada dalam keadaan terbelakang (miskin dan bodoh). Para pemikir Islam ketika itu mencoba mencari penyebabnya. Apa sebab umat Islam terbelakang,? setelah dianalisa maka disimpulkan ada beberapa penyebabnya, *pertama* hilangnya semangat dinamika berpikir umat Islam, mereka berada dalam keadaan jumut dan beku. *Kedua*, umat Islam terjerembab kepada paham fatalistic (*jabariah*), menyerah kepada nasib tanpa usaha. *Ketiga*, dilembaga-lembaga pendidikan Islam yang diajarkan hanya ilmu-ilmu agama saja. *Keempat*, ditinjau dari segi politik kebanyakan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam berada di bawah penjajahan (kolonialis) Barat.

Beberapa orang pemikir pembaharu Islam bersuara lantang agar umat Islam terbebas dari berbagai penyakit yang melanda tersebut. Di antaranya Jamaluddin AlAfghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Rido (di Mesir), di Turki Sulthan Mahmud II, di India Said Ahmad Khan. Sedangkan di Indonesia nama pembaharu itu baru muncul pada awal abad kedua puluh, seperti Ahmad Dahlan, Abdullah Ahmad, Syekh Jamil Jambek dan lain-lain

Para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Timur Tengah terutama di Makkah sangat banyak terimbas dengan suasana dunia Islam tersebut, apa sebabnya ? karena Makkah adalah merupakan tempat berkumpulnya ide-ide dan pemikiran dari seluruh dunia Islam, tempat penggodokan berbagai ide yang berkembang di dunia Islam. Di tempat ini setiap tahun umat Islam berkumpul dari seluruh dunia pada waktu melaksanakan haji. Dalam pertemuan itu baik formal maupun informal, masing-masing menerima berbagai informasi yang berkembang di dunia Islam, termasuklah informasi dan gerakan pembaharuan yang telah dibincangkan terdahulu. Dari informasi yang berkembang tersebutlah para penuntut ilmu yang berasal dari Indonesia menyerapnya dan kemudian membawa ide itu ke Indonesia.

Sebagai contoh misalnya, Syaikh Thahir Jalaluddin, adalah seorang di antara pelajar Indonesia yang bermukim di Makkah untuk menuntut ilmu, ia lahir di Ampek Angkek, Bukit Tinggi pada tahun 1869. Beliau mempunyai hubungan langsung dengan Al Azhar Kairo dan beliau banyak dipengaruhi pemikiran Muhammad Abduh. Sekembalinya dari Makkah pada tahun 1900, beliau mendirikan sekolah di Singapura dengan nama

al Iqbal al Islamiyah. Di samping itu beliau terbitkan pula majalah al Imam majalah ini sering mengutip pendapat Muhammad Abduh dan juga pendapat yang dikemukakan oleh al Manar di Mesir.

Abdullah Ahmad seorang tamatan Makkah berasal dari Sumatera Barat juga, pernah berkunjung ke sekolah yang dibangun oleh Syekh Thahir Jalaluddin yang bernama al Iqbal al Islamiyah, dari kunjungannya itulah beliau terdorong untuk membangun madrasah di Indonesia yang berbeda dengan pendidikan surau di Sumatera Barat. Madrasah yang dibangunnya itulah yang bernama Adabiyah atau Adabiyah School, yang menurut Mahmud Yunus, Madrasah Adabiyah adalah madrasah yang pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1909.

Sejak masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan tersebut ke Indonesia, maka secara bertahap terjadi perkembangan dalam dunia pendidikan, khususnya pesantren. Perubahan di dunia pesantren terjadi secara perlahan dan bertahap. Mulai muncul perkataan "Pesantren Modern". Lembaga pendidikan pesantren yang pertama menamakan dirinya lembaga pendidikan modern atau Pesantren Modern adalah Pesantren Darus Salam Gontor Ponorogo.

Pondok Modern Gontor Ponorogo didirikan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1345 atau 9 Oktober 1925, oleh K.H. Ahmad Sahal bersama dengan K.H. Zainuddin Fanani, dan K.H. Imam Zarkasyi. Ketiga pendiri ini dikenal dengan sebutan "Trimurti". Pesantren ini memakai kata "modern" untuk membedakannya dengan sistem pendidikan "tradisional" pada masa berdirinya pondok psantren ini di tahun 1926. Pondok psantren di kala itu, terutama yang ada di Jawa masih bersifat tradisional. Ciri yang membedakannya dari pesentren tardisional di kala itu adalah penggunaan bahasa Arab dan Inggeris secara aktif. Ide untuk mengajarkan dua bahasa ini adalah diinspirasi ketika diadakan Mukhtar 'Alam Islami di Makkah yang mengharapkan untuk mengirim calon peserta yang mampu berbahasa Arab dan Inggeris. Delegasi dari Indonesia harus mengirim dua orang, HOS Cokroaminoto yang mampu berbahasa Inggeris tapi tidak bisa berbahasa Arab dan KH. Mas Mansur yang fasih berbahasa Arab tapi tidak mampu berbahasa Inggeris. Setelah pesantren Gontor memperlihatkan hasil tamatannya, maka banyaklah pesantren di Indonesia ini yang mencontoh sistem pendidikan pesantren Gontor.



Dinamika pendidikan pesantren terus berjalan sesuai dengan arus perkembangan zaman. Setelah Indonesia merdeka tuntutan masyarakat Indonesia untuk mencedaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terus bergulir, dan salah satu makna dari tercerdaskannya bangsa itu adalah apabila lembaga-lembaga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang dapat berkiprah aktif di tengah-tengah masyarakat. Untuk dapat berkiprah aktif dalam rangka mengisi pembangunan di Indonesia, maka pesantren dituntut untuk dapat mengikuti derap kemajuan zaman.

Salah satu dari tuntutan tersebut adalah tuntutan pengembangan sistem pendidikan di pesantren. Di antara sub sistem yang perlu mendapat perubahan tersebut adalah kurikulum. (materi yang diajarkan). Materi pendidikan agama saja yang berbasis kepada kitab-kitab klasik dirasakan tidak memadai untuk memikul amanah pembangunan mencerdaskan bangsa, maka kurikulum yang berbasis agama tersebut diubah dengan memasukkan mata pelajaran umum ke pesantren-pesantren. Selain dari masuknya ilmu pengetahuan umum ke pesantren, masuk pula pendidikan keterampilan. Metode mengajarpun sudah bervariasi, tidak lagi semata-mata metode sorogan dan wetonan. Karena tuntutan penataan pendidikan di pesantren semakin diperlukan, maka manajemen pendidikan menerapkan manajemen administrasi pendidikan sebagaimana layaknya sebuah lembaga pendidikan.

### **3. Tuntutan Masa Depan**

Prediksi masa depan terkait dengan dunia kita yang akan memasuki kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin luar biasa. Kemajuan dari tahun ketahun dalam bidang IPTEK sangat mencengangkan manusia. Akan tetapi dari segi moral manusia semakin menurun. Ada tiga penyakit besar manusia modern, pertama materialisme, kedua hedonisme, ketiga individualisme.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadikan batas-batas dunia semakin menipis bahkan cenderung hilang, secara fisik (batas-batas negara) masih jelas terlihat, tetapi pembatasan informasi tidak. Informasi dapat sampai kepada seseorang dengan cepat dan dalam waktu yang hampir bersamaan.



Di dalam dunia yang didominasi oleh kemajuan ilmu dan teknologi diperlukan adanya pemahaman ke arah mana hidup di bawa oleh manusia, pemahaman ke arah mana hidup di arahkan.

Gambaran dunia masa depan itu adalah, dunia yang menjadikan basisnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kemajuan itu maka muncullah dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya adalah pendistorsian nilai-nilai akhlak. Kegandrungan manusia di dalam mencintai materi membuat manusia itu akan berupaya mencari materi tanpa mempertimbangkan halal atau haram, dan penggunaannya banyak yang mubazzir.

Kegandrungan manusia untuk mencari kelezatan hidup duniawi (hedonisme), membuat manusia mengobrol seks dengan segala aspeknya. Gejalanya membuka aurat dan memperagakan gerakan-gerakan erotis di muka umum, serta komersialisasinya di dalam segala lini yang luar biasa.

Banyak faktor yang akan mempengaruhi dunia masa depan kita terutama di Indonesia. Uraian terdahulu telah mengungkapkan tentang peranan ilmu pengetahuan, tetapi kalau ditinjau lebih dalam sebetulnya faktor-faktor lain juga banyak berpengaruh yang akan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan hidup manusia, di antaranya ekonomi, politik, sosial seni, agama (moral).

Dalam hal ini dimana letak pendidikan sebagai sarana untuk membentuk manusia masa depan itu ?, Seperti apa sosok manusia yang ingin kita bentuk pada masa depan?

Soedjatmoko, mantan Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seorang intelektual Indonesia yang kenamaan, pernah mempertanyakan kemampuan –kemampuan semacam apa yang harus dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang ? beliau mengemukakan beberapa ciri dari kemampuan tersebut. yaitu: “serba tahu” “*well informed*” harus tertanam pada diri seseorang bahwa proses belajar tidak pernah berhenti, harus mampu memasuki era “*life-long education*”. Dengan memiliki sikap mental *life-long education* itu seseorang mampu memegang dua atau tiga karir semasa hidupnya..

Selanjutnya dituntut kemampuan mencerna informasi yang dengan demikian dituntut untuk kemampuan analitis dan kemampuan besar untuk berpikir integratif dan konseptual. kreatif terhadap tantangan

baru, keberanian bertanggung jawab, kepekaan terhadap keadilan sosial dan solidaritas sosial, solidaritas nasional yang meliputi umat manusia seluruhnya, termasuk golongan-golongan yang lemah dan miskin. Dan juga harus peka terhadap batas-batas toleransi masyarakat terhadap perubahan sosial dan ketidakadilan.

Selain dari itu dia harus memiliki harga diri dan kepercayaan kepada diri sendiri berdasarkan iman yang kuat. Hal ini membuat kesanggupan untuk mandiri, berprakarsa berusaha sendiri dan bersaing di samping juga dia memungkinkan untuk berorganisasi dan bekerja sama dengan orang atau pihak lain. Baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, lepas dari perbedaan kebudayaan, ras dan agama. Selanjutnya juga harus mampu mengidentifikasi dimensi-dimensi moral dalam perubahan sosial atau pilihan teknologi, dan dia harus mampu menalar secara moral (*moral reasoning* atau *ijtihad*) dan mempunyai kemampuan untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan agama sehingga terungkap relevansinya dengan perkembangan-perkembangan baru (Sodjatmoko, 1993:35 -36).

Selanjutnya beliau mengajukan pula pertanyaan, sistem pendidikan yang bagaimana yang dapat membentuk generasi muda yang dia sanggup hidup dalam keadaan dunia yang tidak menentu dan dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi sosial secara besar-besaran ?

Untuk menjawab itu beliau mengajukan konsep. Membentuk generasi kritis dan kreatif. Mengembangkan motivasi dan mengembangkan karakter, yang harus diutamakan bukan pengalihan ilmu, tetapi peningkatan kemampuan belajar bangsa (*learning capacity*). Hal itu perlu ditinggalkan secepat-lekasnya sistem pengajaran secara hafalan di luar kepala, secara memorisasi, pada semua tingkat pendidikan. Pada tingkat universitas perlu tekanan utama supaya dialihkan dari kuliah-kuliah ke berkarya di perpustakaan dan laboratorium. (Sodjatmoko, 1993 : 36)

#### 4. Pesantren Masa Depan

Pertanyaan yang mendasar dalam pembahasan ini adalah bagaimana sosok pesantren masa depan tersebut ? Untuk menjawab hal itu tentu kita pertanyakan bagaimana pula sosok masa depan tersebut, sehingga dengan mengetahui sosok masa depan tersebut dapat pula disinkronkan dengan manusia yang bagaimana yang akan kita bentuk.



Ada beberapa ciri-ciri dari masa depan tersebut :

**a. Ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Manusia berada pada ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin dahsyat. Kemajuan ilmu pengetahuan di segala lapangan tidak bisa dihempang karena setiap bangsa telah mempersiapkan diri untuk itu. Universitas-universitas di seluruh dunia sibuk mengembangkannya, lewat riset, penerbitan buku ilmiah, majalah, seminar, diskusi dan sejenisnya serta sarana pengembangan ilmu lainnya.

**b. Kompetitif.**

Era globalisasi ini menuntut masyarakat dunia untuk berkomtitif secara sehat. Hampir di semua lini akan terjadi kompetitif tersebut (Iptek, ekonomi, politik, budaya dan lain lain). Di era kompetitif, maka sudah pasti berlaku apa yang dikatakan Darwin "*the survival of the fittest*" (yang unggul yang akan langgeng). Bagaimanakah nasib bangsa yang tidak memiliki keunggulan, dia akan mengekor kepada bangsa yang maju, bahkan bukan mustahil akan terjadi new klonialisme. Penjajahan dalam bentuk baru, tidak fisik bangsa tersebut yang dijajah, tetapi mentalnya di mana bangsa tersebut menggantungkan seluruh harapannya kepada bangsa lain yang lebih unggul dari mereka.

**c. Moral**

Bicara moral bicara tentang baik dan buruk. Dunia global telah memutuskan sekat-sekat antar bangsa, maka pergaulan umat manusia telah mendunia, dipergaulan yang mendunia ini manusia tidak bisa menghindarkan diri dari percampur adukan budaya dunia, sehingga orang tidak bisa mengklek lagi bahwa itu budayanya, sebab bangsa lainpun telah memakainya, boleh jadi budaya itu berasal dari suatu nagara, tetapi karena telah mendunia maka tidak mustahil budaya tersebut menjadi pakaian dari budaya bangsa lain. Di sini tentu bercampur antar baik dan buruk dengan batas-batas yang hampir tak jelas.

**d. Masyarakat Majemuk**

Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, beraneka ragam warna kulit dan bahasa. Selain dari itu juga kepercayaan dan



agamapun beraneka ragam pula. Khusus Indonesia jelas sekalilah bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis, baik dipandang dari segi geografis, suku dan agama. Pluralis itu adalah sesuatu yang alami dan lumrah. Di dunia kita yang semakin menggolabal ini maka pluralis itu semakin menampakkan diri. Oleh karena puluralis itu adalah merupakan suatu kenyataan maka manusia perlu bersikap positif dalam hal ini.

Bertolak dari prediksi masa depan umat manusia khusus masyarakat Indonsia, maka dunia pendidikan kita harus ditujukan kepada penyadaran masyarakat tentang urgensi pendidikan serta pendidikan yang bagaimanakah yang layak dan pantas diberikan kepada peserta didik. Untuk menjawab tantangan globalisasi, maka ada beberapa hal yang dikembangkan di pesantren.

#### e. Penataan Kurikulum.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin dahsyat. Karena itu pesantren tidak cukup untuk mentransferkan ilmu, tetapi lebih daripada itu lagi yakni meningkatkan kemampuan belajar (*learning capacity*). Rancangan kurikulum pun disesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Ada 4 pilar ilmu yang mesti diberikan kepada peserta didik: Pertama ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan (*ulumud diniyah*), ilmu pengetahuan kealaman (*natural sciences*), ilmu pengetahuan sosial (*social sciences*), dan humaniora. Keempat pilar ilmu dijabarkan dalam bentuk mata-mata pelajaran yang diberikan dalam bentuk intrakurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler.

#### f. Proses Pembelajaran.

Proses pembelajaran termasuk di dalamnya kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik berkualitas adalah kondisi yang tidak bisa ditawar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada tiga kompetensi dasar yang mesti dimiliki oleh seorang pendidik. *Pertama*, kompetensi keilmuan, memiliki ilmu yang membuat dia mampu dan layak mengajar pada tingkat tertentu. *Kedua*, kompetensi profesional, kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan ilmunya kepada orang lain serta, kemampuan memanage pengajaran. *Ketiga*, kompetensi moral akademik, memiliki tanggung jawab, jujur, loyalitas kepada tugas dan lain sebagainya. Selain dari pendidik maka dalam proses pembelajaran pun sarana dan fasilitas sangat diperlukan.

### g. Pembentukan Karakter (*Character Building*)

Dalam Kamus bahasa Indonesia *character* (karakter) adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; watak (Kamus Bahasa Indonesia, 1990 :389).

Dalam Kamus Psikologi di definisikan "*a consistent and enduring property or quality by means of which a person, object, or event can be identified*" (Chaplin, 1973 :79). Dalam Kamus Filsafat karakter di definisikan, *character* (bhs Yunani, chracter, dari charassein, menajamkan, mengukir, tanda atau bukti yang dicetak pada sesuatu untuk menunjukkan hal-hal seperti kepemilikan, asal-usul, nama atau merek). Chracter mempunyai arti: 1. Sebutan bagi jumlah total sifat seseorang, yang mencakup prilaku, kebiasaan, kesukaan, hal-hal yang tidak disukai, kemampuan, bakat, potensi, nilai, dan pola pikir. 2. Struktur yang terkait secara relatif atau sisi sebuah kepribadian yang menyebabkan sifat seperti itu. 3. kerangka kerja sebuah kepribadian yang secara relatif telah ditetapkan sesuai dengan sifat-sifat tertentu itu dalam meujudkan dirinya. (Kamus Filsafat, 1995 :50-51).

Bila disimpulkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa karakter itu terkait dengan sikap mental yang menjadi watak, tabiat dan bawaan seseorang. Pendidikan, misinya yang paling utama adalah pembentukan kepribadian, bukan pemindahan ilmu. Suatu hal yang amat memperhatikan dalam dunia pendidikan kita sekarang ini, kita amat lemah dalam pembentukan karakter ini. Mungkin di satu sisi kita telah berhasil dalam bidang *transfer of knowledge*, tetapi belum seutuhnya kita berhasil dalam dalam pembentukan watak. Diantara karakter yang perlu dibangun adalah, motivasi, etos kerja, semangat berkompetensi, jujur, disiplin, ulet, dan berbagai watak positif lainnya.

Pembentukan watak seperti yang diharapkan ini tidak semuanya tergantung kepada *transfer of knowledge*, mesti dirancang dalam pendidikan kita *transfer of values* (transfer nilai-nilai). Nilai positif yang telah menjadi watak bangsa kita atau watak bangsa lain yang positif yang perlu kita tiru, perlu ditransferkan kepada anak didik kita. Dan disinilah perlu dirancang medianya. Karena tidak cukup hanya dengan mentransferkan ilmu saja, perlu ada pendidikan motivasi, disiplin, jujur, bekerja keras, berkompetensi dan lain sebagainya. Ini kesemuanya diprogramkan oleh lembaga pendidikan merupakan bagian dari kurikulum.



#### **h. Pembentukan Manusia Religius dan Akhlak**

Sebagian dari nilai-nilai religius dan akhlak telah diuraikan dalam pembentukan karakter. Nilai religius adalah menyadarkan seseorang bahwa dia adalah hamba Allah yang dia harus taat kepadaNya. Dia bukan makhluk superman sehingga menimbulkan arogansi, walaupun dia memiliki keistimewaan dia adalah makhluk yang daif dihadapan Allah, karena itu dia selalu butuh kasih sayangNya, karena itu dia selalu berupaya untuk menarik cinta Ilahi kepadanya, maka dia berusaha untuk mendekatkan diri kepadaNya, dan setelah itu sampailah dia kepada perjalanan dirinya bahwa Allah selalu bersamanya.

Akhlak, tidak hanya terdapat dalam karakter yang disebutkan di atas, tetapi lebih dari pada itu. Kalau yang disebutkan di atas karakter-karakter tersebut banyak kaitannya dengan tanggung jawab pribadinya (harga dirinya) sebagai manusia, maka akhlak yang ingin dibentuk ini adalah tanggung jawabnya di samping dirinya, juga Allah manusia dan makhluk lain. Di sinilah letaknya memfungsikan serta mengaktualkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mempunyai fungsi ganda sebagai khaliftullah dan sebagai hamba Allah.

#### **i. Pembentukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial**

Di dunia yang menggelobal, maka orang harus dapat menerima kenyataan bahwa di dunia ini bukan dia saja yang hidup. Masih banyak orang lain yang berbeda dengan dia, berbeda tempat tinggal, suku, bangsa, bahasa, agama, budaya dan adat istiadat. Bagaimanakah dia hidup ditengah-tengah masyarakat yang sedemikian itu. bila dia tidak siap dengan kenyataan yang ada?. Karena itu salah satu muatan pendidikan kita itu bernuansa kemajemukan, termasuk di dunia pesantren.

#### **j. Pembentukan Watak Bekerja.**

Kerja adalah kebutuhan pokok manusia, manusia bekerja bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga adalah menunjukkan keberadaannya (eksistensinya). Kalau boleh kita pinjam perkataan Descartes "*cogito ergo sum*" "saya berpikir maka saya ada" maka "saya bekerja, maka saya ada". Begitulah pentingnya bekerja tersebut. Manusia sejak dini mesti diberi orientasi kerja. Orientasi kerja tidak



sama dengan membuat pelatihan kerja. Yang paling dipentingkan di sini persepsi dan tanggapan mereka tentang kerja.

## **5. Kesimpulan**

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang telah mengalami dinamika. Sejak masuknya Islam ke Indonesia dinamika itu telah berlangsung hingga saat sekarang. Pada tahap awal pesantren terbatas kepada penyelenggaraan pendidikan yang hanya mengajarkan kitab-kitab klasik saja, kemudian setelah ide-ide pembaharuan pemikiran Islam masuk ke Indonesia maka terjadilah perubahan disebagian pesantren dengan memasukkan mata pejaran umum. Selanjutnya di era tahun 1970an masuklah kedunia pesantren pendidikan keterampilan.

Di dalam mensikapai berbagai perubahan tersebut, maka ada beberapa sikap pesantren yang muncul. Pertama, ada pesantren yang tetap mempertahankan keorisinalannya, yaitu mengajarkan kitab-kitab klasik dan methode sorogan dan wetonan, sementara ada pula pesantren yang telah mengadopsi pemikiran modern dengan memasukkan mata pelajaran umum dan keterampilan, sementara ada pula pesantren yang mengkhususkan dirinya dalam bidang keterampilan. Selain dari itu ditemukan pula adanya pesantren yang membuka sekolah umum di samping madrasah. Demikianlah fariasi pesantren dalam mensikapi perubahan zaman.

Selanjutnya, diawal abad kedua puluh satu ini di era globalisasi, pesantren sudah perlah mengadakan muhasabah, instrospeksi diri dalam menghadapi perubahan kedepan. Beberapa pokok-pokok pikiran yang kami tuangkan di sini adalah merupaka secuil kecil dari pemikiran apa yang hendak kita berikan kepada pesantren ditengah peruahan zaman sekarang ini. Dan pemikiran ini jauh dari sempurna semoga mendapat masukan dari kita semua.

## **C. PERANAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL**

### **1. Pendahuluan**

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang telah tua sekali usianya, telah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu, yang setidaknya

memiliki lima unsur pokok, yaitu kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran ilmu-ilmu agama. Di lembaga ini berlangsung upaya pendidikan sepanjang hari dan malam dibawah asuhan kyai.

Lembaga pendidikan ini juga, telah turut mengalami dinamika sesuai dengan arus perkembangan zaman, yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan memakai sistem non klasikal. Inti materi pelajaran yang disampaikan kepada santri adalah kitab-kitab klasik dengan metode sorogan, wetonan dan hafalan. Dengan sistem seperti ini tinggi rendahnya ilmu seorang santri, diukur dari jenis dan kitab yang telah dibaca dan dipelajari serta dipahami oleh santri, oleh karena itu tidak ada batasan tahun yang pasti lamanya seorang santri berada di pesantren.

Pendidikan di pesantren, sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur telah mengalami perubahan-perubahan, sebagai akibat dari arus dinamika kemajuan zaman. Arus pembaharuan yang muncul di dunia Islam termasuk di Indonesia pada awal abad XX, banyak mempengaruhi tatanan berpikir umat Islam dalam segala hal, termasuk dalam bidang pendidikan. Karena itu maka muncullah ide-ide pembaharuan dalam dunia pendidikan Islam.

Khusus dalam hal pembaharuan di bidang pendidikan ada empat sasaran pokok yang harus diraih. Yaitu : pembaharuan dari segi metode, pembaharuan dari segi isi. Pembaharuan dari segi sistem dan manajemen, dari segi metode, telah dirasakan perlu pembaharuan, tidak lagi semata-mata berdasarkan kepada metode sorogan dan wetonan, tetapi telah perlu diperkenalkan metode lain.

Setelah Indonesia merdeka, tuntunan pembaharuan pendidikan di pesantren semakin terasa di dalam rangka untuk turut serta mengisi kemerdekaan itu sendiri. Karena itu berbagai materi pelajaran dimasukkan ke dunia pesantren, sehingga komponen pendidikan di pesantren terdiri dari :

- a. Pengajaran dan pendidikan agama
- b. Keterampilan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat sekitar
- c. Kepramukaan
- d. Kesehatan dan olahraga
- e. Kesenian yang bernafaskan Islam (Mukti Ali, 1986:80).



Pesantren telah memainkan peranannya yang besar dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada saat bangsa Indonesia berada dalam kekuasaan Hindia Belanda, pendidikan bagi sebagian besar bangsa Indonesia sangat mahal, di samping ditemukannya hambatan-hambatan struktural, maka ketika itu pendidikan pesantren merupakan salah satu alternatif, terutama bagi peserta didik yang tinggal di pedesaan.

Di pesantren ini pula santri dididik tidak hanya terbatas dalam hal yang berkenaan dengan ilmu-ilmu agama saja. Tetapi lebih dari pada itu pendidikan pesantren telah lama dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mendidik sikap-sikap positif bagi peserta didiknya. Di antaranya adalah sikap mandiri, hemat, hidup sederhana, persaudaraan, disiplin, hormat kepada guru (kyai).

Dengan sikap-sikap yang positif yang dididikkan tersebut, tidak mengherankan bahwa dari pesantren banyak tokoh-tokoh pemimpin bangsa. Lebih dari itu pesantren pada masa penjajahan Hindia Belanda berfungsi sebagai kubu perjuangan bagi upaya-upaya perlawanan terhadap kaum penjajah.

Nilai-nilai religius yang terpadu dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia merupakan kekuatan mendasar yang dimiliki oleh pesantren. Dan nilai-nilai itu begitu kentalnya menyatu dalam pribadi warga pesantren, sehingga banyak nilai-nilai modernisasi budaya barat yang tidak mampu menembus dinding pesantren. Daya tahannya terhadap berbagai upaya yang cukup kuat, oleh karena itu pesantren memiliki kultur tersendiri.

Indonesia telah lama mencanangkan program pembangunan manusia seutuhnya, yang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa manusia yang ingin diciptakan itu adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU No 20 tahun 2003, Bab II, pasal 3)

Di dalam rangka mewujudkan kualitas manusia yang diinginkan tersebut, maka pemerintah memprogramkannya lewat pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Salah satu di antara lembaga pendidikan yang akan berupaya untuk membentuk manusia seutuhnya tersebut adalah pesantren. Di dalam kaitan inilah tulisan ini akan mencoba melihat sejauhmana peranan pesantren dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.



## 2. Ciri-ciri Umum Pendidikan Pesantren

Sesuai dengan latar belakang masalahnya, dapat dilihat tujuan utama didirikannya suatu pesantren adalah untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam (tauhid, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, tasawuf, bahasa Arab dan lain-lain). Diharapkan seorang santri yang keluar dari pesantren telah memahami beraneka ragam mata pelajaran agama dengan kemampuan merujuk kitab-kitab klasik.

Sangat dianjurkan juga seorang santri calon kyai di samping menguasai ilmu-ilmu agama secara menyeluruh, secara khusus dia juga memiliki keahlian dalam mata pelajaran tertentu, semacam spesialisasi. Karena adanya spesialisasi-spesialisasi kyai-kyai tertentu, maka hal ini juga berpengaruh terhadap spesifik pesantren yang diasuh oleh kyai tersebut.

Oleh karena adanya spesifik dari pesantren tersebut, maka biasanya seorang santri yang telah menyelesaikan pelajarannya pada salah satu pesantren, pindah ke pesantren lain yang menjadi spesifik dari pesantren yang didatanginya itu.

Karena tuntutan pokok yang mesti dipahami oleh santri adalah ilmu-ilmu agama Islam, maka tidak boleh tidak para santri mesti memahami ilmu-ilmu agama Islam dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang telah dijabarkan oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Atas dasar itulah, pemahaman kitab-kitab berbahasa Arab adalah merupakan unsur pokok dalam suatu pesantren.

Untuk mengajarkan kitab-kitab klasik tersebut seorang kyai menempuh metode: sorogan, wetonan dan hafalan. Wetonan adalah metode kuliah di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai. Kyai membacakan kitab yang dipelajari saat itu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan. Sorogan adalah metode kuliah dengan cara santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari.

Kitab-kitab yang dipelajari itu diklasifikasikan berdasarkan tingkatan-tingkatan. Ada tingkat awal, menengah dan atas. Seorang santri pemula terlebih dahulu dia mempelajari kitab-kitab awal, barulah kemudian dibenarkan mempelajari kitab-kitab pada tingkat berikutnya, dan demikianlah seterusnya.

Di samping metode sorogan dan wetonan yang disebutkan terdahulu, maka metode hafalan menempati kedudukan yang paling penting di dunia pesantren. Pelajaran-pelajaran tertentu dengan materi-materi tertentu diwajibkan untuk dihafal.

Selain dari itu dilaksanakan pula bentuk musyawarah, yakni mendiskusikan pelajaran yang sudah dan yang akan dipelajari. Musyawarah bertujuan untuk memahami materi pelajaran yang telah diberikan oleh kyai.

Gambaran di atas adalah merupakan gambaran umum dari pesantren yang tergolong tradisional, atau dalam istilah mereka pesantren salafi. Sedangkan pesantren yang tergolong khalafi (modern), maka metode-metode penyampaian yang disebutkan di atas bukanlah satu-satunya metode pengajaran, mereka telah mempergunakan metode yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah umum.

Penanaman akhlak sangat dipentingkan di dunia pesantren. Akhlak sesama teman, kepada masyarakat sekitarnya, terlebih-lebih kepada kyai. Hubungan antara santri dan kyai tidak hanya berlaku selama santri berada dalam lingkungan pesantren, hubungan tersebut berlanjut kendatipun santri tidak lagi berada secara formal di pesantren. Pada waktu-waktu tertentu bekas santri datang mengunjungi kyai (sowan). Selain itu hubungan santri dengan kyai tidak hanya menyangkut dalam hal yang berkenaan dengan proses belajar mengajar, tetapi lebih dari pada itu lagi. Dalam hal-hal yang amat pribadipun sifatnya selalu ditanyakan santri kepada kyai.

### **3. Relevansi Pendidikan Pesantren Dengan Tujuan Pendidikan Nasional**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, bab II pasal 4, menyebutkan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia-manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Bila dirinci sosok manusia Indonesia yang ingin diciptakan sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 adalah :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berakhlak mulia
3. Sehat.
4. Berilmu
5. Cakap
6. Kreatif.
7. Mandiri
8. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk melihat kaitan langsung antara pendidikan pesantren dengan tujuan pendidikan nasional, ada baiknya diuraikan kegiatan pendidikan pesantren yang berisikan pencapaian point-point yang tertera dalam tujuan pendidikan nasional tersebut di atas (Daulay, 1991:114-116).

#### **a. Pendidikan Ketuhanan dan Akhlak**

Seluruh pesantren dalam berbagai pola dan program pendidikannya, sangat mengutamakan pendidikan ketuhanan dan akhlak. Program-program pendidikan baik yang berbentuk formal maupun non formal, tertuju kepada pembentukan manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur.

Kegiatan-kegiatan kearah pembinaan tersebut dapat dilihat :

- 1) Penanaman ilmu-ilmu agama, yang mencakup akidah, syariah dan akhlak. Penanaman itu tidak hanya bersifat kognitif akan tetapi juga bersifat afektif dan psikomotor.
- 2) Pembiasaan-pembiasaan pengamalan agama, antara lain lewat :
  - a) Shalat berjamaah
  - b) Membaca Al-Qur'an
  - c) Zikir
  - d) Puasa sunat
  - e) Shalat malam (shalat tahajjud)
  - f) I'tikaf di masjid.
- 3) Pembinaan nilai-nilai akhlak terpuji serta pembiasaannya. Untuk membina akhlak yang baik, maka pesantren menentukan beberapa hal :



- a) Peraturan-peraturan yang mesti ditaati dan diberi sanksi, sesuai dengan pelanggaran tersebut.
- b) Menerapkan disiplin : bangun, ibadah, belajar, olahraga, istirahat, tidur dan kegiatan-kegiatan lain.
- c) Kyai, ustadz menjadi panutan dan merupakan contoh teladan
- d) Menanamkan cita-cita ideal dari pondok pesantren di mana santri itu belajar

### **b. Pendidikan Akal dan Ilmu Pengetahuan**

Sejak masuknya ide-ide pembaharuan ke dunia pendidikan Islam Indonesia, maka lembaga pendidikan pesantren tidak lagi semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, telah diupayakan memasukkan berbagai mata pelajaran umum. Hanya saja di dalam memasukkan mata pelajaran selain mata pelajaran agama, antara satu pesantren dengan pesantren lainnya, bobotnya tidak sama. Karena itulah timbul berbagai polarisasi pesantren seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Walaupun mata pelajaran ilmu-ilmu keagamaan, dan ilmu sosial humaniora, telah dimasukkan kedalam kurikulum pesantren, namun tekanan pendalaman ilmu-ilmu di pesantren tetap ilmu-ilmu agama.

### **c. Pendidikan Jasmani**

Kegiatan pendidikan jasmani di pesantren dilakukan di luar kegiatan intrakurikuler. Ada yang melaksanakan pada pagi hari sebelum kegiatan kelas dimulai dan ada pula yang melaksanakannya di sore hari. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan pesantren. Diprogramkan kegiatan olahraga yang tidak begitu banyak membutuhkan biaya, baik biaya rutin maupun biaya pengadaan sarannya, tanpa mengurangi nilai yang ingin dicapai dari kegiatan olahraga itu sendiri.

Pemeliharaan kesehatan, juga mendapat perhatian di pesantren, adanya balai pengobatan, semacam poliklinik untuk menanggulangi penyakit ringan. Sedangkan penyakit-penyakit yang tergolong berat dibawa berobat ke rumah sakit yang lebih lengkap.

Sesuai dengan tujuan kurikuler pendidikan jasmani yang ingin dicapai di pesantren, yakni untuk memberikan kesegaran dan kesehatan jasmani

di samping sebagai sarana rekreasi bagi santri, bukan untuk menciptakan olahragawan profesional, maka kegiatan olahraga yang dilaksanakan di pesantren telah memungkinkan untuk mencapai tujuan kurikuler dimaksud.

#### **d. Pendidikan Kemasyarakatan**

Di pesantren ditanamkan rasa kebersamaan bagi setiap santri, tidak terlihat perbedaan seseorang dari status ekonomi. Mereka tinggal pada tempat yang sama, memakan makanan yang sama, memakai pakaian yang rata-rata berkualitas sama, jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan mereka. Hal ini karena santri melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama, seperti shalat berjamaah, belajar, olahraga, istirahat, makan, mencuci pakaian, membersihkan ruangan dan lain sebagainya. Lebih dari pada itu penanaman ukhuwah islamiah baik secara teori maupun praktek sangat diperhatikan. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan bagian dari pendidikan kemasyarakatan yang juga diberikan di pesantren.

#### **e. Pendidikan Kejiwaan**

Sasaran pokok dari pendidikan kejiwaan adalah terbentuknya pribadi yang berjiwa sehat. Untuk bisa mencapai hal itu perlu dididikan agar santri dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan.

Di pesantren, pendidikan kejiwaan telah dipraktekkan lewat bimbingan kyai terhadap santri. Hubungan kyai dengan santri sangat erat. Santri selalu datang kepada kyai untuk mengemukakan berbagai persoalan, baik yang menyangkut tentang pelajaran maupun tentang problema-problema kehidupan. Dalam hal inilah bimbingan kyai terhadap santri berlangsung. Kyai berperan sebagai konselor dan santri sebagai klien (konseli). Nasehat-nasehat dan petuah-petuah kyai dijadikan pedoman oleh santri. Dalam bentuk seperti inilah pendidikan kejiwaan itu berlangsung.

#### **f. Pendidikan Kesenian**

Pendidikan kesenian dilaksanakan di pesantren dalam bentuk pendidikan ekstra kurikuler. Dan dilaksanakan pada jam yang telah ditentukan. Kegiatan kesenian, seperti barzanji, rebana, gambus, kasidah, sudah lama muncul di dunia pesantren.

Departemen Agama, lewat proyek pembinaan dan bantuan kepada pondok pesantren, memprogramkan pembinaan kesenian pada pondok pesantren dengan program dasar dan program latihan. Program dasar meliputi seni drama, seni rupa, seni suara, seni sastra dan keterampilan seni. Program latihan yang meliputi latihan berbagai jenis seni drama, berbagai jenis seni sastra, seni rupa, berbagai jenis fotografi dan berbagai jenis latihan lainnya.

### **g. Pendidikan Keterampilan**

Salah satu upaya pembaharuan yang dilakukan bagi pesantren adalah memasukkan pendidikan keterampilan ke pondok pesantren. Hasil keputusan Seminar Pondok Pesantren Seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1965 dan Seminar Pendidikan Pada Perguruan Agama yang diadakan oleh Departemen Agama tahun 1971 memutuskan agar di pondok pesantren diadakan pendidikan keterampilan, seperti pertukangan, pertanian, pembaharuan kurikulum, di samping pembinaan di bidang personil, meterial, organisasi dan administrasi.

Pendidikan keterampilan di pesantren, dapat diklasifikasikan pada tiga macam. Pertama, pesantren yang memberikan bobot keterampilan yang tinggi, sesuai dengan tujuan institusional yang ingin diraihny. Kedua, pesantren yang memberikan keterampilan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran. Ketiga, pesantren berupaya menyeimbangkan antara pendidikan akademik dan pendidikan keterampilan.

## **4. Kesimpulan**

Dengan mendiskripsikan kegiatan Pendidikan di Pesantren ditinjau dari beberapa aspek yan diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pesantren memiliki kaitan erat dengan pencapaian tujuan nasional. Beberapa aspek yang ditemukan dalam tujuan pendidikan nasioanal, dapat ditemukan di pesantren. Artinya bahwa pesantren memprogramkan aspek-aspek apa yang terdapat dalam tujuan pendidikan nasional, seperti: pesantren memprogramkan agar santri menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, serta berakhlak mulia, begitu juga pesantren memprogramkan agar santrinya sehat baik jasmani maupun rohani dengan meprogramkan pembelajaran olah raga dan



kesehatan, pesantren memprogramkan santri mereka menjadi orang berilmu ; ilmu yang diajarkan di pesantren meliputi, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kealaman, sosial dan humaniora , pesantren juga mengajarkan orang untuk cakap, beberapa keterampilan yang diajarkan di pesantren adalah membuat santrinya untuk menjadi cakap, begitu juga kreatif dan mandiri. Tentang mandiri, pesantren amat dominan sekali peranannya dalam membina santri dan ini telah terbukti.

## **D. PESANTREN DAN OTONOMI DAERAH**

### **1. Pendahuluan**

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, ianya muncul sejak zaman wali songo menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Bahkan menurut sebagian pendapat, model pendidikan pesantren telah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Karena itu ada yang berpendapat Pesantren itu dipengaruhi unsur-unsur budaya dan agama sebelum Islam. Pawiyatan misalnya, adalah pendidikan Jawa kuno, dimana Ki ajar dan cantrik hidup dalam suatu lokasi yang sama dan terjadinya proses pendidikan dengan baik di tempat tersebut. Setelah datangnya Islam ke Indonesia beberapa aspek dari kehidupan masyarakat itu diislamisasikan, termasuk lembaga pendidikan pra Islam.

Di Pesantren terlaksanalah berbagai kegiatan kependidikan Islam. Perkembangan Pesantren adalah tahap permulaan memberikan materi pelajaran yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Santri yang menamatkan pelajaran di suatu pesantren biasanya kembali ke daerahnya masing-masing dan di daerah asalnya itu dia mendirikan pesantren baru. Dengan demikian terjadilah jaringan antara pesantren. Dari segi metode penyampaian pelajaran populer di pesantren dengan istilah *sorogan*, *wetonan*, hafalan dan muzakarah.

Setelah Indonesia dimasuki oleh ide-ide pembaharuan pada permulaan abad kedupuluh maka dunia pendidikan Islampun dimasuki pula oleh ide-ide pembaharuan tersebut, sehingga terjadilah perubahan dalam sistem pendidikan Islam. Di antara perubahan itu adalah lahirnya madrasah, masuknya mata pelajaran umum ke pesantren serta penerapan sistem klasikal. Mengenai masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, pada tahap awal sebahagian pesantren dapat menerima pembaharuan tersebut, sedangkan sebagiannya belum dapat menerimanya.

Akibat dari itu sampai sekarang pesantren itu dipolakan kepada dua pola utama. Pertama, pesantren yang telah menerima ide-ide pembaharuan (disebut juga pesantren khalafi), kedua pesantren yang tergolong kepada pesantren tradisional (disebut dengan pesantren salafi). Pesantren kelompok pertama telah memasukkan mata pelajaran umum kedalam program kurikulumnya dan telah pula melaksanakan sistem klasikal serta administrasi pendidikan. Sedangkan pesantren kelompok kedua mata pelajaran yang diajarkan semata-mata kitab-kitab klasik.

Sejak berdirinya pesantren, terutama pada masa kolonial Belanda, pesantren telah menunjukkan kemandiriannya, dia tidak berada dibawah kendali pemerintah Belanda, bahkan pesantren dikala itu menjadi kelompok oposan dengan pemerintah. Setelah Indonesia pada tahap awal lewat BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada tahun 1946 telah mengusulkan kepada pemerintah untuk memperhatikan pendidikan Islam di Indonesia, salah satu diantaranya adalah pesantren. Untuk memberikan perhatian tersebut maka tugas ini diemban oleh Kementerian Agama. Sejak saat itu pengelolaan pesantren tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah lewat Kementerian Agama.

Sejak bergulirnya era reformasi di Indonesia dimana salah satu suara yang cukup keras diperdengarkan adalah keinginan otonomisasi daerah. Untuk itu disahutilah dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di era otonomisasi ini akan semakin banyak peluang terbuka bagi pembenahan-pembenahan pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang telah banyak berkiprah di Indonesia. Salah satu kendala besar yang dihadapi oleh pesantren, khususnya di daerah ini adalah masih perlu memberdayakan pesantren agar dapat mandiri seutuhnya, karena itu lewat terwujudnya otonomisasi, maka diharapkan pesantren akan mendapat peluang lebih berkembang di daerah ini.

## **2. Indonesia dan Era Pendidikan**

Indonesia, sejak merdeka hingga saat sekarang ini belum lagi menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama yang harus diperhatikan, karena itu kita tidak heran kenapa SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia sampai



hari ini amat memprihatinkan begitu juga kualitas lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dengan kualitas lembaga pendidikan di negeri jiran. Tingginya angka *drop out* serta putus sekolah, merupakan salah satu indikasi betapa pendidikan kita saat sekarang ini sedang “sakit”, untuk itu perlu perhatian serius bagi berbagai kelompok.

Pada zaman Bung Karno, sesuai dengan kondisi Indonesia yang masih baru merdeka perhatian dalam bidang politik sangat menonjol, akibatnya kabinet sering jatuh bangun, konstituante tidak dapat melaksanakan tugas pokok utamanya setelah Pemilu, akhirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terpaksa dikeluarkan Bung Karno sejak saat itu tensi dan suhu politik semakin tinggi baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Pada era Soeharto, dipanglimakanlah ekonomi. Dampak negatifnya timbulnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Era kedua tokoh tersebut telah berlalu, telah meninggalkan berbagai hal yang menjadi agenda untuk diperbaiki bersama.

Melihat kenyataan yang ada serta dampak negatif yang muncul dari mempanglimakan politik dan ekonomi, maka sudah saatnya sekarang para pembuat kebijakan untuk mendudukkan pendidikan sebagai bagian teramat penting untuk ditangani secara sungguh-sungguh. Karena itu menurut hemat penulis telah tiba saatnya untuk “mempanglimakan” pendidikan. Perhatian yang sungguh-sungguh harus dicurahkan ke pendidikan. Anggaran pendidikan mesti dinaikkan, sarana dan fasilitas pendidikan ditenahi, tenaga terdidik dikirim ke luar negeri dan jika perlu tenaga-tenaga yang dari luar negeri mesti direkrut untuk membantu pemulihan pendidikan di Indonesia. Manajemen serta program strategis, arah serta isi pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh lima tahun ke depan telah tergambar, dan program lainnya yang ada kaitannya dengan pendidikan.

### **3. Pesantren Lembaga Pendidikan Islam yang Mandiri**

Salah satu ciri yang menonjol dari pendidikan pesantren adalah kemandirian lembaga ini. Kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan telah terlihat sejak lama terutama setelah masuknya kaum penjajah. Pada zaman kolonial Belanda kebijakan pendidikan mereka adalah diskriminatif. Ada tiga strata sosial masyarakat yang mendapat pelayanan pendidikan yang berbeda. Pertama anak-anak Belanda sendiri. Kedua, orang Indonesia



yang memiliki kedudukan di pemerintahan kolonial Belanda atau orang yang memiliki tingkat ekonomi tertentu. Ketiga, masyarakat awam rakyat kebanyakan yang berhak memasuki strata sekolah yang paling rendah pula.

Di dalam kebijakan pendidikan kolonial ini, pesantren atau madrasah tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Pesantren tumbuh dan berkembang sendiri secara alamiyah tanpa mendapat perhatian, bahkan cenderung pesantren oposan dengan pemerintah baik dari segi kultur maupun politik. Selain dari itu pemerintah kolonial Belanda tidak pula mengajarkan pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah, pendidikan agama hanya dapat diberikan di sekolah-sekolah swasta, itupun pendidikan agama tidak boleh diberikan kepada murid yang orang tuanya keberatan untuk diajarkan pendidikan agama kepada anaknya.

Melihat peta pendidikan di zaman kolonial Belanda ini, dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk pendidikan antara satu dengan lain saling bertentangan. Pertama pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Belanda dengan mengkonsentrasikan seluruh mata pelajarannya kepada pengetahuan umum (skuler). Kedua pendidikan pesantren dengan mengkonsentrasikan mata pelajarannya kepada mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Antara keduanya tidak terjalin sinkronisasi dan sinergi, masing-masing bergerak dengan modelnya sendiri-sendiri. Keadaan yang sedemikian ini menunjukkan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren memiliki kemerdekaan untuk mengurus dirinya sendiri tanpa intervensi pemerintah kolonial.

Pada alam Indonesia merdeka, dimana pemerintah yang salah satu tanggung jawabnya melaksanakan pendidikan, sesuai dengan salah satu bunyi kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 "Mencerdaskan kehidupan bangsa". Sejak awal kemerdekaan BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) telah mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada pesantren. Dengan demikian lewat Departemen Agama telah diberikan arahan, bimbingan serta bantuan untuk meningkatkan kualitas dan peran pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. Dengan demikian maka sikap oposan yang diberikan oleh pesantren kepada pemerintah kolonial Belanda tidak diberlakukan kepada pemerintah Indonesia, sebab apa? Karena pemerintah Indonesia ini adalah pemerintah yang dari rakyat untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan

termasuk masyarakat pesantren. Karena itulah sejak awal kemerdekaan sampai saat sekarang ini pesantren memiliki komitmen kelayaklitan yang tinggi terhadap pemerintah Indonesia.

#### **4. Otonomi Daerah dan Kaitannya Dengan Pembinaan Pesantren**

Salah satu tujuan reformasi adalah adanya otonomi daerah, berkenaan dengan itu lahirlah dua undang-undang. Pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Arus dari tuntutan otonomisasi ini adalah demokratisasi. Suara dari segala penjuru dunia sangat gencar saat sekarang ini untuk mensuarakan demokratisasi tersebut termasuk Indonesia terlebih-lebih setelah reformasi.

Uraian dalam dasar pemikiran tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diungkapkan beberapa hal yang relevan dengan pembahasan ini, yaitu penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Diuraikan juga bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Di sini sangat dituntut adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas peran masyarakat.

Kewenangan otonomi daerah itu dimaknai dengan keleluasaan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Daerah otonomi mempunyai kewenangan yang luas, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan serta evaluasi dalam hal penetapan anggaran dana berdasarkan asset yang dimiliki daerah. Bidang-bidang yang menjadi cakupan daerah menjagi tanggung jawab daerah, antara



lain misalnya pendidikan. Oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota bukan bawahan dari pemerintah Propinsi, maka Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada DPRD setempat, karena itu alokasi-alokasi pendanaan setempat ditentukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD setempat dengan demikian alokasi dana yang 80% untuk daerah tersebut dapat dialokasikan bagi kebutuhan daerah. Di sinilah letaknya bahwa peranan pemerintah amat dominan dalam rangka memberdayakan potensi daerah termasuk pendidikan, lebih khusus lagi pesantren.

Substansi dari Undang-Undang itu sebetulnya adalah demokratisasi, keadilan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bagian dari penyelenggaraan negara yang diotonomkan itu adalah pendidikan. Gelombang demokratisasi dalam pendidikan menuntut adanya desentralisasi pengelolaan pendidikan. Beberapa dampak dari sentralisasi pendidikan telah muncul di Indonesia uniformitas. Uniformitas ini mematikan inisiatif dan kreatifisme serta inovasi perorangan maupun masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini sangat perlu pula dihargai adanya sisi perbedaan yang tidak mesti seragam, karena keberadaan masyarakat majemuk itu menuntut untuk adanya berbagai perbedaan-perbedaan yang merangsang untuk tumbuhnya kreatifitas dan inovasi.

Di tengah arus menyongsong serta akan memberlakukan otonomi daerah maka peranan pemerintah daerah sangat dominan untuk menjadi stabilisator dinamisator dan motivator di daerahnya. Pemerintah Daerah yang dengan kepercayaan yang diamanahkan kepadanya mesti arif memanfaatkan segala potensi daerah baik kekayaan alam, kultur serta potensi masyarakat lainnya untuk bergerak bersama-sama dalam rangka memberdayakan daerah tersebut.

Pesantren sebagai salah satu asset kekayaan yang terdapat di daerah yang dalam hal ini disoroti dari dua sisi. *Pertama*, berdirinya suatu pesantren pada dasarnya telah disemangati oleh kemandirian. Jadi, prinsip serta spirit otonomi itu telah ada bagi pesantren. Karena itu inisiatif untuk mengembangkan diri mestinya telah ada bagi setiap pesantren. *Kedua*, pesantren adalah asset daerah, karena itu kehadirannya adalah merupakan



mitra kerja baik bagi pemerintah begitu juga masyarakat. Berkenaan dengan itu pemerintah dan masyarakat setempat sangat berkepentingan tentang keberadaan pesantren. *Ketiga*, karena adanya saling membutuhkan antara pesantren dan pemerintah serta masyarakat, maka perlu diikat kerjasama antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus terkendali dalam suatu sistem yang teratur. *Keempat*, sesuai dengan semangat Otonomi Daerah adalah guna memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka pesantren yang tumbuh dari upaya masyarakat sangat layak untuk mendapat mengayomi yang serius dari Pemerintah Daerah.

## 5. Pemerintah Daerah dan Pesantren

Sesuai dengan hakikat reformasi total disegala bidang bahwa paradigma lama harus diganti dengan paradigma baru. Paradigma lama bertolak dari pendekatan kekuasaan. Segala sesuatu ditentukan dari "atas". Dari atas itu bisa person penguasa bisa juga lembaga yang mensuarakan suara penguasa. Karena itu pemerintah berada pada posisi yang amat kuat, karenanya suara arus bawah nyaris tak terdengar. Paradigma baru yang dibangun itu adalah paradigma kerakyatan, bertolak dari aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakannya serta memberikan pelayanan dengan tujuan untuk mensejahterakannya.

Bertolak dari paradigma itu maka tata pikir yang meletakkan pesantren selama ini berada pada posisi nyaris tak terpedulikan harus diletakkan pada posisi kepedulian yang tinggi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Apa sebab ? Karena era ini sekarang adalah era kerakyatan, kemasyarakatan, dimana kepedulian yang tinggi mesti diarahkan kepada kebutuhan masyarakat. Pesantren yang lahir dari rahim masyarakat besar di masyarakat dan menjadi asset masyarakat sangat mempunyai hak untuk mendapat perhatian.

Bidang-bidang apa sajakah yang perlu dan mendesak untuk mendapat perhatian tersebut terhadap pesantren ? Menurut pengamatan penulis ada beberapa persoalan pokok yang sedang digeluti oleh pesantren di daerah ini hingga hari ini.

- a. Pendanaan-pendanaan pesantren bersumber dari masyarakat, yang dikutip dalam bentuk uang sekolah, atau juga sumbangan dari donatur yang tidak mengikat. Dengan lajunya kebutuhan pembiayaan pendidikan

- jelas lewat sumber dana ini tidak mencukupi. Karena itu pemerintah dan masyarakat perlu memberdayakan pesantren guna mencari solusi terhadap persoalan ini. Prinsip yang paling penting ditanamkan adalah memberikan pancing bukan memberikan ikan. Solusinya bisa dibicarakan dengan duduk bersama antara pemerintah, pengusaha, ulama, tokoh masyarakat, pendidik, tokoh pesantren dan lain sebagainya.
- b. Guru, salah satu diantara faktor pendidikan yang amat menentukan kualitas pendidikan. Pesantren saat sekarang kekurangan guru baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya terutama guru-guru pelajaran non keagamaan, seperti matematika, IPA, bahasa Inggris. kebijakan apakah yang harus ditempuh guna terpenuhinya kebutuhan ini ? Hal ini banyak terkait dengan faktor pertama di atas.
  - c. Management pendidikan. Kebanyakan pesantren di daerah ini masih lemah management pendidikan. Ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan manajemen yang peranan pemerintah daerah dan masyarakat amat menentukan dalam hal ini, dengan kewibawaan dan fasilitas yang ada dapat membantu mengatasi hal-hal yang berkenaan dengan manajemen.

## 6. Jaringan Kerjasama Antar Pesantren

Dunia kita yang semakin mengglobal, membuat kehidupan kita semakin saling ketergantungan antara satu dengan lain. Dunia pesantren pun demikian juga, karenanya diperlukan adanya saling keterkaitan antara satu dengan lain. Kesamaan visi dan misi pesantren ke depan perlu dibina antar pesantren. Pesantren harus membuka hubungan kemitraan antara satu dengan lain. Dengan hubungan kemitraan itu akan dicarikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi bersama Ikatan organisasi antar pondok pesantren mesti diperkuat, sebab dengan ikatan yang ada itu akan dicarikan solusi dari problema yang dihadapi. Pertemuan halaqah seperti ini perlu dibudayakan, arena ini dijadikan tukar menukar informasi dan saling berbagi pengalaman.

Selain dari itu tradisi pesantren yang telah membudaya di kalangan pesantren di Jawa perlu juga dilestarikan di daerah ini, yakni adanya spesifik-spesifik dari suatu pesantren. Disamping pesantren mengikuti "arus deras" sekarang ini yaitu mengikuti patron madrasah pemerintah,



agar santri pesantren bisa mengikuti ujian negara, juga pesantren memiliki kespesifikan. Ada pesantren memiliki kespesifikan Bahasa (Arab dan Inggris), ada hadits, ada tafsir, tasawwuf dan lain sebagainya, sehingga dengan kespesifikannya itu pesantren tersebut memiliki nilai plus.

## 7. Kesimpulan

Di akhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan beberapa point pokok berkenaan dengan topik di atas. *Pertama*, pesantren adalah asset daerah di daerahnya masing-masing. Pesantren merupakan salah satu institusi untuk mencapai cita-cita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu tanggung jawab pembinaan pesantren tidak hanya terletak di pengelola pesantren, tetapi juga terletak di bahu pemerintah dan masyarakat setempat.

*Kedua*, dengan akan diperlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat. Maka peran pemerintah daerah sangat dominan untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan di daerahnya. Di sinilah diperlukan suara rakyat lewat wakil-wakilnya untuk mensuarakan agar memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan yang didalamnya terdapat pesantren.

*Ketiga*, kalangan dunia pesantrenpun amat dituntut saat sekarang ini agar merubah pola-pola lama yang selama ini terkesan kurang dinamis untuk lebih mendinamisasikan diri, serta proaktif untuk mengembangkan diri sehingga dapat menggali potensi-potensi yang tumbuh di lingkungannya untuk diberdaya gunakan bagi kemajuan pesantren itu sendiri.

*Keempat*, untuk terwujudnya beberapa maksud di atas prasyarat utamanya adalah terjalin hubungan kerjasama yang baik antara pesantren dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta antar pesantren sendiri agar terdapat satu visi yang sama dalam pembinaan pesantren.



## BAB III

# SEKOLAH

### A. EFEKTIFITAS PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH

#### 1. Pendahuluan

Pendidikan agama adalah salah satu dari tiga mata pelajaran yang wajib diberikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan (Pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan) (UU Nomor 2 Tahun 1989 pasal 39 ayat (2)). Dalam pasal penjelasan diterangkan pula bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Dan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003, pasal 12 ayat (1) a. menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik. "Peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama".

Bila dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan agama mestilah mampu mengantarkan seorang peserta didik kepada terbinanya setidaknya tiga aspek. *Pertama*, aspek keimanan mencakup seluruh arkanul iman. *Kedua*, aspek ibadah, mencakup seluruh arkanul Islam. *Ketiga* aspek akhlak, mencakup seluruh akhlakul karimah.

Dalam operasionalnya pendidikan agama di sekolah-sekolah umum diatur oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di sekolah-sekolah negeri sejak dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, pendidikan agama dilaksanakan dua jam pelajaran setiap minggunya.

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan pada bab XIII pasal 47 ayat (2), bahwa ciri satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Perguruan yang memiliki ciri kekhususan dapat menambah bobot mata pelajaran sesuai dari ciri kekhususannya. Sekolah-sekolah umum yang bernafaskan agama dapat menambah bobot mata pelajaran agama melebihi yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Tulisan singkat ini akan mencoba memaparkan beberapa problema dan solusi pendidikan agama di sekolah umum.

## 2. Beberapa Problema dan Solusi

Ada beberapa asumsi problema pendidikan agama di sekolah umum.

### a. Peserta Didik

Peserta didik berasal dari lingkungan keluarga yang beraneka ragam tingkat pemahaman, pengamalan serta penghayatan agama. Dan hal ini tentu ada peserta didik yang berasal dari keluarga yang sudah memiliki pemahaman, pengamalan dan penghayatan agama yang tinggi, tetapi juga ada yang berasal dari kelompok sedang dan rendah. Idealnya kelompok-kelompok tersebut harus dipisahkan agar mendapat perlakuan yang berbeda sehingga masing-masing kelompok memperoleh perhatian.

### b. Pendekatan Kognitif

Pendidikan itu setidaknya memiliki tiga aspek sasaran. *Pertama* sasaran pengisian otak (*transfer of knowledge*). Di sini yang paling ditekankan adalah mengisi kognitif peserta didik, mulai dari yang sederhana seperti menghafal sampai analisis. *Kedua*, mengisi hati, melahirkan sikap positif (*transfer of value*), sasarannya menumbuhkan kecintaan kepada kebaikan dan membenci kejahatan. *Ketiga*, keterampilan (*transfer of skill*), timbul keinginan untuk melakukan yang baik dan menjauhi perilaku jelek. Diantara ketiga tersebut yang paling mudah dilakukan oleh seorang guru adalah pendekatan kognitif, sebab didalam prakteknya tidak sejelimet pendekatan affektif dan psikomotorik. Karena itulah dikebanyakan sekolah yang paling sering dilakukan dalam pendekatan pendidikan agama adalah aspek kognitif. Akan tetapi karena agama banyak menyentuh *qalb* (hati) manusia,

maka pendekatan terhadap agama tidak selamanya efektif jika hanya didekati lewat pendekatan kognitif, karena itu pendekatan afektif dan psikomotorik merupakan suatu keniscayaan disamping pendekatan kognitif.

### **c. Pendekatan parsial**

Ada kesan di berbagai sekolah umum baik negeri maupun swasta bahwa pendidikan agama tertumpu menjadi tanggung jawab guru-guru agama saja, sedangkan guru-guru mata pelajaran lainnya merasa kurang ada hubungannya dengan pendidikan agama. Untuk mengefektifkan pendidikan agama tersebut maka guru-guru bidang studi lainnya mesti menjadi guru agama yang mengimplisitkan nilai (*value*) agama kedalam mata pelajarannya. Sang guru dapat menarik nilai-nilai luhur yang terdapat dalam mata pelajarannya.

### **d. Sarana dan fasilitas**

Pendidikan agama sebagaimana pendidikan lainnya juga membutuhkan sarana dan fasilitas. Bila di sekolah ada laboratorium IPA, Biologi, Bahasa, maka sebetulnya sekolah juga membutuhkan laboratorium agama di samping masjid. Apa saja isi dari laboratorium agama tersebut? Laboratorium itu dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang membawa peserta didik untuk lebih menghayati agama, misalnya video yang bernafaskan keagamaan, musik dan nyanyian keagamaan, syair, puisi keagamaan, alat-alat peraga pendidikan agama, foto-foto yang bernafaskan keagamaan dan lain sebagainya yang merangsang emosional keberagamaan peserta didik.

### **e. Evaluasi**

Evaluasi yang berorientasi terhadap penilaian kognitif semata sudah harus diubah kepada evaluasi yang berorientasi kepada penilaian afektif dan psikomotorik. Disamping tetap melaksanakan penilaian kognitif. Sudah perlu direncanakan salah satu bentuk evaluasi dengan mempergunakan pendekatan afektif dan psikomotorik. Evaluasi pendidikan agama Islam sudah harus dikembangkan menilai afektif dan psikomotor peserta didik. Penilaian afektif adalah untuk melihat sejauh mana penghayatan terhadap agama, sedangkan penilaian yang bersifat psikomotorik adalah sejauh mana pula dia dapat mengamalkan ajaran agama dan memperaktekannya.



### 3. Upaya Penanaman Ranah Afektif

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan afektif adalah : 1). Berkenaan dengan perasaan, 2). Keadaan perasaan yang mempengaruhi keadaan penyakit (penyakit jiwa), 3). Gaya atau makna yang menunjukkan perasaan (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1990:8).

Kamus Psikologi menyebutkan : *affect, affection* : 1). *a broad class of mental processes, including feeling, emotion, moods, and temperament. Historically, affection was distinguished from cognition and valition*, 2). *(Titchener) pleasantness and unpleasantness. Affectivity* : 1). *Emosional, tendency toward emosional reaction*, 3). *Generalized emotional reaction not readily identifiable with a particular situmulus situation* (Chaplin, 1973:13-14).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa affectif itu adalah masalah yang berkenaan dengan emosi (kejiwaan), berkenaan dengan ini terkait dengan suka, benci, simpati, anti pati, dan lain sebagainya. Dengan demikian afektif itu adalah sikap bathin seseorang.

Pendidikan agama yang berorientasi kepada pembentukan afektif ini adalah pembentukan sikap mental peserta didik kearah menumbuhkan kesadaran beragama. Beragama tidak hanya pada kawasan pemikiran saja, tetapi juga memasuki kawasan rasa. Karena itu sentuhan-sentuhan emosi beragama perlu dikembangkan. Diantara metode pendidikan yang banyak kaitannya dengan sentuhan emosi adalah :

#### a. Bimbingan Kehidupan Beragama

Bimbingan kehidupan beragama dapat diberikan lewat pembentukan lembaga bimbingan kehidupan beragama. Peserta didik yang bemasalah atau tidak mesti lewat pintu gerbang apa yang disebut bimbingan. Bimbingan ini sifatnya adalah pendekatan individual. Dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan psikologis. Data-data person yang memuat kehidupan beragamanya telah ada ditangan pembimbing. Lewat itulah dikembangkan dialog dengan peserta didik tersebut.

#### b. Uswatun Hasanah (Contoh Teladan)

*Uswatun hasanah* itu munculnya dari pendidik, karena tugas mendidik itu tidak hanya mengisi otak, tapi juga mengisi hati. Untuk mengisi hati perlu

adanya keteladan. Pendidika menurut UU No 20 tahun 2003 disebutkan pada Bab I, pasal 1 ayat (6): Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

#### **c. Malam Ibadah**

Diisi dengan berbagai aktifitas religius dengan menampilkan acara-acara yang merangsang untuk semakin tebalnya emosi beragama, misalnya doa, membaca al-Qur'an, zikir, pertaubatan dan lain sebagainya.

#### **d. Pesantren Kilat**

Secara kontiniu (berkelanjutan), pesantren kilat Sabtu-Minggu, perlu diprogramkan. Pelajar-pelajar pada tingkat SMPL dan SMA, dapat mengikutinya tanpa terkecuali. Diprogramkan setiap peserta didik minimal telah mengikutinya satu kali selama menjadi siswa.

#### **e. Laboratorium Pendidikan Agama**

Adanya suatu ruangan khusus yang ditata dengan baik yang bernuansa religius, misalnya musik, sajak, puisi religius, video yang mengkisahkan nuansa keberagamaan. Peserta didik secara bergiliran perkelas pada hari-hari yang ditentukan mengikuti acara di tempat tersebut.

#### **f. Iklim Religius**

Menciptakan suasana religius yang kental di lingkungan pendidikan, meliputi tata pergaulan, pakaian, lingkungan sekolah, praktek ibadah dan lain-lain.

#### **g. Hubungan Sekolah dan Rumah Tangga**

Seperti yang telah dimaklumi bahwa arti tri pusat pendidikan itu ada tiga – rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan agama di sekolah hanya sebagian dari upaya pendidikan. Kesuksesan pendidikan agama harus ada jaringan kerja antara rumah tangga, sekolah dan masyarakat, setidaknya bagaimana hubungan sekolah dengan rumah tangga.

## 4. Kesimpulan

Pelaksanaan pendidikan agama sangat kompleks, menyangkut berbagai aspek, karena itu keberhasilannyapun terkait pula dengan berbagai aspek tersebut, antara lain peserta didik, pendidik, kurikulum, manajemen, metode, evaluasi dan lain sebagainya. Untuk mengefektifkan pelaksanaannya perlu diadakan evaluasi terhadap berbagai hal yang disebutkan di atas.

Salah satu yang sering menjadi bahan diskusi adalah bagaimana menerapkan pendekatan afektif dan psikomotorik dalam pendidikan agama yang memang terasa lebih sulit bila dibanding dengan pendekatan kognitif. Berkenaan dengan itu maka ada beberapa tawaran diantaranya bimbingan beragama, uswatun hasanah, malam ibadah, pesantren kilat, evaluasi dan iklim beragama serta membina hubungan baik antara sekolah dengan rumah tangga.

## B. INTEGRASI PENDIDIKAN YANG IDEAL DI SEKOLAH

### 1. Pendahuluan

Pendidikan pada hakekatnya adalah memanusiakan manusia. Karena itu hubungan simbiotik antara manusia dan pendidikan tidak bisa dipisahkan. Manusia tidak bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikisnya tanpa lewat pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sendiri ditujukan hanya buat manusia. Dengan kata lain hanya makhluk manusialah yang berhak memperoleh pendidikan.

Jika demikian halnya langkah awal yang amat perlu diketahui oleh setiap orang yang terlibat langsung dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan adalah memahami hakikat manusia. Pemahaman yang tepat tentang manusia akan melahirkan arah pendidikan yang benar demikian juga sebaliknya.

Manusia adalah makhluk yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. manusia memiliki berbagai potensi baik fisik maupun nonfisik. Potensi-potensi itu adalah merupakan potensi dasar bagi manusia yang dibawanya sejak lahir. Pendidikan manusia seutuhnya itu adalah dimaknai bahwa seluruh potensi manusia itu mestilah terdidik dan tidak ada aspek yang diabaikan. Apa upaya yang dilakukan untuk itu? Tentu diawali dengan pemahaman yang tepat tentang manusia dan setelah



itu, baru dirancang program pendidikan yang akan menggapai gambaran manusia yang diciptakan itu.

Gambaran tentang manusia yang multi dimensial itu diintegrasikan dalam satu kesatuan untuk membawa peserta didik ke arah yang dicita-citakan. Pengintegrasian itu meliputi berbagai program pendidikan yang dirancang lewat kurikulum, manajemen, proses pembelajaran di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal seyogyanya merupakan perwujudan dari konsep pendidikan yang ideal, yakni pendidikan yang mengintegrasikan berbagai dimensi dari potensi manusia.

Ada dua peristilahan yang sering dikaitkan dengan manusia pada saat dihubungkan dengan pendidikan. Pertama perkataan “manusia seutuhnya”. Perkataan ini ditemukan pada tujuan pendidikan nasional yang dicantumkan dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan seterusnya. Sedangkan pada UU No.20 Tahun 2003 juga menggambarkan bahwa manusia yang ingin dibentuk itu mencakup aspek fisik dan nonfisiknya seperti yang tertera pada bab II pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Kedua, perkataan “insan kamil”, istilah ini sering dipakai dalam konsep tasawwuf, namun berbagai pakar pendidikan Islampun memakai perkataan ini ketika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam.

Merujuk pada kedua peristilahan itu pada hakikatnya tidak lain bahwa pada diri manusia terdapat berbagai aspek, dan untuk itu mestilah dididik secara berkeseimbangan agar melahirkan manusia seutuhnya atau insan kamil.

## **2. Mengenal Manusia Sebagai Makhluk Pendidikan**

Banyak para ahli mendefinisikan siapa manusia, biasanya definisi yang dikemukakan itu sangat terkait dengan keahlian dari yang mendefinisikan

tersebut. Jika seorang ahli filsafat mendefinisikannya maka terkait dengan berpikir, tetapi bila ahli sosiologi akan terkait dengan sosial, begitu ahli-ahli lainnya. Definisi yang sering diungkapkan misalnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir (*Hayawan an Nathiq*) adalah bersumber dari ahli filsafat. *Zoon paliticon* berasal dari ahli sosial, dan lain sebagainya.

Kendatipun muncul berbagai definisi tentu saja definisi itu belumlah menggambarkan tentang manusia yang sesungguhnya itu, definisi tersebut belum bisa mengcover seluruh hakikat manusia, boleh jadi baru sebagian kecil saja dari hakikat manusia tersebut. DR. A. Carrel dalam bukunya "Man The Unknown" menjelaskan tentang kesukaran untuk mengetahui hakikat manusia tersebut. Kendatipun mendefinisikan manusia dan mencari hakikat manusia itu begitu sukarnya, namun bagaimanapun juga manusia itu mesti bertugas untuk mencarinya dan mengungkapkan hakikat manusia tersebut sesuai dengan kemampuannya.

Berkenaan dengan ini ada beberapa alasan :

- a. Al Qur'an dan Sunnah Nabi dan pendapat para ulama dan pemikir Islam menyuruh manusia itu untuk memikirkan dirinya.  
*"Dan pada diri mereka apakah tidak mereka pikirkan"* (Az Zariyyat: 21)
- b. Untuk memfungsikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, agar dapat berguna dan bermanfaat di alam semesta ini maka manusia perlu tahu siapa dirinya.
- c. Kenyataan yang dapat diamati bahwa di antara manusia itu ada yang melahirkan perilaku-prilaku terpuji, sehingga membawa kemaslahatan hidup baik bagi pribadinya maupun masyarakat, dan demikian pula sebaliknya. Untuk itu tentu timbul pertanyaan bagaimanakah caranya agar manusia itu dapat melakukan kebajikan sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain di samping bagaimana pula menghindarkan agar manusia itu tidak membawa malapetaka bagi kehidupan manusia baik person maupun kolektif.
- d. Untuk dapat merancang program pembinaan manusia seutuhnya membentuknya menjadi insan kamil. Hal itu perlu memerlukan pengenalan manusia secara tepat tentang potensi-potensi manusia yang harus dibina.

Mengenal manusia adalah diawali dengan mengenal potensi manusia. Assyaibani menyatakan bahwa potensi manusia itu meliputi badan, akal dan ruh. Ketiga-tiganya persis segitiga yang sama panjang sisi-sisinya. Hasan langgulung menyebutkan potensi manusia itu fitrah, ruh, kemauan bebas dan akal. Zakiah Derajat mengemukakan bahwa potensi spritual manusia meliputi dimensi : akidah, akal, akhlak, perasaan (hati), keindahan dan dimensi sosial.

Potensi manusia itu terdiri dari dua macam. *Pertama*, potensi fisik, yaitu seluruh potensi yang meliputi seluruh organ tubuh manusia yang berwujud nyata, bersifat material. *Kedua*, potensi ruhaniyah manusia, yakni potensi yang tidak berwujud nyata bersifat abstrak. Potensi itu apabila dirujuk kepada Al Qur'an ditemukan empat bentuk besar yaitu akal, qalb, nafs dan ruh.

#### **a. Akal**

Akal adalah daya pikir yang ada pada diri manusia. Kata akal berasal dari bahasa Arab kata asalnya *'aqala* yang artinya mengikat dan menahan. Pada zaman jahiliyah orang yang berakal (*'aqil*) adalah orang yang dapat menahan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, sehingga karenanya dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu persoalan (Ensiklopedi Islam jld I, 1999 : 98).

Quraisy Shihab, menyebutkan pengertian akal, adalah :

- 1) Daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, seperti bunyi ayat :

*"Demikianlah itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, tetapi tidak ada yang memahami kecuali orang-orang alim (berpengetahuan)"* (Al Ankabut : 43).

- 2) Dorongan Moral

*"Dan jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak atau tersembunyi dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan alasan yang benar. Demikian diwasiatkan Tuhan kepadamu semoga kamu memahaminya"* (Al An'am : 151).

- 3) Dorongan untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah (Shihab, 1996 : 194-195).



“Seandainya kami mendengar dan berakal maka kami tidak termasuk penghuni neraka”(Al Mulk : 10).

Filsafat menempatkan akal sebagai daya berpikir. Al Kindi, misalnya menyebutkan ada tiga daya pada diri yaitu : daya bernafsu terletak di perut, daya berani terletak di dada dan daya berikir terletak di kepala. Akal sebagai daya berpikir dibagi kepada dua, yakni akal teoritis dan akal praktis. Al Farabi membagi akal itu kepada: *akal potensial*, *akal aktual*, *akal mustafad*. Akal potensial menangkap bentuk-bentuk dari barang-barang yang dapat ditangkap dengan panca indra. Akal aktual menangkap arti-arti dan konsep-konsep. Akal mustafad akal yang mempunyai kesanggupan untuk berkomunikasi dengan akal yang di atas yang berada di luar diri manusia yaitu akal kesepuluh yang diberi nama akal aktif (Nasution, 1996: 30-31).

## b. Qalb

Kata qalb terambil dari akar kata yang bermakna membalik karena seringkali ia berbolak-balik sekali senang, sekali susah, sekali setuju dan sekali menolak (Shihab, 1996 : 288).

Menurut Al Ghazali, pengertian qalbu :

- 1) Segumpal daging sanubari yang terletak di sebelah dada kiri, ia adalah daging yang istimewa.
- 2) Rasa ruhaniyah yang halus yang berkaitan dengan hati jasmani (bendawi). Perasaan halus itu adalah hakikat manusia yang tahu mengerti dan paham ialah yang mendapat perintah, yang dicela yang diberi sangsi dan yang mendapat tuntutan (Al Ghazali, 1975 : 5-12).

At Tarmizi – seorang sufi abad ketiga Hijriyah – mengibaratkan *qalb* (hati) ibarat seorang raja yang segala urusan berada di tangannya. Hati juga ibarat sebuah kota, di mana akan diperintah dipengaruhi oleh orang yang menguasai kota tersebut. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa segala bentuk emosi, pengenalan dan perasaan akan kembali kepangkuan hati sebagai pusatnya. Dan segala ketentuan akhlak akan kembali ke hati sebagai pusatnya, hatilah yang memegang pengaruh dan kekuasaannya, di samping hati manusia sebagai pusat ilmu pengetahuan (al ma'rifah) (An Najjar, 1999 : 63).

### c. Nafsu

Kata nafsu di dalam Al Qur'an mengandung berbagai makna yang di antaranya :

- 1) Manusia sebagai makhluk hidup. firman Allah :  
“Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain” (Al Baqarah : 48).
- 2) Kata An Nafsu yang memiliki arti zat ilahiyyah, seperti firman Allah:  
“Dan Aku (Allah) telah memilihmu untuk diriKu” (Thaha : 41).
- 3) Cakupan makna dari kekuatan amarah dan syahwat (nafsu birahi) dalam diri manusia (Said Hawa, 1995 : 49).

Menurut Quraish Shihab bahwa nafs dalam konteks pembicaraan tentang manusia tertuju kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk. Dalam pandangan Al Qur'an *nafs* diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan dan karena itu sisi dalam manusia inilah yang oleh Al Qur'an dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar (Shihab, 1996 : 286).

Sesungguhnya, apabila dilihat dari struktur ruhaniyah manusia, maka manusia tidak bisa dilepaskan dari keinginan, kemauan dan dorongan-dorongan untuk memiliki. Kalau dorongan-dorongan masih berada pada koridor yang sesuai dengan tuntunan Allah dan rasulnya, maka nafs itu akan melahirkan nilai-nilai positif.

### d. Ruh

Said Hawa menulis dalam bukunya “Jalan Rohani” bahwa ruh itu mempunyai dua pengertian. *Pertama*, jisim atau jasad halus yang bersumber dari rongga hati jasmani, ia tersebar keseluruh bagian tubuh dengan perantaraan urat nadi, dan juga tersebar ke aliran-aliran darah dalam tubuh serta ke aliran sumber hidup dalam tubuh serta ke aliran sumber rasa (instink), sumber penglihatan, dan sumber penciuman menuju organnya masing-masing. Ia sama dengan aliran cahaya pelita (lampu) yang menerangi setiap sisi rumah, maka tidak ada bagian rumah itu yang tidak memperoleh penerangan. Hidup sama dengan cahaya yang liputannya menyebar luas, ruh sama dengan pelita, aliran dan gerakan ruh dalam batin sama dengan



aliran atau gerakan (perambatan) cahaya pelita yang terdapat di setiap sisi rumah dengan bahan pembakarnya yang terbakar (Hawa, 1996: 45).

Ruh itu sifatnya suci dan bersifat assamawi akan tetapi ruh itu bisa menjadi kotor dan berat jika bercampur dengan syahwat. Namun bila ruh itu membersihkan dirinya dari tarikan hawa nafsu ia akan kembali kepada tabiat asalnya kepada kesucian (An Najjar, 1996: 59).

Berbagai potensi yang disebutkan di atas adalah bagian yang menyatu dalam diri manusia yang tidak bisa diabaikan kendatipun satu bagian saja dari potensi itu agar terbentuk manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu tidak bisa dicapai tanpa pendidikan yang integral dan holistik terhadap berbagai potensi tersebut. Oleh karena pendidikan manusia seutuhnya harus dirancang secara seimbang antara pendidikan akal, qalb, nafs dan ruh. Pendidikan yang menekankan satu aspek saja akan melahirkan manusia yang tidak paripurna.

Di sisi lain potensi manusia itu telah dikembangkan pula oleh psikolog tentang adanya tiga kecerdasan yang menyatu pada diri manusia yaitu kecerdasan intelegensi (IQ), kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan spritual (SQ). Menurut IQ bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang memiliki nilai intelektual tinggi yang dapat diukur secara kuantitatif.

Studi tentang IQ pertama kali dipelopori oleh Sir Francis Galton pengarang *Heredity Genius* (1869), kemudian disempurnakan Alfred Binet dan Simon, pada umumnya mengukur kemampuan praktis, daya ingat (*memory*), daya nalar (*reasoning*), perbendaharaan kata dan pemecahan masalah (*vocabulary and Problem solving*). IQ ini sangat populer pada masanya sehingga sangat banyak berpengaruh terhadap pemikiran manusia di kala itu tentang pengukuran terhadap kecerdasan seseorang (Tasmara, 2001 : VIII).

Ternyata selain dari pengukuran yang bersifat kognitif itu ada kecerdasan lain yang diperkenalkan oleh psikolog Daniel Goleman seorang psikolog alumnus Harvard University menulis buku yang berjudul "Emotional Intelligence" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kecerdasan emosional. Dengan memanfaatkan penelitian yang menggemparkan tentang otak dan perilaku, Goleman memperlihatkan yang terkait mengapa orang ber IQ tinggi gagal dan orang yang ber IQ sedang-sedang menjadi sangat sukses. Faktor-faktor ini mengacu pada suatu cara lain untuk



menjadi cerdas – cara yang disebutnya “kecerdasan emosional”. Kecerdasan emosional kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat dan motivasi diri, empati dan kecakapan sosial. Kecerdasan emosional seperti diungkapkan Goleman adalah kesanggupan untuk membaca perasaan terdalam orang lain; untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dirumuskan oleh Aristoteles, “Siapapun bisa marah-marah itu mudah, tetapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik-bukanlah hal mudah (Goleman, 1997 : IX).

Berikutnya Danah Zohar menulis buku SQ (Spritual Intellegensia) memperkenalkan SQ ini kepada masyarakat. Beliau menulis buku SQ = *Spiritual Intelligence The Ultimate Intellegence*. Danah Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan SQ itu yaitu : kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan orang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita (Danah Zohar, 2000 : 4).

Danah Zohar dan Ian Marshall menjelaskan pula bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk spritual karena selalu didorong oleh kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan “mendasar” atau “pokok”. Mengapa saya dilahirkan? Apa makna hidup saya? Buat apa saya melanjutkan hidup yang saat saya lelah, depresi atau merasa terkalahkan ? Apakah yang membuat semua itu berharga ? Kita diarahkan, bahkan ditentukan, oleh sesuatu kerinduan yang sangat manusiawi untuk menemukan makna dan nilai dari apa yang kita perbuat dan alami. Kita merasakan sesuatu kerinduan untuk melihat hidup kita dalam konteks yang lebih lapang dan bermakna, baik dalam dalam keluarga, masyarakat, klub sepak bola, karier, agama maupun alam semesta itu sendiri (Danah Zohar, 2000: 4).

Ketiga bentuk kecerdasan tersebut (IQ, EQ, SQ) tidak selalu terkait dengan agama, oleh karena itu, perlu dikembangkan pula adanya kecerdasan religius. Kecerdasan ini terkait dengan keyakinan manusia terhadap Tuhan. Bahwa hubungannya yang intensif dengan Tuhan akan melahirkan pikiran dan perilaku bijaksana. Kecerdasan religius ini tidak hanya terbatas jangkauannya

dalam kehidupan kekiniannya tetapi menjangkau kehidupan setelah kehidupan sekarang.

Melihat kepada hakikat manusia yang sesungguhnya itu, maka dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk fisikal dan nonfisikal haruslah didekati sesuai dengan hakikat manusia tersebut.

Pendidikan manusia seutuhnya itu adalah pendidikan yang menyentuh seluruh aspek manusia. Pendidikan yang hanya menyentuh satu aspek saja atau sebagian saja tidak akan dapat melahirkan manusia seutuhnya.

Agar pendidikan manusia seutuhnya dapat terwujud maka semestinya lah diprogramkan pendidikan yang integral berbagai aspek tersebut baik pada jalur pendidikan formal, informal dan nonformal.

Berkenaan dengan itu apa yang dilakukan oleh sekolah agar pendidikan integrated itu terwujud. Uraian berikut ini akan mencoba memaparkan hal tersebut.

### 3. Integrasi Pendidikan di Sekolah

Sekolah semestinyalah difungsikan sebagai lembaga pendidikan, bukan hanya sekedar lembaga pengajaran. Telah lama diperkenalkan oleh para pakar tentang perbedaan pendidikan dengan pengajaran. Pengajaran konsentrasinya lebih tertuju kepada pengisian otak (*kognitif*) tekanannya terfokus kepada *transfer of knowledge*. Sedangkan pendidikan tidak hanya pemindahan “ilmu” tetapi adalah pembentukan kepribadian. Dengan demikian pendidikan lebih luas cakupannya dari pengajaran.

Dalam konsep pendidikan Islam ada tiga istilah yang selalu disebut-sebut oleh para pakar pendidikan yaitu : *Ta’lim*, *Tarbiyah*, *Ta’dib*. *Ta’lim* lebih berorientasi kepada pemberian ilmu sama dengan pengajaran, diambil dari kata ‘*allama*.”*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya ...*” (Al Baqarah :31). *Tarbiyah* dari kata *Rabba*, *Yarubbu*= artinya memelihara, merawat, mendidik. Allahlah Tuhan yang memelihara alam semesta. “*Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam*” (Al Fatihah : 2). *Ta’dib* diambil dari hadist Rasul *Addabani Rabbi* (Tuhanku telah mendidikku).

Naquib Al Attas seorang pakar pendidikan Islam dari Malaysia, mengatakan bahwa peristilahan pendidikan Islam itu lebih tepat dipergunakan



istilah *Ta'dib*, karena dengan *Ta'dib* itulah betul-betul akan memanusiakan manusia. Namun mayoritas pakar pendidikan Islam, sampai saat sekarang tetap mempertahankan bahwa kata *tarbiyah*lah yang lebih tepat untuk padanan kata pendidikan.

Lewat aktifitas pendidikan akan diprogramkan pembentukan manusia seutuhnya. Manusia yang berdimensi fisik dan nonfisik. Dipandang dari sudut fisik pendidikan akan membawa peserta didik kepada pendidikan jasmani yang bertujuan terbentuknya fisik yang sehat, segar, bugar. Pendidikan nonfisik akan membentuk keseimbangan seluruh potensi bathin manusia sehingga aspek-aspek bathin mendapat pendidikan yang sewajarnya dan sepatutnya.

Pemaknaan dari pembentukan manusia seutuhnya itu adalah terlayannya semua aspek fisik dan ruhaniyah manusia itu dalam satu kerangka pendidikan. Terlaksananya pendidikan akal, qalbu, nafs dan ruh secara berkeseimbangan, atau terlayannya pendidikan kecerdasan intelegensi, kecerdasan emosi, kecerdasan spritual, serta kecerdasan religius.

Untuk itu diprogramkan berbagai aktifitas pendidikan :

#### **a. Integreted Kurikulum**

Kurikulum pendidikan di sekolah tidak hanya terkonsentrasi untuk mencerdaskan akal semata-mata, tetapi harus mencakup kecerdasan lainnya, yakni kecerdasan emosional, spritual dan religius. Setidaknya ada tiga ranah yang harus ditransferkan, yaitu : *kognitif*, *afektif* dan *psikhomotorik*. Agar terlaksana integreted kurikulum ini harus dilakukan secara simultan program intra kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler.

#### **b. Bimbingan dan Konseling**

Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah adalah sesuatu yang amat urgen, ia tidak hanya pelengkap tetapi pokok. Lewat BK akan dilaksanakan berbagai pendidikan kejiwaan yang akan mempercepat terbentuk pribadi yang diharapkan, misalnya, punya motivasi tinggi, etos kerja dan semangat tangguh, punya cita-cita yang jelas, moralitas yang anggun, punya tanggung jawab, dan berbagai sifat-sifat mental positif lainnya.

Praktek BK di sekolah seharusnya ditangani secara professional. Dilaksanakan oleh guru BK yang professional. Program yang jelas, dukungan manajemen dan lain-lain yang memberdayakan program BK di sekolah.



Kegiatan BK ini akan banyak tertuju kepada pembinaan kecerdasan emosional, spritual dan religiulitas peserta didik. Kegiatan BK yang seperti ini tentu tidak hanya tertuju kepada peserta didik yang bermasalah saja, tetapi semua peserta didik yang ada di sekolah tersebut berhak mendapat pelayanan BK.

### c. Pengimplisitan Nilai (*Value*)

Untuk pembentukan watak dan kepribadian peserta didik ke arah yang dicita-citakan maka hal itu mesti mengandung muatan nilai-nilai (*values*). Nilai-nilai baik mesti diadopsi semaksimal mungkin dan nilai jahat harus dihindari semaksimal mungkin pula. Hal ini tidak mungkin dilakukan lewat pengajaran (*transfer of knowledge*), tetapi mesti dilaksanakan dengan memasukkan nilai-nilai tersebut lewat berbagai kegiatan guru. Setiap guru dapat malakukan ini di dalam maupun di luar kelas.

## 4. Kesimpulan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki aspek fisik dan nonfisik. Kedua aspek tersebut menyatu dalam diri pribadi seseorang. Agar terujud manusia seutuhnya itu maka kedua aspek tersebut mesti dirancang pembinaannya.

Pendidikan manusia seutuhnya haruslah meliputi pendidikan fisik yang diprogramkan untuk terciptanya fisik yang sehat, segar dan bugar. Sedangkan aspek nonfisik, meliputi akal, qalb, nafs, dan ruh. Psikholog memperkenalkan tiga kecerdasan yakni IQ, EQ, SQ. Selain itu perlu pula diperkenalkan adanya kecerdasan religius.

Untuk terintegritednya aspek-aspek ruhaniyah manusia tersebut perlu dirancang program pendidikan yang mengintegrasikan berbagai aspek dimaksud; sehingga manusia yang dihasilkan dari pendidikan yang terintegrited itu akan melahirkan manusia paripurna.

Ada beberapa program pendidikan yang dirancang untuk mengakomodir seluruh aspek-aspek ruhaniyah manusia dalam satu kesatuan :

- a. Lewat kurikulum yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aspek ruhaniyah tersebut dalam satu kesatuan.

- b. Lewat program-program bimbingan dan konsling yang dirancang secara intensif terprogram dan professional.
- c. Lewat pengimplisitan nilai-nilai (values) dalam berbagai aktifitas pendidikan, baik menyangkut mata pelajaran, kegiatan ekstra kurikuler. Dan lain sebagainya.

## **C. IMPLEMENTASI SUMBER DAYA PEMBELAJARAN DALAM PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH DITINJAU DARI AL QURAN DAN HADITS**

### **1. Pendahuluan**

Pendidikan bermutu adalah cita-cita ideal bagi setiap orang yang menggeluti dunia pendidikan. Cita-cita ideal yang sedemikian itu adalah logis dan mendasar sebab dengan melahirkan *out put* bermutu diharapkan lulusannya akan dapat mengemban tugasnya sesuai dengan cita-cita pendidikan di mana ia didik. Akan tetapi setelah melihat kenyataan yang ada secara realitas membentuk manusia beremutu tidak semudah yang dibayangkan. Karena untuk membuat sesuatu itu bermutu tidak hanya terkait satu aspek saja, ianya mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Dalam dunia pendidikan mutu tidak hanya terkait dengan pendidik, tetapi juga aspek lainnya, misalnya, instrumen, lingkungan, bahkan peserta didik dan tidak kalah pentingnya adalah proses.

Dari berbagai teori pendidikan dapat dikemukakan garis besar upaya peningkatan mutu tersebut, yang diawali tentang mutu bahan bakunya (*raw inputnya*). Oleh karena itulah sebagian lembaga pendidikan menekankan hal ini. Ia hanya mengambil *rawinputnya* dari yang telah terjamin kualitasnya. Selanjutnya peranan tenaga pendidik. Tenaga pendidik sangat besar pengaruhnya bagi meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidik adalah manusia yang aktif yang bisa merekayasa pembelajaran dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Namun, di samping itu peranan sumber daya pembelajaranpun tidak kalah pentingnya dalam rangka memberdayakan pendidikan

Upaya-upaya perbaikan untuk mencapai mutu yang optimal, dunia pendidikan telah banyak melakukan berbagai terobosan dan pemikiran.



Salah satu di antaranya di kembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Paradigma baru ini adalah menampilkan pengembangan pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan sekolah dan kebutuhan daerah masing-masing. Konsep ini adalah memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong serta melibatkan langsung untuk mengambil keputusan partisipatif semua warga sekolah (guru, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu sekolah.

Paradigma yang dibangun adalah menuntut tanggung jawab bersama untuk mengemabangkan dan memberdayakan sekolah. Prinsip tentunya sangat berbeda dengan prinsip pengembangan masa lampau, di mana yang memegang peranan adalah top manajer dalam hal sentralisasi, yang bersifat intruksional dan hirarkhis. Konsep ini tidak melibatkan rasa tanggung jawab dan memiliki dari warga sekolah. Akibatnya yang muncul adalah partisipasi semu bukan partisipasi aktif.

Sehubungan dengan itu tulisan ini akan mencoba mencari kaitan yang signifikan anatara implementasi sumber daya pembelajaran dengan manajemen berbasis sekolah yang berdasarkan Al Quran dan Al Hadist.

## **2. Sumber Daya Pembelajaran**

Apa yang dimaksud dengan sumber daya pembelajaran adalah sumber-sumber yang berasal dari lingkungan yang dapat digunakan dalam pendidikan di mana meletakkan seluruh media (alat) yang berfungsi untuk mencapai tujuan sehingga dapat berhasil guna (efektif dan efisien).

Sumber-sumber yang berasal dari lingkungan artinya apa-apa saja yang terdapat dilingkungan (dalam maupun di luar ke kelas) yang dapat digunakan untuk kelancaran dan tercapainya tujuan pembelajaran.

Indikator Sumber Daya Pembelajaran :

a. Media, terdiri dari :

- 1) Media hidup, sumber daya manusia yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, misalnya guru, pimpinan.
- 2) Media tak Hidup, selain manusia, yakni benda-benda.
- 3) Media Grafis, di antaranya gambar, photo, sketsa, peta, globe, dan lain.



b. Aktifitas Guru

Aktifitas guru dalam mengajar, mampu menampilkan berbagai metode. Aktifitas guru dalam mengajar dengan menggunakan metode ceramah hanya mampu diserap anak sebanyak 20 %, sedangkan 80 % lagi menjadi hilang (*lost information*) (Rahmat, 1989)

c. Manajemen

Para ahli berbeda-beda dalam memberi pengertian manajemen. Menurut Dubrin (1990) Manajemen adalah proses menggunakan sumber-sumber organisasi untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan fungsi-fungsi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan

d. Keputusan / Kebijakan Pimpinan

### 3. Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah (*school based management*) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasar kebijakan pendidikan nasional. (Departemen Pendidikan Nasional, 2001 :3)

Landasan berpikir dari MBS ini adalah memberikan otonomi yang luas kepada sekolah untuk membenahi pendidikannya dalam rangka mencapai kualitas yang optimal. hal ini memberikan otonomi yang luas kepada sekolah untuk memberdayakan dan mengolah sumber daya dan sumber dana.

MBS ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan kita. Selama ini keterkaitan pengelolaan sekolah sangat erat dengan keputusan yang sentralistik. Keputusan yang sentralistik mengandung dua kelemahan yang amat prinsipil. *Pertama*, keputusan yang bersifat sentral (pusat), belum tentu sesuai dan cocok dengan daerah, apalagi bila dikaitkan dengan kebutuhan daerah. *Kedua*, timbulnya partisipasi semua dari semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan sekolah (pimpinan, guru, siswa, orang tua siswa, tokoh masyarakat). Akibatnya maka banyak program sekolah

yang tidak bisa berjalan dengan baik. Menumbuhkan rasa memiliki, rasa bertanggung jawab adalah sesuatu yang amat penting dalam meningkatkan dedikasi warga sekolah.

### **Tujuan MBS**

Tujuan MBS untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rinci MBS bertujuan:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah, dan
- d. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang dicapai. (Diknas, 2001 :4)

### **Alasan Diterapkannya MBS :**

- a. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan dan peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah.
- b. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan, dan di dayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- c. Pengambilan keputusan yang dilaksanakan sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
- d. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
- e. Keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Sekolah dapat bertanggung

- jawaban tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
- f. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat, dan
  - g. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah cepat. (Diknas, 2001 : 4-5)

#### 4. Kaitan Antara Sumber Daya Pembelajaran dengan Peningkatan Mutu Sekolah yang Berlandaskan Kepada MBS

Di awal telah diuraikan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan banyak sekali faktor yang terkait. Salah satu di antaranya faktor itu adalah sumber daya pembelajaran.

Dalam mengkaji sumber daya pembelajaran ini ada tiga hal yang perlu kita kemukakan. *Pertama*, sumber daya manusia. *Kedua*, sumber daya benda-benda (alat). *Ketiga*, sumber daya kebijakan dan peraturan.

##### a. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia itu ada beberapa macam : pimpinan sekolah, guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat dan siswa.

##### 1) Pimpinan

Pimpinan adalah orang yang diberi amanah untuk memenej sekolah. Peranannya sangat menentukan maju mundurnya sekolah, akan terlihat perbedaan yang mencolok sekolah yang dipimpin oleh seorang yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik dengan yang tidak.

##### 2) Guru

Guru orang yang memiliki peranan yang amat penting dalam memproduksi *output* bermutu. Di antara berbagai faktor pendidikan yang amat berperan adalah faktor pendidik, sebagian besar mutu pendidikan terkait



erat dengan guru. Karena peranan guru begitu dominan, maka untuk memberdayakannya guru paling tidak memiliki empat kompetensi pokok. *Pertama*, kompetensi, pedagogik. *Kedua*, kompetensi kepribadian, *ketiga*, kompetensi profesional, dan *keempat*, kompetensi sosial.

Kompetensi keilmuan terkait erat dengan pendidikan guru., semakin tinggi strata pendidikan guru maka semakin berpeluang untuk memiliki ilmu pengetahuan. Kompetensi professional mencakup tentang kompetensi memaneg pembelajaran, termasuk persiapan, methode, manajmen kelas dan lain sebagainya. Kompetensi moral akademik, mencakup tentang sikap mental, disiplin, loyalitas kpada tugas, mencintai profesinya sebagai guru, kejujuran ilmiah (obyektif) dan lain sebaiunya.

### 3) Sumber Daya Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas pembelajaran adalah alat yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Sesuatu yang dapat dipersonafikasi dalam bentuk nyata akan lebih cepat ditangkap oleh peserta didik dan akan lebih tahan lama. Seekor lembu yang ditunjukkan gambarnya akan lebih cepat dapat ditangkap dan bertahan lama dalam pikiran peserta didik, ketimbang diceritakan dengan lisan tentang lembu tersebut. Apalagi sarana dan fasilitas ini terkait erat dengan peraktikum mahasiswa. Jadi esensi dari sarana dan fasilitas itu adalah membntu pendidik untuk terjadinya dengan baik proses pentranseferan ilmu pengetahuan dan *skill*.

### 4) Orang Tua Siswa

Tiga pusat sumber belajar telah lama kita di Indonesia teruta setelah diperkenalkan oleh Ki Hajar dewantara, apa yang disebut dengan tri pusat pendidikan – rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena dalam manajemen pendidikan yang sesungguhnya ketiga pusat pendidikan tersebut saling terkait.

Di dalam konsep MBS, maka salah satu warga sekolah itu adalah orang tua. Karena orang tua adalah penanggung jawab pendidikan di rumah tangga. Keterkaitan antara rumah tangga dengan sekolah sebetulnya amat erat dan tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan itu maka amat pantas dan layak jika orang tua merupakan salah satu komponen pembelajaran. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pemberei dana bila diperlukan

tetapi ia juga sebagai orang yang akan menerima hasil sekolah. Atas dasar itu maka ia juga turut berpikir untuk meningkatkan mutu sekolah. Kedudukannya dalam MBS adalah bagian integral dari seluruh sumber daya pembelajaran. Konsep BP3 selama ini harus dirubah, di mana orang tua hanya penilai dana saja, maka idealnya orang tua juga berperan mensuplai ide, pemikiran dan tenaga.

5) Tokoh Masyarakat.

Tokoh masyarakat, sebetulnya erat kaitannya dengan Dewan Sekolah. MBS, harus terkait dengan 'Dewan Sekolah'. Dewan Sekolah sebuah lembaga yang memikirkan upaya pemberdayaan sekolah. Dengan demikian sebaiknya MBS ditopang untuk terbentuknya 'Dewan Sekolah' di setiap sekolah dengan adanya 'Dewan Sekolah.'. Di Dewan Sekolah ini akan duduk tokoh-tokoh masyarakat setempat, dengan duduknya mereka di situ akan memiliki peranan yang besar untuk memajukan sekolah.

6) Siswa.

Bahan baku yang akan digodok dalam proses pendidikan adalah siswa, maka keberhasilan siswa merupakan salah satu indikator penting berhasilnya proses pembelajaran. Bahan baku ini (*raw input*) sangat banyak menentukan kualitas *out put* sekolah. Agar *output* pembelajaran menghasilkan kualitas pendidikan yang baik, maka siswa mesti memiliki kualitas akademik dan non akademik yang baik pula.

## b. Tinjauan Dari Sudut Al Quran Dan Al Hadist

AlQuran dan Al Hadist adalah pedoman yang berdasarkan kewahyuan yang sifatnya adalah memuat aturan-aturan umum. Keduanya sangat sedikit memuat kandungan yang bersifat teknis, kecuali dalam hal yang bersifat akidah dan ibadah. Dalam hal-hal yang berbentuk kehidupan dunia, terutama yang cenderung berubah dan bersifat teknis Al' Quran dan Al Hadist memuat garis-garis besar saja, bahkan Rasulullah pernah bersabda yang artinya: "*Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu*"

Misalnya bagaimana cara bertanam buah-buahan yang baik sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan diserahkan kepada manusia tersebut.



Manajemen berbasis sekolah adalah pada dasarnya adalah memberikan otonomi yang luas kepada sekolah untuk mengembangkan dirinya yang tidak selalu terikat dengan konsep-konsep sentralistik. Di sini yang paling diutamakan bagaimana menggalang persatuan dan kesatuan lingkungan sekolah untuk dapat diberdayakan. Di dasari atas argumentasi bahwa yang paling mengetahui tentang apa dan bagaimana sekolah itu adalah orang yang berada dalam lingkungan sekolah tersebut secara aktif, karena itu mereka-mereka inilah yang diberdayakan guna tercapainya tujuan pendidikan di sekolah tersebut.

## **D. MEMBERDAYAKAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH**

### **1. Pendahuluan**

Salah satu krisis yang sedang melanda bangsa kita adalah krisis akhlak. Krisis itu telah melanda hampir seluruh lapisan masyarakat. Penanganan yang serius terhadap krisis ini nampaknya belum ada yang sungguh-sungguh. Di satu sisi akhlak itu disanjung-sanjung dan ditempatkan pada tempat yang ideal, misalnya dicantumkan dalam tujuan pendidikan nasional yakni bertujuan untuk berekembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, akan tetapi dalam prakteknya amat terabaikan, tentang akhlak ini, ada sikap mendua.

Sikap mendua itu terlihat secara nyata dari aplikasi dan pelaksanaan pendidikan agama sebagai upaya untuk membentuk akhlak mulia sangat terabaikan, sehingga membuat pendidikan agama itu tidak berdaya, tidak begitu kompetitif di dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Ada beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan pendidikan agama itu kurang berdaya, seandainya beberapa persoalan itu dapat diatasi maka pendidikan agama akan dapat dikedepankan sebagai upaya untuk membentuk akhlak generasi muda. Pertama, kurang terkoordinirnya pelaksanaan pendidikan agama di sekolah antara orang tua, sekolah (guru dan pimpinan sekolah) dan pemerintah serta masyarakat.

Pendidikan agama di sekolah itu seolah-olah hanya bulat-bulat diserahkan kepada guru agama. Masih adanya anggapan bahwa pendidikan agama itu kurang penting bila dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya.



Anggapan ini berimplikasi banyak terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Keadaan yang seperti inilah yang penulis maksudkan di atas adanya sikap mendua tersebut, di satu sisi (dalam konsep dan teori) pendidikan agama dan akhlak mulia sangat dipentingkan, tetapi ketika pelaksanaannya di lapangan kelihatan betul seolah-olah kurang mendapat perhatian serius. Selain dari itu ada beberapa permasalahan pokok di sekitar faktor pendidikan, yang sifatnya lebih bersifat intern, permasalahan ini disekitar peserta didik, pendidik, kurikulum sarana dan fasilitas, metode dan evaluasi.

## 2. Perkembangan Pendidikan Agama di Sekolah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Sikap religius itu telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Bekas-bekas peningkatan sejarah menunjukkan bukti nyata terhadap sikap beragama tersebut.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno di muka sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, mengatakan bahwa pentingnya setiap bangsa Indonesia bertuhan, dan mengajak setiap bangsa Indonesia mengamalkan agamanya masing-masing.

Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Sila pertama ini merupakan manifestasi dari sikap hidup religius tersebut. Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar ketuhanan yang adil dan beradab. Atas dasar itu pulalah maka di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 diatur hal yang berkenaan dengan ketuhanan, yakni pada pasal 29 ayat 1 dan 2.

Ayat 1 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Untuk merealisasi sikap hidup yang agamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah membentuk Departemen Agama. Tugas utama departemen ini adalah mengurus soal-

soal yang berkenaan dengan kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu diantaranya adalah berkenaan dengan pendidikan agama. Ruang lingkup pendidikan agama yang dikelola oleh Departemen Agama tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolah agama saja – pesantren dan madrasah – tetapi juga menyangkut pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

Upaya-upaya untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah umum, telah dimulai sejak adanya rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), tahun 1945, diantara usul badan tersebut pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan termasuk pengajaran agama, madrasah dan pesantren. Usul Badan Pekerja sebagai berikut :

Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur, seksama sehingga cukup mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipilihnya. Tentang cara melakukan ini baiklah kementrian mengadakan perundingan dengan badan pekerja. Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah (Poerbakawatja, 1970:38).

Usul badan pekerja itu baru dapat dilaksanakan pada masa Menteri PP dan K dipegang oleh Mr. Suwandi (2 Oktober 1948 – 27 Juni 1947). Diawali dengan pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkan peraturan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri PP dan K mengenai teknis pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang berkenaan dengan pendidikan agama di sekolah, maka secara formal pendidikan agama telah memiliki landasan yuridis.

Tujuan yang esensial dari pendidikan agama di sekolah adalah untuk memberikan pengetahuan keagamaan yang dapat dipraktekkan peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan tingkat umur dan kematangannya. Sifatnya lebih bersifat fungsional. Setelah dilaksanakannya



pendidikan agama di sekolah sejak lebih dari 50 tahun yang lalu dirasakan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga merupakan hambatan bagi tercapainya tujuan pendidikan agama itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan agama perlu diberdayakan, agar tujuan idealnya dapat tercapai.

Langkah awal pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dimulai dengan adanya peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri PP dan K yang dituangkan dalam berbagai keputusan bersama antara kedua Menteri yang kandungan isinya meliputi tentang teknis pelaksanaan pendidikan agama di sekolah.

Pendidikan agama pada awal dilaksanakan pada tingkat dasar, menengah dan atas, dan menurut UU No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran agama di sekolah menyinggung masalah pendidikan agama di sekolah yang kepada orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

Ada beberapa peraturan yang muncul di kala itu yang seolah-olah menggambarkan pendidikan agama itu kurang penting. Hal ini tentu dapat dipahami bahwa pada saat itu Indonesia baru merdeka, yang banyak sedikitnya masih ada pengaruh pendidikan kolonial Belanda yang tidak mengajarkan pendidikan agama di sekolah pemerintah.

Setelah gagalnya gerakan G 30 S PKI melakukan *coup d'etat* pada tahun 1965, pemerintah dan rakyat Indonesia semakin menunjukkan perhatian yang besar terhadap pendidikan agama, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunis. Untuk merealisasi maksud tersebut maka sidang umum MPRS tahun 1966, telah menetapkan salah satu keputusan No. XXVII/MPRS/1966, pasal 1 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas-universitas negeri. Di samping itu, pasal 4 menyatakan tentang isi pendidikan semakin memperkuat pendidikan agama, yakni point (1) yang berbunyi "*Mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama*".

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menggambarkan kedudukan juridis formal pendidikan agama semakin kokoh, dengan ditetapkan, pertama tujuan pendidikan nasional Bab II Pasal UUSPN :



Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selanjutnya dengan ditetapkan isi kurikulum (Bab IX pasal 39 ayat 2) isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat :

- a. Pendidikan Pancasila
- b. Pendidikan Agama
- c. Pendidikan Kewarganegaraan

Seterusnya dalam kurikulum dijelaskan pula bahwa salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan adalah pendidikan agama. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 dijelaskan pula kedudukan agama sebagai salah satu hak peserta didik. Pada Bab V, pasal 12 ayat (1) a berbunyi setiap peserta didik apada satuan pendidikan berhak :

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan pendidikan yang seagama.

Pada Bab X, pasal 36 dan 37, menjelaskan pula tentang Kurikulum, menjelaskan bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan salah satunya adalah peningkatan iman dan takwa (pasal 36, ayat (3) a. Sedangkan pada pasal 37 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa pendidikan agama diajarkan pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

### **3. Sinkronisasi Pendidikan Agama di Sekolah, Rumah Tangga dan Masyarakat**

Pendidikan agama di sekolah tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kaitannya dengan rumah tangga dan masyarakat. Pendidikan agama yang diberikan guru di sekolah baru bisa efektif jika di peraktekkan anak di rumah dan di sinilah peranan orang tua untuk mengefektifkan pendidikan agama tersebut. Guru tidak akan tahu apakah peserta didik tersebut melaksanakan shalat atau tidak, yang tahu adalah orang tuanya. Masyarakat juga dilibatkan,

untuk memperkuat jaringan pendidikan agama. Peranan masyarakat lewat remaja masjid, majelis taklim dan juga berbagai bentuk pendidikan agama nonformal lainnya, adalah wahana pendidikan agama yang juga banyak peranannya dalam mengefektifkan pendidikan agama.

#### 4. Kesimpulan

Melihat kompleksnya masalah pendidikan agama di sekolah maka untuk memberdayakannya perlu diperhatikan beberapa hal :

- a. Managemennya, keterpaduan perhatian yang sungguh-sungguh dari orang tua, guru pimpinan sekolah, pemerintah, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam operasionalnya.
- b. Lembaga pendidikan tenaga guru agama, betul-betul dapat diandalkan untuk membentuk tenaga pendidik agama yang profesional untuk itu perlu dirancang kurikulumnya.
- c. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, mesti mengalokasikan dana yang memadai untuk membiayai sarana dan prasarana pendidikan agama di sekolah.
- d. Pembentukan iklim beragama di sekolah sangat menentukan untuk membentuk sikap beragama seseorang.
- e. Memberdayakan pendidikan agama adalah merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah.

## BAB IV

# MADRASAH

### A. KEBIJAKAN PENDIDIKAN MADRASAH DAN OTONOMI DAERAH

#### 1. Pendahuluan

**M**adrasah telah muncul sebagai lembaga pendidikan di dunia pendidikan sejak abad ke sebelas masehi dan telah tumbuh berkembang pada masa kejayaan pendidikan Islam. Di antaranya yang terkenal adalah madrasah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk yang populer dengan nama Madrasah Nizamiyah, demikian juga madrasah yang dibangun oleh Zainuddin Zinki penguasa Syiria dan Mesir. Khusus untuk Indonesia perkataan madrasah baru populer setelah masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia pada awal abad kedua puluh, dan dikategorikanlah madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang menyuarakan suara pembaharuan, berbeda dengan pesantren yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional.

Dalam perkembangannya telah tumbuh dinamika, perkembangan-perkembangan yang mengarah kepada perubahan yang prinsipil. Sejak Indonesia merdeka telah terjadi tiga fase perkembangan madrasah yang membawa kepada perubahan-perubahan orientasi. Perubahan yang juga sangat bermakna kedepan ini adalah ketika diterapkannya otonomi daerah yang juga membawa dampak terhadap diberlakukannya otonomi pendidikan. Di tengah-tengah arus perubahan itu madrasah terlibat langsung didalamnya. Pertanyaan mendasar yang perlu dimunculkan dalam menyikapi diterapkannya otonomi daerah itu adalah kebijakan apakah yang diberlakukan bagi madrasah.



## 2. Tinjauan Historis

Sejak Indonesia merdeka sudah terjadi 3 fase perkembangan madrasah:

### a. Fase Antara Tahun 1945 – 1974

Pada fase ini madrasah lebih terkonsentrasi kepada pendidikan ilmu-ilmu agama, dan diajarkan pengetahuan umum sebagai pendamping dan untuk memperluas cakrawala pikir para pelajar. Civel effect untuk melanjutkan studi bagi lulusan madrasah terbatas kepada perguruan tinggi agama (IAIN), walaupun dapat diterima di perguruan tinggi umum itupun dalam bidang ilmu-ilmu sosial pada perguruan tinggi swasta. Untuk ke UMPTN mendapat hambatan. Pengertian madrasah pada periode ini adalah sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1946 dan peraturan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 1950, madrasah adalah:

- 1) Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam, menjadi pokok pengajaran.
- 2) Pondok dan pesantren memberi pendidikan setingkat dengan madrasah.

### b. Fase Antara Tahun 1975-1989

Fase diberlakukannya SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri. Inti dari SKB ini adalah diakuinya kesetaraan antara madrasah dengan sekolah:

SD = MI  
SLTP = MTs  
SLTA = MA

Defenisi madrasah pada periode ini adalah : lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Disebabkan karena berbagai faktor, terutama struktur kurikulumnya yang sedemikian rupa maka kesetaraan madrasah dengan sekolah umum belum tercapai dalam arti yang sesungguhnya.

### c. Fase Antara Tahun 1990 Sampai Sekarang

Fase ini adalah mulai diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1989 (UUSPN) dan diikuti dengan pelaksanaan PP No. 28 dan 29 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar dan menengah.

Madrasah pada periode ini berciri khas agama Islam, maka program yang dikembangkan adalah mata pelajaran yang persis dengan sekolah umum. Sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam diajarkan ilmu pengetahuan agama, seperti aqidah-akhlak, fiqh, Alquran-hadits, bahasa arab, Sejarah Kebudayaan Islam.

Madrasah Pada UU NO 20 tahun 2003, dituliskan pada pasal 17 ayat (2) dan 18 ayat (3), menjelsakan “ Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Aliyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertam (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs, atau bernentuk lain (pasal 17 ayat (2)).

Pendidikan menengah terdiri atas berbentuk sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sedrajat. (Pasal 18 ayat (3)).

### **3. Problema Madrasah**

#### **a. Hambatan Struktural dan Kultural**

Secara struktural madrasah berada dalam lingkungan Departemen Agama. Maka tanggung jawab pembiayaan pun berada dipundak Departemen Agama. Dampaknya terdapat beberapa kepincangan dalam pendanaan. Sebaiknya, kendatipun madrasah berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama tetapi alokasi pendanaan yang dikucurkan tidak berbeda dengan diterima oleh sekolah. Ada data yang ditemukan tentang pendanaan ini, misalnya pada tahun anggaran 1999/2000 biaya pendidikan persiswa (MIN (Ibtidaiyah) adalah Rp 19.000, sedangkan SDN Rp 100.000 (1:5,2). MTs (Tsanawiyah) Rp 33.000, sedangkan SMPN Rp 46.000 (1:1,4). Untuk dibanding (1:1,3). Untuk IAIN dibanding universitas negeri (1:3). (Amanah No. 54 Tahun XIII, 7 Mei – 7 Juni 2000, hal. 21).

Diskriminasi yang seperti ini harus diakhiri. Mengakhirinya tidak mesti madrasah berada dibawah naungan Diknas atau Pemda, tetapi yang perlu diperhatikan adalah alokasi pembiayaan tidak berbeda antara madrasah dan sekolah, jadi yang perlu dihitung adalah unit cost persiswa dan unit cost itu harus sama antara sekolah dengan madarasah.



Kultural, madrasah belum menjadi tipe sekolah ideal bagi kebanyakan umat Islam terutama menengah ke atas. Hal ini sangat banyak dampaknya bila madrasah ingin diberdayakan dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (*school based manajment*). Prinsip dasar dari school based manajment adalah bahwa sekolah mendapat otonomi luas dan bertanggung jawab dalam menggali, memanfaatkan, serta mengarahkan berbagai sumber daya, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.

Disebabkan itu perlu dibangun komunikasi yang insentif terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dewan sekolah, para pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa serta seluruh anggota masyarakat (Sanusi, 2001:19-20).

## **b. Tenaga Pendidik**

Kekurangan tenaga pendidik yang sesuai dengan profesi, terutama dalam bidang mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Inggris. Guru menduduki posisi kunci dalam kesuksesan belajar siswa, berperan sebagai *the man behind the gun*. Bukan senjatanya yang menentukan tetapi adalah orang (manusia) yang memainkan senjata tersebut. Prinsip ini menggambarkan bahwa alat, sarana dan prasana yang kurang ditangan guru yang cekatan akan dapat ditutupi, tetapi sebaliknya pula, sarana dan prasarana yang baik ditangan guru yang tidak cekatan, tidak bermanfaat. Berdasarkan itu maka dapat dimaklumi bahwa pengadaan tenaga pendidikan dibidang ini sangat mendesak untuk dipenuhi di seluruh madrasah, atau dapat juga ditempuh jalan dengan mengadakan penataran bagi guru dalam bidang mata pelajaran tertentu sebagai salah satu solusinya.

## **c. Sarana dan Fasilitas**

Banyak madrasah yang masih memiliki sarana dan fasilitas seadanya, terutama madrasah swasta dan madrasah yang baru dinegerikan. Dalam hal ini terkait erat dengan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk madrasah serta partisipasi masyarakat.

## **d. Struktur Kurikulum**

Agar tercapai esensi madrasah sebagai sekolah yang berciri khas



Islam, maka pertama kurikulum yang diaplikasikan di madrasah persis sama dengan di sekolah baik materinya begitu juga waktu pelaksanaannya. Disamping itu maka struktur kurikulum agama tidak hanya terfokus kepada intra kurikuler, masih adalagi kokurikuler, ekstra kurikuler dan hidden kurikuler.

#### 4. Madrasah Pada Era Otonomi Daerah

Arus demokratisasi demikian derasnya dalam kehidupan manusia saat sekarang ini, inti dan hakikat dari arus demokratisasi itu adalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan arus bawah. Indonesia setelah era reformasi merealisasi kehendak sebagian besar masyarakat Indonesia untuk adanya otonomi daerah. Berkenaan dengan itu lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dan diiringi pula PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan antara keuangan pusat dan daerah.

Gelombang demokratisasi dalam bidang pendidikan menuntut adanya desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dampak dari sentralisasi pendidikan telah muncul di Indonesia unifornomitas. Unifornomitas ini mematikan inisiatif dan kreatifisme serta inovasi perorangan maupun kelompok.

Bagaimana kedudukan madrasah di era otonomi daerah ini, ada beberapa pendapat tentang ini.

- a. Madrasah tetap dibawah naungan Departemen Agama. Semangat ini didasari atas idealsasi yang tinggi. Selain dari itu bahwa Departemen Agama adalah Departemen yang tidak diotonomikan, maka termasuk jugalah didalamnya pendidikan agama.
- b. Madrasah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional/ Pemerintah Daerah. Argumennya adalah karena masalah pendidikan telah diotonomkan, maka dikhawatirkan pendidikan di lingkungan

madrasah yang selama ini sudah tertinggal dibanding dengan sekolah akan semakin tertinggal. Oleh karena itu madrasah sebaiknya berada dalam lingkungan Dinas Pendidikan/ Pemerintah Daerah agar memperoleh fasilitas dan perhatian Pemerintah Daerah sama seperti yang diberlakukan Pemerintah daerah terhadap sekolah.

- c. Adanya pembagian wewenang antara Departemen Agama dengan Pemerintah Daerah, teknis-teknis ini akan diatur tersendiri.

## 5. Pemberdayaan Madrasah

Arah baru paradigma pendidikan mengalami perubahan. Dari sentralistik ke desentralisasi, kebijakan yang *top down* ke arah kebijakan *bottom up*. Orientasi pengembangan parsial pendidikan keorientasi pengembangan holistik, pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya. Peranan pemerintah sangat dominan untuk meningkatkan peran masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif. Lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat, keluarga, LSM, pesantren dan dunia usaha (Fasli Jalal, 2001:5).

Bertolak dari arah baru ini maka pemberdayaan madrasah dilaksanakan lewat :

- a. Pemberdayaan manajemen, meliputi pemberdayaan SDM, manusia pengelola pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, pengawas dan lain sebagainya dan siap memasuki era manajemen berbasis sekolah.
- b. Pemberdayaan sistemnya, dari sistem *top down* ke *bottom up*, sentralisasi ke desentralisasi.
- c. Pemberdayaan kebijakan, dari kebijakan yang memarjinalkan madrasah kepada kebijakan yang membawa madrasah ke center.
- d. Pemberdayaan masyarakat, melibatkan unsur-unsur masyarakat untuk ikut serta didalam pemberdayaan madrasah, dengan cara meningkatkan peran serta *stakeholder* dan akuntabilitas.

## **B. PROFESIONALISME GURU MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN**

### **1. Pendahuluan**

Guru adalah salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki peranan yang paling strategis, sebab gurulah sebetulnya 'pemain' yang paling menentukan di dalam terjadinya proses belajar-mengajar. Di tangan guru yang cekatan fasilitas dan sarana yang kurang memadai dapat di atasi, tetapi sebaliknya di tangan guru yang kurang cakap, sarana dan fasilitas yang canggih tidak banyak memberi manfaat.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendidiknya terlebih dahulu. Dicanangkanlah program DII untuk guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah adalah merupakan bahagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas guru baik untuk program pengadaan maupun penyetaraan.

Salah satu di antara ciri kemajuan zaman tersebut adalah adanya suatu pekerjaan yang ditangani secara profesionalis, sehingga pekerjaan itu dikerjakan secara sungguh-sungguh dan serius oleh orang yang memiliki profesi di bidang tersebut. Pekerjaan guru merupakan pekerjaan profesi, karena itu mesti dikerjakan sesuai dengan tuntutan profesionalis.

Di bidang keguruan ada tiga persyaratan pokok seseorang itu menjadi tenaga profesionalis di bidang keguruan. *Pertama*, memiliki ilmu pengetahuan dibidang yang diajarkannya sesuai dengan kualifikasi di mana dia mengajar. *Kedua*, memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang keguruan, dan ketiga memiliki moral akademik.

Timbul pertanyaan upaya apakah yang dilakukan sehingga guru madarasah dapat menempatkan dirinya sebagai tenaga profesionalis. Untuk itu, tulisan ini akan mencoba menguraikannya.

### **2. Profesionalisme Tenaga Pendidik**

Profesionalis adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok yang menghasilkan nafkah hidup dan menghendaki suatu keahlian (Salam, 1997 : 137). Cirinya: 1). Memiliki keahlian dibidang tersebut. 2). Menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut. 3).Hidup



dari pekerjaan tersebut. 4). Bukan sebagai hobby. Burhanuddin Salam menyebutkan ciri profesi itu adalah : 1). Adanya pengetahuan khusus, 2). Adanya kaedah atau standar moral yang tinggi, 3). Mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, 4). Ada izin khusus untuk melaksanakan suatu profesi, 5). Biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. (Salam, 1997: 141-142). Selain dari ini masih ada lagi pendapat lain yang menguraikan tentang ciri keprofesian.

Bila mengacu kepada beberapa penjelasan yang disebutkan di atas, timbul pertanyaan apakah guru merupakan tenaga profesi? Sikun Pribadi berpendapat bahwa guru harus diberi prediket profesi. Sodik A. Kuntoro juga berpendapat bahwa tugas guru adalah tugas profesi, seperti profesi kedokteran, hukum dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut maka guru dapat digolongkan kepada tenaga profesi. Keprofesian guru dapat dilihat dari ilmu, kemampuan teknis, komitmen moral yang tinggi terhadap tugasnya. Ilmu Pengetahuan. Kaitannya dengan guru yang profesionalis adalah sang guru tadi memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang yang diajarkannya, sehingga memungkinkan dia untuk mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Kemampuan teknis keguruan, dalam hal ini memiliki berbagai keterampilan mengajar, misalnya, persiapan mengajar, proses pembelajaran, sampai kepada evaluasi. Komitmen Moral, berkenaan dengan sikap mental seorang guru, meliputi: mencintai pekerjaannya, disiplin, obyektif, dan lain-lain.

Rincian-rincian dari tiga sumber pokok tersebut melahirkan kompetensi keguruan, yang meliputi; 1). Mengusai bahan, 2). Mengelola program belajar mengajar, 3). Mengelola kelas, 4). Menggunakan media/sumber, 5). Menguasai landasan-landasan kependidikan, 6). Mengelola instruksi belajar mengajar, 7). Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran (Roestiyah, 1989 : 6-7)

### 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kualitas manusia Indonesia masih rendah, begitu juga kualitas dan ranking pendidikan tinggi di Indonesia, belum yang mencapai 100 besra dunia. Dari berbagai survey tentang *Human development Index* (HDI), juga masih rendah, oleh karena itu untuk mendongkraknya adalah leat memperbaiki mutu pendidikan.

**a. Peserta Didik (*Raw Input*)**

Bila pendidikan diibaratkan dengan sebuah pabrik, maka pabrik tersebut bila ingin menghasilkan produk yang berkualitas dimulainya dengan memasok bahan baku yang berkualitas pula, dengan alasan semakin baik bahan bakunya (*raw input*) akan semakin baik pula kualitas *out put*nya.

Dipandang dari sudut peserta didik ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar :

**1) Faktor intern**

- a. Faktor jasmani, meliputi faktor kesehatan, kebugaran tubuh, siswa yang sehat badannya akan lebih baik hasil belajarnya dari siswa yang sakit. Begitu juga sangat berpengaruh kesempurnaan dan kelengkapan indra (penglihatan, pendengaran, serta kelengkapan anggota fisik lainnya).
- b. Faktor psikologis, di antaranya yang amat berpengaruh adalah intelegensia, perhatian, minat, bakat, motiv, kematangan, kesiapan dan kelelahan.

**2) Faktor ekstern**

Di antara faktor ekstern itu adalah :

**a) Keluarga**

Di dalam keluarga yang menjadi penanggung jawab adalah orang tua, sikap orang tua di dalam keluarga saat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Sikap orang tua yang otoriter, demokratis sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Karena itu rumah tangga sangat berpengaruh bagi perkembangan pribadi anak.

**b) Faktor sekolah**

Faktor sekolah juga tidak kalah pentingnya di dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang baik, meliputi guru, sarana, fasilitas, kurikulum, disiplin, lingkungan sekolah hubungan guru dengan siswa, hubungan sekolah dengan orang tua siswa, dan lain sebagainya.

**c) Faktor masyarakat**

Karena peserta didik hidup berkecimpung ditengah-tengah masyarakat, maka lingkungan masyarakat sangat berpengaruh bagi peserta didik.

## **b. Sarana dan Fasilitas**

Pengajaran akan lebih sukses lagi apabila peserta didik terlibat secara fisik dan psikis. Seorang siswa yang hanya mendengar dari gurunya tentang cerita seekor kerbau, sangat jauh bedanya apabila si guru dapat memperlihatkan gambar kerbau, dan lebih terkesan lagi pengaruhnya apabila si siswa tadi melihatnya secara langsung apalagi kalau sudah sampai pula memegangnya.

## **c. Pendidik**

Seperti yang telah diungkapkan terdahulu bahwa guru adalah faktor pendidikan yang amat penting, sebab ditangan guru metode, kurikulum, alat pembelajaran lainnya akan hidup dan berperan. Manusia yang mengendalikan senjata itulah yang menentukan bukan senjatanya (*the man behind the gun*). Atas asumsi sedemikian itulah maka salah satu yang paling pokok dibenahi oleh pemerintah di dalam membenahi dunia pendidikan adalah guru. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dalam rangka meningkatkan peran guru.

Pemantapan dan peningkatan kompetensi keguruan. Kompetensi keguruan yang sepuluh macam adalah standard pokok yang tidak statis.

Memegang teguh etika profesi keguruan. Kode etik guru, seperti hasil Kongres ke XIII adalah :

- a. Berbakti membimbing anak didik seutuhnya, memiliki kepemimpinan.
- b. Profesional.
- c. Membina komunikasi, terutama memperoleh informasi tentang anak didik.
- d. Menelusuri hubungan dengan orang tua murid untuk kepentingan anak didik.
- e. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat.
- f. Berusaha meningkatkan mutu profesinya.
- g. Memelihara hubungan antar sesama guru.
- h. Membina dan memelihara mutu organisasi profesional.
- i. Melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan ketata pemerintahan.
- j. Guru berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi peserta didik.



Kesejahteraan guru, *last but not least* kesejahteraan guru amat berperan dalam rangka meningkatkan kinerja mereka, kesejahteraan itu bisa dalam arti materi dan immateri.

#### **d. Lingkungan**

Lingkungan ada dua macam lingkungan fisik dan kedua lingkungan sosial. Lingkungan fisik yakni suasana dan keadaan berlangsungnya pendidikan. Lingkungan sosial yakni iklim dan suasana kependidikan. Iklim yang kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan adalah merupakan kurikulum tersembunyi bagi pencapaian tujuan pendidikan.

### **4. Upaya Pembentukan Guru Madrasah yang Profesional**

Guru madrasah adalah guru, karena itu perlakuan umum yang diberlakukan untuk guru juga berlaku untuk guru madrasah, guru yang sukses dan guru yang profesional kriteria umumnya sama untuk seluruh guru, kendatipun tidak menutup kemungkinan adanya sepesifik guru madrasah.

Menurut D.N Medley (1979) ada empat fase asumsi yang melandasi keberhasilan guru dan pendidikan guru. Fase pertama (skitar tahun 1930 an) penelitian terfokus kepada sifat-sifat kepribadian guru. Kepribadian guru yang dapat menjadi suri teladanlah menjamin keberhasilannya mendidik anak. Fase kedua, keberhasilan guru di dalam mengajar adalah metode mengajar. Metode penyampaian yang baik menjamin keberhasilan pendidikan. Hal ini banyak juga pengaruhnya di kalangan pendidik di Indonesia.

Fase ketiga mengutamakan iklim interaksi di kelas. Interaksi guru di dalam kelaslah yang menentukan, iklim di dalam kelaslah yang paling dominan di dalam keberhasilan pendidikan. Fase keempat memusatkan perhatian kepada penampilan (*performance*) yang menggambarkan dia memiliki kemampuan (*competency*). Calon guru dievaluasi kemampuan mengajarnya berdasarkan penampilannya (implisit di dalamnya: penguasaan materi, strategi penyampaian, penguasaan alternatif media yang tepat, dan lainnya) (Muhadjir, 1986 : 108-109).

Menurut Noeng Muhajir, seorang pendidik adalah seorang yang mempunyai pengetahuan lebih serta mampu mengimplisitkan nilai-nilai

di dalamnya, jadi calon guru diberi bekal pengetahuan sesuai dengan tugasnya, dan pengetahuan itu memperibadi di mana nilai-nilai menjadi implisit di dalamnya. (Muhadjir, 1986 : 110)

Ada pendapat yang menyatakan bahwa kemampuan guru itu dilihat dari kemampuan mengajarnya, asumsi ini di dasarkan kepada “guru yang baik adalah guru yang mampu mengajar baik” (Muhadjir, 1989 :111). Ada beberapa model di dalam Evaluasi Kemampuan Mengajar guru (EKM):

- a. Model STAG (*Stanford Teacher Competence Appraisal Guide*), mengemukakan empat komponen evaluasi: Tujuan, penampilan (*performance*), evaluasi, profesionalitas serta kemasyarakatan. Kemudian dikembangkan menjadi 17 item evaluasi dari 17 itu 13 item dapat dilihat dengan observasi, misalnya mengevaluasi tentang pemilihan isi pelajaran, dan lain sebagainya.
- b. Model Rob Norris, mengetengahkan 6 komponen yang mencakup 45 item. Keenam komponen itu adalah kualitas personal-profesional, persiapan mengajar, perumusan tujuan, evaluasi, penampilan di kelas, penampilan siswa. Sebanyak 21 item tentang penampilan guru di kelas.
- c. Model Oregon, yang disebut sebagai OCE-CBTE (*Oregon College of Education Competency based Teacher Education*), mengelompokkan kemampuan mengajar dalam 5 claster: perencanaan dan persiapan, kemampuan mengajar (guru) dan kemampuan belajar (siswa), kemampuan hubungan interpersonal dan kelima kemampuan hubungan dan tanggung jawab profesional terhadap orang tua, kurikuler, administratif dan anggaran.
- d. Model APKG (Alat penilaian kemampuan Guru) yang disadur dari TPAI (*Teacher Performance Assesment Instruments*) mengetengahkan lima alat mengukur kemampuan, yaitu : rencana pengajaran, prosedur mengajar, hubungan antar pribadi, standard profesional, dan persepsi siswa.

Di Indonesia dikembangkan 10 kompetensi kemampuan dasar guru: menguasai bahan, mengelola program belajar-mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai perestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program bimbingan, dan penyuluhan di sekolah, mengenal dan menyelenggarakan administrasi di sekolah,



memahami prinsip dan mampu menafsirkan hasil penelitian guna keperluan mengajar. (Muhadjir, 1986 :113-114).

Berdasarkan ungkapan di atas, penulis mengelompokkan kompetensi keguruan itu kepada tiga kelompok besar :

- a. Kelompok penguasaan keilmuan, yakni seorang guru mesti menguasai ilmu yang akan diajarkannya kepada anak didik dengan cukup baik, sesuai dengan tingkat kepada siapa ilmu itu diberikan. Kelompok ini menampilkan seorang guru yang bermental ilmu, mencintai ilmu serta senantiasa giat untuk menambah ilmunya, terutama di dalam bidang mata pelajaran yang diasuhnya. Kereteria yang paling sederhana dalam hal ini adalah penguasaan bahan pelajaran yang diajarkannya dengan baik. Kalu jika disesuaikan dengan kompetensi guru dan dosen pada UU No 14 tahun 2005, sama dengan kompetensi profesional.
- b. Komponen dasar kedua, adalah kemampuan mengkomunikasikan ilmunya, termasuk di dalamnya adalah kemampuan persiapan mengajar, mengelola interaksi belajar-mengajar, penguasaan kelas, penguasaan metode mengajar yang tepat untuk mata pelajaran tertentu, kemampuan penggunaan media/sumber, kemampuan hubungan interpersonal, dan lain lain yang termasuk dalam bidang kemampuan mengkomunikasikan ilmunya. Di dalam kompetensi guru dan dosen yang tertera dalam UU No 14 tahun 2005, sama dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial.
- c. Komponen dasar ketiga adalah kompetensi moral akademik, seorang guru bukan hanya orang yang bertugas untuk mentransferkan ilmu (*transfer of knowledge*), tetapi juga orang yang bertugas untuk mentransferkan nilai (*transfer of value*). Guru tidak hanya mengisi otak peserta didik (kognitifnya), tetapi juga bertugas untuk mengisi mental mereka dengan nilai baik dan luhur, mengisi afektifnya. Di sini seorang pendidik menjadi panutan bagi peserta didiknya, dalam banyak segi sang guru tadi dapat dijadikan contoh teladan oleh peserta didiknya. Para pendidik Islam di zaman klasik telah banyak membahas tentang ini. Misalnya Ibn Jama'ah menyebutkan seorang guru mestilah menghiasi dirinya dengan akhlak yang diharuskan bagi seorang yang beragama dan bagi seorang Muslim, dan tokoh-tokoh pendidik Islam lainnya. Dan ini sama dengan kompetensi kepribadian dalam UU No 14 tahun 2005.



## 5. Kesimpulan

Salah satu komponen pokok terpenting dari pendidikan adalah guru. Keberhasilan pengajaran dan peningkatan kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh guru, karena itulah perhatian tentang guru ini mesti diutamakan bila ingin meningkatkan hasil pendidikan. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang disetarakan dengan sekolah, ijazah madrasah sama dengan sekolah. Berangkat dari alas pikir tersebut, maka untuk meningkatkan mutu pendidikan harus berawal dari peningkatan mutu gurunya, dedikasinya serta kecintaan kepada profesinya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi madrasah adalah masalah guru. Guru di madrasah masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk menciptakan tenaga profesional di bidang keguruan harus ditempuh beberapa upaya. Guru madrasah pada prinsipnya sama dengan guru di sekolah kriteria-kriteria serta kompetensi keguruan anatar guru sekolah dan madrasah tidak berbeda. Ada tiga kompetensi pokok yang mesti di miliki oleh seorang guru, yakni kompetensi keilmuan, kompetensi komunikasi keilmuan dan kompetensi moral akadebut. Dan hal itu semua telah terangkum dalam kompetensi guru yang disebutkan dalam UU No 14 Tahun 2005, Undang –Undang tentang Guru dan Dosen, yang mencakup empat kompetensi: Kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

## C. PEMBAHARUAN MADRASAH DI INDONESIA

### 1. Pendahuluan

Di Indonesia, pendidikan Islam telah berlangsung sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, dilaksanakan dengan cara tradisional. Setelah memasuki awal abad kedua puluh di kalangan dunia Islam termasuk Indonesia telah dimasuki oleh semangat pembaharuan, digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan dan pencerahan (*renaissance*) (Steenbrink, 1986:26).

Ide-ide pembaharuan itu juga memasuki dunia pendidikan. Timbulnya ide pembaharuan dalam bidang pendidikan adalah karena banyaknya orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Al-Qur'an dan studi Islam. Pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada awal abad ke 20 berusaha memperbaiki pendidikan Islam

baik dari segi isi maupun metode (Steenbrink, 1986:27-28). Realisasi dari ide pembaharuan tersebut timbulnya usaha mendirikan madrasah.

Madrasah yang pertama sekali didirikan di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah (Adabiyah School) didirikan di Padang pada tahun 1909 oleh Abdullah Ahmad. Selanjutnya pada tahun 1916 didirikan Madrasah School (Sekolah Agama) dan dalam perkembangan berikutnya menjadi Diniyah School dan nama Diniyah School inilah akhirnya berkembang dan terkenal.

Sampai pada tahun 1930 mata pelajaran yang diajarkan di madrasah-madrasah ini adalah semata-mata pelajaran agama, kemudian sebagian madrasah mulai 1930-an memasukkan mata pelajaran umum. Kendatipun mata pelajaran umum telah dimasukkan namun tekanan madrasah adalah tetap mata pelajaran agama dengan tujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang ahli dalam ilmu agama.

Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan mata pelajaran umum untuk dimasukkan kedalam kurikulum madrasah semakin merata, sebagai tuntutan zaman. Dengan demikian timbullah berbagai variasi di dalam memperseimbangkan antara mata pelajaran umum dan agama di lingkungan madrasah, dan di dalam memperseimbangkan itu mata pelajaran umum mendapat porsi yang sedikit. Ada yang berbanding 50:50, 60:40, 30:70, bahkan ada yang berbanding 10:90 (Kafrawi, 1978:103).

Sebagai akibat dari perbandingan antara mata pelajaran umum dan agama seperti yang tertera di atas, maka ijazah madrasah mempunyai nilai yang tidak sama dengan ijazah sekolah-sekolah umum yang diasuh oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketidak samaan nilai ijazah tersebut dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, kesempatan untuk melanjutkan studi bagi lulusan madrasah hanya terbatas kepada Perguruan Tinggi Agama saja dalam hal ini IAIN. Lulusan madrasah tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studinya ke fakultas-fakultas umum, baik fakultas-fakultas eksakta maupun fakultas-fakultas ilmu sosial. Hal yang demikian ini tentu saja tidak menguntungkan bagi tamatan madrasah, dan lebih ironisnya lagi generasi muda Islam yang dididik di madrasah tidak memiliki kesempatan untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial.

*Kedua*, kesempatan untuk mencari pekerjaan bagi lulusan madrasah juga terbatas bila dibanding dengan lulusan sekolah umum. Instansi



pemerintah, swasta lebih mengutamakan lulusan sekolah umum dari pada lulusan madrasah untuk bekerja di instansi mereka, bahkan ada yang tidak menerima lulusan madrasah sama sekali.

Berdasarkan dua hal tersebut menjadikan madrasah berada pada posisi marginal. Dan hal ini tentu saja tidak menguntungkan. Untuk itu perlu dicarikan upaya pemecahannya sehingga kedudukan madrasah sama dan setara dengan sekolah-sekolah umum.

Inti atau esensi permasalahan yang menyebabkan ketidak samaan ijazah madrasah dan sekolah umum terletak pada kurikulumnya. Seandainya kurikulum madrasah diperbaharui sehingga tamatan madrasah dapat menguasai ilmu-ilmu yang dikuasai oleh tamatan sekolah umum, maka permasalahan nilai ijazah di antara kedua bentuk pendidikan itu dapat diwujudkan.

Untuk merealisasi ide menyamakan status lulusan madrasah dengan sekolah umum, maka pada tahun 1975, keluarlah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Inti dari SKB Tiga Menteri itu adalah :

- a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.
- c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. (SKB Tiga Menteri Tahun 1975 Bab II pasal 2).

Ketiga point di atas ini adalah pemberian hak yang diperoleh madrasah yang belum pernah dimilikinya seperti itu sebelumnya. Dan ketiga point itu juga mengandung makna baik implisit maupun eksplisit bahwa status dan derajat Madrasah SKB Tiga Menteri sama dengan sekolah umum.

Apa sebab hak itu bisa diberikan kepada madrasah ? Hal ini tiada lain oleh karena madrasah lewat SKB Tiga Menteri telah mengadakan pembaharuan kurikulum. Kalau pada tahun-tahun sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri bobot mata pelajaran umum lebih kecil dari mata pelajaran agama, maka setelah SKB Tiga Menteri dikeluarkan, madrasah memiliki bobot 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama.



Dengan pertimbangan yang demikian ini diharapkan lulusan madrasah akan memiliki bobot yang sama dengan lulusan sekolah umum. Di sisi lain kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi terhadap madrasah. Hal ini berakibat akan semakin cerahlah kehidupan madrasah di Indonesia.

Selanjutnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan, terutama berkaitan langsung dengan pendidikan tingkat dasar dan menengah (PP No. 28 dan 29 Tahun 1990), dan diikuti pula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1993 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992, maka keberadaan madrasah sudah betul-betul sama dan sebangun dengan sekolah.

Madrasah pasca Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Pemaknaan ini adalah madrasah sama dengan sekolah yang diperkuat dengan ciri-ciri keislaman berupa ilmu keislaman dan lain sebagainya.

Madrasah pada tingkat aliyah dibagi kepada dua. Pertama, Madrasah Aliyah (MA) dan kedua Madrasah Aliyah Keagamaan. Madrasah Aliyah (MA) adalah sekolah umum yang berciri khas Islam, dengan demikian kurikulumnya persis seperti yang ada pada sekolah umum yang diberi ciri keislaman. Sedangkan Madrasah Aliyah Keagamaan, dipersiapkan untuk siswa yang akan mempelajari ilmu-ilmu keislaman.

Ditinjau dari segi pelaksanaannya, tentu saja mengalami berbagai masalah, antara lain tenaga pengajar, sarana dan fasilitas, waktu/jam pelajaran dan dana.

Tulisan ini akan mencoba menguraikan pembaharuan kurikulum: Tinjauan Tentang SKB Tiga Menteri yang meliputi makna dan hakekatnya, pandangan konsepsi pendidikan Islam tentang SKB Tiga Menteri, Civil Effectnya, problema-problema pelaksanaannya dan madrasah pasca UUSPN UU No. 2 Tahun 1989 serta UU No 20 tahun 2003.

## **2. Urgensi Pembaharuan Kurikulum Madrasah**

Masalah pembaharuan kurikulum di dunia pendidikan bukanlah hal yang aneh, tetapi malah merupakan keharusan demi untuk menghadapi

perkembangan masyarakat. Pola-pola lama dirubah untuk mencari pola-pola baru adalah merupakan dinamika dalam kehidupan manusia. Munculnya ide-ide dan upaya-upaya pembaharuan pendidikan itu adalah erat kaitannya dengan kebutuhan persamaan status di kalangan masyarakat. Pendidikan yang berbeba bisa menyebabkan status yang berbeda di masyarakat. Stratifikasi masyarakat juga erat kaitannya dengan pendidikan. Kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas akan menjadi kelompok dominan. Sedangkan kelompok yang tidak memperoleh pendidikan yang tidak baik serta pendidikan yang tidak menjamin masa depan bisa cenderung menjadi kelompok minoritas.

Timbulnya apa yang disebut *caste-like* (semacam kasta), dalam tulisan John U Ogbu yang berjudul: *Equalization of Educational Opportunity and Racial/Ethnic Inequality*, erat kaitannya dengan masalah pendidikan. Dalam tulisan ini Ogbu melihat adanya kelompok dominan dan kelompok minoritas. Kelompok pertama dominan dalam hal ekonomi dan pendidikan, sedangkan kelompok kedua terbelakang dalam kedua hal itu.

Khusus dalam bidang pendidikan, kaum minoritas memperoleh pendidikan yang lebih rendah, yang ini sudah barang tentu berakibat rendahnya penghasilan kaum minoritas (Ogbu, 1982:273-274). Disisi lain dengan rendahnya pendidikan kaum minoritas tersebut, maka sulitlah bagi mereka untuk meniti karier dan mobilitas status. Berdasarkan uraian Ogbu dalam tulisan ini dapat dipetik suatu pengertian: bahwa erat sekali hubungan timbulnya *caste-like* dengan pendidikan.

Di Indonesia, sebelum kemerdekaan adanya batasan-batasan tertentu bagi anak-anak pribumi untuk memperoleh pendidikan. Bagi seseorang lulusan Sekolah Desa, dan Sekolah Kelas Dua jelas sudah tidak mungkin baginya untuk memasuki MULO, AMS, yang merupakan jenjang ke pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian hanya segelintir kecil sajalah orang-orang Indonesia yang bisa mengecap pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Hal ini tentu saja memiliki dampak yang tidak baik terutama untuk mobilitas status bagi masyarakat pribumi.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak Indonesia untuk memasuki dunia pendidikan mulai dari tingkat rendah sampai perguruan tinggi. Hanya saja karena madrasah-madrasah pada waktu itu lebih diarahkan untuk membentuk



orang-orang yang ahli dalam ilmu agama saja, maka tamatan madrasah terbatas ruang lingkupnya untuk memasuki perguruan tinggi.

Melihat kondisi yang demikian itu, maka perlu diciptakan suatu peraturan yang memungkinkan tamatan madrasah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Dengan demikian lahirlah SKB Tiga Menteri. Kondisi yang membatasi lulusan madrasah tidak boleh melanjutkan ke perguruan tinggi umum, bisa berakibat fatal bagi umat Islam Indonesia, sebab anak-anak yang berasal dari keluarga Muslim yang taat yang memasuki madrasah tidak memperoleh kesempatan untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang-bidang ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial.

Diskriminasi dalam bidang pendidikan berdampak jauh terhadap mobilitas sosial suatu masyarakat. Pada saat adanya diskriminasi pendidikan di Indonesia pada zaman pemerintahan Belanda sebagai bagian dari kebijakan pendidikan Belanda, maka mayoritas masyarakat Muslim Indonesia tidak memperoleh pendidikan yang layak, maka tidak heran mereka tertinggal dalam berbagai kehidupan. Begitu juga pada saat madrasah belum diperbaharui, belum dikeluarkan SKB Tiga Menteri, maka lulusan madrasah sangat terbatas di dalam melanjutkan studinya.

### **3. Makna dan Hakikat SKB Tiga Menteri**

Seperti yang telah diungkapkan terdahulu bahwa inti dari SKB Tiga Menteri Tahun 1975 adalah peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, peningkatan meliputi :

- a. Kurikulum
- b. Buku-buku pelajaran, alat-alat pendidikan lainnya dan sarana pendidikan pada umumnya
- c. Pengajar (SKB Tiga Menteri Bab III pasal 3)

Hasil dari peningkatan tersebut adanya *civil effect* terhadap ijazah madrasah.

Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri tahun 1975 kita melihat adanya perbedaan yang mendasar antara lulusan madrasah dengan sekolah umum. Perbedaan yang mendasar itu terlihat nyata sekali di dalam dua hal: Pertama di dalam kesempatan untuk melanjutkan studi. Dalam hal ini lulusan



madrasah tidak memiliki kesempatan untuk memasuki universitas umum negeri, mereka hanya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi agama seperti IAIN atau Perguruan Tinggi Agama Swasta. Setelah adanya SKB Tiga Menteri, maka lulusan madrasah telah memiliki kesempatan untuk memasuki universitas umum negeri. Bagi yang memiliki ijazah aliyah yang tergabung dalam kelompok ilmu-ilmu fisika dan ilmu-ilmu biologi dapat melanjutkan ke Fakultas Kedokteran, Pertanian, Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti Alam dan sebagainya. Sedangkan yang memiliki ijazah madrasah aliyah kelompok studi ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan budaya dapat melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum, Filsafat, Bahasa, Sastra, Ilmu Ekonomi, Politik dan sebagainya.

Kesempatan melanjutkan studi adalah salah satu bagian dari pemerataan pendidikan. Josep D. Farrell mengemukakan, bahwa di negara-negara berkembang salah satu problema yang dihadapi dalam pendidikan ini adalah pemerataan kesempatan melanjutkan pendidikan. Banyak anak-anak di negara-negara berkembang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke lembaga yang lebih tinggi bahkan banyak pula yang drop out (Farrell, 1982:45-46).

Perbedaan kedua adalah dari segi kesempatan kerja. Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri kesempatan untuk menjadi pegawai negeri maupun swasta, bagi tamatan madrasah hanya terbatas dalam lingkungan Departemen Agama atau lembaga-lembaga keagamaan saja. Tetapi dengan adanya SKB Tiga Menteri ini kesempatan itu lebih luas.

Keterbatasan pekerjaan menimbulkan keterbatasan penghasilan dan keterbatasan memperoleh upah yang tinggi. Seperti yang dialami kelompok-kelompok minoriti diberbagai negara. Umat Islam Indonesia kendatipun mayoritas dari segi jumlah, tetapi bisa memiliki peranan minoriti apabila terbelakang di dalam dunia pendidikan..

Dari sisi lain dapat juga dilihat bahwa SKB Tiga Menteri itu adalah upaya untuk menimbun jurang pemisah antara lulusan madrasah dengan sekolah umum. Upaya menimbulkan jurang itu amat diperlukan dalam rangka untuk menghilangkan dua pola pikir generasi Indonesia di masa mendatang.

Bila direnungkan lebih mendalam lagi maka pada hakekatnya madrasah SKB Tiga Menteri itu tiada lain adalah sekolah umum plus. Pada tingkat

sekolah dasar yaitu Ibtidaiyah sama dengan SD Plus, ditingkat SLTP yaitu Tsanawiyah sama dengan SMP Plus dan ditingkat SLTA yaitu Madrasah Aliyah sama dengan SMA Plus. Plusnya di sini adalah mata pelajaran agama dan bahasa Arab yang tidak mungkin mereka peroleh apabila mereka memasuki sekolah umum.

Sebenarnya bila kita menukikkan pandangan lebih mendalam tentang konsep pendidikan dalam Islam baik yang bersumber dari ajaran dasar yakni Al-Qur'an maupun Hadits begitu juga praktek yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman kejayaan Islam, dapat kita lihat bahwa Islam tidak memisahkan antara ilmu diniyah (agama) dengan ilmu umum. Bahkan bila diteliti secara cermat Islam tidak mengenal pembahagian ilmu tersebut dengan peristilahan ilmu agama dan ilmu umum. Sebab apa yang kita sebut dengan ilmu umum misalnya kelompok-kelompok ilmu-ilmu kealaman (*natural science*) dan kelompok-kelompok ilmu-ilmu sosial (*social science*), ada yang kelompok-kelompok ilmu yang dianjurkan bahkan ada yang sampai kepada tingkat wajib sekurang-kurangnya wajib khifayah untuk dipelajari.

Sehubungan dengan masalah ini, sangat menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Zakiah Daradjat. Pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA), yang tegas-tegas digolongkan dalam mata pelajaran umum, namun Islam mendorong untuk mengetahuinya agar alam raya dengan segala makhluk yang ada didalamnya dapat diketahui dan diolah untuk kemanfaatan umat manusia. Pelajaran Matematika juga tegas-tegas berada dalam kelompok mata pelajaran umum. Padahal pengetahuan Matematika sangat diperlukan sebagai dasar bagi pengetahuan teknologi yang akan digunakan dalam pengelola alam yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia (Daradjat, 1977).

Pengetahuan dalam bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran umum, yang juga diperlukan oleh setiap orang Islam, agar ia dapat mengenal bangsa-bangsa, peraturan-peraturan dasar yang berlaku dalam negara dan masyarakat pada umumnya (Daradjat, 1977).

Pengetahuan Bahasa (Indonesia, Inggris dan sebagainya) juga tergolong mata pelajaran umum. Akan tetapi bagi seorang muslim di Indonesia kedua bahasa itu juga diperlukan di samping bahasa Arab.

Pendek kata semua pelajaran yang dalam kurikulum terkelompok dalam mata pelajaran umum itu, sebenarnya perlu pula diketahui dan



dipahami oleh seorang Islam, untuk dapat melaksanakan perintah Allah (Daradjat, 1977).

Berdasarkan pandangan di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam pada hakekatnya sangat menganjurkan untuk mempelajari ilmu-ilmu umum walaupun sebetulnya batas yang tegas antara ilmu yang digolongkan kepada ilmu-ilmu umum dan agama itu sulit untuk menentukannya. Sebab apa yang dikatakan dengan ilmu umum itu ternyata sangat dianjurkan oleh Islam untuk dipelajari.

Bila kita kembali kepada sejarah di saat kejayaan Islam baik di dunia timur, maupun di barat (Andalusia), pada saat itu pembedaan ilmu tidak hanya ilmu-ilmu diniyah (agama) saja yang dikembangkan dan diperhatikan tetapi juga ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, matematika, fisika, astronomi, dan berbagai bidang ilmu alam dan kemasyarakatan (Nasr, 1970:60).

Berbagai madrasah di kala itu di samping mengajarkan ilmu-ilmu diniyah juga mengajarkan ilmu-ilmu umum, seperti halnya Madrasah Al-Mustanshiriyah di Bagdad didirikan oleh khalifah Al-Mustansir Billah tahun 631 H. Ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah tersebut adalah ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu syari'ah, bahasa Arab, kedokteran, ilmu pasti (Yunus, 1981:70).

Dengan demikian pada saat itu dikembangkan secara seimbang antara ilmu-ilmu naqliyah serta ilmu-ilmu 'aqliyah dan lisaniyah. Ilmu-ilmu 'aqliyah adalah : ilmu falak, ilmu kimia, ilmu pasti, fisika, kedokteran, ilmu musik. Sedangkan yang tergolong ilmu naqliyah adalah ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu tauhid dan lain-lain. Ilmu lisaniyah adalah ilmu bahasa seperti nahu syaraf, balaghah dan sebagainya.

Para ilmuwan Islam di kala itu menyatu di dalam diri mereka sebagai seorang intelek dan ulama, misalnya Ibnu Sina sebagai seorang ulama, di samping sebagai seorang filosof Islam yang juga seorang dokter yang terkenal. Ibnu Rusyd sebagai filosof Islam terkenal di Andalusia juga seorang ahli fiqh yang terkemuka bahkan sampai sekarang karyanya dalam bidang fiqh masih dipelajari dan dibaca yaitu *Bidayah al Mujtahid*. Sebuah kitab fiqh yang memuat tentang perbandingan mazhab. Demikian juga sejumlah ilmu-ilmuan lainnya yang belum disebutkan nama-nama mereka dalam tulisan ini.



Para ahli pendidikan Islam baik klasik maupun modern telah menguraikan bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya pendidikan diniyah semata-mata.

Al-Qabisi, nama lengkapnya Abu al Hasan Ali bin Muhammad bin Khallaf al Qabisi hidup pada abad keempat Hijriyah membagi ilmu itu kepada dua bagian yang beliau sebut istilahnya dengan: Pertama ilmu ijbariyah, yang tergolong dalam ilmu ijbariyah ini adalah Al-Qur'an, al-shalat, al-do'a sebahagian an-nahwu wal 'Arabiyah dan qiraat al-kutub. Ilmu-ilmu ijbariyah ini semacam ilmu dasar atau komponen dasar menurut istilah kita saat sekarang ini. Kedua ilmu ikhtiraiyah, termasuk dalam ilmu ini adalah berhitung, keseluruhan nahwu dan bahasa Arab, sya'ir dan sejarah bangsa Arab (Al-Ahwani, 165-170).

Tokoh-tokoh pendidikan Islam kontemporer yang akan kita uraikan pendapat mereka di sekitar konsep pendidikan Islam, adalah :

- a. Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwani, mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah perpaduan yang menyatu antara pendidikan jiwa, membersihkan ruh, mencerdaskan akal, dan menguatkan jasmani (Al-Ahwani, 9).
- b. Ali Khalil Abû Al-Ainani, mengungkapkan bahwa hakekat pendidikan Islam itu adalah perpaduan di antara pendidikan akal, aqidah, akhlak, perasaan, keindahan dan kemasyarakatan (Al-Ainani, 1980:150-209).
- c. Dr. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Al-Abrasyi, 1964:9-10).
- d. Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Toumy al-Syaibani, menjelaskan bahwa tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat (Al-Syaibani, 1979:410).

Bertolak dari pandangan Al-Qur'an tentang manusia maka semakin jelaslah bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya semata-mata yang berkenaan dengan kehidupan akhirat saja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menempatkan fungsi manusia sebagai khalifah.

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."*

Esensi makna khalifah adalah orang yang diberikan Allah amanah untuk memimpin alam, dalam hal ini manusia bertugas untuk memelihara dan memanfaatkan alam semesta ciptaan Allah.

Dengan demikian eksistensi khalifah terletak pada daya kreatif untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu jabatan khalifah adalah jabatan yang bersifat kreatif ketimbang sekedar status (Saefuddin, 1987:8).

Agar manusia itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah secara maksimal, maka sudah barang tentu manusia itu memiliki ilmu pengetahuan dan perlengkapan-perengkapan lainnya. Guna memenuhi persyaratan dalam bidang ilmu pengetahuan, Allah SWT mengajari Adam tentang nama-nama sesuatu seperti yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33.

*“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada Malaikat lalu berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar”* (Al-Baqarah 31).

*“Mereka menjawab: Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami: Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”* (Al-Baqarah 32).

Allah berfirman : *“Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu. Allah berfirman: Bukankah sudah Kukatakan kepada kamu, bahwa Aku mengetahui rahasia langit, bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan”* (Al-Baqarah: 33)”.

Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tersebut, maka dia mampu mengelola alam ini untuk kesejahteraan mereka. Mampu mengelola alam pertama menjadi alam kedua dalam bentuk teknologi. Kemampuan berkarya manusia itu diungkapkan oleh Dr. Sir Muhammad Iqbal, dalam salah satu untaian syairnya :

*Kau yang menciptakan malam dan aku yang membuat pelita.*

*Kau yang menciptakan tanah liat dan aku yang membuat piala.*

Berdasarkan fungsi manusia sebagai khalifah maka tidak kita ragu lagi manusia itu mestilah memiliki seperangkat ilmu pengetahuan, baik

ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu-ilmu sosial sedemikian juga ilmu-ilmu humaniora di samping ilmu-ilmu agama.

Dari sisi lain bisa pula ditinjau bahwa manusia adalah perpaduan yang menyatu di antara unsur

Jasmani dan rohani. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 29:

*Artinya : "Maka apabila Aku telah menyempurnakan dan telah meniupkan kedalamnya roh (ciptaan) Ku, maka tunduklah kamu kepada-Nya dengan bersujud" (Al-Hijr:29)*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan kejadian fisik manusia (Adam) dari tanah (materi) dan setelah itu Allah meniupkan roh ciptaan Allah (immateri) kepada Nabi Adam, sehingga dengan demikian sempurnalah kejadian Adam sebagai manusia.

Dimensi jasmani terdiri dari organ-organ tubuh manusia yang bersifat materi, baik yang terlihat langsung oleh panca indra maupun dengan mempergunakan alat.

Sedangkan dimensi rohani manusia terdiri dari :

- a. Dimensi akal
- b. Dimensi aqidah
- c. Dimensi akhlak
- d. Dimensi perasaan
- e. Dimensi keindahan
- f. Dimensi Kemasyarakatan (Daradjat, 1984).

Berdasarkan ungkapan-ungkapan di atas maka pendidikan yang ideal menurut Islam adalah pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi manusia tersebut, baik potensi jasmani maupun potensi rohani.

Bila keterangan-keterangan di atas ini semuanya dikaitkan dengan SKB Tiga Menteri 1975 jelaslah bahwa pendidikan Islam yang ideal itu sejalan dan serasi dengan hakekat SKB Tiga Menteri. Keserasian SKB Tiga Menteri dengan konsep pendidikan Islam adalah dari segi pengembangan ilmu yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja akan tetapi mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi manusia untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi.



SKB Tiga Menteri ini berusaha untuk menghilangkan dikhotomi yang terasa selama ini. Sehingga dengan demikian diharapkan akan tumbuh pandangan yang utuh terhadap ajaran Islam.

Dari segi teknis operasional SKB Tiga Menteri ini bukanlah tanpa problem. Ada sejumlah problema-problema mendasar ditinjau dari segi pelaksanaan yang apabila tidak diatasi sudah pasti SKB Tiga Menteri tahun 1975 tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Problema-problema tersebut akan dicoba diuraikan dalam pembahasan berikut.

#### **4. Problematika Pelaksanaan SKB Tiga Menteri Tahun 1975**

Ditinjau dari pelaksanaan SKB Tiga Menteri terdapat beberapa problema.

##### **a. Tenaga Pengajar**

Pendidikan adalah merupakan satu sistem, sedangkan tenaga pengajar atau guru adalah merupakan sub sistem. Sub sistem yang satu ini memiliki kedudukan yang amat penting. Oleh karena keterkaitan dengan pelaksana pendidikan itu sendiri. Betapapun canggihnya suatu konsepsi pendidikan termasuk kurikulum dan silabus bila tidak ditopang oleh guru yang berkualitas dan berdedikasi maka konsep yang canggih itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satu problem yang dihadapi oleh madrasah SKB Tiga Menteri adalah masih kekurangan guru baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kekurangan guru ini terasa sekali pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika dan yang sejenisnya. Usaha untuk mengatasi kekurangan ini telah diusahakan dengan jalan membuka jurusan Tadris pada Fakultas Tarbiyah di sebahagian IAIN. Walaupun telah dibuka jurusan Tadris tersebut namun kebutuhan akan tenaga pengajar ini masih terasa. Dari segi kualitas diharapkan sekali madrasah SKB Tiga Menteri memiliki tenaga pendidik yang berkualitas. Sebab beban-beban yang diemban oleh madrasah SKB Tiga Menteri jauh lebih berat dari beban tugas yang diemban oleh sekolah umum. Karena dari satu sisi madrasah ini diharapkan pengetahuan umumnya sama dengan sekolah umum di samping memiliki pengetahuan agama dan bahasa Arab.

Berdasarkan kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984 dapat dilihat bahwa program studi dibagi kepada dua program, yaitu program A dan program B. Program A meliputi A1, A2, A3, A4 dan A5.

A1 adalah program ilmu-ilmu agama, A2 Fisika, A3 ilmu-ilmu Biologi, A4 ilmu-ilmu sosial, sedangkan A5 adalah pengetahuan budaya. Berdasarkan pembagian jurusan ini, dapat dipahami bahwa ada dua program studi yang amat membutuhkan laboratorium, pertama program studi ilmu-ilmu fisika dan kedua program studi ilmu-ilmu biologi. Disamping itu juga pengembangan pengetahuan bahasa amat penting di lembaga pendidikan ini, maka laboratorium bahasa juga merupakan hal yang amat penting. Untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai diperlukan dana yang memadai pula. Bila kita melihat masalah dana ini, pada umumnya madrasah-madrasah kita memiliki dana yang terbatas, sehingga dengan demikian sarana yang dimiliki masih terbatas pula.

#### **b. Waktu/Jam Pelajaran**

Seperti yang telah dimaklumi bahwa madrasah SKB Tiga Menteri ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum bahkan pada tingkat aliyah dibuka program studi ilmu-ilmu fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan budaya. Berdasarkan yang demikian itu maka sudah barang tentu dibutuhkan waktu belajar yang mestinya lebih banyak dari sekolah umum, oleh karena seorang tamatan madrasah SKB Tiga Menteri memiliki bobot pengetahuan umum yang sederajat dengan sekolah umum, di samping pengetahuan agama dan bahasa Arab. Untuk mencapai target yang sedemikian itu sudah logis kalau madrasah SKB Tiga Menteri memiliki jam belajar yang lebih dari sekolah umum.

Untuk mencapai maksud tersebut program yang ideal adalah menempatkan siswa dalam satu asrama yang menyatu dengan sekolah. Dengan melaksanakan program asrama ini, para siswa dapat dikondisikan dalam suasana belajar sepanjang hari, mulai dari selesai shalat Subuh sampai selesai shalat 'isya pada malam hari. Apabila belum memungkinkan bagi madrasah-madrasah kita, untuk membuka program asrama, maka penambahan waktu belajar pada sore atau malam hari adalah suatu hal yang tidak mungkin ditawarkan. Penambahan waktu ini diharapkan agar tercapai kualitas tamatan madrasah seperti yang diharapkan. Penambahan waktu belajar ini ditekankan kepada pendalaman program studi masing-masing.

### **c. Dana**

Tanpa dapat diingkari bahwa dana adalah kunci penggerak dari berbagai program, dan kemacetan dana akan berakibat pula kemacetan program, demikian juga halnya dengan program pendidikan. Seperti yang telah diungkapkan terdahulu bahwa madrasah-madrasah baik swasta maupun negeri pada umumnya masih kekurangan dana. Untuk menanggulangi kekurangan dana ini dapat diupayakan antara lain dengan membentuk kerjasama antara orang tua murid dan guru yang lebih mantap dan terprogram.

### **d. Organisasi**

Organisasi formal yang mengelola madrasah adalah Departemen Agama. Sebaiknya untuk meningkatkan mutu madrasah dibentuk badan kerjasama antara Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan Nasional. Dari Departemen Pendidikan Nasional diharapkan banyak memberi bantuan dalam bidang tenaga pengajar dan lain sebagainya.

## **5. Madrasah Pada Undang-undang No 2 Tahun 1989**

Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional, adalah seperangkat aturan-aturan atau ketentuan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang ini terdiri dari XX bab dan 59 pasal. Berisikan ketentuan umum, dasar fungsi dan tujuan, hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan, jalur dan jenis pendidikan, jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum, hari belajar dan libur sekolah, bahasa pengantar, penilaian, peran serta masyarakat, badan pertimbangan pendidikan nasional, pengolahan, pengawasan, ketentuan lain, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Di dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 12, 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan-peraturan tentang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berkenaan dengan itu lahirlah :



1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Peraturan Pemerintah yang terkait dengan madrasah adalah PP No. 28 dan No. 29 Tahun 1990. Di dalam PP Nomor 28 Tahun 1990 disebutkan pada bab III pasal 4 ayat (3) menjelaskan, bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah (MA).

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 040/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum. Dan untuk penyelenggaraan madrasah dilimpahkan kepada Menteri Agama. Berdasarkan pelimpahan tersebut maka Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Madrasah Aliyah. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993.

Di dalam Keputusan tersebut dijelaskan bahwa Madrasah Aliyah (MA) adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 membagi pendidikan menengah itu kepada Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Menengah Keagamaan, Pendidikan Menengah Kedinasan, dan Pendidikan Menengah Luar Biasa (PP No. 29 Bab I, pasal 1).

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan jenis-jenis pendidikan menengah tersebut dan yang terkait dengan pembahasan ini adalah pendidikan menengah umum, yang didefinisikan dengan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dimaklumi bahwa Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 370 Tahun 1993, adalah dikelompokkan kepada pendidikan menengah umum maka

kurikulumnya mestilah sejalan dengan hakekatnya sebagai pendidikan menengah umum. Selain dari itu karena hanya sekolah menengah yang berciri khas agama maka di dalam kurikulumnya juga tergambar ciri khas tersebut. Dengan demikian misi Madrasah Aliyah (MA) tersebut ada dua. Pertama perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa serta ciri-ciri keislamannya.

Penjelasan tersebut akan mencoba memaparkan kurikulum Madrasah Aliyah (MA). Dasar penyusunan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) adalah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum.

Dalam bab I pasal 1 butir 6 disebutkan Madrasah Aliyah (MA) adalah sekolah menengah umum (SMU) yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Selanjutnya dalam bab IX pasal 20 menegaskan pelaksanaan ketentuan tentang kurikulum Madrasah Aliyah (MA) ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berkenaan dengan itu maka Menteri Agama RI menetapkan Surat Keputusan No. 373 tanggal 22 Desember 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah.

Berdasarkan PP No. 29 Bab I, pasal 1 yang membagi pendidikan menengah itu kepada beberapa jenis, salah satu diantaranya adalah Pendidikan Menengah Keagamaan. Dalam rangka menyahuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 374 tanggal 22 Desember 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

Madrasah Aliyah Keagamaan ini diwujudkan untuk penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan (PP No. 29 Tahun 1990, bab I pasal 1 ayat 6).

Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan dan teknologi serta kesenian.

## **6. Madrasah Pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003**

Fungsi, peranan dan status madrasah secara substansial pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 ini tidak berbeda dengan madrasah pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989. Hanya saja dilihat dari yuridisnya, madrasah pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 lebih kuat dan kokoh, karena penyebutan nomenklatur madrasah masuk dalam batang tubuh Undang-Undang, berbeda halnya dengan Undang-Undang No 2 tahun 1989, peristilahan madrasah hanya diatur pada Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri. Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dijelaskan pada Peraturan pemerintah No 28 tahun 1990. Sedangkan perakatan Madrasah Aliyah disebutkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 489/U/1992. Perkatan madrasah pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 dapat ditemukan pada pasal 17 dan 18.

Pasal 17: Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 18 : Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

## **7. Masa Depan Madrasah di Indonesia**

Salah satu pertanyaan yang timbul di dalam membicarakan madrasah adalah: Bagaimana masa depan madrasah di Indonesia ? Apakah akan mengalami masa depan yang cerah sehingga dijadikan alternatif model pendidikan masa datang di Indonesia, atau malah sebaliknya.

Pertanyaan ini logis diajukan mengingat :

- a. Dari segi jumlah madrasah jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan sekolah umum



- b. Dari segi minat untuk memasuki madrasah jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sekolah umum
- c. Kualitas kebanyakan lulusan madrasah belum betul-betul seimbang dengan lulusan sekolah umum.

Berangkat dari hal tersebut, mungkinkah eksistensi madrasah dapat dipertahankan ? Ataukah madrasah tetap akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua, pinggiran (marginal) ?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini sudah pada tempatnya, pertama sekali kita lihat dahulu kekuatan dan kelemahan madrasah. Permasalahan yang mendasar dan esensial dari madrasah telah diatur dalam SKB Tiga Menteri Tahun 1975. Di antara kekuatan yang strategis yang dimiliki oleh madrasah saat sekarang ini yang belum pernah dimiliki oleh madrasah-madrasah sebelumnya, telah tercantum pada Bab II pasal 2. Inti pokok dari Bab II itu adalah mensejajarkan ijazah madrasah dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.

Makna derajat di sini mengandung arti bahwa tamatan madrasah memiliki hak dan status yang sama dengan tamatan sekolah umum. Implikasi dari persamaan itu dilihat dari hak untuk melanjutkan studi maupun hak untuk memperoleh pekerjaan.

Dengan dilaksanakannya SKB Tiga Menteri ini berarti :

- a. Eksisten madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat
- b. Pengetahuan umum pada madrasah-madrasah lebih meningkat
- c. Fasilitas fisik dan peralatan perlu disempurnakan
- d. Adanya civil effect terhadap ijazah madrasah.

Oleh karena permasalahan filosofis dan strategis telah diatur sedemikian rupa dalam SKB Tiga Menteri, maka yang tinggal sekarang adalah permasalahan yang bersifat teknis. Salah satu permasalahan yang bersifat teknis adalah bagaimana meningkatkan kualitas madrasah sehingga betul-betul setaraf dengan sekolah umum yang diasuh oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan yang diharapkan, maka madrasah mestilah dapat mengatasi berbagai problema yang tengah

dihadapinya, yakni tenaga pengajar, peralatan, waktu, dana dan organisasi pengelola. Problema-problema ini kita sebutkan dengan problema intern.

Madrasah setelah diberlakukannya undang-undang sistem pendidikan nasional, di samping problema intern, problema eksternpun tidak kalah pentingnya untuk diatasi guna mengukuhkan eksistensi madrasah. Problema ekstern adalah hubungan dan kaitan madrasah dengan lembaga-lembaga lain di luar Departemen Agama. Dalam hal ini terkait erat dengan kebijakan otonomi daerah. Madrasah harus memiliki sikap dan keijakan yang jelas tentang duduknya madrasah dalam otonomi daerah.

Selain dari itu dilihat dari sudut memasyarakatkan madrasah pada kalangan umat Islam yang tergolong menengah ke atas sangat diperlukan. Apalagi kebijakan di masa yang akan datang adanya manajemen berbasis sekolah dan adanya komite sekolah. Alangkah akan terbantunya madrasah bila di madrasah turut serta yang menjadi komitenya adalah masyarakat Muslim yang memiliki status ekonomi tingkat menengah ke atas.

Bagi umat Islam, kehadiran lembaga pendidikan madrasah sangat dibutuhkan. Oleh karena model madrasah inilah yang mendekati untuk tercapainya hakekat tujuan pendidikan Islam yang disimpulkan dalam:

- a. Tercapainya tujuan *hablum minallah* (hubungan dengan Allah)
- b. Tercapainya tujuan *hablum minannas* (hubungan dengan manusia)
- c. Tercapainya tujuan *hablum minal'alam* (hubungan dengan alam)

Ketiga komponen tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan. Anak didik dalam konsep pendidikan Islam mesti memperoleh ketiga-ketiganya. Bila diuraikan lebih rinci dalam bentuk subjek mata pelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Komponen *hablum minallah* adalah subjek-subjek yang mengungkapkan pengenalan kepada Allah melalui ayat-ayat tanziliyah. Penjabarannya dalam bentuk mata pelajaran meliputi: tauhid, fiqh, tafsir, hadits, akhlak/tasawuf. Kesemuanya ini kita sebut dengan ilmu-ilmu diniyah.

Adapun komponen *hablum minannas*, adalah subjek-subjek mata pelajaran yang menguraikan manusia, yang meliputi antara lain: sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sedangkan komponen *hablum minal'alam* adalah subjek-subjek mata pelajaran yang menguraikan



hubungan manusia dengan alam, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain : fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu kealaman (*naturalscience*).

Berangkat dari hal yang diungkapkan ini, jelaslah bahwa pendidikan Islam itu adalah kesatuan antara tiga komponen, yakni: komponen *hablum minallah* yang dituangkan dalam ilmu-ilmu diniyah. Komponen *hablum minannas* yang dituangkan dalam ilmu-ilmu sosial, dan komponen *hablum minal'alam* yang dituangkan dalam ilmu-ilmu kealaman. Dengan demikian tentu saja pendidikan yang hanya berpusat pada salah satu atau sebagian saja dari ketiga komponen itu bukanlah pendidikan Islam yang utuh.

Melihat konsep yang sesungguhnya dari pendidikan Islam tersebut seperti tertera di atas, timbul pertanyaan lembaga pendidikan mana yang ada sekarang ini yang melaksanakan ketiga komponen itu secara utuh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya ditelusuri secara global tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada.

Ada tiga lembaga pendidikan Islam yang dijumpai saat sekarang, yakni pesantren, sekolah dan madrasah. Pesantren adalah lembaga Islam yang sudah tua sekali usianya. Lembaga ini sudah ada sejak permulaan penyebaran Islam di Indonesia. Di lembaga ini inti pokok materi yang dipelajari adalah ilmu-ilmu diniyah. Kalaupun ada ilmu sosial dan kealaman itu hanya sebagai pelengkap atau pendamping saja. Di lembaga ini santri dibimbing untuk menguasai segala macam ilmu-ilmu diniyah dari sumber aslinya yang berbahasa Arab atau lebih populer dengan istilah kitab kuning. Berdasarkan tujuan kurikuler yang hendak dicapai di pesantren ini maka para santri sudah barang tentu kurang atau tidak menguasai sama sekali ilmu-ilmu sosial/humaniora dan ilmu-ilmu kealaman.

Lembaga kedua adalah sekolah, sesuai dengan perjalanan yang ditempuh oleh sekolah, jelas kelihatan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bukan diniyah. Jadi yang dikembangkan di sekolah adalah ilmu-ilmu sosial/humaniora dan ilmu-ilmu kealaman. Kendatipun di lembaga ini diajarkan juga mata pelajaran agama namun belum mencapai sasaran yang diharapkan. Pendidikan agama di sekolah baru menitik beratkan lapangan kognitif. Sedangkan yang diharapkan disamping kognitif adalah pembinaan afektif.



Lembaga berikutnya adalah madrasah. Pada mulanya lembaga ini juga menitik beratkan pelajaran diniyah, tetapi setelah dikeluarkan SKB Tiga Menteri diperkuat pula dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1989, yang memposisikan madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, maka diupayakan untuk memperseimbangkan antara ilmu-ilmu diniyah dengan ilmu-ilmu sosial/humaniora dan ilmu-ilmu kealaman. Memang diakui secara jujur bahwa hasil perpaduan yang utuh dari ketiga komponen tersebut belum dapat diraih oleh madrasah, disebabkan masih bergumul problema intern dan eksternnya, akan tetapi sebagai langkah awal kearah penyatuan ketiga komponen tersebut telah dimulai lewat madrasah.

Dari ketiga lembaga yang ditampilkan ini, maka madrasahlah yang lebih mendekati untuk terwujudnya hakekat tujuan pendidikan Islam. Hanya saja diperlukan pembinaan yang serius guna meningkatkan kualitas madrasah. Pembinaan-pembinaan yang perlu dilakukan sekarang terhadap madrasah adalah dari segi peningkatan mutu dan kehadirannya dapat diterima masyarakat dari segala lapisan. Bila kedua hal ini dapat diatasi maka madrasah merupakan alternatif yang terbaik sebagai model pendidikan Islam masa kini.

Dari segi kurikulum formal, madrasah mencoba menampilkan perpaduan di antara tiga komponen di atas, perpaduan itu akan mencoba agar tamatan madrasah lahir sebagai manusia Muslim yang utuh. Dari segi kurikulum informalnya adalah madrasah di suasana dengan suasana Islami

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi oleh pengetahuan ilmu-ilmu diniyah dan sikap hidup beragama yang kuat akan melahirkan kepribadian yang pecah yang pada gilirannya akan menghantarkan manusia kepada kehancuran. Disamping itu pula kemajuan zaman menuntut manusia untuk lebih banyak berpartisipasi dan mendalami ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial humaniora, supaya manusia lebih banyak berpartisipasi dalam kemajuan zaman tersebut.

Lembaga pendidikan yang hanya menitik beratkan kepada pengkajian science dan teknologi, jelas tidak akan menghantarkan kepada keselamatan manusia, keluhan-keluhan ini telah sering kita dengar di dunia sekarang ini. Disamping itu pula lembaga-lembaga pendidikan yang mengabaikan

atau tidak ambil bagian dalam *science* dan teknologi tersebut akan ketinggalan dan akan menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai lembaga marginal.

Alternatif yang terbaik adalah menampilkan lembaga pendidikan yang memadukan antara *science* dan teknologi serta agama. Atau dengan istilah lain tersatu padunya antara ilmu-ilmu duniyah, sosial/humaniora dan ilmu-ilmu kealaman. Lembaga yang seperti itu secara utuh belum ada tetapi yang agak mendekati model tersebut adalah madrasah.

Bertolak dari kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh madrasah, disamping tidak menutup mata atau kekurangan-kekurangannya yang masih perlu diperbaiki, penulis melihat bahwa madrasah adalah merupakan model alternatif pendidikan Islam yang mendekati untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam.

Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang memiliki beberapa kelebihan, bila dibanding dengan lembaga pendidikan lainnya (pesantren dan sekolah), dan pastilah diramalkan bahwa masa depan madrasah akan cerah. Untuk terwujudnya kecerahan tersebut mestilah diupayakan menanggulangi problem intern dan ekstern yang telah penulis kemukakan terdahulu.

Kehadiran madrasah hingga saat sekarang ini belum seluruhnya dihayati oleh umat Islam. Kemampuan serta keberadaannya masih belum diyakini sepenuhnya. Hal ini terlihat dengan jelas masih segelincir kecil umat Islam yang memilih madrasah.

Hal ini tidak sepenuhnya disalahkan kepada umat Islam. Tentu saja di dalam mencari dan memasuki pendidikan seseorang akan mencari lembaga pendidikan yang berkualitas dan mempunyai masa depan yang cerah. Secara jujur kita kemukakan bahwa sampai saat sekarang ini madrasah belum bisa memperlihatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas.

Faktor apa sebetulnya yang dominan menyebabkan madrasah belum bisa memperlihatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas? Menurut hemat penulis hal ini adalah permasalahan teknis. Karena bersifat teknis maka pemecahannya tidak sesukar yang bersifat filosofis dan strategis. Permasalahan teknis itu telah penulis uraikan dalam dua hal, yaitu masalah yang bersifat intern dan ekstern. Permasalahan teknis ini akan bisa dipecahkan dan diatasi apabila ditangani dengan serius dan penuh tanggung jawab.

## **8. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian terdahulu dapat diambil berbagai kesimpulan:

- a. Pembaharuan pendidikan adalah sesuatu yang wajar dan bahkan mesti terjadi, sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- b. Pendidikan memegang peranan yang penting guna meningkatkan status seseorang, maupun kelompok. Agar umat Islam Indonesia tidak termarginalkan, maka semestinyalah umat Islam memperhatikan masalah yang berkenaan dengan pendidikan secara sungguh-sungguh.
- c. Dunia pendidikan Islam di Indonesia, telah mengalami dinamikanya, sejak permulaan abad ke 20 telah terjadi pembaharuan pendidikan dengan munculnya sistem madrasah.
- d. Pada mulanya titik tekan madrasah terletak pada mata pelajaran diniyah (agama), tetapi setelah diberlakukan SKB Tiga Menteri maka diupayakan menseimbangkan antara mata pelajaran, diniyah dengan mata pelajaran ilmu-ilmu sosial/humaniora dan ilmu-ilmu kealaman, dan selanjutnya setelah dikeluarkan undang-undang sistem pendidikan nasional (UU No. 2 Tahun 1990) dan dengan PP No. 28 dan 29 serta masing-masing Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat, maka keberadaan madrasah semakin menyatu dengan sekolah, sehingga madrasah disebut dengan sekolah yang berciri khas agama Islam. Kurikulum dan program studinya sama antara sekolah dan madrasah.
- e. Pendidikan model madrasah adalah lebih memungkinkan untuk tercapainya hakekat tujuan pendidikan Islam, asalkan problema teknis yang bersifat intern dan ekstern dapat diatasi.
- f. Problema yang bersifat intern meliputi tenaga pengajar, sarana/fasilitas, waktu, dana dan organisasi. Sedangkan problema ekstern adalah hubungan madrasah dengan lembaga-lembaga lain di luar Kementerian Agama, terutama kedudukannya di era otonomi daerah.
- g. Apabila madrasah dapat mengatasi kemelut yang dihadapinya itu, maka sudah barang tentu masa depan madrasah akan cerah dan dapat dijadikan sebagai model alternatif pendidikan Islam di Indonesia.



## **D. MERUMUSKAN PENGERTIAN SEKOLAH YANG BERCIRI KHAS ISLAM**

### **1. Pengantar**

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, pada bab III pasal 4 ayat 3 dan 4 mengemukakan sebagai berikut :

(Ayat 3) Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah.

(Ayat 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh Menteri, sedangkan ayat 3 diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Menteri Agama.

Selanjutnya untuk merealisasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 maka masing-masing Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 0489/U/1992 menjelaskan bahwa Madrasah Aliyah adalah sekolah umum (SMU) yang berciri khas agama Islam. Menteri Agama juga lewat Surat Keputusan Nomor 370 Tahun 1993 juga mempertegas tentang keberadaan Madrasah Aliyah (MA) sebagai Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam.

Sejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 1989 dilengkapi dengan seperangkat peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan, telah dapat dipahami bahwa pemerintah bermaksud pelaksanaan pendidikan di Indonesia berada dibawah satu sistem pendidikan nasional.

Madrasah yang sejak awal tumbuhnya dikenal sebagai sekolah yang mengajarkan mata pelajaran agama Islam semata-mata, selanjutnya berkembang dengan memasukkan sejumlah mata pelajaran umum. Persentase mata pelajaran umum di madrasah antara satu madrasah dengan madrasah yang lainnya tidak sama. Ada yang berbanding 30:70, 40:60, 50:50, 60:40 dan 70:30. Persentase 70:30 bermakna 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama, dilaksanakan sesuai dengan SKB Tiga Menteri Tahun 1975. Dan setelah direalisasi UUSPN (UU No. 2 Tahun 1989) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 serta Surat Keputusan masing-masing Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dinyatakan bahwa madrasah itu adalah sekolah yang

berciri khas agama Islam. Dengan demikian kurikulum madrasah sama persis dengan kurikulum sekolah, kecuali ditambah mata pelajaran agama yang merupakan ciri keislamannya.

Menurut SKB Tiga Menteri itu jenjang pendidikan terdiri dari :

- Madrasah Ibtidaiyah sederajat dengan Sekolah Dasar
- Madrasah Tsanawiyah sederajat dengan SLTP
- Madrasah Aliyah sederajat dengan SMU

Setelah dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar dapat dipahami bahwa kehadiran Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah tetap diakui keberadaannya secara yuridis formal. Oleh karena kedua jenis madrasah ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dasar, maka materi pelajaran yang diberikan tetap memuat materi-materi pelajaran yang terdapat pada Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, hanya saja diberi ciri khas agama Islam.

Begitu juga PP Nomor 29 Tahun 1990 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 dan Surat Keputusan Menteri Agama No. 370 Tahun 1993 memperjelas bahwa Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam.

Oleh karena ada perkataan sekolah yang berciri khas agama Islam, maka sudah pada tempatnya perkataan ini perlu diberi penjelasan yang tegas sehingga pelaksanaannya ada patron yang tegas pula.

## **2. Sekolah yang Berciri Khas Agama Islam**

Dalam PP Nomor 28 Bab III pasal 4 ayat 3 dan 4 belum merinci tentang sekolah yang berciri khas agama Islam, yang maksudnya adalah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah begitu juga Departemen Agama belum merincinya. Berkenaan dengan itu, penulis mencoba untuk mengemukakan pendapat tentang sekolah yang berciri khas agama Islam, yaitu :

### **a. Komposisi Mata Pelajaran**

Komposisi mata pelajaran mencakup ilmu-ilmu agama Islam, yang meliputi aqidah, syari'ah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, qur'an,

hadits. Beberapa mata pelajaran yang dituliskan di atas adalah merupakan bidang studi ilmu-ilmu keislaman yang telah banyak diungkap oleh para ahli pendidikan Islam, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa mata pelajaran tersebut merupakan inti pelajaran yang berciri agama Islam. Sejalan dengan pandangan tersebut maka sekolah yang berciri khas agama Islam, mestilah memuat mata pelajaran yang disebutkan di atas. Konferensi dunia tentang pendidikan Islam telah membagi ilmu pengetahuan itu dua macam, pertama *perennial knowledge* (ilmu-ilmu abadi), dan kedua *acquired knowledge* (ilmu-ilmu perolehan). Ilmu-ilmu yang tergolong kelompok pertama adalah Al-Qur'an, meliputi bacaan, hafalan, tafsir, sunnah, sejarah hidup Rasulullah, tauhid, ushul fiqh, dan bahasa Arab. Hasan Langgulung menjelaskan, bahwa ilmu agama itu terdiri dari ilmu tafsir qiraat, tajwid, dabt, musthalah hadits, fiqh, ushul fiqh, ilmu kalam, tasawuf. Abdul Fatah Jalal menegaskan pula, bahwa sumber ilmu itu ada dua yaitu sumber manusia. Sumber ini diperoleh oleh manusia lewat upaya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Berikutnya sumber Ilahi, yaitu ilmu yang bersumber dari Allah SWT, yaitu ilmu syariat, maupun ilmu addin yang dipelajari manusia lewat wahyu.

Bertolak dari pendapat di atas maka dapat diformulasikan bahwa ilmu-ilmu yang berciri khas keislaman itu meliputi Al-Qur'an, hadits, aqidah, syariah, sejarah Islam dan bahasa Arab. Jika demikian maka kelompok-kelompok ilmu tersebut tetap perlu diberikan di madrasah ibtidaiah, tsanawiyah dan aliyah.

Selain dari itu diberikan nuansa Islam kepada mata pelajaran umum, dan memperkenalkan prinsip-prinsip ilmu-ilmu kealaman, sosial, humaniora kedalam ayat-ayat Qur'an dan Hadits.

## **b. Suasana Keislaman**

Suasana keislaman itu yang terpenting diantaranya tata cara berpakaian, khusus bagi puteri tetap memakai pakaian Muslimah baik siswa begitu juga guru wanita. Suasana pergaulan tetap melambangkan norma-norma keislaman. Suasana religius terlihat dalam menggunakan salam, memulai pelajaran dan mengakhirinya, ada mushalla atau masjid yang difungsikan pada saat waktu shalat tiba. Peringatan hari-hari besar keislaman di samping bersifat serimonial juga program kegiatan yang bersifat edukatif. Pengembangan kesenian yang bermafaskan keislaman perlu mendapat perhatian. Ringkasnya



kegiatan-kegiatan yang diluar kurikulum formal, sangat perlu diprogramkan suasana islami, dan inilah yang dimaksudkan dengan pembentukan iklim. Dengan program seperti ini akan terlihat ciri khas keislaman pada lembaga pendidikan madrasah.

### **c. Pendidik dan Peserta Didik Beragama Islam**

Ciri berikutnya adalah pendidik dan peserta didik di lembaga Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah itu seluruhnya beragama Islam. Oleh karena madrasah pada awal berdirinya dikhususkan untuk mendidik anak-anak Muslim dalam bidang agama Islam, maka dengan demikian sejak awal berdirinya lembaga ini telah terkenal sebagai wadah untuk mempelajari mata pelajaran agama Islam, sekaligus pula dapat dipahami bahwa peserta didik dan pendidik di madrasah seluruhnya beragama Islam.

Apakah ketentuan yang seperti ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, UU Nomor 2 Tahun 1989 pada Bab III pasal 7 yang menetapkan: Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Mengenai ini dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional :

Pendidikan nasional memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, karena itu dalam peserta didik tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali dalam satu kesatuan yang memiliki kekhususan. Misalnya satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan atas dasar kewanitaan dibenarkan untuk menerima hanya wanita sebagai peserta didik dan tidak menerima pria. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tertentu dibenarkan untuk menerima hanya penganut agama yang bersangkutan.

Berkenaan dengan Diktum Bab III pasal 7 UU Sistem Pendidikan Nasional serta uraian penjelasannya dapat dimaklumi bahwa secara

umum tidak membedakan penerimaan siswa atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi terkecuali sekolah yang memiliki kekhususan. Dalam hal ini madrasah adalah sekolah yang memiliki kekhususan yakni kekhususan agama Islam. Oleh sebab itu maka siswa yang diterima di madrasah adalah yang beragama Islam. Hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III pasal 7.

#### **d. Dikelola oleh Kementerian Agama**

Ciri keempat ini merupakan ciri pelengkap dari tiga ciri sebelumnya. Ciri ini mengenal lembaga pengelola. Karena sekolah yang bercirikan keislaman sangat tepat apabila dikelola oleh badan yang mengelola masalah-masalah yang berkenaan dengan pembinaan umat Islam. Badan yang mengelola madrasah ini adalah Departemen Agama yang dilaksanakan oleh Dirjen Binbaga Islam. Dalam PP Nomor 28 Tahun 1990 juga disebutkan, bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama, seperti yang ditulis pada bab III, pasal 4 ayat 3 dan 4 yang telah disebutkan pada kata pengantar terdahulu. Di era otonomi daerah seandainya kebijakan terhadap madrasah di bawah pemerintahan daerah, maka keberadaan Departemen Agama tetap diperlukan.

### **3. Kesimpulan**

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan baik dari segi isi (materi pelajaran) maupun dari segi metode. Dari segi isi telah terjadi perubahan-perubahan dari semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, berkembang dengan masuknya mata pelajaran umum bahkan dalam kurikulum SKB Tiga Menteri mata pelajaran umum lebih dominan. Selanjutnya dalam perkembangan berikutnya lahirlah PP Nomor 28 Tahun 1990, didalam PP itu disebutkan pula keberadaan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah, kedua lembaga tersebut dikelompokkan pada kelompok sekolah yang bercirikan Islam, sekaligus dikelompokkan pula sebagai bentuk satuan pendidikan dasar enam tahun untuk ibtidaiyah dan satuan pendidikan dasar tiga tahun untuk tsanawiyah.

Salah satu diktum yang menarik yang perlu diberikan batasan yang jelas adalah tentang makna sekolah yang bercirikan Islam. Untuk itu

penulis mengembangkan pendapat yang dapat disimpulkan sekolah yang bercirikan khas agama Islam itu adalah :

1. Komponen mata pelajaran yang diberikan materi-materi ilmu yang berciri khas keislaman.
2. Di lembaga tersebut terprogram suasana keislaman
3. Pendidik dan peserta didiknya semuanya beragama Islam
4. Dikelola oleh Departemen Agama atau setidaknya Departemen agama tetap miliki otoritas terhadap madrasah kendatipun madrasah berada di bawah Pemerintahan Daerah.

## **E. MADRASAH : LEMBAGA PENDIDIKAN YANG PERLU DIBERDAYAKAN**

### **1. Pendahuluan**

Menarik sekali *Roundtable Discussion* Masa Depan Madrasah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2004 digagas oleh *Indonesian Institute for Civil Society* di Jakarta yang selanjutnya di publikasikan oleh Republika pada tanggal 28 dan 30 Juli 2004. Beberapa pakar pendidikan baik teoritis maupun praktis hadir dalam pertemuan tersebut.

Diskusi ini kelihatannya ingin membedah apa problem yang dihadapi madrasah saat ini dan apa pula solusi yang ditawarkan. Duduk bersama untuk membahas berbagai isu yang terkait dengan madrasah sangatlah diharapkan agar berbagai problem yang dihadapi madrasah dapat dicari jalan keluarnya.

### **2. Mengenal Madrasah**

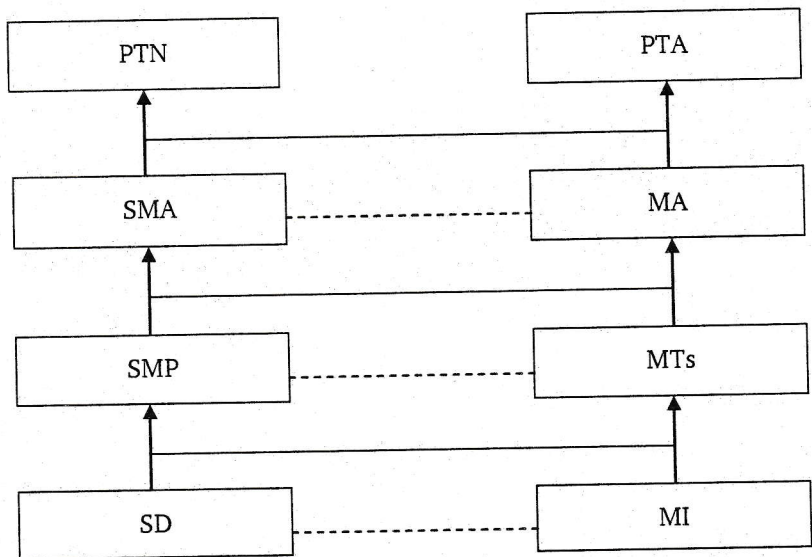
Mungkin masih banyak di antara masyarakat Indonesia yang belum mengenal madrasah dalam arti yang sesungguhnya. Sebagian mungkin beranggapan madrasah adalah sekolah agama (tempat mengaji) di mana peserta didik hanya menerima pengetahuan agama Islam saja, dan tidak ada kaitannya dengan pengetahuan umum yang akan mengantarkan peserta didik kepada pengembangan intelektual yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Anggapan tersebut tentu tidak salah karena madrasah memang pernah memerankan dirinya seperti anggapan



tersebut. Namun sejak hampir tiga puluh tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 1975 pada saat diberlakukannya SKB Tiga Menteri terhadap madrasah, maka madrasah telah mengalami dinamika.

Jika dilihat dari latar belakang sejarah perkembangan madrasah sejak Indonesia merdeka dapat dipetakan perjalanannya pada tiga fase. Pada setiap fase memiliki ciri khasnya tersendiri. *Fase pertama*, tahun 1945 – 1974, fase di mana madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang lebih terkonsentrasi kepada pembelajaran ilmu agama (tafsir, hadist, fiqh, tauhid, sejarah Islam, bahasa Arab, dan sedikit pengetahuan umum sebagai pendampingnya). Dampaknya mobilitas vertikal abiturien madrasah mengalami hambatan, lulusan madrasah tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi di luar Perguruan Tinggi Agama Islam.

*Fase kedua* 1976 – 1989, adalah dimana madrasah memasuki era baru yang disebut dengan madrasah SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri – ditanda tangani bersama pada tahun 1975. Hakikat dari madrasah SKB adalah kesetaraan madrasah dengan sekolah, ijazah madrasah punya *civil effect* yang sama dengan sekolah, seperti bagan di bawah ini:



Keterangan :

————— = Garis Melanjutkan

- - - - - = Garis Pindah

Berdasarkan SKB Tiga Menteri ini murid-murid madrasah bisa pindah ke sekolah umum yang sederajat pada kelas yang sama dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya, demikian pula murid-murid sekolah.

*Fase ketiga*, 1990 sampai sekarang, madrasah setelah diberlakukannya UU No.2 Tahun 1989 (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional). Undang-Undang No.2 Tahun 1989 ini diaplikasikan dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP). PP yang terkait dengan Pendidikan Dasar dan Menengah, adalah PP No.28, 29 Tahun 1990.

Pada PP No. 28 Tahun 1990 Bab III Pasal (3) menjelaskan : “Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah”. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Aliyah diatur oleh SK Menteri Pendidikan dan kebudayaan.

Sejak diberlakukannya UU No.2 Tahun 1989 dan PP No.28 Tahun 1990, maka madrasah telah menyatakan dirinya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Makna yang terkandung di sini adalah madrasah = sekolah yang diberi ciri khas keislaman. Jika madrasah sama dengan sekolah maka madrasah mesti mengadopsi semua mata pelajaran (kurikulum) sekolah, kemudian ditambah dengan ciri khas agama Islam yang diwujudkan dalam bentuk pelajaran agama Islam yang diajarkan di madrasah (aqidah-akhlak, fiqh, qur'an – hadist, SKI, dan bahasa Arab) serta suasana keislaman.

Selanjutnya setelah diberlakukannya UU No.20 Tahun 2003 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, maka posisi madrasah seperti yang tertera pada peraturan sebelumnya semakin kuat. Hal ini dapat dilihat pada Bab VI Pasal (17), tentang pendidikan dasar yang mencantumkan secara eksplisit MI (Madrasah Ibtidaiyah), setara dengan SD (Sekolah Dasar) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah), setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Selanjutnya pada pasal (18) tentang Pendidikan Menengah, mencantumkan pula secara eksplisit MA (Madrasah Aliyah) setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan), setara dengan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

### 3. Permasalahan Madrasah

Dari *Roundtable Discussion* Masa Depan Madrasah, kelihatan yang paling banyak disorot tentang problematika yang dihadapi madrasah

adalah guru, baik kuantitas maupun kualitas. Di antara kualitas guru yang dikemukakan adalah ketidak sesuaian kualitas guru dengan mata pelajaran yang diajarkannya atau banyak guru yang mengajarkan mata pelajaran tidak sesuai dengan keahliannya.

Sebetulnya apabila diperhatikan ada tiga problem besar yang dihadapi madrasah. *Pertama* guru, seperti yang telah banyak dibahas. *Kedua*, pendanaan, yang belum adanya kesetaraan antara sekolah dengan madrasah, barangkali data yang disajikan di bawah dapat diketahui gambarannya.

Tabel 1

Gambaran Pengeluaran Sekolah per Siswa dan Sumber-sumber Pembiayaan Sekolah dan Madrasah (di luar buku) 1995 – 1996

Jenis Sekolah	Pengeluaran Per Siswa		Rata-Rata Pengeluaran Per Siswa	Sumber Pembiayaan	
	Min	Maks		Pemerintah	Kel. dll
SD Negeri	99	342	197	182	15
MI Negeri	63	225	140	135	5
SD Swasta	72	290	176	121	55
MI Swasta	31	163	93	64	29
SLTP Negeri	160	462	300	245	55
MTs Negeri	99	358	230	209	21
SLTP Swasta	113	512	273	57	216
MTs Swasta	53	185	104	6	98
SMA Negeri	255	615	421	332	88
MA Negeri	127	572	328	270	58
SMA Swasta	115	587	342	79	263
MA Swasta	61	380	169	4	165

Sumber : Anggaran Pendidikan di Indonesia, 1998



Tabel 2

Perbandingan Rata-Rata Jumlah Guru Negeri per 100 Siswa di Sekolah dan Madrasah Berdasarkan tingkat Pengeluaran

Jenis Sekolah	Rata-Rata Jumlah Guru Negeri per 100 Siswa		
	Rendah	Menengah	Tinggi
SD Negeri	3,38	4,56	7,22
MI Negeri	1,58	3,75	6,54
SD Swasta	1,58	2,75	3,51
MI Swasta	0,05	0,70	1,60
SLTP Negeri	3,41	4,56	6,27
MTs Negeri	2,60	3,00	4,62
SLTP Swasta	0,40	0,90	0,80
MTs Swasta	< 0,05	< 0,05	< 0,05
SMA Negeri	4,93	5,98	7,47
MA Negeri	2,46	4,26	6,57
SMA Swasta	0,26	0,75	1,28
MA Swasta	< 0,05	< 0,05	< 0,05

Sumber : Anggaran Pendidikan di Indonesia, 1998

*Ketiga*, adalah struktural dan kultural. Secara struktural madrasah, sesuai dengan PP No.28/1990 berada di bawah naungan Departemen Agama dan perlakuan terhadap madrasah selama ini masih belum betul-betul setara dengan perlakuan terhadap sekolah dari segi alokasi pendanaan tabel 1 di atas bisa dijadikan rujukan. Dampak dari kekurangan dana tersebut berpengaruh besar terhadap kesempurnaan proses pembelajaran disebabkan kekurangan fasilitas.

Dipandang dari segi kultural, bahwa dukungan masyarakat terhadap madrasah masih lemah. Madrasah adalah tempat sekolah bagi kebanyakan kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga hal ini sangat banyak pengaruhnya untuk memacu pertumbuhan madrasah.

#### **4. Tawaran Solusi**

Untuk meningkatkan mutu madrasah, problema utama yang harus diselesaikan adalah dua hal. Pertama guru, baik kuantitas maupun kualitas, untuk ini diupayakan agar perhatian terhadap pengangkatan guru di masa-masa yang akan datang agar madrasah lebih mendapat perhatian khusus serta senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu guru madrasah lewat berbagai pelatihan, penataran dan lain sebagainya. Selanjutnya pendanaan, untuk itu diupayakan program pendanaan yang berkeselimbangan, setara antara madrasah dengan sekolah.

#### **5. Kesimpulan**

Melihat kepada kenyataan tentang problema yang dihadapi madrasah, maka tidak ada jalan lain kecuali kiranya seluruh komponen bangsa yang bergerak di bidang pendidikan ikut serta memberdayakan madrasah baik pemerintah begitu juga masyarakat.

Memberdayakan madrasah, berarti memberdayakan pendidikan di Indonesia, sebab madrasah adalah bagian dari lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Para siswa yang dididik di madrasah adalah bagian dari anak bangsa yang tidak ada bedanya dengan anak-anak bangsa lainnya.

## BAB V

# PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

### A. PENGEMBANGAN PROGRAM KURIKULUM FAKULTAS TARBIYAH (SUATU RESPONSTERHADAP OTONOMI DAERAH)

#### 1. Pendahuluan

Tujuan institusional Fakultas Tarbiyah adalah pembentukan tenaga kependidikan agama. Sebagai tenaga kependidikan agama ada beberapa kompetensi yang harus dimilikinya. Kompetensi yang harus dimilikinya itu mestinya relevan dengan program kurikulum yang telah ditetapkan bagi Fakultas Tarbiyah.

Dalam teori pengembangan kurikulum memang tidak bisa dilepaskan keterkaitan erat antara tujuan pendidikan dengan kurikulum. Tujuan pendidikan terkait erat dengan filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan muncul dari filsafat suatu bangsa. Tidak bisa dimungkiri bahwa kurikulum adalah jalan raya yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, karena itu amat dituntut relevansi antara tujuan yang ingin dicapai dengan kurikulum yang diprogramkan.

Kurikulum sifatnya adalah dinamis, tidak statis, menyahuti tuntutan perkembangan zaman serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang baik itu ada relevansi antara kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan masyarakat, istilah populer yang dipakai adalah *link and match*.

Era otonomi daerah adalah era dimana daerah mempunyai kewenangan luas mengatur daerahnya, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan serta evaluasi dalam hal penetapan anggaran dana berdasarkan asset yang dimiliki daerah. Bidang-bidang yang menjadi cakupan daerah menjadi tanggung jawab daerah, antara lain misalnya pendidikan.



Dalam dunia pendidikan era otonomisasi ini akan merubah beberapa paradigma selama ini antara lain sentralisasi, akan mengarah kepada desentralisasi, serta prinsip demokratisasi, keterbukaan, akuntabilitas yang arahnya akan munculnya kebijakan arus bawah. Otonomi daerah itu bukanlah sekedar memindahkan Jakarta ke ibu kota Propinsi atau Kabupaten dan Kota. Tetapi yang diambil adalah makna yang terdapat dari ruh otonomi itu yang intinya adalah demokratisasi, keadilan serta memberdayakan daerah.

Fakultas Tarbiyah sebagai LPTKA, dalam pengembangan kurikulumnya banyak terpaut dengan kebutuhan daerah dalam bidang ketenagaan kependidikan agama. Karena itu kerjasama yang erat antara Fakultas Tarbiyah dengan Pemerintah Daerah adalah sesuatu yang mesti dilakukan.

## 2. Hakikat Pengembangan Kurikulum

Menurut etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang artinya tempat berpacu. Perkataan kurikulum yang berasal dari kegiatan olahraga itu mengandung arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai ke garis finish. Seterusnya perkataan kurikulum itu memasuki dunia pendidikan yang berkembang pengertiannya sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam pengertian lama kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Tetapi dalam pengertian baru kurikulum tidak lagi terpasung dengan pengertian sempit itu tetapi telah dikembangkan kepada pengertian yang lebih luas, misalnya pendapat Saylor dan Alexander, yang menjelaskan kurikulum adalah: *The school curriculum is the total effort of the school to bring about desired outcome's in school and out-of-school situation. In short, the curriculum is the school's program for learner* (Saylor and Alexander, 1960:4). Defenisi ini jelas bukan hanya sekedar mata pelajaran, akan tetapi kurikulum itu adalah segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain dari itu kurikulum juga tidak hanya mengenai situasi di dalam sekolah tetapi juga di luar sekolah.

Selain dari itu ada juga yang mendefenisikan yang lebih luas yakni yang diungkapkan oleh Alice Miel dalam bukunya *Changing the Curriculum a social process*: bahwa kurikulum juga meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan dan sikap orang yang meladeni

dan diladeni sekolah, yaitu anak didik, masyarakat, para pendidik dan personalia (Alice Miel, 1946:10). Didalam aplikasinya kurikulum dapat dibagi kepada intra kurikuler, ko kurikuler, ekstra kurikuler dan hidden kurikuler.

Hasan Langgulang menyebutkan kurikulum adalah merupakan sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial olahraga dan kesenian yang disediakan oleh sekolah untuk anak didiknya baik didalam maupun di luar sekolah dengan maksud menolongnya agar dapat berkembang secara menyeluruh dalam semua aspeknya dan mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan (Langgulang, 1994:44). Dari berbagai definisi yang diungkapkan di atas disimpulkan bahwa kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja yang diajarkan di sekolah, akan tetapi lebih luas dari itu.

Kurikulum sifatnya dinamis, dan terbuka untuk perubahan-perubahan dan pembaharuan dan pengembangan. Apa sebabnya ? Karena masyarakat itu sendiri dinamis, maka sudah barang tentu akan terbuka perubahan-perubahan. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya perubahan kurikulum. Pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akibat kemajuan tersebut banyak hal-hal baru yang ditemukan di dunia ilmu pengetahuan, maka tidak boleh tidak sekolah harus menyahuti hal tersebut. Kedua, perubahan masyarakat (*social change*), banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat ini menuntut pula terhadap perubahan kebutuhan dan orientasi masyarakat, dan ini berpengaruh pula bagi timbulnya perubahan kurikulum. Karena kurikulum itu sifatnya dinamis berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman, maka perubahan dan pengembangan kurikulum bukanlah sesuatu yang tabu.

Fakultas Tarbiyah sebagai LPTKA, tidak lepas dari alur pikir yang dikemukakan terdahulu, yakni tidak menutup adanya perubahan-perubahan didalam pengembangan kurikulumnya agar tetap dapat menyahuti perkembangan zaman.

Dalam menyusun kurikulum Noeng Muhajir menjelaskan ada tiga model dalam penyusunan kurikulum. Pertama, pendekatan akademik, yakni bertolak dari sistematisasi disiplin ilmu. Program pendidikan yang menggunakan pendekatan ini mendasarkan keahliannya pada kebulatan sub disiplin ilmu itu sendiri, spesialisasi membekali subjek didik, pada



kebulatan sub disiplin tertentu. Terapan keahlian atau spesialisasi disiplin atau sub disiplin. Pembekalan dalam disiplin ilmu tersebut diharapkan mampu memunculkan ilmuan dengan teori baru, tesis baru, produk teknologi baru dan penemuan (*invention*) baru lainnya.

Kedua, pendekatan teknologik, menyusun program kurikulumnya berdasarkan tugas kerja yang nanti diembannya. Materi yang diajarkan dipilih sesuai dengan tugasnya nanti, tugas kerja yang akan dipakai sebagai acuan menyusun program tersebut, bisa jadi tugas kerja dokter, tugas guru, atau tugas-tugas lainnya. Hakikatnya tugas tersebut mesti dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar kerja masing-masing. Penyusunan kurikulum ini didasari atas tugas yang jelas. Tugas seorang dokter jelas, tugas seorang guru jelas, tugas seorang pilot pesawat jelas.

Model ketiga adalah model pendekatan humanistik, yaitu ingin menjangkau cita-cita ideal tertentu dalam hal ini dipentingkan adalah perkembangan wawasan dan tampilan prilaku sesuai dengan cita-cita ideal yang hendak dicapai. Pendidikan agama termasuk dalam kelompok ini (Muhajir, 1987:176-181).

### **3. Hakikat Otonomi Daerah**

Arus demokratisasi demikian derasnya dalam kehidupan manusia saat sekarang ini, inti dan hakikat dari arus demokratisasi itu adalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan arus bawah. Indonesia setelah era reformasi merealisasi kehendak sebagian besar masyarakat Indonesia untuk adanya otonomi daerah. Berkenaan dengan itu lahirlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 22 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diiringi pula dengan PP No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Diuraikan juga bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Di sini sangat dituntut adanya



upaya untuk memberdayakan masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas peran masyarakat.

Kewenangan otonomi daerah itu dimaknai dengan keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Daerah otonom mencakup kewenangan yang luas, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan serta evaluasi dalam penetapan anggaran dana berdasarkan asset yang dimiliki daerah. Bidang-bidang yang menjadi cakupan daerah, menjadi tanggung jawab daerah, antara lain misalnya pendidikan.

Gelombang demokratisasi dalam bidang pendidikan menuntut adanya desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dampak dari sentralisasi pendidikan telah muncul di Indonesia uniforomitas. Uniforomitas ini mematikan inisiatif dan kreatifisme serta inovasi perseorangan maupun kelompok. Di tengah-tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia sangat perlu dihargai adanya sisi perbedaan yang tidak mesti seragam, karena keberadaan masyarakat majemuk itu menuntut untuk adanya berbagai perbedaan-perbedaan yang merangsang untuk tumbuhnya kreatifitas dan inovasi.

Di sisi lain lewat otonomi daerah ini dituntut tumbuhnya masyarakat yang bertanggung jawab, salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat itu adalah pembinaan sumber daya manusia.

#### **4. Fakultas Tarbiyah Sebagai LPTK A**

Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK A, telah memprogramkan program kependidikan yang dibagi kepada Tiga Pembidangan kurikulum nasional. *Pertama*, Mata Kuliah Umum (MKU) yang diberlakukan bagi semua jurusan yang terdiri dari : Pancasila, Kewiraan, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, IAD, ISD dan IBD, Metodologi Studi Islam.

*Kedua*, Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) terdiri dari: Ushul Fiqh, Ulumul Hadits, Ulumul Qur'an, Ilmu Kalam, Ilmu Tasawuf, Filsafat Umum, Metode Penelitian, Fiqh, Hadits, Tafsir, Sejarah Peradaban Islam.

Ketiga, Mata Kuliah Keahlian (MKK), mata kuliah ini disesuaikan dengan jurusan (Jurusan PAI, PBA dan KI), misalnya pada Jurusan PAI diprogramkan Ilmu Pendidikan, Ilmu Jiwa Belajar, Perencanaan Sistem PAI, Pengembangan Kurikulum PAI, Materi Pendidikan Agama Islam, Statistik, Pengembangan Sistem Evaluasi PAI, Praktek Mengajar.

Arah pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang akan datang Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 232/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Dalam Surat Keputusan itu ditetapkan bahwa struktur kurikulum pendidikan tinggi dijabarkan dalam bentuk MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), MKK (Mata Kuliah Keilmuan Keterampilan), MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), MPB (Mata Kuliah Prilaku Berkarya), MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat).

Kelompok MPK yang terdiri dari mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan inti. Kelompok MKK yang terdiri dari mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan. Kelompok MKB yang terdiri dari mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dan berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan prilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi. MBB terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global.

Arah dari penyusunan kurikulum adalah bertolak dari penjabaran kompetensi dalam isi kurikulum menurut pilar proses pembelajaran MPK, MKK, MKB, MPB, MBB.

Berkenaan dengan ini maka pengembangan kurikulum Fakultas Tarbiyah, berdasarkan kepada kompetensi yang ingin dicapai. Pertama kompetensi tenaga kependidikan agama merupakan langkah awal dalam pengembangan kurikulum Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK.



## 5. Kaitan Antara Fakultas Tarbiyah Sebagai LPTK A dan Otonomi Daerah

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa hakikat dari otonomi daerah itu adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara luas dan bertanggung jawab. Berkenaan dengan itu diperlukan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Dikaitkan dengan pendidikan keagamaan khususnya, maka di era otonomi ini dapat diprogramkan untuk dididikan kepada anak didik prihal apa yang sesuai dengan daerah dimaksud baik dari segi kulturnya, budayanya, agama serta lingkungan alam.

Arah kemajuan dunia yang akan datang adalah arah di mana masyarakat manusia semakin dipengaruhi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak itu berpengaruh kepada tata pikir, sikap kejiwaan dan prilaku. Karena itu arah pendidikan agama masa depan adalah bagaimana peserta didik diberi bekal untuk dapat menjawab berbagai hal yang tumbuh di masyarakat sebagai dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi.

Diantara dampak-dampak negatif tersebut dapat diperkirakan, dari segi tata pikir, bukan suatu yang mustahil pikiran manusia yang theosentris akan bergeser kepada antroposentris. Dari berpusat kepada Ketuhanan-banyak hal yang dikaitkan manusia dengan Tuhan – bergeser kepada terpusat kepada manusia. Manusia – karena kemampuan Ipteknya – menjadi seolah-olah amat menentukan di mata manusia dimasa yang akan datang. Gejala seperti ini yang dialami oleh manusia ketika mereka memulai memasuki zaman renaissance, afklarung dan zaman modern. Karena itu bukan sesuatu yang mustahil bahwa arus dan frekuwensinya di zaman post modernis ini akan semakin deras.

Dari segi kejiwaan, disebabkan kehidupan yang semakin keras, persaingan dan kompetitif yang semakin dominan, dan akan semakin kentarnya dalam kehidupan sosial berlakunya *the survival of the fittest*, maka gejala ketentrman jiwa akan semakin terancam, manusia akan dihindangi oleh berbagai gejala-gejala jiwa yang kurang sehat.

Dipandang dari sudut moralitas, disebabkan berbagai pengaruh dari alat komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, maka manusia akan dihindangi oleh budaya global, diantara budaya global yang semakin menggejala adalah hedonisme, kecenderungan manusia untuk mencari



kenikmatan dan kelezatan hidup. Penyimpangan sex akan semakin merebak, begitu juga penggunaan dan pemakaian obat-obat terlarang lainnya.

Jika beberapa indikasi yang dikemukakan di atas dijadikan dasar tolok ukur untuk mempredikasikan guru agama yang bagaimana yang akan dibutuhkan saat sekarang ini dan masa yang akan datang ini dalam era otonomi daerah ini ? maka jawabannya adalah guru-guru agama yang dapat memberikan solusi bagi berbagai persoalan dihadapi masyarakat khususnya generasi muda. Berkenaan dengan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita didalam pengembangan kurikulum Fakultas Tarbiyah sebagai lembaga LPTK A, yaitu :

*Pertama*, menetapkan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru agama. Kompetensi tersebut berinduk kepada empat kompetensi pokok, yaitu kompetensi keilmuan, kompetensi moral, kompetensi manajemen pendidikan dan kompetensi mengkomunikasikan keilmuan. Kompetensi keilmuan adalah berkenaan dengan penguasaan ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didik. Jurusan PAI, adalah penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, seperti aqidah, fiqih, qur'an-hadits. Sedangkan kompetensi keilmuan PBA, adalah pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabang-cabangnya. Dalam sebaran kurikulum nasional Fakultas Tarbiyah tahun 1998, pada Jurusan/Program Bahasa Arab sangat miskin penguasaan bahasa Arab, tertulis hanya dua mata pelajaran saja yang terkait langsung dengan bahasa arab yaitu PBA 505 Qawaid dan PBA 506 Sharaf. Kompetensi keilmuan KI diarahkan kepada kompetensi tenaga Kependidikan Islam, yang dapat dikonsentrasikan kepada manajemen pendidikan, bimbingan dan penyuluhan dan lain sebagainya.

Kompetensi moral, terkait erat dengan sikap perilaku pendidik yang menjadi sumber moral bagi anak didiknya. Di era semakin terpuruknya moral disebabkan berbagai faktor maka kehadiran orang yang dapat diandalkan moralnya amat diperlukan. Etika profesi pendidikan menjadi handalan untuk membina anak didik. Tentang hal ini Noeng Muhajir berkomentar "pendidik merupakan cermin dimana anak didik selalu berkaca. Seluruh tingkah laku pendidik selalu dalam pengamatan peserta didik". Selanjutnya beliau memberi penjelasan tambahan "seorang pengajar keterampilan bertukang perlu memiliki keterampilan yang tampilannya meyakinkan bagi subjek didiknya, tidak cukup hanya menguasai teori bertukang. Seorang pengajar piano harus terampil dalam berpiano,

seorang pengajar PMP haruslah orang yang memahami Pancasila dan sekaligus meyakini betul Pancasila itu suatu ideologi yang tangguh. Seorang pengajar pendidikan agama tidaklah hanya cukup karena yang bersangkutan memiliki pengetahuan agama itu secara luas melainkan juga ianya seorang yang meyakini kebenaran agama tersebut dan menjadi pemeluknya yang baik (Muhajir, 1987:8). Kompetensi manajemen pendidikan ditujukan lebih khusus kepada kemampuan seorang pendidik untuk memenej kelas.

Kompetensi komunikasi keilmuan, intinya adalah merupakan seorang guru untuk mentransferkan ilmunya kepada peserta didik, dalam hal ini terkait dengan metode mengajar, pengelolaan bahan ajar, pengelolaan kelas, pengelolaan interaksi belajar mengajar, psikologi pendidikan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan itu maka program kurikulum yang terkonsentrasi sesuai dengan jurusan dan tujuan institusionalnya adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. PAI konsentrasinya adalah ilmu-ilmu agama, PBA, konsentrasinya adalah pendidikan bahasa Arab, KI dikonsentrasikan kepada pilihan-pilihan yang telah ditetapkan seperti manajemen, bimbingan penyuluhan dan lain sebagainya.

Peranan otonomi daerah adalah diberikannya otonomi perguruan tinggi dalam memprogramkan kepentingan yang dianggap urgen perguruan tinggi tersebut, tidak lagi terkait erat secara kaku seperti yang telah dialami selama ini, paling tidak bobot kurikulum muatan lokalnya (institusional) semakin besar. Program studi pun dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan. Program studi yang dibutuhkan dibuka sedangkan program studi yang sudah jenuh dapat ditutup.

Dengan adanya kebebasan perguruan tinggi tersebut mengatur internnya maka hal ini akan dapat dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi, kota dan kabupaten. Apa saja yang paling dibutuhkan oleh pemerintah setempat, maka kebutuhan itu dapat disuplay oleh perguruan tinggi.

Ada beberapa bidang yang dapat disuplay oleh Fakultas Tarbiyah yang apabila kerjasama antara Fakultas Tarbiyah dengan Pemerintah Daerah dapat dilembagakan. *Pertama* pengadaan guru-guru agama mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pendidikan menengah.



*Kedua*, melaksanakan perkuliahan penyetaraan bagi guru-guru agama yang belum memiliki sertifikat D-II dan D-III. *Ketiga*, pengadaan guru-guru kelas di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. *Keempat*, pengadaan guru-guru Matematika, IPA, Bahasa Inggris pada madrasah dan sekolah. *Kelima*, pengadaan guru kelas pada Madrasah Diniyah Awaliyah, Wustho dan Ulya. *Keenam*, pengadaan guru-guru Bahasa Arab pada tingkat dasar dan menengah. *Ketujuh* pelaksanaan kuliah akta IV bagi guru-guru yang belum memiliki sertifikasi akta IV. *Kedelapan*, pengadaan tenaga-tenaga manajemen pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Kesembilan*, pengadaan tenaga-tenaga bimbingan dan penyuluhan. *Kesepuluh*, pengadaan tenaga pustakawan.

Untuk merealisasi berbagai peluang-peluang tersebut, maka ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan oleh Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan. *Pertama*, mengikat kerjasama dengan Pemerintah Daerah di seluruh daerah di Sumatera Utara. Adanya survey sehingga ditemukan data-data kependidikan keagamaan di daerah Sumatera Utara yang dengan itu akan dibuat peta kependidikan keagamaan di daerah ini. Atas dasar itu dapat diprediksikan berapa kebutuhan real tenaga kependidikan agama di daerah ini untuk lima tahun mendatang. *Kedua*, dengan diketahuinya kebutuhan real tenaga kependidikan agama di Sumatera Utara, maka akan dapat membuka program-program studi yang dibutuhkan.

Kaitan antara Fakultas Tarbiyah sebagai LPTKA dan Otonomi Daerah, dapat dilihat dari berbagai sisi, perlu adanya reorientasi kurikulum Fakultas Tarbiyah yang ada sekarang, sehingga output Fakultas Tarbiyah dapat memiliki empat kompetensi pokok yang dari keempat kompetensi pokok ini akan melahirkan berbagai kompetensi lainnya. Keempat kompetensi ini adalah, *pertama*, kompetensi keilmuan, *kedua*, kompetensi moral, memiliki komitmen moral yang tinggi, menjadi contoh teladan di lingkungannya. *Ketiga*, kompetensi komunikasi keilmuan, di sini seseorang dipersyaratkan untuk memiliki keterampilan menyampaikan ilmu. Dan, *keempat* kompetensi manajemen pendidikan. Undang-Undang No 14 Tahun 2005, telah menetapkan kompetensi guru itu adalah: Kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

Selain dari penataan kurikulum yang menjurus kepada terbentuknya kualifikasi tenaga pendidik yang kompeten, maka Fakultas Tarbiyah



juga perlu mempertimbangkan di era otonomi daerah ini untuk membuka berbagai program studi yang dibutuhkan daerah, seperti yang dikemukakan terdahulu.

## **6. Kesimpulan**

Pengembangan dan perubahan kurikulum adalah sesuatu yang lumrah dan alami disebabkan masyarakat itu sendiri mengalami perubahan. Masyarakat sebagai pemakai produk pendidikan tentu akan membutuhkan produk pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK A perlu melihat apakah kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibidang tenaga kependidikan agama telah dapat disahuti oleh Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan.

Berkenaan dengan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konsentrasi keilmuan setiap jurusan perlu lebih dimantapkan. PAI konsentrasinya adalah penguasaan ilmu-ilmu keagamaan. PBA penguasaan bahasa Arab dengan segala cabang-cabangnya. KI perlu diarahkan kepada penguasaan salah satu bidang dari yang konsentrasi yang dipilih.

Peluang Fakultas Tarbiyah pada era otonomi daerah ini adalah dari sisi terbukanya pengkajian yang lebih intensif tentang kebutuhan daerah dalam bidang pendidikan agama, berkenaan program studi apa, tenaga yang dibutuhkan, dan lain sebagainya, sekaligus memberdayakan daerah untuk merealisasinya. Karena itu kerjasama yang insentif antara Pemerintah Daerah dan Fakultas Tarbiyah adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa diabaikan.

## **B. PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI MASA DEPAN (PELUANG DAN TANTANGAN)**

### **1. Pendahuluan**

Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta pada bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Sejak saat itu telah terjadi dinamika dan perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia berawal dari lahirnya STI kemudian STI berubah menjadi UII, Fakultas Agama UII dinegerikan menjadi PTAIN, kemudian

muncul IAIN dan STAIN, dan terakhir lahirnya UIN. Selain dari itu muncul pula Pendidikan Tinggi Islam swasta baik yang berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi.

Kehadiran lembaga pendidikan tinggi tersebut adalah merupakan sahutan terhadap kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan *beragama di tanah air ini*. Masyarakat Indonesia yang religius meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama adalah mendudukan betapa urgennya kedudukan agama di Indonesia

Perjalanan lembaga ini yang sudah lebih dari setengah abad telah memberikan sumbangan yang amat bermakna bagi pembangunan bangsa dan negara. Produk-produknya telah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat yang tentunya merupakan aset bangsa yang amat berharga.

Dinamika perkembangan masyarakat bergulir terus tidak bisa dihempang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dahsyat bagi kehidupan manusia, baik cara pandang maupun gaya hidupnya. Perguruan Tinggi adalah lembaga yang terkait erat dengan masyarakat sebab *input* perguruan tinggi berasal dari masyarakat, dan *output* perguruan tinggi diserap oleh masyarakat, karena itulah perguruan tinggi mesti peka terhadap perkembangan masyarakat.

Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi di masa depan adalah bagaimana perguruan tinggi tersebut dapat menjawab berbagai perolema yang muncul di masyarakat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tentunya tidak terlepas lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam. Tantangan yang muncul di hadapan kita saat sekarang adalah tantangan globalisasi. Banyak dampak globalisasi yang muncul bila dikaitkan dengan perguruan tinggi. Antara lain tantangan persaingan global, tantangan relevansi pendidikan tinggi dengan kemajuan zaman, khusus buat perguruan tinggi agama tantangan tersebut dapat ditambahkan dengan tantangan kehidupan religius dan moral.

Bertolak dari tantangan-tantangan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi agama sehingga ianya survive dalam menghadapi tantangan tersebut

## 2. Tinjauan Historis

Pada zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1930 an telah muncul hasrat dan cita-cita umat Islam Indonesia untuk mendirikan Perguruan Tinggi. M. Natsir menulis dalam bukunya *Capita Selecta* mengemukakan tentang cita-cita Dr. Satiman untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam. Dr. Satiman mengemukakan pendapatnya itu dalam majalah Pedoman Masyarakat (PM) No 15. Dalam tulisan itu Dr. Satiman bercita-cita untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam di tiga tempat Jakarta, Solo dan Surabaya. Di Jakarta akan didirikan sekolah tinggi sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Muhammadiyah (AMS) yang bersifat *westerch* (kebaratan). Di Solo akan didirikan sekolah tinggi untuk muballigh. Di Surabaya diadakan sekolah tinggi yang akan menerima orang-orang pesantren. (Natsir, 1973 :90)

Mahmud Yunus juga mengemukakan bahwa di Padang Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdiri Perguruan Tinggi Islam yang dipelopori oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI). Menurut Mahmud Yunus inilah perguruan tinggi Islam pertama di Sumatera Barat bahkan di Indonesia, akan tetapi karena Jepang masuk ke Indonesia maka perguruan tinggi itu ditutup pada tahun 1941

Dalam Kongres ke II Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI) yang berlangsung tanggal 2-7 Mei 1939 juga salah satu agenda pembahasannya adalah tentang perguruan tinggi Islam. Realisasi hasil kongres tersebut didirikanlah di Solo Perguruan Tinggi Islam yang dimulai dari tingkat menengah dengan nama *Islamische Middelbare School* (IMS).

Hasrat umat Islam Indonesia untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam adalah sesuatu yang logis yang tentunya didorong oleh dua faktor petama faktor interen yakni dorongan karena telah berdirinya perguruan-perguruan tinggi umum, seperti Sekolah Tinggi Teknik di Bandung tahun 1920, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta tahun 1920 dan Sekolah Tinggi Kedokteran juga di Jakarta tahun 1927. Sedangkan faktor ekstren adalah pengaruh dari masuknya ide-ide pemaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Di beberapa negara telah berdiri universitas Islam seperti Al Azhar di Mesir, Aligarh di India dan lain sebagainya.

Menjelang Indonesia merdeka pada bulan April 1945 Majelis Syurah Muslimin Indonesia (Masyumi) membentuk panitia perencanaan Sekolah



Tinggi Islam yang diketuai oleh Muh. Hatta dan Sekrtarisya M. Natsir. Sekolah Tinggi ini dibuka secara resmi pada tanggal 8 Juli 1945 bertepatan dengan 27 Rajab 1364 H.

Disebabkan karena situasi dan kondisi negara Republik Indonesia pada waktu itu maka STI tersebut dipindahkan ke Yogyakarta, maka pada tanggal 10 april 1946 perkuliahan STI kembali dibuka di Yogyakarta. Pada bulan Nopember 1947 STI dikembangkan menjadi universitas dengan nama Universitas Islam Indonesia mengasuh empat fakultas yaitu agama, hukum, pendidikan dan ekonomi. Yang dibuka secara resmi pada tanggal 10 Maret 1948, bertepatan degan 27 Rajab 1367 H. Perkembangan berikutnya adalah Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian PTAIN digabung ADIA yang ada di Jakarta menjadi IAIN.

Setelah melalui fase-fase perkembangan Pendidikan Tinggi Islm di Indonesia hingga saat sekarang lembaga pendidiakn tersebut dapat dibagi kepada tiga macam:

- a. Lembaga Pendidikan Tinggi Islam negeri, yakni IAIN dan STAIN dan UIN.
- b. Lembaga pendidikan tingi Islam swasta yang berbentuk universitas, instut dan sekolah tinggi.

### **3. Peta Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia**

Sebelum kita bahas peta pendidikan tingi Islam, perlu dicari apa batasan pendidikan tinggi Islam..

- a. Pendidikan Tinggi Islam adalah sekolah tinggi atau institut yang konsentrasi pengembangan keilmuannya adalah ilmu-ilmu agama Islam.
- b. Universitas yang di dalam statutanya menyebutkan Universitas Islam serta menyelenggarakan perkuliahan ilmu-ilmu agama Islam.

Untuk menganalisa peta Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia perlu di kedepankan analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats). Oleh karena beragamnya perguruan tinggi Islam maka analisa SWOT yang dikemukakan yang bersifat umum yang dimiliki oleh hampir seluruh perguruan tinggi Islam

a. *Strengths*

- 1) Dukungan landasan filosofi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keputusan-keputusan politik yang memberi peluang untuk eksisnya lembaga Pendidikan Tinggi Islam
- 2) Dukungan umat Islam Indonesia yang menginginkan agar adanya lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia
- 3) Banyaknya lembaga pendidikan Islam tingkat dasar dan menengah yang menjadi *raw input* bagi pendidikan tinggi Islam, seperti: pesantren, sekolah dan madrasah.

b. *Weakness*

Pendanaan yang terbatas, sehingga berdampak kepada pengembangan yang terbatas pula

- 1) Sumber Daya Manusia pengelolanya baik tenaga administrasi maupun dosen masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 2) Terbatasnya sarana dan fasilitas.
- 3) Terbatasnya aset-aset yang dapat dikembangkan guna dijadikan sumber dana.

c. *Opportunities*

- 1) Harapan masyarakat terutama umat Islam sangat besar terhadap Pendidikan Tinggi Islam.
- 2) Semakin sadarnya masyarakat Indonesia terutama umat Islam tentang kedudukan perguruan tinggi dalam era global guna membentuk manusia unggul.
- 3) Semakin banyak lembaga Pendidikan Tinggi Islam berkualitas sehingga digandrungi masyarakat.

d. *Threats*

- 1) Masih banyak Pendidikan Tinggi Islam yang masih dalam proses pembinaan sehingga di khawatirkan kalah bersaing di era persaingan sekarang. Semakin sulitnya mendapat lowongan kerja bagi lulusan Pendidikan Tinggi Islam terutama alumni ilmu-ilmu keagamaan.
- 3) Belum berdirinya lembaga Pendidikan Menengah Keagamaan

Negeri yang merupakan lembaga pendidikan yang berdiri sendiri di samping Madrasah Aliyah. Lembaga inilah diharapkan untuk menjadi raw input bagi IAIN/STAIN serta sekolah tinggi dan institut yang mengkonsentrasikan keilmuannya pada ilmu-ilmu agama Islam.

- 4) Belum terumuskannya konsep Islamisasi ilmu, sehingga ciri keislaman pada universitas Islam belum kelihatan dengan jelas.

## **4. Perguruan Tinggi Islam Ke Depan**

### **a. Tantangan Globalisasi**

Dunia tanpa batas adalah kenyataan hidup kita saat sekarang, sekat-sekat batas antar negara telah menipis. Di dunia yang seperti ini maka arus keluar masuk, manusia, jasa, teknologi, barang ke suatu negara adalah sesuatu yang lumrah. Selain dari itu saling pengaruh budayapun tidak bisa dihindari. Pengaruh ini semua tidak bisa dihindari dan akan terjadi persaingan global. Pada alam kompetitif maka kualitas menjadi andalan. Karena kualitas menjadi andalan maka peranan perguruan tinggi semakin dominan untuk membentuk manusia berkualitas tersebut. Jadi dengan demikian perguruan tinggi masa depan itu adalah perguruan tinggi bermutu.

### **b. Tantangan Perkembangan Ilmu Teknologi**

Sejak keberadaan umat manusia di bumi secara evolusi dan gradual telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak penemuan-penemuan baru sebagai hasil dari upaya manusia mengembangkan ilmu tersebut. Di pandang dari sudut konsep keilmuan dalam Islam, ilmu itu terbagi kepada dua macam, sesuai dengan hasil konferensi pendidikan Islam sedunia, yaitu ilmu yang tergolong *perennial knowledge* dan ilmu yang tergolong *acquired knowledge*. Ilmu *perennial knowledge* adalah ilmu yang bersumber dari wahyu, sedangkan ilmu *acquired knowledge* adalah ilmu yang bersumber dari prolehan manusia. Dalam konsep Islam kedua jenis keilmuan itu menyatu dalam satu kesatuan.

Bertolak dari konsep tersebut, maka idaelnya suatu lembaga Pendidikan Tinggi Islam adalah mengembangkan kedua ilmu secara simultan,



tanpa memisahkannya apalagi mempertentangkannya. Untuk mengembangkan kedua ilmu tersebut secara seimbang, maka perlu dirancang pengembangan kedua ilmu tersebut.

Dalam rangka perancangan tersebut saat sekarang telah dipikirkan IAIN yang sekarang bercorak institut untuk dikembangkan kecorak universitas. Institut hanya mengembangkan satu kelompok ilmu tertentu, sedangkan universitas mengembangkan sejumlah disiplin ilmu tertentu. Sebelum sampai ke arah pengembangan ke arah universitas maka terlebih dahulu dikembangkan IAIN dengan mandat yang diperluas (*wider mandate*) setelah itu baru menuju UIN.

### c. Tantangan Moral

Salah satu dampak negatif dari kemajuan ilmu dan teknologi serta globalisasi, adalah munculnya semangat hedonism. Hedonism ini adalah pandangan bahwa tujuan kehidupan adalah usaha mencapai segala kenikmatan fisik setinggi mungkin, sesering mungkin dan dengan cara apapun tanpa memperhatikan konsekwensi yang mungkin dialami. (Team Penulis Rosda, 1995 : 135).

Falsafah hidup hedonisme ini telah berkembang pesat di berbagai negara ditandai dengan berbagai indikasi, yakni semakin meluaskan kebebasan seks dengan segala perangkatnya, narkoba dan segala jenisnya adalah merupakan indikasi betapa merosotnya moral. Berkenaan dengan itu maka pendidikan tinggi Islam mesti memiliki peranan yang sungguh sungguh untuk menjadi pionir dalam menegakkan moral, termasuk memperkokoh moral akademik.

## 5. Kesimpulan

Di ujung tulisan ini perlu disampaikan kesimpulan pokoknya bahwa perguruan tinggi Islam di masa yang akan datang sangat berperan dan turut serta menyumbangkan darma baktinya bagi pembangunan bangsa. Untuk lebih mengefektifkan peranannya di masa depan maka beberapa problema yang dikemukakan di atas mesti disahuti diberikan respon dan konsep-konsep guna menjawab beberapa tantangan tersebut, yakni tantangan globalisasi, ilmu pengetahuan dan moral..

## **C. IAIN DI ERA GLOBALISASI : PELUANG DAN TANTANGAN DARI SUDUT PENDIDIKAN ISLAM**

### **1. Pendahuluan**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta setelah menggabungkan dua lembaga pendidikan tinggi Islam di kala itu yaitu PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) yang berkedudukan di Yogyakarta dengan ADIA (Akademik Dinas Ilmu Agama) yang berkedudukan di Jakarta. Setelah diresmikan IAIN di Yogyakarta ini, secara bertahap berkembanglah IAIN di seluruh Indonesia, yang sampai dengan tahun 1973 berjumlah 14 buah. Dan sekarang telah berkembang sejumlah STAIN menjadi IAIN, dan sejumlah IAIN menjadi UIN. IAIN saat sekarang berjumlah : STAIN UIN 11.

Didirikannya lembaga ini dengan maksud untuk memberi pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam (Buku Tahunan: 1961:28).

Dalam perjalanan panjang IAIN di Indonesia ini telah banyak menghasilkan lulusannya baik pada strata satu, begitu juga pada strata dua dan tiga. Dengan demikian kiprah para alumninya telah tersebar luas di masyarakat, yang meliputi sebagai pendidik, da'i, birokrat, wiraswasta dan lain sebagainya.

Pada beberapa dekade terdahulu, sesuai dengan tuntutan pembangunan di tanah air, alumnus IAIN telah banyak terserap sebagai Pegawai Negeri yang kebanyakan bertugas di lingkungan Departemen Agama. Pada beberapa tahun belakangan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang *zero growth*, yang bermakna bahwa pengangkatan pegawai berdasarkan kepada penggantian yang meninggal dan pensiun. Keadaan yang seperti ini berdampak kepada banyaknya alumni IAIN yang tidak bisa diangkat sebagai pegawai negeri, sedangkan persiapan mereka untuk terjun ke dunia kerja tidak memungkinkan karena kemampuan yang terbatas. Kenyataan ini merupakan suatu problema yang amat serius untuk dipecahkan oleh pengambil kebijakan di lingkungan IAIN.

Selain dari persoalan pokok yang dialami oleh out put IAIN, dari sisi raw input IAIN pun pada saat sekarang ini tidak pula kecil masalah yang dihadapi. Sejak dikeluarkannya UUSPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) UU No. 2 Tahun 1989, dan diikuti dengan Peraturan



Pemerintah mengenai pendidikan antara lain PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990, yaitu mengenai pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang diikuti pula dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama yang mempertegas madrasah adalah sekolah yang bercirikan agama Islam. Madrasah sebagai sekolah yang bercirikan agama Islam bermakna bahwa kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah yang diberi tambahan tentang ilmu-ilmu agama sebagai salah satu cirinya.

Dengan demikian pada tingkat Ibtidaiyah kurikulumnya sama dengan Sekolah Dasar, tingkat Tsanawiyah sama dengan SLTP, sedangkan tingkat Madrasah Aliyah sama dengan SMU, yang pada masing-masing tingkat diberi bobot ilmu-ilmu agama yang lebih dari yang diberikan di sekolah.

Khusus pada tingkat pendidikan menengah, Madrasah Aliyah menurut peraturan yang berlaku dibagi kepada dua jenis. Pertama, jenis Madrasah Aliyah Umum dan jenis kedua Madrasah Aliyah Keagamaan. Madrasah Aliyah Umum programnya persis sama dengan SMU. Sedangkan Madrasah Aliyah Keagamaan, sampai sekarang seperti kurang mendapat perhatian, sehingga kurang berkembang.

Ditinjau dari sudut program Madrasah Aliyah Umum yang persis sama dengan SMU kecuali dalam beberapa hal tertentu yakni dalam bidang studi ilmu agama Islam yang tujuan institusionalnya bukanlah mempersiapkan calon-calon siswa yang akan melanjutkan ke IAIN. Berbarengan dengan itu maka image diri siswa aliyah umum sudah terbentuk bukan untuk dipersiapkan sebagai orang yang akan mendalami ilmu agama. Kedua problem utama ini - *raw input* dan *output* IAIN - yang sekaligus berdampak besar terhadap kelangsungan IAIN di masa depan.

Berkenaan dengan kenyataan yang dihadapi oleh IAIN saat sekarang ini tentu amat diperlukan reorientasi terhadap IAIN.

## **2. IAIN dan Tuntutan Perkembangan Zaman**

Sejak awal berdirinya IAIN - bahkan sejak PTAIN dan ADIA berdiri - telah mengkhususkan dirinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama, ciri khas tersebut tetap dipertahankan hingga sekarang, terlebih-lebih lagi setelah pemerintah



mengeluarkan PP No. 30 Tahun 1990 yang kemudian disempurnakan dengan PP60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, yang telah memberikan batasan secara eksplisit tentang pengertian institut. Pada bab III pasal 6 ayat 5, menjelaskan bahwa institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.

Jiwa dari didirikannya IAIN dapat dilihat pada konsedran Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 tentang pembentukan IAIN. Hal ini terkait erat untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat. Di dalam pemahaman tentang tenaga ahli agama Islam terkandung makna sosok alumni IAIN yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai problem kemasyarakatan yang berkaitan dengan masalah agama. Agar dapat melaksanakan fungsi dimaksud, IAIN mesti dibekali dengan ilmu-ilmu umum, yang sejalan dengan fakultas dan jurusan yang dipilihnya. Kesadaran tentang pentingnya ilmu-ilmu umum dipelajari pada lembaga pendidikan Islam telah tumbuh sejak awal abad ke-20 di Indonesia. Kehadiran ilmu-ilmu umum itu adalah sebagai upaya untuk mendampingi ilmu-ilmu agama yang dipelajarinya di fakultas/jurusan masing-masing dan untuk memperluas cakrawala berpikir mahasiswa.

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terasa sekali cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi. Banyak hal dari perubahan-perubahan itu yang menuntut untuk diberikan solusi menurut pandangan agama. Karena itu pendidikan dan pengajaran di IAIN dituntut untuk bersifat dinamik. Sejalan dengan itu tuntutan untuk pembaharuan kurikulum tidak dapat dielakkan.

Selain dari tuntutan perubahan kurikulum di IAIN juga lahir pemikiran pembaharuan yang bersifat fundamental untuk menjawab tuntutan kemajuan zaman. Misalnya tuntutan dunia kerja, perubahan IAIN menjadi universitas. Tuntutan dunia kerja berawal dari semakin kecilnya kesempatan alumni IAIN untuk dapat diangkat sebagai pegawai negeri disebabkan kebijakan pemerintah *zero growth*. Hal ini melahirkan pemikiran tentang pekerjaan apakah yang mungkin dilakukan oleh seorang alumni IAIN sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Untuk itu perlu dibuat semacam tabel yang berisikan sejumlah lapangan kerja yang mungkin untuk diisi oleh alumni IAIN. Sebetulnya jika diinfentaris banyak job kerja yang

dapat dilakukan oleh alumni IAIN, misalnya guru agama, dosen, konsultan hukum Islam, muballigh, konsultan psikologi kurangnya perhatian masyarakat terhadap berbagai profesi di atas, sehingga berdampak kepada *income* yang tidak memadai bagi yang melaksanakan profesi tersebut, sehingga profesi pegawai negeri tetap sebagai sesuatu yang diutamakan.

Atas dasar demikian timbul pemikiran agar kiranya alumni IAIN dibekali dengan berbagai keterampilan yang dapat dipergunakannya sebagai bekal hidup di masyarakat. Pemikiran untuk merubah IAIN menjadi universitas, tentu atas dasar pertimbangan perluasan ruang gerak IAIN.

### **3. Beberapa Problem yang Dihadapi IAIN dan Solusinya**

#### **a. Raw Input**

Setelah diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1989, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah yang meliputi PP No. 27 (pra sekolah), No. 28 (pendidikan dasar), No. 29 (pendidikan menengah), No. 30 (pendidikan tinggi), dan sejumlah peraturan pemerintah lainnya berkenaan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 (pendidikan menengah), menjelaskan pada bab III pasal 4, bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas :

- 1) Sekolah Menengah Umum
- 2) Sekolah Menengah Kejuruan
- 3) Sekolah Menengah Keagamaan
- 4) Sekolah Menengah Kedinasan
- 5) Sekolah Menengah Luar Biasa

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka lembaga-lembaga pendidikan yang ada menyesuaikan diri dengan peraturan dimaksud. Madrasah mulai dari tingkat dasar sampai menengah disebut dengan sekolah yang berciri khas Islam. Penanaman ini mengandung konsekuensi bahwa kurikulumnya sama dengan kurikulum sekolah dan ditambah dengan ciri khas Islam. Pada tingkat pendidikan menengah sebagai input yang masuk ke IAIN, dibagi kepada dua jenis sekolah yaitu Sekolah Menengah Umum yang disebut MAU (Madrasah Aliyah Umum) dan MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan).



Madrasah Aliyah program kurikulumnya sama persis dengan Sekolah Menengah Umum (SMU), yang membaginya kepada tiga program, yaitu IPA, IPS dan Bahasa. Disebabkan pembagian program yang seperti ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

- a. Siswa-siswa MA, bukan dipersiapkan secara khusus untuk memasuki IAIN, kendatipun tidak ditutup untuk itu.
- b. Kesiapan mental siswa MA juga bukan ditempa untuk memasuki IAIN, karena itulah pernah IAIN Sumatera Utara menjaring siswa berprestasi untuk masuk ke IAIN lewat jalur PSB (Penjaringan Siswa Berprestasi), ada beberapa MAN yang tergolong baik tidak mengirimkan siswa dengan alasan tidak ada siswa yang tergolong berprestasi berminat memasuki IAIN. Ini salah satu contoh peranan kesiapan mental di dalam melanjutkan studi siswa MAN.

Bertolak dari dua asumsi di atas, maka secara kuantitatif tidak mustahil seandainya mereka memasuki IAIN setelah lulus ujian masuk, permasalahan yang mendasar adalah ilmu-ilmu dasar keagamaan dan bahasa Arab yang mereka miliki lemah.

Madrasah Aliyah Keagamaan yang merupakan sumber utama IAIN, saat sekarang belum tertata dan terbina dengan baik, bahkan boleh jadi belum ada yang dapat dijadikan contoh yang dapat ditiru oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta.

Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, harus ada lembaga Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri. Selanjutnya bagi siswa MA/SMA yang diterima masuk ke IAIN harus diberikan perhatian khusus dalam hal ilmu-ilmu dasar keagamaan dan bahasa Arab.

## **b. Tenaga Pengajar**

Secara umum kuantitas tenaga pengajar IAIN belum mencapai rasio yang ideal antara perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa, kendatipun demikian belum sampai kepada terhambatnya proses belajar dan mengajar. Dari segi kualitas - bila kualitas - ditujukan kepada derajat pendidikan dosen, memang masih terdapat kesenjangan antara tenaga dosen yang berpendidikan S-1, S-2 dan S-3. Pada jenjang pendidikan S-1 mendominasi. Target yang ingin dicapai tentunya adalah terbalik,



dimana posisi kualifikasi S-1 akan semakin kecil, upaya ini telah dilakukan oleh Departemen Agama dengan membuka program Pascasarjana di berbagai IAIN.

### **c. Output**

Permasalahan yang paling sering muncul dari output IAIN adalah tentang lapangan kerja, dan persoalan ini tidak hanya dialami oleh alumni IAIN saja, tetapi hampir seluruh alumni perguruan tinggi. Timbul pertanyaan “apa yang dapat diperbuat untuk itu ?” tentu, seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa sikap mental dan menggantungkan harapan sebagai pegawai Negeri semata-mata harus dikikis. Jalan keluarnya yaitu, IAIN harus memberikan keterampilan berwiraswasta kepada mahasiswanya adalah suatu keharusan. Keterampilan itu dapat diberikan dalam bentuk intra kurikuler, ekstra kurikuler ataupun pelatihan-pelatihan yang terjadwal.

Selain dari itu pengembangan keprofesian yang dimiliki oleh alumni IAIN harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta dapat “dijual” di masyarakat - artinya masyarakat membutuhkannya.

### **d. Proses Belajar Mengajar**

Proses belajar mengajar ini tergantung kepada dua hal pokok, pertama, sarana dan fasilitas, kedua, keterampilan tenaga mengajar. Sampai sekarang masalah pertama pada umumnya baru terpenuhi hal-hal yang bersifat primer. Sedangkan masalah keterampilan tenaga pengajar masih perlu ditingkatkan. Selain dari keterampilan mengajar sikap mental adalah salah satu yang paling menentukan kesuksesan proses belajar mengajar.

### **e. Kurikulum**

Kurikulum dapat diibaratkan sebagai jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Dalam arti sempit kurikulum adalah mata pelajaran yang akan diajarkan. Sedangkan dalam arti luas adalah seluruh kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, karena itulah kurikulum itu dibagi kepada intra kurikuler, ko kurikuler, ekstra kurikuler dan hidden kurikuler.

Permasalahan yang dirasakan pada kurikulum IAIN ini, perlu perampingan, sehingga mata kuliah yang betul-betul terarah kepada pembentukan

indikator-indikator individu yang ingin diciptakan. Tumpang tindih pembahasan dalam bidang ilmu-ilmu agama sering muncul, dan dapat dijadikan dalam bentuk yang utuh. Selain dari itu perlu diprogram jenis keterampilan yang mungkin dapat diwujudkan.

#### **4. Peluang Untuk Pengembangan IAIN**

Beberapa tahun belakangan ini ada suara-suara yang ingin mengembangkan IAIN menjadi universitas. Rintisan ke arah itu telah mulai dilaksanakan. Perubahan itu sendiri tidaklah begitu sulit sepanjang pihak yang berwenang setuju. Tetapi yang amat penting dipertimbangkan adalah implikasi dari perubahan itu, antara lain tenaga pengajar, fasilitas dan sarana, dana, konsep keilmuan dan banyak lagi yang lain. Sementara menunggu pematangan untuk berdirinya Universitas Islam Negeri, perhatian pembinaan terhadap IAIN adalah suatu keharusan. Ada beberapa modal dasar yang dimiliki IAIN yang dijadikan landasan bagi pengembangannya.

##### **a. Landasan Filosofis dan Konstitusional.**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan landasan filosofi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 UUD 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan beragama. Sebagai bangsa yang berketuhanan dan beragama, maka paham yang bertentangan dengan nilai religius tidak dibenarkan tumbuh di Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedudukan agama pada posisi terhormat. Selain dari itu semua produk pemikiran dan tindakan yang lahir dari bangsa Indonesia adalah berdasar atas semangat beragama. Implikasi dari landasan filosofi dan konstitusional ini akan berdampak terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

##### **b. Sosiologis**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Kehidupan sosial kemasyarakatan tidak bisa terlepas dari agama. Umat Islam yang jumlahnya sembilan puluh persen dari dua ratus juta penduduk Indonesia

senantiasa memerlukan pelayan kehidupan beragama dalam segala aspeknya baik yang berbentuk ibadah maupun kehidupan sosial keagamaan.

### **c. Edukatif**

Pendidikan agama telah berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia dilaksanakan di masjid, surau, meunasah, rangkang, dayah maupun pesantren. Di lembaga inilah didikan pendidikan agama. Sebahagian dari *out put* peserta didik di lembaga tersebut bisa mencapai kualitas ulama, kiyai, ataupun tuan guru. Mereka inilah yang berada pada barisan depan untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama bagi masyarakat Indonesia. Sesuai arus perkembangan zaman. Pendidikan agama saat sekarang ini telah berkembang dalam bentuk pendidikan formal dan non formal. Salah satu yang tergolong kedalam pendidikan formal ini adalah IAIN.

## **5. Persiapan Menghadapi Globalisasi Tinjauan Dari Sudut Pendidikan Islam**

Secara konsepsional pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniyah, menumbuhkan suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta. Dengan demikian pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu seutuhnya sekaligus pewarisan nilai-nilai Islam. (daulay, 1991 :xvi)

Lebih spesifik lagi tujuan pendidikan Islam itu tergambar pada rumusan Konferensi Pendidikan Islam Internasional yang pertama tahun 1977, yaitu :

*Education should aim at the balanced growth of the total personality of Man through Man's spirit, intellect, the rational self, feelings and bodily sense. Education should therefore cater for the growth of Man and all its aspects : spiritual, intellectual, imaginative, pshysical, scientific, linguistic both individually and collectivly and motivate all these aspects towards goodnees and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to*



*Allah on the level of individual, the community and humanity at large.*  
(first Conference on Muslim Education :4)

Secara lebih khusus lagi pendidikan Islam itu berupaya untuk membentuk khalifah Allah di bumi sekaligus sebagai 'abd Allah (sesuai tuntunan Al-Qur'an surah al Baqarah ayaat 30 dan surah Az Zariyat ayat 56). Pakar-pakar pendidikan Islam kontemporer pun seperti: Naquib Al Attas, Hasan Langgulung, Ali Ashraf, dan lain sebagainya, juga berpendapat yang intinya adalah menempatkan pendidikan Islam itu pada proporsi yang sesungguhnya, yang pada beberapa abad sebelumnya tidak demikian.

Reformasi pendidikan Islam telah dimulai pada penghujung abad 19 dan awal abad 20. Salah satu diantaranya yang paling mendasar adalah meletakkan kedudukan ilmu dalam pandangan Islam. Telah lama terjadi di dunia Islam konsep keilmuan melenceng dari posisi yang sebenarnya. Ilmu yang berkembang pada masa sebelum reformasi itu adalah ilmu-ilmu yang terfokus kepada hablum minallah saja, dan mengabaikan ilmu yang berkenaan dengan hablum minannas dan hablum minal'alam.

Konference Islam Internasional tentang pendidikan telah mencoba menata kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan semangat pembaharuan pendidikan Islam tersebut :

*Planning of education to be based on the classification of knowledge into two categories: (a) "Perennial" knowledge derived from the Qur'an and the Sunnah meaning all shari'ah-orientated knowledge relevant and related to them, and (b) "acquired knowledge" susceptible to quantitative growth and multiplication, limited variations and cross-cultural borrowing as long as consistency with shari'ah as the source of values is maintained.*  
(Second Conference on Muslim Education, p: 4)

Pembagian ilmu menurut pandangan Islam yang dibagi kepada dua bagian yaitu *perennial knowledge* dan *acquired knowledge* yang oleh konferensi internasional tentang pendidikan telah disusun mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Didalam penyusunan subjek-subjek tersebut telah dirancang seluruh ilmu-ilmu yang mesti dikuasai oleh setiap muslim. Aplikatifnya tentu tidak lepas dari tujuan institusional dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini tentu ada lembaga pendidikan yang penekanannya kepada pendalaman ilmu yang tergolong

*acquired knowledge* dan ada pula *perennial knowledge* yang masing-masingnya mesti pula menempatkan keseimbangan yang wajar sesuai dengan tujuan institusional masing-masing pula.

IAIN sejak berdirinya telah berupaya untuk merancang kedua jenis ilmu tersebut dalam program kurikulumnya secara seimbang dengan tetap mengedepankan tujuan institusionalnya yakni untuk menyiapkan tenaga dalam bidang ilmu agama. Penyusunan kurikulum yang tergolong ilmu *acquired knowledge* disesuaikan dengan fakultas dan jurusannya.

Di dalam menyahuti perkembangan era globalisasi yang mau tidak mau akan muncul, perlu mendapat perhatian dalam beberapa hal. *Pertama*, kurikulum, permasalahan yang muncul adalah kurikulum bagaimanakah yang adaptif buat dunia global tersebut. Ilmu-ilmu basic tetap ilmu *perennial knowledge*, tetapi bagaimana supaya out putnya bernuansa global. *Kedua*, kualitas, sudah dimaklumi bahwa era global tersebut adalah era kompetitif, pada era ini dikedepankan adalah keunggulan. Untuk meningkatkan kualitas tersebut tidak mungkin semata-mata diserahkan kepada IAIN saja dalam arti memadakan dan memanfaatkan fasilitas, sarana dan faktor-faktor pendidikan yang ada saja, tetapi diharapkan seluruh civitas akademika IAIN turut terlibat didalamnya, terlebih-lebih mahasiswanya. Mahasiswa di abad global tidak hanya menggantungkan pembinaan dirinya pada berlangsungnya proses belajar dan mengajar semata-mata. Fasilitas pembelajaran yang terbuka luas bagi mahasiswa di era global harus dimanfaatkan, dengan demikian proses belajar mengajar tersebut tidak hanya tergantung dan terfokus kepada intra kurikuler saja. Dalam hal ini lembaga formal (IAIN) akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Dalam kaitan ini program kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar IAIN memiliki kedudukan yang amat penting. Kualitas hasil pendidikan ditentukan oleh banyak faktor antara lain sarana dan fasilitas, tenaga pengajar, peserta didik, lingkungan yang kondusif. Kesemuanya ini mesti berorientasi global, bila tidak, sudah dapat dibayangkan tidak mungkin dapat menyahuti tuntutan global tersebut.

Masalah yang ketiga adalah kelembagaan. Pertanyaannya, masihkah relevan dimasa yang akan datang lembaga institut saja? Mengingat semakin bervariasinya minat dan tuntutan masyarakat pada era global tersebut. Boleh jadi tuntutan untuk merubah IAIN menjadi universitas dimasa yang akan datang kelihatannya semakin mendapat tempat. Merubah



IAIN menjadi universitas bukanlah mudah, banyak kendala intern dan ekstern yang muncul. Akan tetapi karena ianya merupakan tuntutan dan kebutuhan masa depan kesulitan tersebut harus dicarikan penyelesaiannya.

## 6. Kesimpulan

IAIN telah tumbuh dan berkembang sejak beberapa dasawarsa yang lalu, dan telah menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Hasilnya telah banyak alumninya yang berkiprah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Pelayanan kehidupan beragama, seperti da'i, guru agama, pegawai, pemikir, hakim agama dan lain sebagainya adalah merupakan profesi alumni IAIN.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka IAIN harus lebih membuka diri untuk menyahuti tuntutan masa depan. Dalam rangka untuk menyahuti perkembangan zaman ada tiga hal pokok yang harus menjadi perhatian, pertama masalah kurikulum yang senantiasa dievaluasi agar sesuai dengan kemajuan zaman, kedua kualitas, dan ketiga pembaharuan kelembagaan.

Idealnya, konsep Universitas Islam adalah mengembangkan berbagai ilmu baik yang tergolong *perennial knowledge* maupun *acquired knowledge*. Akan tetapi bukanlah sesuatu yang salah dalam konsep pendidikan Islam seandainya target ideal itu belum tercapai untuk membina suatu lembaga yang penekanannya kepada salah satu dari ilmu tersebut di atas sepanjang tidak mengabaikan salah satu jenis ilmu lainnya. IAIN - sebelum bisa menjadi sebuah universitas - penekanannya tetap kepada ilmu yang tergolong *perennial knowledge*, dengan tidak mengabaikan mata kuliah yang tergolong kepada ilmu *acquired knowledge* yang relevan dengan fakultas dan jurusan.

## D. KONVERSI IAIN MENJADI UIN

### 1. Pendahuluan

IAIN (Institut Agama Islam Negeri) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bentuk institut. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 1999 perguruan tinggi dalam bentuk institut didefinisikan pada Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi: Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok



disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis. Dalam penjelasan disebutkan program pendidikan yang diselenggarakan pada institut terkait atau sangat dekat berhubungan dengan program-program pendidikan yang lain.

Berkenaan dengan pendefinisian institut seperti yang disebutkan oleh PP No. 60 tahun 1999, maka ruang lingkup IAIN sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi terbatas pada pengembangan ilmu-ilmu keagamaan saja. Apabila ada keinginan untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu di luar ilmu-ilmu keagamaan yang diasuh di perguruan tinggi tersebut mesti berubah wujud menjadi universitas. Sebab universitas didefinisikan dalam PP 60 Pasal 6 ayat (6): universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Dipandang dari sudut konsep keilmuan dalam Islam, maka sesungguhnya ilmu dalam perspektif Islam itu tidak hanya terbatas kepada ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga termasuk ilmu-ilmu lainnya yang non agama (sains kealaman, sains sosial dan humaniora).

Menyadari bahwa peta keilmuan dalam Islam seperti yang disebutkan di atas, maka konsep perguruan tinggi yang tepat menurut pandangan Islam itu adalah konsep universitas. Dengan konsep seperti itu ilmu yang tergolong bersumber dari wahyu (*perennial knowledge*) dan ilmu yang bersumber dari upaya pencapaian manusia (*acquired knowledge*) adalah universitas. Berkenaan dengan itulah saat sekarang ini telah sepuluh Institut Agama Islam Negeri dan satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi universitas. Apa sebetulnya yang mendorong IAIN untuk berubah menjadi UIN ?

Beberapa Alasan Konversi IAIN ke UIN :

#### **a. Konsep Keilmuan dalam Pandangan Islam**

Konsep keilmuan dalam pandangan Islam itu adalah kesatuan (*integrated*) antara ilmu-ilmu yang tergolong *perennial knowledge* (ilmu-ilmu kewahyuan) dan *acquired knowledge* (ilmu yang bersumber dari upaya manusia).

Konferensi Internasional tentang pendidikan Islam telah menetapkan bahwa ilmu itu dibagi kepada dua bagian yaitu *perennial knowledge* yaitu

ilmu-ilmu yang bersumber dari kewahyuan, dan kedua *acquired knowledge* yaitu ilmu yang bersumber dari upaya manusia berdasarkan prosedur ilmiah yang ditempuh.

Ilmu yang tergolong *perennial knowledge* itu adalah : (1) Al Quran (meliputi: qira'ah, hafalan, tafsir, sunnah, sejarah hidup Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut mereka yang mencakup masa awal Islam, tauhid, usul fiqh/fiqh, bahasa Al Quran. (2) Mata pelajaran tambahan (metafisika Islam, perbandingan agama, peradaban Islam). Adapun ilmu-ilmu yang tergolong *acquired knowledge* adalah: (1) Sains imaginative; seni Islam, arsitektur, bahasa, sastra. (2) Sains intelektual; studi sosial, filsafat, pendidikan, ekonomi, politik, sejarah, peradaban, geografi, sosiologi, bahasa, antropolog. (3) Ilmu-ilmu kealaman; matematika, statistik, fisika, astronomi, ruang angkasa, dan lain-lain. (4) Sains terapan. (5) Ilmu-ilmu praktis; perdagangan, ilmu administrasi dan lain-lain.

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kedua jenis ilmu (*perennial knowledge* dan *acquired knowledge*) itu akan mengalami perkembangan dan dinamika. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa untuk mengetahui ke kelompok manakah suatu ilmu dimasukkan itu terkait dengan epistemologi ilmu tersebut. Apabila suatu disiplin ilmu epistemologinya bersumber dari wahyu (Quran dan Sunnah) dan dari situ dikembangkan interpretasi, maka ilmu itu digolongkan kepada kelompok ilmu *perennial knowledge*. Akan tetapi apabila sebuah ilmu dikembangkan lewat gabungan deduktif dan induktif, rasional dan empiris, yang selanjutnya diberi pula masukan nilai-nilai Islami (*Islamic values*) maka ilmu ini tergolong kepada *acquired knowledge*.

Kedua jenis ilmu ini sesungguhnya telah dikenal oleh umat Islam pada zaman klasik. Pada zaman kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam pada ketika itu, mereka kembangkanlah kedua ilmu dimaksud secara seimbang. Akan tetapi ketika zaman kemunduran (*dark age*) melanda umat Islam, ilmu yang dikembangkan hanya ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu saja dan mengabaikan ilmu lainnya, ketika itulah terjadinya dikhotomis ilmu.

Apabila perguruan tinggi Islam ingin menyatukan kedua ilmu itu tanpa adanya dikhotomis, maka jenis dan bentuk perguruan tinggi yang tepat untuk itu adalah jenis universitas. Model inilah sekarang yang menjadi



trend perguruan tinggi Islam di dunia, misalnya Universitas Islam Internasional di Kuala Lumpur dan berbagai Universitas Islam Internasional lainnya yang sejenis yang terdapat diberbagai negara. Universitas Al Azhar Kairo Mesir, Universitas Muslim Aligarh di India, dan sejumlah universitas Islam lainnya yang telah mengadopsi kedua jenis ilmu tersebut.

Bertolak dari kenyataan tersebut maka sudah pada waktunya perguruan tinggi Islam di Indonesia yang selama hampir setengah abad dalam bentuk institut secara bertahap berubah menjadi universitas, agar konsep keilmuan yang utuh, menyatu, dan terintegrasi dapat diwujudkan.

Konsep keilmuan yang utuh itu akan mengembangkan empat rumpun ilmu : ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora. Tiga rumpun ilmu terakhir ini adalah ilmu-ilmu yang sudah lama berkembang di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Sedangkan rumpun ilmu-ilmu agama adalah merupakan ciri khas universitas Islam.

Konsep keilmuan yang dikembangkan di UIN tidak hanya sampai pada tahap pencampuran saja antara ilmu-ilmu yang tergolong ilmu kewahyuan dengan ilmu-ilmu yang tergolong kepada upaya manusia, tetapi lebih daripada itu. Nilai-nilai keislaman akan dimasukkan kepada rumpun ilmu-ilmu sains. Selain dari itu aplikasi kehidupan beragama mesti terlihat dengan jelas di kampus UIN, suasana kesemarakkan pengkajian Islam dalam bentuk pendidikan non formal dalah salah satu tuntutan yang tidak boleh diabaikan. Semangat untuk melakukan studi Islam intensif. Lahirnya group-grpoup diskusi agama, lahirnya buku-buku keagamaan dan produktivitas ilmiah lainnya di kalangan civitas akademika.

Dari segi tata krama, moral, akhlak juga akan tercermin dalam prilaku sehari hari di kampus, dapat dilihat dari pakain mahasiswa yang sopan, rapi dan begitu juga mahasiswa memakai busana Muslimah sesuai dengan kaedah syari'ah, dikuti pula denga tata pergaulan antara mahasiswa dan mahasiswi menunjukkan kesopanan dan menggambarkan akhlak mulia.

Dari perwujudan yang sedemikian itu akan tercermin pula pada alumni yang dilahirkan oleh UIN, akademiknya cerdas, profesional dibidangnya, tetapi juga memiliki wawasan keislaman yang luas serta berakhlakul karimah.



## b. Tinjauan Sosiologis

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Kehidupan sosial kemasyarakatannya tidak bisa terlepas dari agama. Sejak dahulu kala masyarakat Indonesia sudah terkenal sebagai masyarakat yang beragama, munculllah di Indonesia sebelum datangnya agama Islam sudah ada agama Hindu dan Budha, sebelum datangnya kedua agama ini masyarakat Indonesia telah menganut kepercayaan asli, bisa dalam bentuk anisme atau dinamisme.

Setelah munculnya agama Islam di Saudi Arabia, maka agama ini pun bersebar pula ke Indonesia di bawa oleh pedagang-pedagang disekitar abad pertama hijriah atau sekitar abad ke VIII M. Agama Islam sangat cepat tersebar di nusantara seiringan dengan itu tumbuh pula kerajaan Islam di Indonesia yang memperkuat serta mempercepat tersebarnya Islam di Indonesia. Agama berikutnya yang tersebar di Indonesia adalah agama Kristen yang masuk pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dengan demikian jadilah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beragama.

Atas dasar itu pulalah ketika pendiri bangsa Indonesia (*The Faunding Fathers*), menyusun falsafah bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila, menetapkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Hal ini menunjukkan betapa perhataian bangsa Indonesia kepada agama. Untuk merealisasikan kehidupan beragama tersebut dibentuklah Kementerian Agama. Karena kehidupan beragama itu menempati posisi penting di Indonsia, maka pemerintah dan masyarakat Indonesia menghidupkan pendidikan agama di Indonesia. Pendidikan agama itu dapat dilihat dalam bentuk mata pelajaran dan kelembagaan. Banyak muncul lembaga pendidikan agama, misalnya pesantren, madrasah pada tingkat dasar dan menengah sedangkan pada tingkat tinggi ada sekolah tinggi, institut dan universitas. Dengan demikian lahirnya Universitas Islam Negeri adalah merupakan perwujudan dari sikap masyarakat Indonesia yang religius tersebut. Umat Islam yang jumlahnya sembilan puluh persen dari lebih dari dua ratus lima puluh juta penduduk Indonesia senantiasa memerlukan pelayanan kehidupan beragama dalam segala aspek kehidupan, baik yang berbentuk ibadah maupun kehidupan sosial keagamaan.

### c. Tinjauan Regulasi

Tinjauan regulasi di sini dimaksudkan adalah tinjauan dari sudut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional baik yang sudah diberlakukan yaitu UU No. 2 tahun 1989 maupun Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru (UU No. 20 tahun 2003).

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendidikan (PP No. 28 dan No. 29 tahun 1990), begitu juga UU No. 20 tahun 2003, dijelaskan bahwa madrasah baik pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah, yakni MI (Madrasah Ibtidaiyah) MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) disebut adalah sekolah yang berciri khas agama Islam, maka seluruh program dan aplikatif pelaksanaan sama dengan sekolah. Persamaan ini terutama dilihat dari sudut kurikulum, sebaran mata pelajaran, silabus, buku-buku pegangan dan lain sebagainya. Persamaan antara madrasah dan sekolah itu juga sampai kepada penjurusan yang ada setingkat SMA. Pada UU No. 20 tahun 2003 terlihat dengan jelas kesetaraan antara sekolah dengan madrasah hal ini tercantum pada pasal 17 dan 18.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka hakekatnya madrasah adalah lembaga pendidikan yang sama dengan sekolah, maka persiapan keilmuan dan mental tamatan madrasah pun sama dengan tamatan sekolah. Karena kesetaraan itu maka banyak tamatan madrasah yang melanjutkan studinya dalam bidang ilmu-ilmu *acquired knowledge* (*natural sciences, social sciences, dan humaniora*).

Sehubungan dengan itu maka lembaga pendidikan tinggi yang relevan bagi tamatan Madrasah Aliyah untuk melanjutkan studi adalah lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang memprogram ilmu-ilmu yang tergolong *acquired knowledge* yang diimplisitkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Lembaga yang tepat untuk itu adalah Universitas Islam Negeri. Dengan kata lain bahwa lembaga pendidikan Islam pada tingkat dasar dan menengah (MI, MTs, MA) sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu telah berubah dengan memposisikan bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas Islam, maka sudah pada tempatnya pulalah perubahan tersebut terjadi pula pada tingkat perguruan tinggi yakni dari institut ke universitas, agar sinkron dengan perubahan lembaga pendidikan Islam (madrasah) pada tingkat dasar dan menengah.



#### **d. Mobilitas Vertikal**

Selama ini alumni IAIN / STAIN terbatas ruang lingkup lapangan kerjanya dalam bidang agama saja, seperti guru agama, dosen agama, hakim agama, pegawai Kementerian Agama, da'i. Hal ini tentu sesuai dengan spesifik IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi agama.

Dengan dibukanya UIN, maka lapangan pekerjaan alumni akan semakin meluas ke berbagai lapangan kehidupan, seperti; ekonomi, politisi, birokrat pengusaha, budayawan, dan tidak tertutup kemungkinan untuk memegang jabatan-jabatan strategis di Indonesia dan inilah yang dimaksudkan dengan semakin terbukanya mobilitas vertikal alumninya.

Mobilitas vertikal itu akan memberi peluang bagi alumni UIN berkiprah dalam lapangan yang lebih luas dan dapat mengisi posisi penting di dalam birokrasi dan bidang lainnya, yang tidak mungkin diraih oleh alumni IAIN, karena bukan bidangnya.

#### **e. Ilmuan/ Saintis yang Berbasis Agama**

Di UIN akan diprogramkan ilmu-ilmu akademik sesuai dengan program studi yang dipilih oleh seorang mahasiswa di samping itu diajarkan pula ilmu-ilmu agama.

Dan dirancang pula masuknya nilai-nilai Islam (Islamic values) ke dalam mata kuliah mereka. Pertautan nilai-nilai Islami dengan mata kuliah perlu dibangun untuk memberikan karakteristik dari tamatan UIN. Dengan demikian kedua ilmu menjadi tumpuan kurikulum di program studi apa saja di UIN. Intelektualnya (kognitifnya) di isi dengan sains yang dipilihnya, sementara itu hati (afektifnya) di isi dengan ilmu-ilmu agama. Selain dari itu akan diprogramkan pertautan antara kedua ilmu tersebut, atau disebut namanya dengan integrasi ilmu. Di sisi lain diaplikasikan pula sikap hidup keislaman di kampus.

Hasil yang ingin dicapai dari perpaduan kedua ilmu tersebut dan terbangunnya sikap hidup religius, munculnya manusia Indonesia yang cerdas intelektualnya sesuai dengan bidang ilmunya, kuat imannya, serta berakhlakul karimah. Sering juga disebutkan dengan istilah intelektual yang ulama. Maksud yang terkandung di dalamnya adalah seorang yang menguasai suatu bidang sains, misalnya kedokteran atau teknik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berbicara dan menguraikan pikirannya



dibidang agama serta mampu untuk memperhatikan apalikatifnya, seperti menjadi imam shalat dan khatib serta penceramah agama.

## 2. Penutup

Bertolak dari konsep ideal Pendidikan Tinggi Islam adalah berbentuk universitas yang di dalamnya dikembangkan program keilmuan yakni ilmu-ilmu yang tergolong kepada ilmu yang bersumber dari wahyu (*perennial knowledge*) dan ilmu-ilmu yang bersumber dari upaya manusia (*acquired knowledge*).

Ada beberapa argument yang setidaknya dikemukakan apa sebab konversi IAIN ke UIN perlu diwujudkan;

1. Konsep keilmuan yang terintegrated antara ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu-ilmu yang bersumber dari non wahyu.
2. Pandangan sosiologis, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, maka kehidupan beragama itu telah terlihat dengan nyata kehidupan keseharian bangsa Indonesia. Negara juga memfasilitasi kehidupan beragama tersebut dengan membentuk Kementerian Agama. Salah satu dari wujud kehidupan beragama itu adalah pendidikan agama baik dalam bentuk mata pelajaran mau pun lembaga. Telah lama muncul lembaga-lembaga pendidikan agama negeri di indonesia, seperti madrasah negeri pada tingkat dasar dan menengah, dengan adanya tingkat dasar dan menengah tersebut maka sudah pada tempatnya pula perlu adanya lembaga pendidikan tinggi yang bernuansa agama. seperti UIN. Jadi, lahirnya tidak bisa dilepaskan sikap hidup masyarakat Indonesia yang religius tersebut.
3. Pandangan regulasi, bertolak dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menempatkan madrasah (sebagai sumber input utama dari IAIN) adalah lembaga pendidikan yang sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu telah berubah menjadi sekolah, yang dinamakan dengan sekolah yang berciri khas agama Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang sama dengan sekolah, maka persepsi diri mereka dan cita-cita hidup mereka tidak jauh berbeda dengan tamatan sekolah. Oleh karena itu perlu dipersiapkan lembaga Pendidikan tinggi yang sejalan dan sehaluan dengan lembaga pendidikan menengah yang disebut namanya dengan sekolah yang berciri khas agama Islam.

4. Mobilitas vertikal, yakni memberi kesempatan yang luas kepada alumni UIN untuk berkiprah ditegah–tengah masyarakat dalam lapangan kerja yang lebih luas dan variatif serta terbuka peluang untuk menduduki posisi-posisi penting di negara ini.
5. Munculnya ilmuwan yang berbasis agama. Hal ini bermakna bahwa UIN itu akan melahirkan orang yang cerdas intelektualnya, kokoh imannya dan berakhlakul karimah.

## **E. PERANAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **1. Pendahuluan**

Kehidupan perguruan tinggi di Indonesia belum sampai satu abad, dengan demikian termasuk negara yang masih muda dalam tradisi perguruan tinggi. Sangat jauh berbeda dengan negara-negara yang terdapat di belahan Barat (Eropa dan Amerika) yang telah melahirkan perguruan tinggi sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Itu pun pada awalnya kelahiran perguruan tinggi di Indonesia dianggap sebagai suatu yang mustahil.

Pada tahun 1924 sekolah teknik yang berada di Bandung, yang didirikan pada tahun 1920, dijadikan *Technische Hogeschool*. Pada tahun yang sama murid-murid yang pintar tamatan *Rechtschool* diperkenankan untuk mengikuti testing masuk Sekolah Hakim Tinggi atau *Rechtskundige Hogeschool*. Pada tahun 1927 STOVIA di Jakarta secara berangsur–angsur mulai ditransformasikan menjadi sekolah Tinggi Kedokteran atau *Geneeskundige Hogeschool* (Poeponegoro, 1984 JI.5 : 132)

Sedangkan Perguruan Tinggi Agama Islam baru dikenal di Indonesia pada akhir pemerintahan Jepang, tepatnya pada tanggal 8 Juli 1945 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1364 H diresmikan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI). Pada tahun 1946 STI ini dipindahkan ke Yogyakarta sesuai dengan tuntutan revolusi ketika itu dengan pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Tahun 1947 STI berkembang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) yang terdiri dari empat fakultas, Fakultas Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Hukum. Pada tahun 1950 Fakultas Agama dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Selanjutnya pada tahun 1960 PTAIN berkembang menjadi Institut Agama



Islam Negeri (IAIN), dan pada tahun 1997 fakultas-fakultas IAIN yang ada di daerah-daerah yang terpisah dari lokasi IAIN induk, dilepaskan dari IAIN induknya masing-masing untuk mandiri menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Berikutnya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sejak tahun 2002 sebagian IAIN dan STAIN telah berkembang pula menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Pendidikan tinggi atau perguruan tinggi memiliki peranan yang amat penting dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itulah di mana saja di penjuru dunia ini akan berlomba untuk mendirikan Perguruan Tinggi serta mendorong generasi mudanya untuk memasuki Perguruan Tinggi. Apa sebab demikian? Hal ini tiada lain karena lewat Perguruan Tinggi akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Tugas Perguruan Tinggi adalah melahirkan manusia berkualitas. Pembangunan suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari manusia berkualitas tersebut.

## 2. Tugas Pokok Perguruan Tinggi

Ada tiga tugas pokok Perguruan Tinggi sebagaimana yang dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Pertama*, berkenaan dengan pendidikan, pengajaran, *kedua* penelitian dan *ketiga*, pengabdian kepada masyarakat. Dharma pertama intinya adalah penransferan ilmu pengetahuan dari si pendidik (pemberi) kepada peserta didik (penerima). Di sini diperlukan berbagai kelengkapan seperti dosen, mahasiswa, kurikulum, sarana fasilitas pembelajaran, manajemen akademik. Dharma kedua adalah erat kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Lewat penelitian akan ditemukan teori baru ilmu pengetahuan. Dengan ditemukannya teori baru maka akan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Dharma ketiga adalah pengaplikasian ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Ilmu yang dikembangkan lewat dharma pertama dan kedua diterapkan ditengah-tengah masyarakat, dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Lewat dharma ketiga ini akan diwujudkan ditengah-tengah masyarakat tentang peranan lembaga Perguruan Tinggi sehingga Perguruan Tinggi tersebut tidak menjadi menara gading yang jauh terpisah dan tidak bersentuhan dengan masyarakat.



Bagi Perguruan Tinggi Agama atau berbasis tugas itu lebih berat lagi, sebab di samping tugas pokok di atas maka perguruan tinggi agama juga memiliki tugas moral dan etis. Tri dharma tersebut mestilah berada pada bingkai moral. Perguruan Tinggi Agama mesti berperanan sebagai pemikir dan pendistribusi nilai-nilai moral di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu mesti ada nilai (*Values*) dan tugas plus bagi lembaga Pendidikan Tinggi Agama.

### 3. Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Perguruan Tinggi diharapkan akan mejadi pendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan saat sekarang ini, berkait erat pula dengan era milenium 3 saat sekarang yang di mana kita sedang hidup di era tersebut dengan ciri utamanya adalah globalisasi. Sekaitan dengan itu sudah dapat dipastikan bahwa bangsa yang unggul adalah bangsa yang dapat menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disadari betul bahwa penguasaan dan pemanfaatan Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat dicapai melalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Berkenaan dengan itu maka peranan perguruan tinggi sangat menentukan (BPPN, 2001, 2).

Sehubungan dengan itu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) mengajukan pokok-pokok pikiran berkenaan dengan peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia ini perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penerapan dan pengembangan teknologi informasi yang canggih (sistem *on-line*, serta mampu mengakses ke internet) pada semua aktivitas Perguruan Tinggi, terutama dalam pembangunan perpustakaan.
- 2) Peningkatan serta penguatan kemampuan berbahasa asing, terutama Bahasa Inggris sangat diperlukan. Bahasa Inggris haruslah dipandang sebagai *the second language rather than a foreign language*.
- 3) Rendahnya kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia, dibanding dengan perguruan tinggi di negara-negara lain, setidaknya-tidaknya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu dana pengembangan Pendidikan Tinggi yang rendah dan mutu dosen yang rendah pula. (BPPN, 2001: 2-3)

#### **4. Kaitan Perguruan Tinggi dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia, terkait erat dengan cita-cita ideal manusia yang bagaimana yang ingin dibentuk. Profil manusia Indonesia yang ingin diciptakan itu dapat dilihat dari fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yang tertera pada Bab II pasal Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No 2 Tahun 2003).

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkenaan dengan tujuan pendidikan tersebut akan diformulasikan dalam tiga bentuk:

*Pertama*, masalah yang berkenaan dengan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, sehat. *Kedua*, berkenaan dengan berilmu, sehat, cakap, kreatif mandiri. *Ketiga*, berkenaan dengan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

##### **a. Pembentukan Manusia Beriman, Bertakwa, Berakhlak Mulia dan Sehat**

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius, maka kehidupan beragama adalah hal yang amat urgen bagi masyarakat Indonesia. Agama telah ditempatkan pada posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ketika pendiri bangsa bersidang untuk menentukan dasar negara, maka ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Selanjutnya landasan konstitusional UU Dasar 1945 juga menyebutkan tentang agama. Selanjutnya pada tataran landasan operasionalnya dibentuklah Departemen Agama.

Oleh karena demikian pentingnya masalah beragama ini maka ditetapkanlah bahwa salah satu profil manusia Indonesia itu adalah manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Bagaimana supaya manusia itu memiliki kualifikasi yang sedemikian, upayanya tiada lain adalah dengan melalui jalur pendidikan



mulai tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Pendidikan Tinggi. Dengan demikian Perguruan Tinggi punya peranan yang besar dalam membentuk manusia beriman bertakwa dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani.

#### **b. Pengembangan Ilmu, Cakap, Kreatif dan Mandiri.**

Salah satu tugas utama Perguruan Tinggi adalah pentransferan ilmu, pendalaman ilmu, pengembangan ilmu, serta penyebaran luasan ilmu. Lewat Dharma pertama terjadi komunikasi keilmuan antara dosen dan mahasiswa. Dosen mentransferkan ilmunya kepada mahasiswa lewat proses belajar mengajar. Ilmu yang ditransferkan itu diperdalam lagi oleh dosen dan mahasiswa lewat berbagai kegiatan ilmiah berupa diskusi, seminar, symposium dan lain sebagainya. Selanjutnya ilmu itu dikembangkan lewat riset. Lewat risetlah ditemukan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tidak boleh tidak perguruan tinggi mesti mengambil peranan yang sungguh-sungguh dalam bidang riset. Hasil temuan itu dipublikasikan di tengah-tengah masyarakat lewat berbagai media atau dapat dijadikan sebagai kebijakan pemerintah.

Tidak disangsikan lagi bahwa peranan ilmu pengetahuan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Negara-negara yang telah maju dalam bidang ilmu pengetahuannya terimbas pula kepada kesejahteraan masyarakatnya. Sebab lewat kemajuan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh, mereka bisa memproduksi berbagai bentuk produk teknologi. Di sisi lain ukuran dari suatu masyarakat yang berperadaban tinggi adalah kemajuan ilmu pengetahuannya.

Negara kita yang dihuni lebih dari dua ratus juta penduduk yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke terdiri dari tujuh belas ribu pulau-pulau besar dan kecil, memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang sangat mendambakan tangan terampil sebagai output dari suatu perguruan tinggi untuk memanfaatkan, mengelola serta memelihara kekayaan alam Indonesia. Dari mana kita memperoleh manusia-manusia cekatan itu? jawabnya, tiada lain adalah dari Perguruan Tinggi. Oleh karena itulah saat sekarang arah kurikulum kita adalah kurikulum berbasis kompetensi, agar seseorang peserta didik di arahkan untuk betul-betul berkompeten di bidangnya.



Krisis ekonomi yang menimpa kita saat saat sekarang tentu sangat besar imbasnya kepada dunia pendidikan khususnya juga dunia Pendidikan Tinggi. Banyaknya masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin yang saat sekarang ini berjumlah enam puluh juta orang terkendala untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke Perguruan Tinggi.

Kondisi ini serba dilematis, sebab penyelenggaraan pendidikan tinggi itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dapat juga dimaklumi bahwa untuk melahirkan out put yang berkualitas tinggi diperlukan pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang tidak sedikit, sedangkan sebagaian besar masyarakat kita sedang dihipit oleh persoalan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi pula agar kiranya memiliki kepedulian terhadap mahasiswa dan calon mahasiswa agar mereka dapat melanjutkan studi dengan beban yang tidak terlalu berat tatapi juga tetap menjaga mutu.

#### **c. Pembentukan Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab**

Setiap warga negara Republik Indonesia dituntut untuk menjadi seorang demokrat dan seorang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan, meliputi: cinta tanah air, cinta persatuan bangsa, cinta kedamaian, menghargai warga negara lainnya, rela berkorban dan memberi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Untuk terlaksananya hal sedemikian diperlukan poses pendidikan. Dalam proses pendidikan itulah perguruan tinggi mengambil peranan yang sangat penting.

### **5. Kesimpulan**

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia. Lewat Pendidikan Tinggi akan dilaksanakan berbagai aktifitas pendidikan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya baik yang mencakup fisik maupun psikhis. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu mestilah mengacu kepada profil manusia yang ingin dibentuk. Jika ditelusuri terdapat tiga komponen dasar profil manusia Indonesia yang ingin digapai.

*Pertama*, tentang iman, takwa dan akhlak mulia dan sehat. *Kedua*, tentang ilmu pengetahuan, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian. *Ketiga* tentang warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai itu semua diperlukan sebuah lembaga pendidikan yang terpercaya. Kehadiran sebuah Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan untuk mentransferkan ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan nilai (*value*).

Suatu hal yang menggembirakan kita saat sekarang ini tentang kebijakan pemerintah tentang perguruan tinggi. Pada prinsipnya pemerintah memberi peluang yang sama bagi Perguruan Tinggi negeri dan swasta untuk berkembang. Tidak ada perbedaan pendidikan tinggi swasta dan negeri, yang membedakannya adalah akreditasinya. Bukan sesuatu yang mustahil bahwa ada pendidikan tinggi swasta yang lebih baik akreditasinya dari pendidikan tinggi negeri.

## **F. KUALITAS *INPUT* DAN *OUTPUT* PERGURUAN TINGGI AGAMA**

### **1. Pendahuluan**

Jika pendidikan itu boleh kita analogikan dengan sebuah pabrik, maka pabrik itu membutuhkan bahan baku (*raw input*) yang akan diproses seterusnya melahirkan *output*. Kualitas barang yang diproduksi oleh pabrik tersebut sangat tergantung kepada bahan baku dan prosesnya. Apabila bahan bakunya adalah bahan baku yang baik dan berkualitas selanjutnya diproses oleh alat serta cara yang baik dan berkualitas pula maka dapat dipastikan akan melahirkan hasil yang baik. Tetapi apabila salah satu di antaranya bermasalah (bahan baku dan proses) maka belum ada jaminan akan melahirkan hasil (*output*) yang baik

Pendidikan hampir mirip seperti itu. Jika sebuah lembaga pendidikan tersebut menerima saja bahan bakunya *raw inputnya* secara serampangan tanpa terseleksi dan diproses pula dengan cara yang tidak baik, maka hampir dapat dipastikan lembaga pendidikan itu tidak akan menghasilkan hasil yang berkualitas, demikianlah sebaliknya.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka lembaga pendidikan yang mengedepankan mutu diawali dengan penerimaan peserta didiknya dengan lewat seleksi, semakin ketat persaingan dalam seleksi tersebut



maka akan semakin memungkinkan untuk menjaring *input* yang berkualitas. Setelah terseleksi *inputnya* dengan baik, maka mesti diproses pula peserta didik tersebut dengan baik.

Sebetulnya proses inilah yang amat menentukan sekali, bila proses sebuah pendidikan berjalan dengan baik kemungkinan *input* yang lemah akan terbantu walupun tidak maksimal. Oleh karena itu proses pendidikan di sebuah lembaga itu mesti diberi perhatian yang serius oleh penanggung jawabnya. Proses itu meliputi belajar-mengajar. Bagaimana seorang pendidik mengajar, apakah dia telah memenuhi persyaratan minimal sebagai seorang pendidik, meliputi pengetahuannya tentang apa yang diajarkannya, proses merancang pembelajarannya (yang meliputi isi/materi, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi), dan loyalitas kepada tugasnya. Seterusnya juga ketersediaan sarana dan fasilitas yang menunjang untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Seterusnya bagaimana pula mengenai peserta didiknya belajar, meliputi kesehatannya, motivasinya, sarana fasilitas yang dimilikinya, perhatian orang tua dan lingkungan belajarnya, dan seterusnya. Apabila proses itu berjalan dengan baik di kedua belah pihak (pendidik dan peserta didik), maka berpeluang akan melahirkan *output* yang baik pula

Sekarang bagaimana di lembaga pendidikan tinggi agama ? berkenaan dengan *raw input* dan proses pembelajaran. Tulisan ini akan mencoba membahas dua sisi tersebut dan kemudian membahas tentang dampaknya kepada *output*

## 2. Permasalahan *Input*

*Input* lembaga pendidikan tinggi agama adalah bersumber dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) agama dan umum. (MAN, MAS, SMAN, SMAS, SMK.). Sebagai contoh IAINSU. Menerima siswa yang mendaftar berasal dari sekolah-sekolah tersebut di atas. Setelah diadakan testing tertulis dan lisan, mahasiswa yang dikategorikan lulus sesuai dengan standar IAIN SU diterimalah menjadi mahasiswa baru selain dari jalur ujian ini IAIN SU juga menerima Jalur PSB (Penerimaan Siswa Berprestasi). Siswa-siswa yang berpersestasi di sekolahnya di undang masuk IAIN SU.

Secara rinci dikemukakan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi sumber mahasiswa IAINSU dan sekaligus analisa terhadap lembaga tersebut.



### a. Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Madrasah ini sejak diberlakukannya Undang-Undang No 2 tahun 1989 dan PP No 28 tahun 1990 serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 489/U/1992, telah resmi menyebut madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Dengan demikian, madrasah sudah sama dengan sekolah. Pengertian yang lebih mendalam bahwa lembaga tersebut memprogramkan kegiatan kependidikannya sama dengan sekolah. Karena lembaga ini juga disebut dengan berciri khas agama Islam, maka mata pelajaran agama Islam diberi bobot yang lebih banyak dibanding dengan sekolah. (aqidah-akhlaq, al Qur'an-Hadist, fiqh, SKI, bahasa Arab)

Sebagai lembaga yang memprogramkan mata pelajaran umum sama dengan sekolah, maka muncul beberapa hal : *pertama*, penguasaan pengetahuan umumnya lebih menonjol ketimbang penguasaan ilmu agamanya. *Kedua*, cita-cita untuk melanjutkan studi bagi sebagian besar siswa MAN lebih tertuju ke perguruan tinggi umum. *Ketiga*, penguasaan ilmu-ilmu dasar keagamaan dan bahasa Arab lemah.

### b. MAS (Madrasah Aliyah Swasta)

Madrasah Aliyah swasta ini dapat kita bagi kepada dua. *Pertama*, Madrasah Aliyah swasta murni yaitu siswa-siswa yang belajar di madrasah swasta, yaitu lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi Islam, yayasan ataupun perseorangan. Permasalahannya hampir sama dengan Madrasah Aliyah Negeri, sebab seluruh programnya sama dengan Madrasah Aliyah Negeri. *Kedua*, Madrasah Aliyah Swasta Pesantren. Siswa madrasah ini berasal dari pesantren. Di pesantren ditemukan kurikulum madrasah yang digabung dengan kurikulum pesantren. Siswa madrasah pesantren lebih menguasai dasar-dasar ilmu keagamaan dan bahasa Arab bila dibanding dengan MAN dan MAS murni. Oleh karena pesantren sangat beragam, maka dalam bidang pengetahuan umum sebagian pesantren memiliki kesetaraan pengetahuan umumnya dengan MAN, tetapi sebagian lagi belum. Biasanya pesantren-pesantren yang jauh dari kota kesulitan guru-guru umum yang sedikit lebih berkualitas. Tetapi di pandang dari sudut pengetahuan agama dan bahasa Arab rata-rata lulusan pesantren lebih baik dari lulusan MAN/MAS murni, oleh karena di pesantren diprogramkan pengetahuan agama yang lebih dari MAN dan MAS murni.

**c. SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) dan SMAS (Sekolah Menengah Atas Swasta)**

Siswa yang berasal dari sekolah menengah atas negeri pada umumnya memiliki kelebihan di bidang pengetahuan umum tetapi lemah dalam bidang pengetahuan agama dan bahasa Arab. Kecuali bagi mereka yang mengikuti pembelajaran di madrasah-madrasah di mana mereka memperoleh dasar-dasar keagamaan dan bahasa Arab yang lebih baik.

**d. SMKN (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri) dan SMKS (sekolah Menengah Kejuruan Swasta)**

Sebagian kecil sumber mahasiswa IAIN SU itu berasal dari sekolah-sekolah menengah kejuruan. Problema dan situasi yang dihadapi oleh SMK ini hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh SMAN.

Lembaga-lembaga yang disebut di atas inilah yang menjadi sumber mahasiswa IAIN SU. Dan itu jugalah yang menjadi sumber dari Perguruan Tinggi Islam Swata lainnya, dengan segala variasi kelebihan dan kekurangannya, yang apabila disimpulkan bahwa dari sejumlah yang diterima itu memang masih sangat diperlukan pembinaan dasar-dasar keagamaan dan bahasa Arab.

Melihat kenyataan tersebut maka di berbagai IAIN / UIN telah mencari solusi dengan membuat program pengajaran bahasa dan agama dengan perlakuan khusus, misalnya IAIN Alaudin Ujung Pandang, khusus mahasiswa baru selama dua semester pada sore hari diwajibkan mengikuti pelajaran bahasa Arab dan Inggris.

STAIN Malang sekarang UIN Malang telah lama melaksanakan perogram Ma'had. Mahasiswa baru selama satu tahun tinggal di asrama dan mereka meperoleh pengetahuan bahasa dan agama. Model seperti ini sangat bagus karena dapat mengintensifkan pelajaran bahasa dan agama.

### **3. Proses**

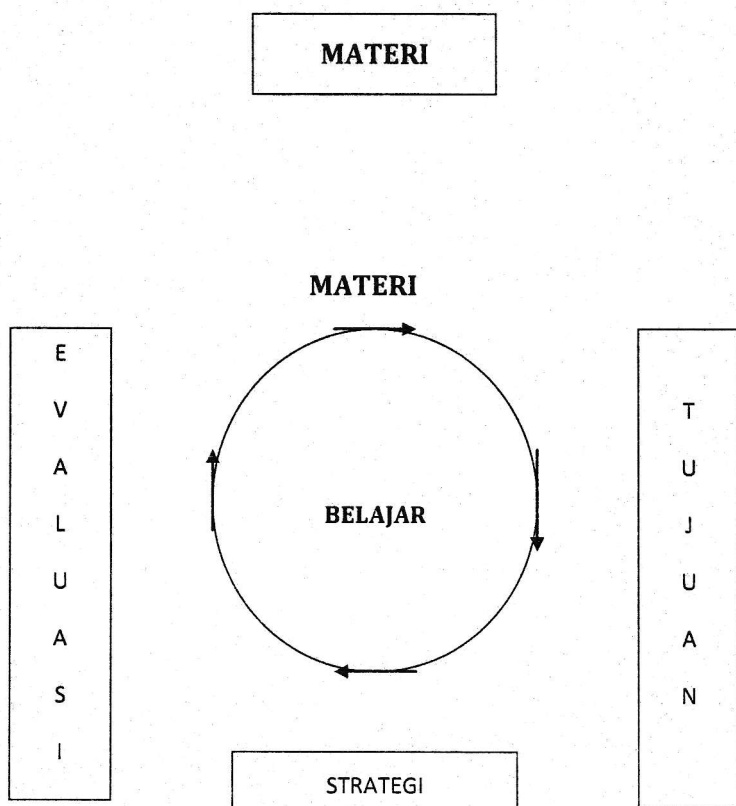
Untuk melaksanakan proses pendidikan diperlukan perangkat pokoknya adalah dosen, mahasiswa, materi (bahan), sarana pembelajaran. Dosen diperlukan persyaratan pokoknya adalah memiliki kompetensi kedosenan yang apabila disimpulkan ada tiga hal pokok. *Pertama*, ilmu yang diajarkannya,

*kedua*, memiliki dasar kependidikan dan keterampilan mengajar, *ketiga* loyalitas kepada tugas.

Dalam proses pembelajaran ini peranan dosen sangat menentukan. Sarana dan fasilitas yang kurang memadai akan dapat ditutupi kelemahan itu oleh dosen yang cekatan dan terampil, kelas yang pasif dapat diaktifkan oleh dosen. Kurikulum dan silabus adalah benda mati yang akan hidup ditangan dosen yang piawai. Oleh karena itulah banyak pendapat bahwa jika ingin memperbaiki mutu pendidikan, perbaikilah dulu mutu pendidiknya. Menyadari hal tersebut maka perlu diupayakan para pendidik memiliki kompetensi minimal seperti yang disebutkan terdahulu.

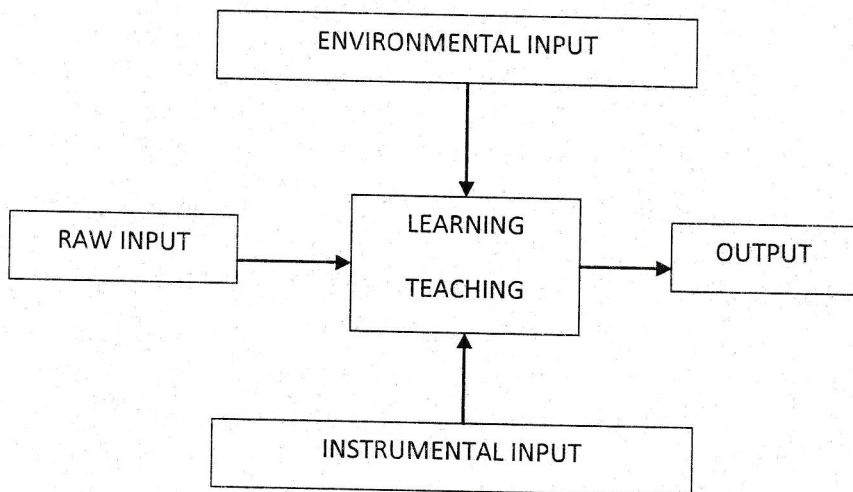
Pendidik (dosen atau guru) mempunyai empat tugas pokok. *Pertama*, menyusun materi pembelajaran yang diambil dari kurikulum, silabus, GBPP. *Kedua*, menetapkan tujuan pembelajaran.

*Ketiga*, memilih strategi yang tepat dan keempat evaluasi. Seperti bagan di bawah ini :



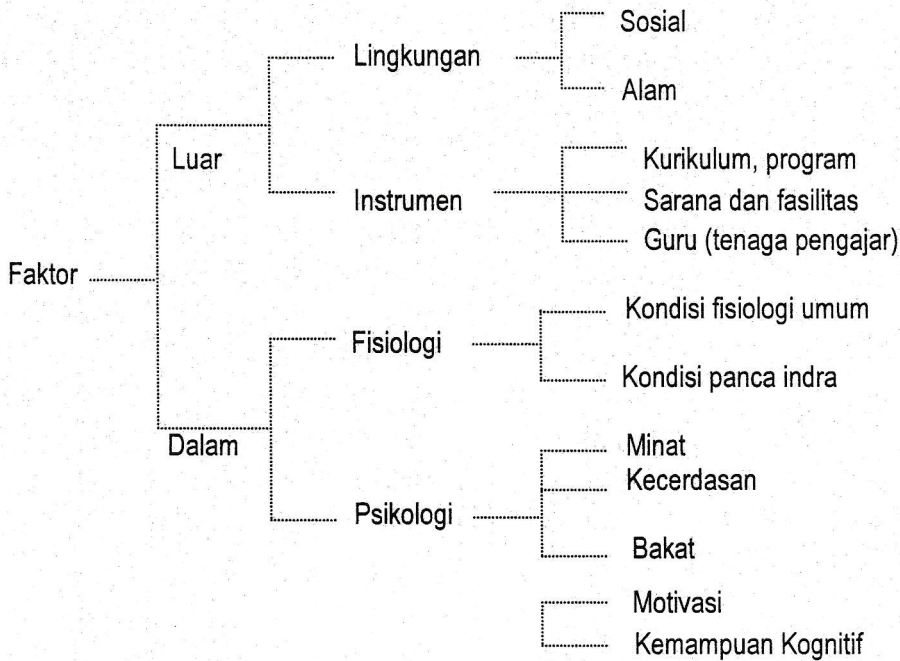


Kendatipun disebutkan bahwa pendidik (dosen atau guru) yang sangat berperan dalam memberhasilkan pembelajaran bahkan dapat disebut sebagai *the man behind the gun*, namun peranan mahasiswa, kurikulum, alat dan lingkungan tidak boleh diabaikan. Keseluruh komponen itu juga memberikan andel di dalam melahirkan *output* berkualitas., seperti bagan di bawah ini;



Menurut ini, proses belajar-mengajar dipengaruhi dua hal : Pertama, faktor lingkungan (*environmental input*) dan kedua, faktor instrumen (*instrumental input*). Beberapa faktor tersebut berinteraksi satu sama lain dalam menghasilkan *output*.

Faktor-faktor tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk ikhtisar dibawah ini :



4. Output

Seluruh lembaga pendidikan tinggi berupaya melahirkan *output* berkualitas, di sini tentu timbul pertanyaan. Apa tolok ukurnya *output* yang berkualitas itu? Untuk itu memang mesti harus ada tolok ukurnya. Jika kita mengatakan bahwa perguruan tinggi A berkualitas, tentu diperlukan standar untuk itu.

Tolok ukur pertama adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. *Output* yang dilahirkan jika tidak mungkin pencapaian maksimal tapi mendekati tentang pencapaian tujuan-tujuan yang disebutkan di atas. Untuk itu perlu di rumuskan indikator-indikatornya. Dengan diberlakukannya sekarang KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), maka hal itu akan semakin mudah untuk mengetahuinya.

Tolok ukur kedua adalah pasar atau user. Siapa pemakai lulusan lembaga pendidikan tinggi agama tersebut? tentu masyarakat, bagaimana penilaian masyarakat terhadap lulusan tersebut? misalnya, lulusan jurusan/prodi PAI (Pendidikan Agama Islam), bagaimana seorang lulusan PAI berperan sebagai guru agama di sekolah, apakah dia sukses atau tidak, atau dia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, begitu juga dengan

lulusan-lulusan prodi lainnya. Masyarakat sebagai pengguna (*user*) sangat berperan dalam menilai hasil lulusan perguruan tinggi agama.

Kembali ke pokok masalah bagaimanakah kualitas *output* perguruan tinggi agama kita saat sekarang ini, maka jawabannya terpulang kepada tinjauan dari dua sisi tersebut di atas.

## 5. Kesimpulan

Perguruan Tinggi Agama Islam telah berkembang cukup pesat di tanah air kita ini, hal ini dapat dilihat dari jumlah lembaga pendidikan tinggi agama yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta. Permasalahannya, apakah pertumbuhan yang pesat itu sebanding pula dengan pertumbuhan kualitasnya, hal ini masih perlu dipertanyakan, masih perlu mendapat kajian. Kualitas sebuah perguruan tinggi agama ditentukan oleh banyak faktor, setidaknya dapat dilihat ada dua faktor, pertama *raw input* dan kedua proses. Jika ingin meningkatkan mutu maka memperbaiki kedua faktor tersebut adalah hal yang amat penting

## G. PEMBEDANGAN ILMU PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

### 1. Pendahuluan

Pembedangan ilmu pada PTAI ke depan terkait erat bagaimana pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan kemudian bagaimana menyikapinya. Diawali dari konsepsi idealnya dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan kesatuan pandangan tentang hal tersebut, baik yang berasal dari dalam PTAI sendiri maupun dari luar.

Jika dirujuk kepada konsep ideal pembedangan ilmu sejak dari zaman klasik sampai sekarang ini, kelihatan bahwa ilmu dalam pandangan Islam itu terbagi kepada dua rumpun pokok, yakni ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari non wahyu yakni upaya dan penemuan manusia. Dari kedua sumber pokok itulah lahirnya berbagai cabang-cabang ilmu pengetahuan, yang di Indonesia populer dengan istilah ilmu pengetahuan agama dan umum.

Dalam proses sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam Islam pernah terjadi pada zaman kemunduran seolah-olah ilmu pengetahuan



menurut pandangan Islam itu hanyalah ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu saja. Pandangan yang seperti itu mulai berubah secara gradual setelah umat Islam menerima ide-ide pembaharuan di sekitar abad ke sembilan belas. Di Mesir, misalnya muncullah Muhammad Ali Pasha yang membangun berbagai institusi pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari non kewahyuan seperti dibangunnya sekolah-sekolah pertanian, teknik, meliter, pertambangan, kedokteran dan lain-lain. (Nasution, 1992 : 38). Demikian juga di Turki usaha yang sama dilaksanakan oleh Sultan Mahmud II. Di India atas prakarsa Said Ahmad Khan dibangunlah sekolah MAOC (*Muhammaden Anglo Oriental College*), di sekolah ini diajarkan ilmu pengetahuan kewahyuan dan ilmu pengetahuan non kewahyuan, sekolah inilah merupakan cikal bakal Universitas Islam Alighar (*Alighar Muslim University*)

Di Indonesia, atas usaha dari pelajar-pelajar Islam yang pulang dari Timur Tengah yang mereka sudah mendapat ide-ide pembaharuan pemikiran selama di Timur Tengah, seperti Abdullah Ahmad, Muhammad Jamil Jambek, Karim Amrullah, Syekh Taher Jalaluddin. Atas prakarsa mereka terutama Abdullah Ahmad maka pada awal abad ke dua puluh mulai didirikan madrasah yang di dalamnya diajarkan pengetahuan agama dan umum. Namun dapat dimaklumi juga bahwa memasukkan pengetahuan umum ke lembaga pendidikan Islam terutama pesantren tidak semudah yang dibayangkan, bahkan sampai hari ini masih ada pesantren yang tetap bertahan hanya mengajarkan kitab-kitab klasik yang isinya sudah pasti ilmu-ilmu agama saja.

Secara khusus di dunia perguruan tinggi di Islam di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami dinamika. Pada tahap pertama sekali didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) pada bulan Juli 1945, kurikulum yang dipakai adalah mencontoh kurikulum Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar Kairo. Setelah STI berubah menjadi UII (Universitas Islam Indonesia) di Yogyakarta yang Fakultas Agamanya dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) pada tahun 1950 yang mengasuh tiga jurusan yakni Tarbiyah, Qada dan Dakwah. Dari Jurusan yang dikembangkan ini kelihatan bahwa pengembangan ilmu adalah ilmu-ilmu keagamaan. Selanjutnya pada tahun 1960 didirikan IAIN dengan menggabungkan antara PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta. Dari kedua IAIN inilah IAIN Yogyakarta dan Jakarta secara bertahap berkembangnya IAIN di

seluruh Indonesia sejumlah 14 buah. Di IAIN sampai tahun 1980an ilmu-ilmu yang dikembangkan adalah ilmu-ilmu agama. Baru pada tahun 1980an di berbagai IAIN dibuka jurusan Tadris di Fakultas Tarbiyah dengan program studi matematika, IPA, Fisika dan Bahasa Inggris.

Pada tahun 1997, fakultas-fakultas daerah yang berada di bawah asuhan IAIN induk masing-masing, secara administrasi dan manajemen dipisahkan dari induknya menjadi sekolah tinggi dengan nama STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Fokus utama dari sekolah tinggi inipun tetap pengembangan ilmu-ilmu agama.

Sejak tahun 1990 an pada masa Tarmizi Taher menjadi Menteri Agama di kembangkan gagasan untuk mendirikan Universitas Islam Negeri. Gagasan dan pemikiran itu berkembang di kalangan PTAI. Sejak saat itu IAIN Syarif Hidayatullah mempersiapkan diri untuk menjadi universitas yang akhirnya pada tahun 2002 diresmikan berdirinya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di UIN ini dikembangkan kedua ilmu pokok tersebut, adanya ilmu yang bersumber dari wahyu dan ada ilmu yang bersumber dari non kewahyuan.

## **2. Konsep Ilmu Dalam Islam**

Umat Islam bersentuhan dengan ilmu pengetahuan buat pertama sekali adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu. Rasulullah pada saat-saat tertentu menerima wahyu dari Allah lewat Jibril. Selanjutnya wahyu tersebut disampaikan beliau kepada para sahabat. Informasi yang disampaikan itu kepada mereka menjadi pengetahuan bagi mereka.

Wahyu yang disampaikan itulah Al Qur'an selain dari itu para sahabat juga menerima wejangan dari Rasul dan itulah yang disebut dengan Hadist atau Sunnah. Dengan demikian pada tahap awal umat Islam mengenal dua sumber ilmu pengetahuan yaitu Al Qur'an dan Sunnah..

Semangat keilmuan telah ditumbuhkan Rasul sejak dini, baik lewat ucapan, praktek dan dorongan beliau, misalnya saja Rasulullah membebaskan tawanan perang yang mampu mengajari umat Islam membaca dan menulis sebagai tebusan. Selain dari pada itu al-Qur'an pun banyak berbicara tentang ilmu dan mendorong untuk berilmu.



Umat Islam berkenalan dengan ilmu pengetahuan non kewahyuan, ketika terjadi penaklukan daerah-daerah di belahan utara - Syiria, Irak, Iran, Mesir- yang kaya dengan pengetahuan dan peradaban. Hasil kontak itulah yang menimbulkan munculnya semangat ilmiah di kalangan kaum Muslimin. Setelah melewati periode penterjemahan umat Islam menjadi pelopor ilmu pengetahuan terutama sekitar abad ke delapan sampai ke dua belas Masehi. Pada ketika itu berkembanglah di kalangan umat Islam dua pilar utama ilmu pengetahuan yakni ilmu-ilmu *naqliyah* dan *aqliyah*. Apabila dirujuk kepada pendapat para pemikir Islam klasik terlihat bahwa kedua ilmu tidak pilah tapi menyatu. beberapa pendapat tentang itu akan diuraikan: Al Farabi mengklassifikasikan pengetahuan sebagai berikut: (1) Ilmu Bahasa: sintaksis, tata bahasa, pengucapan, cara berbicara, puisi. (2) Logika: pembagian, komposisi dan definisi pikiran secara sederhana. (3) Ilmu Propaedeutic: ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu optik, ilmu tentang cakrawala, musik, ilmu gaya berat, ilmu membuat alat. (4) Fisika (ilmu alam); metafisika (ilmu tentang Tuhan dan prinsip benda). (5) Ilmu Kemasyarakatan: yurisprudensi, retorika. Al Farabi memasukkan studi keagamaan di bawah metafisika dan ilmu kemasyarakatan. (Ashraf, 1989 : 29)

Ikhwanussafa, membagi pengetahuan atas tiga kelas : (1) Pendahuluan: menulis, membaca, bahasa, ilmu hitung, puisi dan ilmu persajakan, pengetahuan tentang pertanda dan yang ghaib, keahlian dan profesi. (2) Religius atau positif : Qur'an, penafsiran alegoris, hadist, sejarah, hukum, tasawuf dan penafsiran mimpi. (3) Filosofis atau faktual (haqiqi): matematik, teori angka, ilmu ukur, astronomi, musik, logika dengan retorika dan sofistika. Fisika (zat dan bentuk), cakrawala dan elemen-elemen, meteorologi, geologi, botani, zoology, metafisika (teologi). Tuhan, kecerdasan, jiwa (dari lingkungan ke bawah) pemerintah, nabi-nabi, raja-raja, jenderal, khusus, individual, alam baka. (Ashraf, 1989 : 29)

Sedangkan Al Ghazali mengelompokkan pada *shar'iyah* dan *gayr syari'yyah*. Syari'ah terdiri dari: (1) Usul yakni al Qur'an, sunnah Nabi, ijmal dan astar sahabat. (2) Furu' ilmu yang dipahami dari usul tadi, yakni ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia yang biasanya berupa fiqh dan ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. (3) *al Muqaddimat*, yaitu ilmu alat seperti bahasa. (4) *al Mutammimat*, yakni ilmu al Qur'an, tafsir, ilmu hadist, usul al-fiqh, dan lain-lain. *Ghair shar'iyah* dikelompokkan menjadi tiga : (1) terpuji. (2) mubah. (3) tercela. (Azizy, 2003: 17)



Ibnu Khaldun menyebutkan dalam *Muiqaddimah* bahwa ilmu terbagi dua yaitu *naqliyyaah* dan *'aqliyyah*, atau ilmu filsafah atau intelektual. Yang termasuk pada ilmu *naqliyyah* adalah Qur'an, Hadist, yurisprudensi, theologi, sufisme (tasawwuf) ilmu-ilmu linguistik, seperti : tata bahasa, leksikografi dan kesusasteraan, metafisika, ilmu ghaib, ilmu abjad, kimia, ilmu yang menyangkut kuantitas seperti ilmu ukur, ilmu hitung, aljabar, transaksi komersial, astronomi dan astrologi. (Ashraf, 1987 :32)

Naquib Al Attas, menjelaskan hakikat pengetahuan bertolak dari pandangan bahwa semua pengetahuan itu datangnya dari Allah. Penggolongan pengetahuan berdasarkan kepada kenyataan bahwa manusia itu memiliki dua jiwa, yang satu adalah santapan dan kehidupan jiwa sedangkan yang kedua adalah kelengkapan yang dapat digunakan untuk melengkapi dirinya di dunia untuk mengejar tujuan yang pragmatis. Pengetahuan jenis pertama diberikan Allah melalui wahyu-Nya kepada manusia lewat Al Qur'an.

Adapun jenis kedua adalah pengetahuan tentang ilmu-ilmu (*'ulum*) yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan penelitian. Hal itu ditempuh lewat penyelidikan dan perenungan rasional. Kelompok ilmu pertama wajib diketahui oleh setiap Muslim *fard 'ain* sedangkan kelompok ilmu kedua *fard kifayah*. (Al Attas, 1979: :: 29-34)

Konfrensi pendidikan Islam internasional membagi ilmu kepada dua: *perennial knowledge* dan *acquired knowledge*, seperti yang telah dikemukakan terdahulu.

Bayar dodce dalam bukunya *Muslim Education in Medeval Time* mengemukakan bahwa The Medieval Curriculum: (a) *The revealed science and Science of the Arabic Language (The Arab language, grammer, rethoric, literature, reading (Qur'anic), exegesiss (commentary), traditions (of the prophet), law, sources of principle the law, theology.* (b) *The rational science; mathematics, devition of inheritance, logic. Many individual scholars studied philosophy, astrology, astronomy, geometry, medicine, pharmacy and certain aspect of the natural science, as well as alchemy, but these subyect were as rule taught by private teacher in their homes or else in hospitals.* (Dodce, 1962 : 29-30)

Mehde Nakosteen mengemukakan pula : ilmu pengetahuan Islam mengalami kemajuan yang mengesankan selama priode abad "pertengahan" melalui orang-orang kreatif seperti al Kindi, al Razi, al Farabi, Ibnu Sinan,

Ibnu Sina, al Masudi, at Tabari, al Ghazali, Nashir Khusru, Omar Khayam dan lain-lain. Pengetahuan Islam itu telah melakukan investigasi dalam ilmu kedokteran, theologi, matematika, geografi dan bahkan sejarah. Tetapi itu semua ini dilakukan di dalam framework keagamaan dan skolastikisme (Nakosteen, 1996 :xi).

Kurikulum pendidikan Muslim pada waktu itu (zaman pertengahan), disebutkan Nakosteen: bukan suatu yang luar biasa menemukan pelajaran-pelajaran: matematika (aljabar, trigonomateri dan geometri); sains (kimia, fisika, astronomi); ilmu kedokteran (anatomi), pembedahan, farmasi, dan cabang-cabang ilmu kedokteran khusus; filsafat (logika, etika, dan metafisika); kesusasteraan (filologi, tata bahasa, puisi dan ilmu persajakan); ilmu-ilmu sosial, sejarah, geografi, disiplin-disiplin yang berhubungan dengan politik, hukum, sosiologi, psikologi dan jurisprudensi (fiqh), teologi (perbandingan agama, sejarah agama-agama, studi Qur'an, tradisi religius (Hadist) dan topik-topik religius lain). (Nakosteen, 1996 :71)

Berdasarkan uraian diatas dengan berbagai formulasi dari berbagai pakar, serta bukti-bukti sejarah, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya ilmu dalam Islam dibagi kepada dua jenis, yakni ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari manusia.

Praktek keilmuan yang seperti ini telah diaplikasikan oleh masyarakat Muslim di zaman klasik. Hanya saja pada zaman kemunduran (*dark age* yang dialami oleh umat Islam pada saat mana akal tidak difungsikan secara maksimal dan pintu ijtihad tertutup, ilmu yang berkembang adalah ilmu-ilmu kewahyuan saja. Hal ini melanda seluruh dunia Islam. Kenyataan seperti inilah yang dialami oleh pendidikan Islam di Indonesia, sebelum masuknya ide-ide pembaharuan di mana ilmu-ilmu yang dikembangkan di pesantren, dayah, surau adalah ilmu-ilmu kewahyuan yang dikemas di dalam kitab-kitab klasik (kuning).

Selanjutnya setelah adanya kontak antar dunia Islam dengan dunia Barat di abad ke sembilan belas, maka timbullah kesadaran umat Islam bahwa ilmu yang semestinya dikembangkan dalam Islam itu tidak hanya ilmu-ilmu kewahyuan saja, juga mencakup ilmu-ilmu yang non kewahyuan. Sejak saat itu secara bertahap muncullah upaya untuk merekonstruksi keilmuan dalam Islam dalam dua pilar tersebut.



Di Indonesia upaya untuk menggabungkan antara ilmu-ilmu kewahyuan dengan yang non kewahyuan itu dilaksanakan pada awal abad kedua puluh setelah kembalinya para pelajar Islam yang menuntut ilmu di Timur Tengah. Sejak saat itu berdirilah madrasah yang mencoba untuk menggabungkan kedua ilmu tersebut, dan secara bertahap pula pesantren memasukkan mata pelajaran umum dan keterampilan.

Gaung penyatuan kedua ilmu tersebut (*perennial knowledge* dan *acquired knowledge*) terdengar sangat bergema ketika dilaksanakan konferensi pertama pendidikan Islam se dunia pada tahun 1975. Hasil dari konferensi itu di realisasi dengan munculnya Universitas Islam Internasional (International Islamic University), salah satunya yang terdapat di Asia Tenggara ini yaitu di Kuala Lumpur Malaysia, dan ada lima lagi yang sejenis tersebar di dunia Islam.

### **3. Aplikasinya Dalam lapangan Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan Islam telah berlangsung di Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia, dilaksanakan di masjid, pesantren, dayah, surau. Inti dari ilmu yang dikembangkan pada masa itu adalah pendalam ilmu-ilmu agama saja lewat kitab-kitab klasik. Karena itulah pada zaman kolonial Belanda sebelum abad kedua puluh terdapat dikhotomis antara sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan kolonial Belanda. Dalam sistem pendidikan Islam ketika itu ilmu yang diajarkan hanya ilmu agama saja lewat kitab kuning, sedangkan sistem pendidikan kolonial mengajarkan hanya ilmu-ilmu sekuler dan tidak mengajarkan sama sekali pendidikan agama.

Pada awal abad ke duapuluh baik karena tuntutan interen umat Islam maupun karena pengaruh pembaharuan di dunia Islam yang dibawa oleh para pelajar yang pulang dari Timur Tengah, mulai muncul usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam. Usaha pembaharuan terlihat pada: *Pertama*, mata pelajaran, tidak lagi semata-mata mengajarkan mata pelajaran agama tetapi telah dimasukkan mata pelajaran umum. *Kedua*, metode tidak lagi semata-mata memakai metode sorogan, wetonan, hafalan dan muzakarah seperti yang dikembangkan di pesantren tetapi telah mengenal metode-metode lainnya. *Ketiga*, manajemen telah mengikuti manajemen sekolah yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Selain dari itu sistem klasikal pun diterapkan pula. (Daulay, 2001 : 67).



Secara bertahap lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional; pesantren, dayah dan surau menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Di dalam menyikapi ini tidak secara drastis, tetapi berubah secara pelan-pelan sehingga sampai saat sekarang pun masih ada pesantren yang masih tetap berpegang kepada pola lama dan pesantren ini disebut dengan pesantren *salafiyah* disamping adanya pesantren *khalafiyah*

Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Departemen Agama dan salah satu tugas Departemen Agama adalah mengurus masalah pendidikan agama baik sebagai mata pelajaran maupun sebagai lembaga. Sebagai mata pelajaran pendidikan agama dilaksanakan mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Sebagai lembaga, adanya lembaga pendidikan Islam mulai tingkat dasar sampai pendidikan tinggi - Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan PTAI, di tangan Departemen Agama lembaga-lembaga ini diadakan berbagai perbaikan, namun orientasinya tetap pada pengembangan ilmu-ilmu agama. Di madrasah disusun komposisi kurikulumnya dengan proporsi 70 % agama dan 30% umum.

Perubahan yang cukup drastis di lapangan pendidikan Islam adalah ketika di berlakukannya SKB Tiga Menteri (Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, inti dari perubahan itu adalah pembaharuan dan pemberdayaan madrasah. Diadakanlah perubahan yang drastis dalam kurikulum madrasah SKB Tiga Menteri yakni 70 persen pengetahuan umum dan 30 % pengetahuan agama. Dengan diberlakukannya kurikulum yang seperti itu maka madrasah disetarakan dengan sekolah umum. Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD, madrasah Tsanawiyah setara dengan SLTP dan Madrasah Aliyah setara dengan SLTA.

Selanjutnya dengan diberlakukannya UU No 2 tahun 1989 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka madrasah secara eksplisit dinyatakan sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Pemaknaannya adalah di madrasah diprogramkan seluruh apa yang diprogram di sekolah dan ditambah dengan mata pelajaran agama dan suasana keberagamaan.

Dengan demikian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak tahun 1975 dan diperkuat lagi sejak diberlakukannya UU No 2 tahun 1989 serta PP No 28 dan 29 tahun 1990 telah mengalami perubahan yang drastis. Bagaimana keadaannya

dengan lembaga pendidikan tinggi Islam ? seperti IAIN dan STAIN. Kalau kita mencermati pada tingkat pendidikan tinggi perubahan itu sangat lambat. Atau hampir tidak ada. Kalaupun dapat dikatakan perubahannya adalah ketika sebagian Fakultas Tarbiyah di Indonesia membuka Jurusan Tadris dengan konsentrasi matematika, fisika, biologi dan Bahasa Inggris pada tahun 1980 an. Kelihatannya perubahan itu tidak terlalu banyak berarti bagi pengembangan IAIN sebab perubahan masih bersifat parsial.

Setelah digaungkan perubahan IAIN menjadi UIN oleh Menteri Agama Tarmizi Taher dan didukung oleh Harun Nasution Direktur Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 1990 an mulai tumbuh pemikiran sebagian IAIN ke arah itu. Salah satu yang amat serius memprogramkan perubahan IAIN menjadi UIN adalah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu mereka mengawali dengan membuka jurusan dan program studi umum, yang akhirnya pada tahun 2002 secara resmi IAIN Syarif Hidayatullah berubah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).

Semangat yang sama juga dimiliki oleh IAIN lain dan STAIN seperti IAIN Sunan gunung Jati Bandung, IAIN Sumatera Utara, IAIN Syarif Qasim Pekanbaru Riau, yang lewat pernyataan Gubernurnya mulai Oktober 2003 telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Qasim. STAIN Malang juga telah berubah wujud dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan. Mainstream ke arah ingin berubah itu telah menjadi trend bagi sebagian besar IAIN, setidaknya dalam bentuk *widermandate*

#### **4. Pengembangan ke Depan**

##### **a. Mengkonstruksi Ilmu-Ilmu Keislaman**

Secara garis besar telah dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya ilmu-ilmu keislaman itu adalah perpaduan yang menyatu antar ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari manusia. Pada prinsipnya ilmu itu satu datangnya dari Allah, akan tetapi ada yang langsung dari Allah yaitu ilmu-ilmu kewahyuan dan ada yang lewat perantaraan manusia. Kedua ilmu ini secara ideal harus dikembangkan di lembaga pendidikan Islam

Tahap pengembangannya adalah menentukan batasan-batasan ilmu-ilmu yang tergolong kewahyuan atau bukan kewahyuan. Lewat



penentuan itu akan diperoleh secara jelas batasan masing-masing, dan seterusnya diaplikasikan dalam bentuk mata pelajaran.

Dalam tataran ini IAIN Sumatera Utara telah mengkonstruksi bangunan ilmu itu kepada empat macam.

*Pertama*, ilmu kewahyuan, ilmu yang menyangkut sumber ajaran Islam al Qur'an dan al Hadist. Secara historis studi tentang ilmu ini telah berkembang secara serius baik di kalangan muslim yang pada gilirannya telah melahirkan cabang ilmu 'Ulum al Qur'an, tafsir (Quranic Exegesis), dan 'Ulum al Hadist.

*Kedua*, ilmu itu masing-masing mengandung beberapa disiplin ilmu pendukung kajian al Qur'an dan al Hadist. *Kedua*, Pemikiran Islam, mencakup seluruh pemikiran yang berkembang di kalangan Islam, baik yang secara esensial berkembang dari kedua sumber di atas atau penjabaran terhadap keduanya, maupun dari realitas alam dan perenungan yang telah mengalami "Islamisasi". Hasan Hanafi menyebutnya dengan ilmu-ilmu rasional. Sejarah telah membuktikan bahwa kayanya peradaban Islam dengan ilmu-ilmu pemikiran ini seperti kalam, usul al Fiqh, sufisme, filsafat, saeni, kedokteran, astronomi, fisika, kimia dan lain-lain. (Matondang : 2)

*Ketiga*, adalah ilmu terapan adalah ilmu tentang realitas peradaban dan kebudayaan yang berkembang / dikembangkan oleh umat Islam.

*Kemempat*, ilmu instrumen adalah penunjang bagi pendalaman ilmu-ilmu tersebut di atas yaitu ilmu-ilmu bahasa dan metodologi. (Matondang, 2)

## **b. Pengintegrasian Ilmu**

Sejak bergulirnya pendapat Al Faruqi tentang Islamisasi Ilmu, maka banyak para pakar memperbincangkannya. Sekarang model integrasi itu masih terus berkembang, namun suatu keharusanlah bagi pemikir-pemikir Muslim saat sekarang untuk terus mengembangkannya. Penulis berpendapat paling tidak ada dua langkah yang harus ditempuh untuk ini. Pertama landasan filosofis dan kedua landasan metodologis.

### **1) Landasan Filosofis**

yakni membangun landasan integrasi keilmuan berdasarkan landasan ontologis, epistemologis dan axiologis. Landasan ontologis, membicarakan



tentang hakikat keberadaan sesuatu dan dalam pandangan Islam hakikat keberadaan itu tidak hanya materi, akan tetapi juga immateri. Diyakininya adanya eksistensi kedua keberadaan itu. Hal ini tentu mengandung implikasi terhadap adanya dua pendekatan yakni ada pendekatan yang dilakukan terhadap materi di samping immateri. Karena itu kebenaran yang dibangun tidak hanya kebenaran sensual dan rasional, tetapi juga diakui adanya kebenaran etik dan transendental.

Landasan epistemologis adalah membicarakan tentang asal usul, pencapaian dan dari mana ilmu itu diperoleh. Dalam hal ini ditawarkan pencapaian ilmu tidak hanya berlandas kepada filsafat positivistik dan rasionalistik. Kajian tidak hanya kebenaran sensual dan rasional, maka sudah barang tentu diperlukan landasan epistemologi yang dapat mengungkapkan berbagai tingkat kebenaran tersebut.

Landasan axiology, landasan ini membicarakan apakah ilmu itu bebas nilai atau terkait nilai. Jika ilmu bebas nilai, maka ilmu itu akan menuju ke arah yang tak terkendalikan dan akan berakibat penghancuran manusia dan dehumanisasi. Menurut pandangan Islam ilmu itu terkait nilai. Dengan demikian perlu dipertanyakan, apa, bagaimana dan akan ke mana IPTEK dipergunakan. Bila IPTEK dipergunakan untuk menghancurkan manusia, maka ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

## 2) Landasan Metodologis

Pertanyaannya adalah, metode yang bagaimana yang tepat untuk diberlakukan dalam membangun IPTEK yang berwawasan Islam. Dalam hal ini ada beberapa tawaran, antara lain Mukti Ali memakai pendekatan kontekstual sebagai upaya untuk mempelajari kitab suci sebagai pusat ide, dan sejarah Islam sebagai periferinya. Quraish Shihab memperkenalkan tafsir *maudu'i*, dengan merumuskan tema masalah yang akan dibahas, menghimpun, menyusun, menelaah ayat Al Quran dan melengkapinya dengan Hadits yang relevan, dan menyusun kesimpulan sebagai jawaban Al Qur'an atas masalah yang dibahas.

Noeng Muhajir memperkenalkan cara yang mirip dengan metode *maudu'i*/tematik bagi upaya membangun IPTEK dalam persepektif Islam. Langkah pertama, mengkonstruksi suatu bangunan ilmu tertentu atau mensistematisasikan suatu tema besar beradasarkan konsep IPTEK yang

valid, sekaligus menampilkan problematikanya, sesudah itu baru dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni menghimpun, menyusun, menelaah ayat Al Qur'an dan Hadist yang relevan. Teknis nash tersebut dapat dihimpun pertama-tama berdasar problematika yang teridentifikasi ditahap pertama. Selanjutnya ditahap berikutnya muncul teori atau konsep dasar tentang berbagai hal keilmuan dalam Islam. (Muhajir, 1989)

Qadri Azizy menjelaskan tentang *Islamization of Knowledge* adalah merupakan respons terhadap perkembangan keilmuan di Barat yang begitu maju. Respon ini adalah upaya agar ilmu-ilmu sekuler itu mempunyai akar dan landasan dari ajaran tauhid. (Azizy, 2003: 35.). Menurut beliau program *Islamization of knowledge* ini pada umumnya lebih memfokuskan pada sasaran *social science, humanities*, bahkan juga *natural science* (termasuk teknologi), justru kurang ada gaung untuk memperbaiki ilmu-ilmu keislaman yang baku. (Azizi, 2003 : 36)

### c. Keharusan Berubah

Pembidangan ilmu yang dikembangkan di PTAI selama setengah abad ini tidak banyak perubahan berarti, perubahannya hanya bersifat parsial, misalnya dengan membuka Jurusan Tadris di Fakultas Tarbiyah. Selayaknya sudah sepantasnya di abad dua puluh satu ini terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan itu adalah berkenaan dengan pembidangan ilmu yang selama ini terfokus kepada pembidangan ilmu-ilmu agama saja, maka sudah saatnya terjadi perubahan ke arah lebih komprehensif yakni mengembangkan ilmu-ilmu yang non kewahyuan. Alasan pertimbangan ini adalah :

- a) Konsep pendidikan dalam Islam dan secara khusus konsep keilmuan dalam Islam adalah mengembangkan dua jenis keilmuan yakni ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari non kewahyuan (al Farabi, Ikhwanussafa, al Ghazali, Ibnu Khaldun, Naquib al Attas, asy Syaibani, al 'Ainani, Ashraf dan hasil Konfrensi Islam Internasional tentang Pendidikan Islam).
- b) Pada saat pertama sekali dibukanya perkuliahan pada Sekolah Tinggi Islam (STI) pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar Kairo. Erat kaitannya bahwa ketika itu Al Azhar masih terkonsentrasi

kepada ilmu-ilmu duniyah. Sedangkan sekarang Al Azhar telah membuka fakultas-fakultas non keagamaan.

- c) Sejak diberlakukannya UU No 2 tahun 1989 yakni Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional diiringi dengan seperangkat PP terutama PP No 28 tahun 1990 (tentang pendidikan Dasar) dan PP No 29 tahun 1990 (tentang Pendidikan Menengah), madrasah telah dikategorikan kepada sekolah yang berciri khas Islam. Sebagai sekolah, maka program pokoknya adalah mata pelajaran seperti apa yang diprogramkan di sekolah.

Hal itu bermakna bahwa tujuan institusional madrasah tidak lagi persiapan peserta didik untuk mendalami agama, hal inipun ditandai pula dengan hilangnya jurusan agama di madrasah aliyah. Hal yang sama juga berlaku pada UU No 20 tahun 2003. (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional)

- d) Kondisi lapangan kerja bagi alumni IAIN semakin terbatas, baik sebagai guru maupun ilmu-ilmu umum, tetapi memiliki jiwa keberagamaan yang kuat.

## **5. Kesimpulan**

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan :

- a. Konsep keilmuan dalam Islam pada dasarnya bersumber dari dua pilar yaitu pilar ilmu-ilmu kewahyuan dan non kewahyuan.
- b. Konsep ilmu yang semacam ini telah dibangun sejak zaman klasik, misalnya pemikiran al Farabi, Ikhwanussafa, al Ghazali, Ibn Khaldun. Konsep itu juga dikembangkan oleh pemikir-pemikir Islam kontemporer seperti Naquib al Attas, as Syaibani, al'Ainain, Ashraf dan seluruh tokoh yang mengagas Konferensi Islam Internasional tentang Pendidikan Islam.
- c. Dari dua pilar itu perlu dipetakan pembedaan ilmu yang akan diterapkan di PTAI. IAIN Sumatera Utara telah memetakan itu dalam empat kelompok keilmuan yaitu: kewahyuan, pemikiran, terapan, dan instrumen. Berdasarkan landasan pemikiran di atas untuk ke depan di PTAI sudah semestinyalah digagas pengembangan keilmuan yang berbasis dari dua pilar tersebut di atas.



- b. Pengintegrasian kedua pilar ilmu itu harus terus dikembangkan dan dikaji secara terus menerus, dengan merujuk kepada pendapat-pendapat yang telah lebih dahulu berkembang, seperti gagasan Al Faruqi, Sardar dan para pemikir Islam kontemporer lainnya.
- c. Pemetaan keilmuan di PTAI adalah berbasis kepada dua pilar keilmuan yakni ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari non wahyu. Dari kedua pilar itulah berkembangnya disiplin ilmu-ilmu lainnya. Dengan demikian maka pembukaan program studi, jurusan dan fakultas ilmu-ilmu yang berbasis non kewahyuan sudah perlu dipersiapkan baik konsep ontologis, epistemologis dan aksiologisnya, maupun adminstrasinya. Oleh karena itu harus mengkomunikasikannya dengan kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.

## **H. PERANAN ETIKA AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBENTUK SIKAP ILMIAH**

### **1. Pendahuluan**

Kita hidup di era globalisasi, dunia kesejagatan, di mana batas-batas wilayah dalam makna kultur semakin menipis bahkan cenderung akan hilang. Gaya hidup menggloabal itu telah menjadi milik manusia secara bersama-sama pula. Di dalam kehidupan yang seperti itu maka tidak bisa dihindari akan terjadi saling pengaruh di antara budaya manusia. Sudah menjadi hukum alam apabila terjadi persaingan maka budaya yang kuatlah akan menang, sedangkan budaya yang lemah akan kalah dan mengikut kepada budaya yang kuat itu. Budaya yang kuat itu tidak pula lepas dari pengaruh atau power dari kekuatan peradaban bangsa yang menang tersebut. Karena itu terdapat signifikan bahwa budaya yang kuat itu berasal pula dari negara-negara yang kuat baik dalam arti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Budaya kesejagatan umat manusia kelihatannya semakin cenderung kepada budaya material, individual dan hedonis. Budaya-budaya tersebut, masuk menembus ke dalam kehidupan manusia yang tidak boleh tidak akan mempengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakatnya. Budaya material itu berimplikasi kepada budaya konsumeris, yang akibatnya kebutuhan hidup semakin meningkat, banyak hal-hal yang pada dasarnya tidak begitu diperlukannya, tetapi justru di konsumsinya.

Dampak dari materialis adalah meningkatnya kebutuhan di luar kebutuhan utama manusia. Manusia mesti berupaya dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang terkadang di dalam pemenuhan kebutuhan ini manusia tidak mempertimbangkan apakah itu bersumber dari yang halal atau tidak.

Dampak individualis, hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya pemuasan ego manusia, meninggalkan atau setidaknya kekurangan perhatian manusia terhadap manusia lainnya. Kemiskinan dan kebodohan yang melanda umat manusia di dunia sekarang begitu juga di Indonesia, menimbulkan pertanyaan kita, siapakah yang bertanggung jawab untuk melepaskan mereka dari kemelut tersebut? Strategi memerangi kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dituntaskan tanpa diatur disusun strategi yang tepat. Pemberian “ikan” dalam hal ini tidak terlalu banyak manfaatnya, karena itu perlu pemberian “pancing”. Untuk itu diperlukan manusia-manusia yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pertanyaannya apakah kemiskinan yang melanda dunia dan Indonesia erat kaitannya dengan kurang peduli sebagian masyarakat yang memiliki wewenang dan kemampuan di lapangan ini untuk memiliki kepedulian kepada orang lain.

Kecenderungan hedonisme, merebak di penjuru dunia juga adalah gejala bahwa keinginan untuk mencapai kenikmatan hidup meningkat. Gejala merebaknya di masyarakat terutama generasi muda yang terlibat dalam narkoba adalah bukti nyata tentang itu, di samping meningkatnya penyimpangan seksual di kalangan masyarakat.

Selain dari faktor ekstern yang disebutkan di atas, faktor intern pun tidak kalah pentingnya untuk diketahui agar dapat dicarikan solusinya. Sudah sejak lama sebagian masyarakat kita diserang oleh penyakit lemahnya komitmen pribadi untuk menegakkan disiplin dan peraturan pada dirinya. Kelemahan itu berdampak kepada munculnya perilaku-prilaku tidak terpuji yang merupakan bagian tak terpisahkan dari etik itu sendiri.

Kelemahan disiplin diri, menyebabkan orang bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. Kelemahan menegakkan aturan membuat orang dengan mudah melakukan berbagai kegiatan yang secara akal sehat dan etik tercela. Prestasi dikalahkan oleh prestise, karena itu untuk mencapai prestise tidak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan.



## 2. Urgensi Etika Dalam Kehidupan Manusia

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat (Bertens, 1993:4). Perkataan lain yang identik dengan etika adalah moral berasal dari bahasa latin *mos*, jamaknya *mores* yang juga berarti adat atau cara hidup, dalam prakteknya antara etika dan moral terdapat perbedaan, moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. (Santoso, 2000 : 9)

*Ethic (from Greek ethos 'character') is the systematic study of nature of value concepts. 'Good, 'bad' 'ought', right, wrong, ets and the general principles which justify as in applying them to anything, also called moral philosophy (from latin mores, 'customs') The present article is not concerned with the history of ethic, but treats its general problems apart from their historicakl setting (Encyclopedia Bratenica, 1972:752)*

Etika adalah pembahasan tentang baik dan buruk. Apa yang seharusnya dan selayaknya dilakukan dan apa pula yang tidak. Lillie menggolongkan etika sebagai ilmu pengetahuan normative yang bertugas memberikan pertimbangan prilaku manusia dalam masyarakat apakah baik atau buruk. (Zubair, 1995: 16)

Jika itu dikaitkan dengan akademik, maka berkenaan dengan sikap prilaku warga kampus terhadap apa yang harus dilakukan dan apa pula yang tidak. Ada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan mereka di dalam menjalankan perannya di kampus. Dunia akademik adalah dunia yang memiliki kekhasan , yang di dalamnya ada aturan-aturan main yang tidak boleh dilanggar. Seseorang akan tercela sebagai warga kampus apabila dia melakukan hal tersebut.

Secara umum kaedah etik dan moral berlaku bagi siapa saja dan di mana saja tanpa melihat profesinya. Mencuri, merapok, serta korupsi di mana saja dan profesi apa saja perbuatan itu tetap tercela. Selain dari itu ada hal-hal khusus yang berlaku di lingkungan profesi tertentu yang apabila seseorang melakukannya sangat tercela. Misalnya di dunia perguruan tinggi seorang dosen plagiator dikatakan sangat tidak beretika.

Oleh karena persoalan etika ini amat urgen di perguruan tinggi, maka biasa sebuah perguruan tinggi itu membentuk sebuah badan yang



bertugas membahas dan mengkaji tentang etika warganya, mungkin disebut namanya dengan “Dewan Kehormatan etika Akademik”.

Di pandang dari sudut hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi baik dan buruk, maka sangat wajarlah bila ada aturan-aturan etik yang menjadi landasan di mana seseorang itu bertugas. Karena itulah muncul berbagai etika profesi. Etika profesi kedokteran, etika profesi hakim, dan lain-lain.

Urgensinya etika itu bagi manusia adalah didasari atas bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai kelebihan dan keistimewaan dari makhluk lainnya. Keistimewaan itu terletak pada berbagai kelebihan yang dimiliki manusia baik dari segi potensi lahir maupun batin manusia. Dari kedua potensi itu lahir berbagai produk peradaban manusia. Peradaban manusia itu pada dasarnya adalah meningkatkan derajat dan posisi manusia di dunia ini. Peningkatan derajat manusia itu tidak lepas dari apabila mereka berpegang kepada kaedah-kaedah etik, moral, atau akhlak.

Di pandang dari sudut bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, maka agar terjadi keharmonisan hidup manusia di dunia ini ada aturan yang dipatuhi yang menyangkut tentang nilai (*value*) yaitu tentang baik dan buruk. Berbicara tentang baik dan buruk maka hal itu adalah bidang etika.

Etika mengandung norma-norma yang harus ditaati oleh manusia terlebih-lebih norma itu menyangkut hubungannya dengan orang lain. Kaharmonisan hubungan manusia akan terganggu apabila tidak ada norma etika yang dipedomani bersama untuk dipatuhi. Dengan demikian urgensi etika dalam kehidupan manusia sangat urgen.

### **3. Etika Akademik**

Dalam buku Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar Buku I A Filsafat Ilmu, salah satu bagian yang dijelaskan adalah tanggung jawab ilmunan. Butir-butir yang terdapat pada tanggung jawab ilmunan itu identik dengan etika akademik yang harus dimiliki oleh seluruh civitas akademika di sebuah perguruan tinggi Penulis akan menjadikan hal tersebut menjadi acuan dalam membentangkan beberapa etika akademik yang harus dimiliki oleh seseorang ilmunan atau calon ilmunan (dosen dan mahasiswa) yakni :

- a. Kebenaran, civitas akademika (dosen dan mahasiswa), mesti bertolak dari landasan kebenaran. Kebenaran di sini yang paling tidak dibagi kepada tiga jenis kebenaran. Pertama kebenaran ilmiah, kebenaran filsafat dan kebenaran agama. Kebenaran ilmiah, yakni kebenaran pengungkapan berdasarkan prosedur ilmiah: *ratio* dan *emperis* *deduktif* dan *induktif*. Kebenaran filsafat kebenaran berdasarkan *reflective thinking* (berpikir murni), deduktif, kontemplatif, universal, sistematis dan beberapa persyaratan berpikir filsafat lainnya. Kebenaran agama berdasarkan kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu merupakan salah satu bentuk kebenaran di samping kebenaran ilmiah dan filsafat.
- b. Kejujuran, kejujuran terkait erat dengan pengungkapan kebenaran. Hasil-hasil temuan ilmiah harus didasari atas kejujuran. Seorang ilmuwan tidak boleh memanipulasi data berdasarkan selera dan keinginannya, tidak boleh menjadi plagiator, dan lain-lain yang menyimpang dari nilai-nilai obyektif.
- c. Tanpa kepentingan langsung seorang. Hal ini terkait erat agar seseorang tetap konsisten berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah. Kepentingan yang ditonjolkan bukan kepentingan pribadi, akan tetapi apa kata temuan ilmiah itulah yang menjadi landasan utama.
- d. Berdasarkan kepada kekuatan argumentasi. Seorang warga kampus, harus bertolak dari kekuatan argumentasi. Di sini dipentingkan adalah kekuatan hujjah, bukan otoritas politik atau otoritas person berdasarkan power yang tidak ada kaitannya dengan dunia ilmu.
- e. Rasional, obyektif dan kritis. Rasional erat kaitannya mengemukakan pendapat berdasarkan logika berpikir yang benar. Didasari atas hujjah yang dapat dipertanggung jawabkan. Obyektif, tidak memihak, tidak bias, selalu berjalan di atas kaidah-kaidah ilmiah. Tidak berdasarkan atas suatu kepentingan tertentu kecuali kepentingan ilmiah itu sendiri. Kritis memiliki keberanian untuk menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan.
- f. Obyektif
- g. Kritis
- h. Terbuka, bersedia mengkomunikasikan ilmunya secara terbuka, rela mendapat kritik dari pihak lain dan bersedia pula secara jujur menerima pendapat orang lain apabila itu benar.

- i. Bersifat pragmatis, pemilihan objek penelaahan secara etis.
- j. Tidak merubah kodrat manusia.
- k. Tidak merendahkan martabat manusia.
- l. Keseimbangan kelestarian alam lewat penggunaan kemanfaatan peningkatan ilmu secara komunal.
- m. Universal (Depdikbud, 1984: 90).

Selain dari tanggung jawab ilmiah tersebut para ilmuwan juga mesti memiliki sikap ilmiah, yaitu: *pertama*, tidak ada rasa pamrih (*disinterestedness*), artinya sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. *Kedua*, selektif, yaitu sikap yang ditujukan agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap beberapa hal yang dihadapi. *Ketiga*, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indra serta budi (*mind*). *Keempat*, adanya sikap yang berdasar pada satu kepercayaan (*belief*) dan dengan merasa pasti (*conviction*) bahwa setiap pendapat atau teori telah mencapai kepastian. *Kelima*, adanya suatu kegiatan rutin bahwa ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan sehingga selalu ada dorongan untuk riset. *Keenam*, seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis (akhlak) yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara (Tem Dosen Filsafat Ilmu UGM, 1996 : 12)

Beberapa hal di atas adalah prinsip-prinsip dasar yang dipegangi oleh setiap insan akademik dan prinsip-prinsip itu harus menjadi acuannya dalam bertindak. Penyimpangan dari hal tersebut harus disadarinya bisa berdampak amat luas di masyarakat. Misalnya bila ada seorang akademisi menyimpulkan sebuah hasil penelitian yang disengaja direkayasa tidak berdasarkan kepada apa yang sesungguhnya, tentu dampaknya amat besar kepada masyarakat luas.

#### 4. Metode ilmiah

Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah atau metode keilmuan itu ?. Metode ilmiah adalah pengetahuan yang diproses menurut kaedah-kaedah dan syarat-syarat ilmiah. Landasan pokok dari kaedah ilmiah



itu adalah prosedur pengungkapan kebenaran yang berdasarkan *rational* dan *empiris*.

Lahirnya metode ilmiah ini adalah untuk mendamaikan dua metode sebelumnya yang masing-masing menyatakan bahwa metodenyalah yang paling benar. Pertama metode *rational*. Menurut metode ini kebenaran itu adalah berdasar kepada kebenaran akal (*ratio*). Akal sebagai kunci dari pembuka kebenaran. Akan tetapi setelah dianalisa metode ini terdapat kelemahannya, yakni kebenaran yang dimunculkan bisa bersifat *slopsisme*, yaitu pengetahuan yang benar menurut anggapan kita masing-masing. Kenapa demikian ? sebab tidak ada yang akan menjadi hakim terhadap sesuatu yang dikemukakan seseorang secara *rational*. Selanjutnya berkembang pula aliran *emperisme*. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran haruslah berdasar atas pengalaman langsung yang dialami manusia. Aliran ini pun tidak luput dari kelemahan. Sebab gejala yang terdapat dalam pengalaman kita baru mempunyai arti kalau kita memberikan tafsir terhadap gejala tersebut (Suriasumantri : 1981 : 11).

Oleh karena kedua aliran tersebut (*rationalisme* dan *emperisme*) mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka timbul pemikiran untuk menggabungkan kedua aliran tersebut, itulah yang dinamakan metode keilmuan atau metode ilmiah. Pendekatan *rationalisme* yang bersifat deduktif harus dilengkapi dengan pendekatan *emperisme* yang bersifat induktif. Pendekatan ilmiah bertolak dari permasalahan kemudian landasan teori yang diajukan hingga melahirkan hipotesis, dan selanjutnya hipotesis itu diuji kebenarannya atau ketidak benarannya secara *emperis* dan dari situ diambil kesimpulan.

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ilmiah ini adalah:

- a. Perumusan masalah
- b. Penyusunan kerangka berpikir
- c. Pengajuan hipotesis
- d. Pengujian hipotesis
- e. Penarikan kesimpulan (Lubis, 1994 : 22)

Di sini akan terjadi siklus *logico*, *hipotetico* dan *verifikasi*. Pada tahap pengajuan logika dan hipotesis seseorang berada pada kawasan berpikir deduktif (*rasional*), dan apabila telah masuk ke kawasan verifikasi seseorang

berada pada kawasan induktif (emperik). Setelah hasil-hasil temuan lapangan di peroleh maka hasil temuan lapangan itu dianalisa dan dalam menganalisa itu tentu menggunakan rasio.

## **5. Kesimpulan**

Setelah diuraikan kedua variabel di atas yaitu etika akademik dan sikap ilmiah, maka kita melihat pada dasarnya yang dibangun oleh etika akademik itu adalah juga sikap ilmiah. Sikap ilmiah pada dasarnya bertolak dari kekonsistensian untuk melaksanakan kaedah-kaedah ilmiah. Dan hakikat dari sikap ilmiah adalah menjaga keobyektifan ilmu itu sendiri tentang apa yang dilahirkan oleh prosedur ilmiah itu. Sedangkan etika akademik itu juga adalah menjaga agar setiap ilmuwan berjalan pada etik yang senantiasa menjaga keobyektifan ilmu.

## **I. MEMBERDAYAKAN PENDIDIKAN AGAMA DI PERGURUAN TINGGI**

### **1. Pendahuluan**

Tap MPRS Nomor XXVII Tahun 1966, menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diberikan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai Universitas-Universitas Negeri. Keputusan tersebut erat kaitannya dengan upaya untuk memberantas faham komunisme yang sudah tersebar di masyarakat pada ketika itu dan juga sejalan dengan salah satu arah pendidikan yang ditetapkan oleh MPRS Tahun 1966 yakni mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.

Landasan pikiran yang seperti itu juga menjiwai isi dan arah serta tujuan pendidikan nasional yang diungkapkan secara eksplisit dalam tujuan pendidikan nasional yang dicantumkan pada pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, yakni pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.

Untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa tersebut tentu upaya yang dilakukan adalah lewat pendidikan agama. Pertanyaan yang mendasar tentang hal ini adalah sudah sejauh manakah pendidikan

agama yang dilaksanakan selama ini untuk membawa peserta didik ke arah yang dicita-citakan yakni pembentukan manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja di dalam menggapai tujuan tersebut tidak lepas dari berbagai problema. Problema-problema tersebut harus dicarikan solusinya.

Perkataan iman dan taqwa berada pada tataran abstrak, namun harus muncul pada tataran praktis dalam kehidupan keseharian peserta didik. Karena itu perlu ada indikasi-indikasi terukur yang dapat dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi pendidikan agama di Perguruan Tinggi.

## **2. Landasan Pendidikan Agama Di Perguruan Tinggi**

### **a. Landasan Filosofis**

Landasan filosofi bangsa bertolak dari Pancasila sebagai dasar negara, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini mengandung makna bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan beragama bangsa Indonesia. Disinilah letaknya pandangan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia yang memposisikan agama sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan negara. Meletakkan kedudukan di antara dua posisi tidak sekuler dan tidak pula menjadi negara agama.

### **b. Landasan Konstitusional UUD 1945**

Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari preambuli sampai batang tubuh menyinggung masalah yang berkenaan dengan agama. Dalam preambuli dinyatakan bahwa kemerdekaan dicapai atas berkat rahmat Allah SWT. Di dalam batang tubuh UUD 1945 dicantumkan masalah yang berkenaan dengan agama, yakni pasal 29 ayat 1 dan 2.

### **c. Landasan Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah berkenaan dengan pendidikan.**

Landasan ini menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional yang salah satu aspeknya pembentukan manusia beriman dan bertaqwa.



#### **d. Landasan Kebijakan Politik**

Lewat hasil sidang umum MPR yang diwujudkan dalam bentuk GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) pada bagian yang menjelaskan tentang pembangunan pendidikan dan agama.

#### **e. Landasan Sosial Religius**

Masyarakat Indonesia secara kultural adalah masyarakat religius, karena itu maka untuk menghidupkan serta mendorong agar tumbuh dan berkembangnya semangat keberagaman masyarakat adalah sesuatu yang berlandas kepada landasan kultural sosial masyarakat Indonesia.

### **3. Arah Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi**

Dirjen DIKTI Depdikbud lewat surat yang dikeluarkannya: No. 25/DIKTI/KEEP/1985, menjelaskan tentang tujuan pendidikan di perguruan tinggi adalah menghasilkan warga negara menjadi sarjana yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama, dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain.

Lembaga pendidikan tinggi adalah lembaga ilmiah, maka seharusnya pula pendidikan agama yang diberikan disesuaikan dengan tingkat berfikir mahasiswa tersebut. Dalam hal ini diperlukan pembahasan-pembahasan di samping prinsip dan dasar-dasar agama Islam perlu diberikan pembahasan dan sentuhan sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang ditekuninya.

Dengan demikian ada tiga muatan pokok pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi:

- a. Pokok-pokok yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam (Aqidah, Syari'ah, Akhlak)
- b. Islam dikaitkan dengan disiplin ilmu terkait yang dipelajarinya (Islam untuk disiplin ilmu pendidikan, psikologi, sejarah, ekonomi, hukum dan sosial, kedokteran dan lain-lain)
- c. Kaitan agama dengan kehidupan nyata timbulnya sikap istiqamah, terutama dikaitkan dengan sikap hidup dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi.

## 4. Strategi Pendekatan

### a. Integrated Pendekatan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik.

Banyak kesan dari pengamat pendidikan agama bahwa pendidikan agama dilaksanakan di Indonesia sangat dominan pendekatan kognitif mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Pendekatan ini lebih banyak orientasinya kepada pengisian otak yang sifatnya *transfer of knowledge*. Padahal agama sebetulnya tidak hanya “santapan” otak, bahkan yang lebih dominan adalah “santapan” hati.

Oleh sebab itu maka pendekatan afektif menjadi strategi utama. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan afektif itu? Kamus Umum bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan afektif adalah: 1) berkenaan dengan perasaan; 2) keadaan perasaan yang mempengaruhi keadaan penyakit (penyakit jiwa), gaya atau makna yang menunjukkan perasaan (Kamus Umum bahasa Indonesia, 1990:8).

Kamus Psikologi menyebutkan : *affect, effection*: 1) *a broad class of mental process, including feeling, emotion, moods, and temprament. Historically, affectin was unpleasantness. Affectivity*: 1) *emotionality, tendency toward emotional reaction*; 2) *generalized emotional reaction not readily indentifiable with a particular situmulus situation*. (Chaplin, 1973 : 13-14).

Berdasarkan ungkapan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa afektif itu adalah masalah yang berkenaan dengan emosi (kejiwaan) berkenaan dengan itu terkait dengan suka, benci, simpati anti pati dan lain sebagainya, dengan demikian afektif itu adalah sikap bathin seseorang.

Pendidikan agama yang berorientasi kepada pembentukan afektif ini adalah pembentukan sikap mental peserta didik ke arah menumbuhkan kesadaran beragama. Beragama tidak hanya pada kawasan pemikiran, tetapi juga memasuki kawasan rasa. Karena itu sentuhan-sentuhan emosi beragama perlu dikembangkan. Di antara metode yang banyak kaitannya dengan sentuhan emosi adalah :

#### 1) Bimbingan Kehidupan Beragama

Bimbingan kehidupan beragama adalah lembaga konsultasi mahasiswa dalam berbagai problema kehidupan yang dialaminya terutama berkenaan dengan agama. Diasumsikan berdasarkan tingkat emosional perkembangan

jiwa mahasiswa, banyak di kalangan mahasiswa yang memerlukan bantuan dan pertolongan dari pihak lain untuk memberikan jalan keluar dari problema yang dihadapinya.

## **2) Studi Islam Intensif (SII)**

Kegiatan ini merupakan komplemen dari kegiatan kelas yang terjadwal terstruktur. Bentuknya bisa dalam bentuk diskusi, muzakarah, pesantren kilat, bedah buku, praktikum ibadah dan lain sebagainya.

## **3) Malam Ibadah**

Perlu dijadwalkan adanya latihan spritual untuk menghayati kebermaknaan beragama di kalangan mahasiswa, seperti membaca Al-Qur'an zikir dan lain yang kegiatannya mengarah kepada muhasabah.

## **4) Integrated Pendekatan Sensual, Rasional, Etik dan Transendental.**

Pendekatan agama yang dilakukan kepada mahasiswa harus dilakukan dengan cara rational, ilmiah dan supra ilmiah. Kepada mahasiswa harus diberikan kesadaran bahwa kebenaran itu memiliki beberapa jenis. Sehingga tidak terkesan bahwa kebenaran itu hanya satu sisi kebenaran lainnya. Kebenaran transendental misalnya, adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Kebenaran ini dapat digolongkan kepada kebenaran supra ilmiah. Seseorang harus dapat membedakannya dan mendudukan masing-masing pada posisinya. Misalnya ketika berbicara tentang alam ghaib, maka dipakai pendekatan transendental. Dan ketika berbicara alam nyata dipergunakan pendekatan sensual, rasional dan ilmiah.

Pendekatan-pendekatan tersebut erat kaitannya dengan pendekatan yang dilakukan oleh Al-Qur'an berbicara tentang hal-hal bersifat indrawi, rasional dan supra rasional.

## **5) Dialogis (*Two Ways Traffics*)**

Menghidupkan suasana dialogis berarti menghidupkan pemikiran keagamaan. Pemikiran keagamaan di dalam Islam telah berkembang sejak abad pertama Hijriah. Pada tahap awal lahir dan berkembang pemikiran



teologis (ilmu kalam), muncul aliran Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Dalam bidang Fiqh muncul mazhab-mazhab fiqh seperti : Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam bidang Tasawwuf juga muncul pemikiran yang dikembangkan oleh al Hallaj dengan teori hululnya, Ibnul 'Arabi, Al Ghazali dan lain sebagainya.

Timbulnya berbagai aliran ketika itu menyebabkan timbulnya dinamika pemikiran Islam. Bagi mahasiswa, wacana pemikiran itu perlu ditumbuhkan karena dengan demikian akan memperluas cakrawala pemikirannya sehingga dia tidak terjebak kepada salah satu pemikiran saja dan menjadi fanatisme buta untuk mengikuti pemikiran tersebut.

## 6) Menumbuhkan Sikap Moderat

Beberapa produk dari pemikiran Islam tidak jarang menimbulkan pemikiran ekstrim, seperti halnya pemikiran Qadariyah dan Jabariyah dalam bidang theologis, satu aliran berpendapat bahwa manusia telah diberi kekuatan untuk menentukan dirinya sendiri apakah bahagia atau celaka di dunia dan akhirat. Sedangkan satunya lagi berpendapat seluruh nasib dan ketentuan terhadap manusia telah diatur, manusia tinggal menunggu masanya saja. Kedua aliran ini masing-masing apabila diteliti ayat-ayat Al Qur'an mengandung kedua unsur tersebut. Ada ayat-ayat yang mendorong sikap Qadariyah dan ada pula ayat-ayat Jabariyah. Demikian juga seterusnya. Terjadinya perbedaan pendapat yang dahsyat tersebut bertolak dari masing-masing kelompok berpegang kepada memperkuat fahamnya saja.

Sebenarnya di antara kedua aliran tersebut dapat ditumbuhkan sikap moderat, sebagai contoh munculnya aliran Ahlus Sunnah yang mencoba mengambil sintesa di antara keduanya. Pemikiran moderat ini perlu ditumbuhkan agar mahasiswa tidak terjebak kepada fanatisme buta terhadap satu aliran saja.

## 7) Pendekatan Integrated Keilmuan

Ilmu dalam pandangan Islam terbagi kepada dua. Pertama *perennial knowledge* yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu. Kedua, ilmu yang tergolong *acquired knowledge*. Kedua ilmu itu masing-masing berbeda ontologisnya dan epistemologisnya serta axiologisnya. Agar nilai-nilai

Islam muncul dalam ilmu pengetahuan, maka diperlukan pendekatan integratif di antara kedua ilmu yang disebutkan di atas. Langkah awal dapat dimulai dengan mencari tahu hubungan ayat Qur'an dengan berbagai kaitannya dengan ilmu pengetahuan modern. Misalnya ketika Al-Qur'an berbicara tentang gejala alam perlu pendekatan ilmu-ilmu kealaman, gejala makhluk kehidupan perlu pendekatan ilmu biologis, penciptaan manusia perlu kaitannya dengan kedokteran dan demikian seterusnya. Berikutnya, perlu pengungkapan nilai-nilai Islam (*Islamic Values*) yang terdapat pada ayat-ayat kauniyah.

## 5. Upaya Mewujudkan Kampus Religius

Salah satu cita-cita yang harus ditanamkan oleh pendidik agama di kampus adalah mewujudkan kampus religius. Untuk sampai kesana disadari sangat sulit, kendatipun sulit tetapi visi pendidik mesti diarahkan kesana.

Apa yang dimaksudkan dengan kampus religius itu, adalah suasana keberagamaan yang kental yang dapat diindikasikan antara lain :

- a. Hidupnya praktek-praktek ibadah
- b. Kajian keagamaan yang intensif
- c. Munculnya toleransi kehidupan beragama
- d. Akhlak mulia menjadi primadona warga kampus
- e. Melahirkan produk-produk keagamaan, seperti buku, majalah, koran dan lain sebagainya.

Untuk menuju cita-cita ideal tersebut, maka diperlukan beberapa program strategis.

- a. Menghidupkan pendidikan agama, tidak hanya terjebak dengan alokasi 2 SKS saja, tetapi dapat dibentuk kegiatan-kegiatan pendidikan agama di luar kelas. Hal ini memerlukan manajemen tersendiri.
- b. Mempersiapkan sarana dan fasilitas yang memadai
- c. Buku-Buku Keagamaan dilengkapi diperpustakaan khusus pendidikan agama
- d. Unsur-unsur pimpinan, dosen, pegawai menjadi contoh teladan dalam kehidupan keseharian

- e. Waspada terhadap segala sesuatu yang merongrong kehidupan beragama, baik dalam bentuk ideologis dan lain sebagainya.

## 6. Kesimpulan

Keberhasilan pendidikan agama di perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Antara lain faktor pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, sarana prasarana dan evaluasi, pendekatan yang dilakukan dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya adalah strategi pendekatan yang bagaimana yang dilakukan.

Ada beberapa segi pendekatan yaitu : Pendekatan integratif kognitif, afektif, psikomotorik, integratif sensual, rasional, etik, transendental, pendekatan dialogis, pendekatan sikap moderat dan integratif keilmuan.

Visi pendidikan agama di perguruan tinggi ini adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan kampus religius dengan berbagai indikasi yang telah diuraikan.

## J. PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MASA DEPAN

### 1. Pendahuluan

Usia perguruan tinggi di tanah air kita masih tergolong sangat muda sekali bila dibandingkan dengan usia perguruan tinggi di Eropa dan Timur Tengah. Universitas Oxford di Inggris, umurnya telah berusia ratusan tahun, Al-Azhar di Mesir telah mencapai usia seribu tahun lebih.

Indonesia berkenalan dengan tradisi perguruan tinggi baru pada awal abad ke duapuluh. Sampai Indonesia merdeka (1945). Perguruan tinggi yang ada baru tiga buah, yaitu sekolah Tinggi Kedokteran, sekolah Tinggi Kehakiman di Jakarta, dan sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Ketiga-tiganya baru berbentuk sekolah tinggi, belum universitas.

Khusus pendidikan tinggi Islam, embrionya telah mulai muncul pada saat pendudukan Jepang, kemudian direalisasi berdirinya sebuah universitas Islam di Yogyakarta pada awal kemerdekaan dengan nama Universitas Islam Indonesia (UII). Salah satu fakultasnya adalah Fakultas Agama.



Fakultas Agama dari Universitas Islam Indonesia ini dinegerikan dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). PTAIN di Yogyakarta didirikan tahun 1951, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950, ditanda tangani oleh Presiden RI tanggal 14 Agustus 1950. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No. K/I/1469 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28665/Keb. tanggal 1 September 1951. Di Jakarta dibuka pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1957, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957.

Proses berikutnya, kedua lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut di atas (PTAIN dan ADIA), disatukan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), pada tanggal 24 Agustus 1960 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1380 H. Penyatuan itu dilaksanakan berdasar kepada Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960. Sejak saat itu secara bertahap IAIN berkembang samapi tahun 1973, menjadi 14 IAIN, tersebar di seluruh Indonesia. Dan sekarang jumlah itu telah berubah sejak adanya sebagian IAIN menjadi UIN dan sebagian STAIN menjadi IAIN.

Perguruan tinggi Islam di Indonesia, bila ditinjau dari segi pengelolaan dapat dibagi kepada dua macam yakni yang dikelola oleh Pemerintah (IAIN) dan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) dan yang dikelola oleh swasta yaitu universitas-universitas Islam swasta dan sekolah tinggi Islam swasta, sedangkan bila ditinjau dari segi jenis ilmu yang dikembangkan juga terbagi kepada dua, yaitu khusus mengembangkan jenis ilmu-ilmu keagamaan IAIN, dan STAIN dan sekolah tinggi swasta keagamaan. Disamping itu terdapat pula perguruan tinggi yang mengembangkan berbagai macam jenis keilmuan, ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu keagamaan.

Kesemua jenis perguruan tinggi Islam yang disebutkan di atas telah banyak memberikan andil dalam membentuk sumber daya manusia, dan telah banyak pula peranan alumninya untuk turut dalam pembangunan bangsa dan negara. Namun, sesuai dengan tuntutan zaman lembaga-lembaga pendidikan tersebut perlu membenahi diri dalam berbagai hal agar tetap exist untuk masa selanjutnya.

Problema berikutnya adalah sejauhmana perguruan tinggi Islam di Indonesia ini telah sesuai dengan konsep pendidikan Islam yang sesungguhnya

berdasarkan hasil konferensi Internasional tentang pendidikan Islam pada tahun 1977 dan konferensi-konferensi lainnya, bahwa konsep universitas dalam Islam mengembangkan ilmu pengetahuan kepada dua arah, arah ilmu yang tergolong *perennial knowledge* dan arah ilmu yang tergolong *acquired knowledge*.

Untuk mencoba mendiskusikan hal tersebut di atas penulis mencoba mendiskripsikan problema-problema tersebut dan mencoba memberikan solusi.

## 2. Klasifikasi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Bila diklasifikasi bentuk perguruan tinggi Islam di Indonesia dapat dibagi kepada tiga macam, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi. Universitas Islam swasta, mengasuh berbagai fakultas baik yang tergolong eksakta, sosial dan keagamaan. Ciri yang menonjol dari universitas Islam swasta ini adalah pendidikan agama yang diajarkan tidak hanya sebagai mata kuliah MKDU saja (2 SKS), tetapi diajarkan juga pada semester-semester berikutnya, selanjutnya terlihat adanya berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, dan adanya fakultas agama.

Perguruan tinggi Islam yang berbentuk institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Lembaga perguruan tinggi ini mengasuh berbagai fakultas: Tarbiyah, Syari'ah, Ushuluddin, Dakwah dan Adab. Setiap fakultas mempunyai beberapa jurusan. Pada dasarnya ilmu yang dikembangkan di lembaga perguruan tinggi ini adalah ilmu-ilmu keislaman, dengan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan menengah yang berdasarkan kebudayaan Indonesia dan secara ilmiah memberikan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang pada mulanya berasal dari fakultas-fakultas daerah di luar IAIN induknya, yang kemudian sejak 1 Juli 1997 menjadi mandiri dan terlepas dari IAIN induk masing-masing. STAIN ini juga memprogram jurusan-jurusan yang ada di IAIN.

Sekolah Tinggi Agama Islam swasta, mengasuh paling tidak dua jurusan. Kordinasinya berada di bawah naungan KOPERTAIS (Kordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta).



### 3. Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan Islam semakin gencar dilaksanakan terutama sejak dilangsungkannya konferensi pertama tentang pendidikan Islam pada tahun 1977. Konferensi itu telah menetapkan landasan filosof pendidikan Islam yakni pendidikan yang terintegrated antar pendidikan agama dan umum. Rumusan tujuan pendidikan Islam yang dicantumkan dalam hasil keputusan konferensi pendidikan Islam se dunia, menyebutkan bahwa dalam rumusan tersebut berupaya untuk menghilangkan perbedaan apa yang selama ini disebut dengan istilah ilmu agama dan “sekular”. Untuk merealisasi konsep tersebut maka Konferensi pendidikan Islam yang kedua mengajukan konsep kurikulum pendidikan Islam mulai tingkat dasar sampai universitas. Pada jenjang universitas adalah sebagai berikut :

Kurikulum pada tingkat universitas harus diletakkan atas dasar tingkat sebelumnya (dasar dan menengah) dengan tiga tujuan, sebagai berikut :

- a. Untuk menanamkan pengertian yang mendalam tentang Islam dan masyarakat Islam.
- b. Untuk menanamkan pengetahuan spesialisasi dari salah satu ilmu pengetahuan yang tergolong *perennial knowledge* dan *acquired knowledge*.
- c. Untuk menjamin suatu pertumbuhan yang seimbang bagi pribadi mahasiswa, lewat mata pelajaran dari cabang ilmu yang bermacam-macam. Mata pelajaran didalam pendidikan Islam terdiri dari :
  - 1) Dua mata pelajaran yang bersumber dari *perennial knowledge*, salah satunya adalah bahasa Arab dan yang lainnya boleh diambil peradaban dan kebudayaan Islam atau sejarah pemikiran dan ide-ide dalam Islam.
  - 2) Dua mata pelajaran bersumber dari *acquired knowledge*, yang satunya adalah filsafat sains dan pengajaran Islam, sedangkan yang lainnya, seni Islam dan arsitektur atau salah satu dari pemikiran berikut ini : Pandangan Islam tentang sejarah, ekonomi, sosiologi (*second world conference on Muslim education: 3-4*).

Untuk merealisasi konsep ideal tersebut di atas maka dibentuklah berbagai Universitas Islam International di berbagai negara : Universitas



Islam Bahawalpur di Pakistan, Universitas Islam Madinah dan Universitas Imam Sa'ud di Arab Saudi, dan Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur Malaysia.

Didalam rangka Islamisasi universitas setidaknya ada tiga rekonstruksi yang ditawarkan: Pertama rekonstruksi tentang konsep ilmu. Kedua rekonstruksi kelembagaan. Ketiga rekonstruksi atau lebih tepatnya pengembangan kepribadian individual.

Dr. Hamid Hasan Bilqam dan Dr. Sayid Ali Asyraf mengemukakan tiga rekonstruksi tersebut dalam buku mereka *The Concept of Islamic University*. *Rekonstruksi pertama*, menawarkan memasukkan ilmu-ilmu naqliyah, seperti Alquran, Hadits, fiqh, tauhid dan metafisika sebagai mata kuliah dasar umum elektif bagi mahasiswa. *Rekonstruksi kedua*, rekonstruksi kelembagaan, yaitu menjadikan lembaga pengembangan studi ilmu-ilmu naqliyah sebagai bagian dari universitas. *Rekonstruksi ketiga*, yaitu mengembangkan kepribadian dasarnya sampai alumninya diharapkan dapat mengembangkan konseptual Islami dalam karya ilmiahnya, penelitiannya dan pengamalannya.

Idealisme dari konsep universitas Islam tersebut pada hakikatnya mengacu kepada konsep ideal dari pendidikan Islam, dan konsep ideal dari pendidikan Islam itu berazas kepada konsep manusia menurut Islam. Menurut Al-Attas, manusia itu terdiri dari dua kesatuan yang utuh, yakni jiwa dan raga, ia sekaligus wujud fisik dan ruh. Dia diajari Allah untuk mengetahui nama-nama sesuatu, dan itu merupakan simbol dari ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut ada yang dapat ditangkap oleh panca indra dan dipahami oleh akal budi. Disamping itu juga manusia diberi pengetahuan tentang Allah (ma'rifah), keesaan-Nya yang Mutlak. Letak pengetahun ini pada manusia adalah ruh, jiwa (an-nafs), hati (al-qalb), dan al-'aql (Al-Attas, 1979 :23-29).

Menurut Al Attas juga, bahwa hakikat pengetahuan itu terbagi kepada dua, sesuai dengan jiwa manusia. Pengetahuan jenis pertama mengungkapkan materi wujud dan eksistensi serta mengungkapkan hubungan sejati antara diri manusia dengan Tuhannya, Pengetahuan ini pada akhirnya tergantung pada rahmat Allah dan karena itu menuntut perbuatan dan amal pengabdian kepada Allah. Supaya pengetahuan itu dapat dicapai maka pengetahuan tentang prasyarat (*knowledge of*

*the prerequisites*) menjadi perlu. Dan ini meliputi pengetahuan tentang unsur-unsur dasar Islam (Islam, Iman dan Ihsan). Adapun pengetahuan jenis kedua adalah pengetahuan tentang ilmu-ilmu ('ulum) yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan penelitian. Hal ini ditempuh lewat penyelidikan dan perenungan rational (Al-Attas, 1979 :29-34).

Berdasarkan ungkapan-ungkapan di atas, maka idealisasi dari suatu pendidikan tinggi Islam adalah meliputi dari rekonstruksi filsafat sains dalam Islam yang melandasi tentang terintegrasinya *perennial knowledge* dengan *acquired knowledge*. Aplikasi dicerminkan dalam penataan kurikulum dan silabus serta GBPP. Selanjutnya tercermin pula pada kepribadian insan kampus (dosen, mahasiswa dan pegawai) serta lembaga.

Setelah penulis menguraikan tentang konsep universitas Islam, sekarang kita bertanya sejauh manakah konsep universitas Islam tersebut telah dapat diterapkan pada perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sesuai dengan pembagian yang dilakukan terdahulu bahwa perguruan tinggi Islam di Indonesia ini diklasifikasikan atas tiga jenis, universitas, institut dan sekolah tinggi.

#### **a. Universitas**

Universitas-universitas Islam di Indonesia, dipandang dari sudut filsafat keilmuan, belum dapat mewujudkan konsep filsafat keilmuan Islam secara utuh. Pengintegrasian antara *perennial knowledge* dan *acquired knowledge* belum dapat direalisasi. Konsep keilmuan belum berbeda banyak dengan konsep keilmuan universitas-universitas umum lainnya. Perbedaannya hanya baru dapat dilihat dari jumlah kuantitas tatap muka pendidikan Islam di universitas tersebut. Suasana keislaman pun belum begitu meng-gembirakan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan ibadah, pakaian, pergaulan dan lain sebagainya. Dipandang dari sudut pendidik, masih pilah antara dosen mata kuliah agama, dengan dosen mata kuliah ilmu-ilmu lainnya. Pendidik yang mengasuh mata kuliah ilmu kealaman, sosial dan humaniora belum dapat mengkaitkan ilmunya dengan agama, begitu juga sebaliknya sehingga masih terdapat kesan dikotomis. Masih pilah antara konsep keilmuan, lembaga dan tenaga pendidik.



## **b. Institut**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN), adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan satu jenis keilmuan yakni ilmu-ilmu keagamaan. Dipandang dari sudut keilmuan di lembaga ini juga belum terealisasi konsep keilmuan Islam yang ideal tersebut. Institut, sesuai dengan peraturan yang tertera dalam UU No 2 Tahun 1989, adalah lembaga pendidikan tinggi yang hanya mengasuh sekelompok ilmu sejenis. Dengan pengertian IAIN hanya boleh mengasuh ilmu-ilmu keagamaan saja.

Tuntunan zaman saat sekarang ini menghendaki IAIN tidak lagi dalam bentuknya yang sekarang, tetapi telah diinginkan untuk dikembangkan lebih lagi yakni dalam bentuk universitas. Jadi telah ditunggu kelahiran UIN (Universitas Islam negeri). Selain dari itu ada, karena dianggap cita-cita untuk mendirikan universitas lebih sulit dan memerlukan persiapan yang lebih matang, ada pemikiran IAIN sekarang diperluas bidang studi yang diasuhnya, dalam tingkat IAIN yang diperluas, yakni membuka program-program studi non keagamaan, statusnya tidak sampai ketingkat universitas. Selain dari itu ada juga yang ingin mempertahankan seperti bentuk sekarang, dibenahi dengan cara yang lebih baik. Dan sekarang telah berkembang 11 UIN di Indonesia.

## **c. Sekolah Tinggi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Intinya, tidak jauh berbeda dengan IAIN. Program yang ingin dikembangkan juga adalah sama dengan IAIN. Dirasakan pada kedua lembaga ini (IAIN dan STAIN), dalam menghadapi tuntutan dan perubahan sekarang dan masa depan IAIN dan STAIN harus merubah diri, tidak lagi hanya semata-mata mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan seperti yang dilakukan selama ini.

Sekolah tinggi Islam swasta adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengasuh beberapa jurusan ilmu-ilmu keagamaan. Sekolah Tinggi Islam Swasta ini berada dibawah pengawasan Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (KOPERTAIS). Karena itu pola serta struktur keilmuan yang dikembangkan mengacu kepada IAIN. Seiring dengan itu problema keilmuan yang dihadapinya juga sama dengan yang dihadapi IAIN.



#### 4. Kesimpulan

Setelah mendiskriptifkan perguruan tinggi Islam di Indonesia saat sekarang ini, tentu timbul pertanyaan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam mengembangkan perguruan tinggi Islam di Indonesia dimasa yang akan datang agar dapat menghadapi tantangan kemajuan zaman.

*Pertama*, pembinaan yang serius terhadap universitas-universitas Islam swasta. Dengan pembinaan ini diharapkan universitas Islam swasta dimasa yang akan datang dapat merealisasi konsep ideal dari universitas Islam untuk menuju kearah tersebut terlebih dahulu dibentuk kelompok pemikir yang dapat bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga konsep tersebut dapat direalisasi. Di dalam rangka tersebut perlu diikat kerjasama dengan Universitas Islam Antar Bangsa di Kuala Lumpur, untuk menimba pengalaman mereka dalam mengelola Universitas Islam Internasional tersebut. Didalam upaya untuk mengaplikasikan konsep universitas Islam yang ideal dimaksud, tetap mengacu kepada UU Nomor 2 Tahun 1989 serta PP Nomor 60 Tahun 1990. Dengan arti kata tetap sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang diberlakukan di Indonesia

*Kedua*, pengembangan IAIN menjadi universitas, atau dalam bentuk IAIN yang diperluas demikian juga STAIN Inti pokok dari konsep Universitas Islam adalah terletak kepada konsep dan aplikasi keilmuan, lembaga, dan pendidik, maka upaya-upaya yang dilakukan dalam merealisasi konsep universitas Islam dimaksud tidak mesti mutlak mencontoh apa yang telah dilakukan oleh bangsa lain, tetapi disesuaikan dengan alam Indonesia, seperti:

- a. Mengimplisitkan nilai-nilai Islam ke dalam setiap mata pelajaran
- b. Dirancang konsep Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI), misalnya Islam untuk disiplin ilmu pengetahuan alam, Islam untuk disiplin ilmu pengetahuan sosial, dan sebagainya.
- c. Penggalian konsep-konsep Islam dalam berbagai ilmu sosial, humaniora dan kealaman.
- d. Islamisasi disiplin-disiplin ilmu dengan jalan menghasilkan buku-buku dasar pemikiran Islam dalam semua cabang pemikiran.

Kontowijoyo, menawarkan pula alternatif yang mungkin untuk diterapkan dalam rangka pengintegrasian antara ilmu agama dan umum.

Beliau menawarkan supaya diajarkan mata kuliah filsafat ilmu untuk memberikan latar belakang filosofis mengenai semua mata kuliah umum yang diajarkan. Di Fakultas MIPA misalnya, dapat diajarkan mata kuliah filsafat matematika Islam dan filsafat sains Islam untuk memberikan wawasan epistemologis terhadap mata kuliah lain yang diajarkan di fakultas tersebut. Begitu juga di fakultas ilmu sosial dan humaniora, karena diberikan mata kuliah mengenai filsafat sosial dan filsafat humaniora Islam.

A. Syafii Ma'arif, berpendapat bahwa corak pendidikan yang diinginkan Islam ialah pendidikan yang mampu membentuk “manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, serta anggun dalam moral dan bijaksana”, untuk meraih tujuan ini diperlukan suatu landasan filosofis pendidikan yang sepenuhnya berangkat dari cita-cita Al-Qur'an tentang manusia.

Selain dari beberapa nama yang dikutip di atas, masih banyak lagi pakar pendidikan Islam yang menaruh perhatian serius guna perbaikan pendidikan Islam. Dan suatu hal yang menggembirakan kita bahwa para pakar itu hampir sepakat untuk menghilangkan dikhotomis yang telah merupakan “penyakit” didalam pendidikan Islam.

Kalau boleh kita meninjau istilah Alvin Tofler, bawa peradaban manusia sekarang sedang berada pada gelombang ketiga (*the third weve*) setelah melewati gelombang pertama dan kedua. Demikian jugalah gelombang pendidikan Islam di Indonesia mestinyalah telah memasukkan pula “gelombang ketiga”.

Gelombang pertama, pada tahap awal di saat mana pendidikan Islam terpusat di surau, masjid, rangkang, madrasah dan pesantren. Materi yang diberikan semata-mata mata pelajaran agama saja, tauhid, tafsir, fiqh, hadits, bahasa Arab, dan lain sebagainya tidak mengajarkan mata pelajaran umum. Sistem pengajarannya secara non klasikal.

Gelombang kedua, yaitu setelah berdirinya madrasah-madrasah, yang mengajarkan mata pelajaran umum dan sekolah-sekolah yang mengajarkan mata pelajaran agama.

Gelombang ketiga, yaitu disaat mana pendidikan Islam telah mampu merealisasi berbagai konsep pendidikan Islam dimaksud lewat pengintegrasian secara utuh antara ilmu yang tergolong *perrenial knowledge* dengan ilmu yang tergolong *acquired knowledge*.



Di dalam menghadapi era pendidikan Islam termasuk universitas Islam masa depan sudah perlu dipersiapkan berbagai upaya guna terealisasinya konsep tersebut. Upaya ini diawali dengan meletakkan landasan filosofis pendidikan Islam, dan kemudian diteruskan dengan aplikasinya.

## **K. MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PTAIS**

### **1. Pendahuluan**

Tujuan pendidikan tinggi adalah: (1). Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan /atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan /atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian. (2). Mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. (PP 60 tahun 1999, Bab II pasal 2.

Agar terlaksana dan tercapai maksud yang dikandung di atas, maka di perguruan tinggi diadakan berbagai kegiatan guna mencapai maksud tersebut, dilaksanakan lewat tri dharma perguruan tinggi.

Salah satu dari tri dharma perguruan tinggi adalah pendidikan dan pengajaran. Inti dari pendidikan dan pengajaran itu adalah proses untuk terjadinya transfer ilmu, nilai (value) dan aktifitas. Untuk berlangsungnya proses pendidikan dan pengajaran harus dilaksanakan beberapa hal yang terkait erat dengan proses pembelajaran.

Hal yang terkait erat dengan proses pembelajaran tersebut adalah: pendidik (dosen), peserta didik (mahasiswa), sarana dan fasilitas, kurikulum, metode.

### **2. Aspek-Aspek Manajemen Pendidikan dan Pengajaran**

#### **a. Dosen**

Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar (PP 60 Pasal 1). Sebagai seorang tenaga pendidik di perguruan tinggi, harus memiliki beberapa kompetensi. *Pertama*, kompetensi keilmuan, yakni memiliki kualifikasi keilmuan



yang memungkinkan dia untuk mengajar di perguruan tinggi. Kualifikasi keilmuan diukur dari kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seorang dosen seperti menulis karya ilmiah, seminar, diskusi, penelitian dan juga termasuk tingkat pendidikan, misalnya, untuk program S1 tenaga pendidik minimal pendidikan strata S2, dan demikian seterusnya. Oleh karena itu perguruan tinggi yang belum mencapai tingkat kualifikasi tenaga pendidik pada level seperti ini harus berupaya untuk menyekolahkan tenaga pendidiknya untuk sampai kebatas minimal yang disebutkan di atas.

Kompetensi kedua adalah, memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan ilmunya kepada orang lain. Bekenan dengan ini dimaksudkan adalah memiliki ilmu keguruan, seperti persiapan mengajar, setidaknya memiliki RKBM (Rencana Kegiatan Belajar Mengajar), setiap dosen telah memenej kegiatan pembelajaran pada awal semester dan ia telah mempersiapkan seluruh bahan pelajaran, yang akan disampaikan pada tatap muka, tugas-tugas yang akan dikerjakan, buku bacaan, dan lain sebagainya. Selain dari itu diperlukan juga pengetahuan lain seperti metode mengajar, psikologi pengajaran, penggunaan media dan lain sebagainya.

Kompetensi ketiga adalah moral akademik. Setiap dosen mesti memiliki moral akademik, dia mesti mematuhi etika profesi pendidik. IAIN Sumatera Utara lewat Surat Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara No 47 A tahun 1998 telah menuangkan Etika Akademik IAIN Sumatra Utara, baik untuk dosen, pegawai, dan mahasiswa. Khusus unuik dosen adalah :

- 1) Bertaqwa kepada Allah Swt, bersikap ilmiah, jujur, dan adil.
- 2) Berakhlak mulia: istiqamah, wara'tawadhu', khudu', sabar dan qana'ah.
- 3). Taat beribadah dan menegakkan syiar Islam.
- 4) Menegakkan amar ma'ruf dan nahi anil munkar.
- 5) Memelihara dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, swrta bertanggung jawab secara ilmiah.
- 6) Senantiasa berusaha menuntut ilmu pengetahuan, tidak menyia-nyiaikan waktu dan siap belajar dari sumber mana pun serta rajin meneliti serta membina kreatifitas.
- 7) Zuhud, tidak mencari dan menggunakan pengetahuan hanya untuk mencari harta, prestise dan popularitas semata.

- 8) Terbuka dan menghargai orang lain.
- 9) Rendah hati dan berani mengakui kelemahan /kesalahan.
- 10) Mengajar demi keridaan Allah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penyiaran agama.
- 11) Mencintai dan mengharagai mahasiswa serta bersedia membantu dalam batas-batas kemampuan.
- 12) Bersungguh-sungguh dalam mengajar dan membantu mahasiswa
- 13) Memperlakukan mahasiswa dengan benar, jujur dan adil.
- 14) Tepat waktu dan berdisiplin.
- 15) Terbuka dan selektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

## **b. Mahasiswa**

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tertentu (PP 60 tahun 1999 pasal 1) Mahasiswa adalah *raw input* (bahan baku) yang sedang diperoses untuk menjadi *out put*. *Raw input* dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam. Faktor luar dipengaruhi pula oleh dua hal pertama *environmental* (lingkungan) alam dan sosial. Faktor dalam dipengaruhi oleh fisiologi dan psikologi yang meliputi, minat, kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan kognitif. (Suryabrata, 1983 : 7)

## **c. Kurikulum**

Secara luas kurikulum dimaknai dengan seluruh program sekolah yang diberikan kepada peserta didik. ... "*the school curriculum is the total effort of the school to bring about desired outcome's in school and in out-of - school situation*". Dengan demikian batas kurikulum itu tidak hanya mata pelajaran yang diberikan di sekolah saja, akan tetapi bisa dimaknai dengan seluruh pemberian program kepada peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk pembentukan peserta didik ke arah yang diinginkan. Berdasarkan ini kurikulum harus dirancang dalam bentuk intra kurikuler, kokurikuler, ekstra kurikuler dan hidden kurikuler.

Arah pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang akan datang Menteri pendidikan Nasional telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 232 / 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilain hasil belajar mahasiswa. Dalam Surat Keputusan itu ditetapkan

bahwa struktur kurikulum pendidikan tinggi dijabarkan dalam bentuk MPK Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), MKK (Mata Kuliah Keilmuan Keterampilan), MKB (Mata Kuliah Keahlian Bekerja), MPB (Mata Kuliah Prilaku berkarya), Mata Kuliah Prilaku Berkarya), MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)

Kelompok MPK yang terdiri dari mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas penghayatan inti. Kelompok MKK yang terdiri dari mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan. Kelompok MKB yang terdiri dari matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dan berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif. Penyelenggaran program studi bersangkutan. Kelompok MPB yang terdiri dari mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan prilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk sdetiap program studi. MBB terdiri dari mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global.

Struktur kurikulum IAIN adalah terdiri dari MKU (Mata Kuliah Dasar Umum), MKDK (Mata Kuliah dasar Keahlian) dan ketiga MKK (Mata Kuliah Keahlian) yang tentunya akan mengikuti struktur kurikulum yang telah dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 232/U/2000.

#### **d. Sarana Dan Fasilitas**

Sarana dan fasilitas pembelajaran bagian yang amat urgen dalam menata pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi. Sarana fasilitas di kelas dan di luar kelas. Di dalam kelas dibutuhkan saran dan fasilitas peroses pembelajaran terkait dengan media pemebelajaran. Di luar kelas yang terpokok di antaranya adalah perputakaan, perpustakaan di perguruan tinggi adalah jantungnya universitas (*The heart of unversity*) Perpustakaan ditata dengan sistem manajemen.



### 3. Perguruan Tinggi di Era Global

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, kenyataan religiusitas ini dapat dilihat dari bukti-bukti peninggalan sejarah. Sejak bangsa Indonesia memeluk kepercayaan animisme, dinamisme, samapai masuknya agama Hindu, Budha, Islam Kristen ke Indonesia adalah bukti sejarah yang menunjukkan betapa bangsa ini adalah bangsa yang religius. Penetapan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila adalah mengandung makna tentang urgensinya agama di Indonesia. Ada empat hal yang menyebabkan agama menduduki peran penting di Indonesia:

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Asas Konstitusional UUD 1945
- c. Pembentukan Departemen Agama
- d. Kehidupan Sosial religius masyarakat Indonesia (Daulay, 2001: 176)

Untuk merealisasi kehidupan beragama di Indonesia, maka dilaksanakan pendidikan agama. Pendidikan agama di Indonesia telah dilaksanakan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi agama Islam dibagi secara garis besar kepada dua yakni negeri dan swasta. IAIN dan STAIN adalah berada di jalur lembaga pendidikan tinggi negeri di bawah asuhan Kementerian Agama, sedangkan swasta ada yang berbentuk sekolah tinggi, institut dan universitas.

Tujuan utama dari lembaga pendidikan tinggi agama Islam tersebut adalah untuk mendalami dan mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan yang intinya bersumber dari wahyu Allah Swt.

Ilmu-Ilmu keagamaan itu amat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang religius khususnya umat Islam. Masyarakat Indonesia yang religius tersebut yang mayoritas umat Islam memerlukan bimbingan dan pengarahan dalam kehidupan beragama.

Era globalisasi ini akan melahirkan masyarakat yang kompetitif, masyarakat kompetitif akan melahirkan masyarakat unggul. Jadi, dengan demikian tuntutan dunia global ini adalah membutuhkan manusia unggul. Perguruan tinggi amat berperan dalam membentuk manusia unggul tersebut. PTAIS merupakan salah satu perguruan tinggi yang seharusnya juga mempersiapkan diri untuk terbentuknya manusia unggul yang kompetitif.

#### 4. Perguruan Tinggi sebagai Pusat Kegiatan ilmu

Tri dharma perguruan tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi agama Islam swasta. Dharma pertama pendidikan dan pengajaran (akademik) mengkonsentrasikan kepada transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Transfer nilai (*transfer of value*) dan transfer kecakapan (*transfer of skill*). Di sini komunikasi keilmuan antara dosen dan mahasiswa mesti berlaku dalam menjunjung tinggi kaedah-kaedah ilmiah. Ilmiah di kedepankan dan diunggulkan, penilaian dalam bidang ini diberikan seobyektif mungkin dengan menghindarkan perilaku subyektivitas. Letak kualitas *out put* dari suatu lembaga pendidikan terletak kepada sejauh mana diberlakukan kaedah keobyektifkan

Dharma berikutnya adalah penelitian. Penelitian dalam khazanah ilmu memiliki posisi yang amat penting, sebab dengan riset akan berkembangnya ilmu. Riset bertujuan untuk mencari hakikat keilmuan secara real. Bergerak dari dirasakan adanya masalah, latar belakang masalah, kajian teroitis, perumusan hipotesis dan seterusnya terjun kedunia kerja. PTAIS mesti memiliki.

Dhama selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Civitas akademika disuatu perguruan tinggi terkait erat dengan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi bukanlah menara gading yang terisoliri dari masyarakat, tetapi ianya dituntut untuk dapat menghaati dan merasakan kehidupan masyarakat terebut.

#### 5. Kesimpulan

Manajemen pendidikan dan pengajaran diarahkan bagaimana upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Banyak hal yang terkait dengan peningkatan kualitas penddikan/pengajaran. PTAIS sama halnya dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya sama-sama sedang berlomba untuk mncai kualifikasi yang baik. Di antara penentu dari komponen-komponen tersebut adalah dosen, mahasiswa, proses pembelajaran, kurikulum, sarana dan fasilitas, dan lain-lain.

## BAB VI

# PENDIDIKAN ISLAM INFORMAL

### A. PENDIDIKAN ISLAM DI RUMAH TANGGA

**D**alam pandangan Islam pendidikan anak itu telah dimulai sejak mencari jodoh. Seorang muslim mestilah mencari jodoh berdasarkan kriteria agama. Hal ini berkaitan erat dengan lahirnya generasi baru yang beragama pula. Nabi bersabda bahwa dinikahi seorang wanita karena kecantikannya, hartanya, keturunannya dan agamanya, maka pilihlah agamanya.

Seterusnya hubungan suami isteri mestilah berdasarkan ajaran Islam, dan ketika anak sudah lahir diazankan atau di iqamahkan, kemudian diberi nama yang baik dan diakikah. Inilah tahapan-tahapan awal pendidikan seorang anak di rumah tangga. Sejak itu secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan akal pikiran seseorang, dilaksanakanlah pendidikan agama anak. Dimulai dengan pendidikan akidah, ibadah, membaca dan menghafal surah-surah pendek.

Tanggung jawab mendidik anak atau keluarga dalam Islam didasari oleh ayat al Qur'an surah Attahrim ayat 6 :

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari (siksa) api (neraka)*

Hadits Nabi Saw, yang artinya :

“Suami bertanggung jawab memelihara keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban dalam hal itu, Isteri bertanggung jawab dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban dalam hal itu” (H.R. Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Umar)



Setiap orang dilahirkan atas dasar fitrah, ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi (R. Bukhari dan Muslim)

Suruh anak-anakmu mengerjakan shalat pada usia mereka tujuh tahun dan pukul mereka pada usia sepuluh tahun apabila tidak shalat dan pisahkan mereka dari tempat tidur (H.R Tumizi dari Ibn Umar)

Yang paling menarik dari ayat al Qur'an tentang pendidikan anak ini adalah surah Luqman ayat 12-19:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ نُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنِيٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِيٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تَصْعَقْ خَدْلَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya:

12. Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".
14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.
17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Pada surah Luqman ini dijelaskan secara terperinci tentang pendidikan, yaitu :

Bidang keimanan

- a. Jangan menserikatkan Allah
- b. Menjelaskan bahaya syirik
- c. Bersyukur kepada Allah
- d. Mengingat manusia bahwa tempat kembali adalah Allah
- e. Allah memberitahukan segala apa yang dikerjakan manusia
- f. Allah membalas perbuatan manusia sekecil apapun
- g. Menjelaskan sifat Allah Maha Mengetahui

Bidang Ibadah

Memerintahkan untuk menegakkan shalat

Bidang Akhlak

- a. Berbuat baik kepada orang tua
- b. Kalau orang tua memaksa menerikatkan Allah tidak boleh dipatuhi, tetapi tetap berbauat baik kepada mereka
- c. Sabarlah atas apa yang menimpa
- d. Menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat
- e. Jangan sombong, seperti memalingkan muka, berjalan dengan congkak
- f. Sederhana dalam berjalan dan lemah lembut dalam berbicara.

## B. URGENSI PENDIDIKAN ANAK DI RUMAH TANGGA

Pendidik utama dan pertama itu adalah orang tua, melalui orang tua anak belajar berbagai hal dalam kehidupan ini di antara pendidikan yang penting dilaksanakan di rumah tangga adalah:

### 1. Pendidikan karakter

Anak belajar banyak hal dari orang tuanya, terutama yang berkenaan dengan *value* (nilai-nilai). Anak ibarat selembar kertas putih yang masih kosong siap menerima bentuk tulisan atau lukisan apa yang ditulis oleh penulis dan pelukisnya, dalam hal ini orang tua. Dari asuhan dan peraktek kehidupan Itu anak akan dibentuk. Kehidupan dan pergaulan sehari-hari antara orang tua dan anak adalah suasana pendidikan yang amat



efektif membentuk karakter anak. Jadi, dengan demikian rumah tangga adalah basic utama dari pendidikan karakter. Di sinilah orang tua berperan menanamkan nilai-nilai baik kepada anaknya dan menjauhi nilai-nilai buruk. Dari pergaulan sehari-hari anak dengan orangtuanya akan berdampak besar terhadap pembangunan karakter anak (*character building*). Apabila anak memperoleh nilai-nilai karakter yang baik dari orangtuanya, maka akan berpengaruh sepanjang hayatnya, demikian juga sebaliknya.

Apa sebab rumah tangga menjadi basic pendidikan karakter?, karena beberapa hal :

- a. Di dalam pendidikan karakter yang diperlukan adalah contoh teladan, ketika di rumah tangga anak mendapat dan memperoleh contoh yang baik dari orang tuanya maka hal tersebut akan berpengaruh kepada anak.
- b. Pendidikan karakter berawal dari pembiasaan, ketika anak-anak dimulai dari pembiasaan yang baik, maka hal tersebut akan berpengaruh kepada pribadinya, seperti kebersihan, menjaga waktu, disiplin, kejujuran, dan lain.
- c. Pendidikan di rumah tangga adalah berlangsung secara informal, pendidikan ini lebih banyak berdasar kepada hubungan yang erat antara orangtua sebagai pendidik dengan anak sebagai terdidik. Pada hubungan pendidikan yang bersifat informal, maka yang paling ditekankan adalah pergaulan pendidikan yang berdasarkan kasih sayang.

## **2. Pendidikan agama**

Pendidikan agama anak telah dimulai sejak anak dalam kandungan, yaitu lewat orangtuanya terutama ibunya yang selalu mekaskanakan ibadah dengan baik, membaca al Qur'an, sholat wajib maupun sunnat, zikir, silaturahmi, dan berbagai ajaran agama lainnya, sangat berpengaruh bagi pendidikan agama di rumah tangga masing-masing.

Pendidikan agama anak di rumah tangga telah dapat dimulai sejak anak telah bisa berkomunikasi dengan orang tuanya sebagai pendidik. Dimulai dari hal yang bersifat konkrit yang dapat dilakukannya, misalnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan salam, telah bisa juga diikuti dalam shalat, dan membiasakan perbuatan-perbuatan baik. Akidah telah dimulai sejak anak telah memungkinkan

untuk menerimanya, misalnya ketika dia telah mulai mengenal alam lingkungannya, maka semua yang dikenalnya itu dikaitkan dengan penciptanya adalah Allah SWT. Cerita nabi-nabi, orang-orang shaleh dan lain-lain. Membaca ayat-ayat pendek juga adalah bagian dari pendidikan agama. Pendidikan shalat telah dimulai diajarkan ketika anak belum berusia tujuh tahun, pada usia tujuh tahun si anak telah mulai shalat. Kebiasaan-kebiasaan ini terus dibudayakan bagi anak sehingga sejak kecil dia telah terbiasa melaksanakan shalat. Pendidikan puasa, dimulai sejak anak sudah memungkinkan untuk itu, dimulai dari berpuasa setengah hari, dan apabila telah memungkinkan baru dilaksanakan sehari penuh.

### **3. Pendidikan agama di lingkungan keluarga**

- a. Orang tua (ayah dan ibu) adalah pendidik pertama dan utama, karena:
  - 1) Orang yang paling pertama dikenal anak adalah orang tuanya.
  - 2) Orang tua itu terutama-utama pendidik karena dari merekalah si anak belajar dan menyerap banyak hal.
  - 3) Di rumah tanggalah terjadinya transformasi, pengetahuan dan nilai-nilai.
  - 4) Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak mereka
  - 5) Berakhlak mulia atau tidaknya anak-anak banyak tergantung kepada pendidikan yang diterima mereka di rumah tangga.
  - 6) Pembentukan keperibadian Muslim itu dimulai dari rumah tangga.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak agama:
  - 1) Pendidikan telah dimulai sedini mungkin, bahkan ketika anak masih berada dalam kandungan ibunya pendidikan telah dimulai.
  - 2) Ketika anak lahir di azankan atau di qamatkan adalah merupakan media pendidikan paling awal ketika anak telah berada di dunia.
  - 3) mengaqiqah dan memberkan nama yang baik.
  - 4) Pendidikan agama telah bisa dimulai pada saat anak usia dini (balita).
  - 5) Anak pada usia tujuh tahun telah disuruh melaksanakan shalat

- 6) Diberikan pendidikan nilai-nilai kebajikan sedini mungkin
- 7) Membiasakan anak-anak untuk melakukan kebajikan-kebajikan
- 8) Orangtua mesti menjadi contoh teladan
- 9) Suasana rumah tangga diwarnai dengan suasana keislaman, mengucapkan salam, membaca bismillah setiap memulai pekerjaan, mensuasanai rumah tangga dengan bacaan al Qur'an, dan lain-lain.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap berbagai hal telah diprogramkan
- 11) Melakukan pengawasan terhadap berbagai hal yang merusak akhlak anak.

#### **4. Pendidikan Intelektual**

Sejak dini anak-anak telah tumbuh rasa keintelektualannya, kecerdasan otak anak telah bisa didik sejak balita mereka, bahkan pada masa balita ini adalah masa ke masa pendidikan intelektual anak (*the golden age*). Berbagai bentuk permainan yang membentuk intelektual anak telah bisa dilaksanakan pada masa balita mereka.

#### **5. Pendidikan kejiwaan**

Sejak dini juga pendidikan jiwa anak telah dimulai, anak-anak telah memiliki kepekaan psikologis, mereka telah memiliki rasa suka dan tidak suka, mereka telah memiliki rasa gembira dan sedih. Karena itu pendidikan kejiwaanpun seharusnya juga bebarengan dengan pendidikan keintelektualan. Jiwa yang lembut dari hasil pendidikan kejiwaan banyak ditentukan pada masa balita anak. Dan begitu juga jiwa yang kasar akan tumbuh apabila anak didik dengan kasar. Menyampaikan kata-kata lembut kepada anak-anak adalah salah satu upaya pendidikan kejiwaan anak agar dia pun menjadi orang berhati lembut.

### **C. RUMAH TANGGA SALAH SATU PUSAT PENDIDIKAN (TRI PUSAT PENDIDIKAN)**

Ki Hajar Dewantara, menyebutkan ada tiga pusat pendidikan: Rumah Tangga, Sekolah dan Masyarakat. Ketiganya saling terkait antara satu dengan lain dan saling melengkapi.



### **1. Pendidikan Agama di Lingkungan Keluarga**

Orang tua (ayah dan ibu) adalah pendidik pertama dan utama, karena:

- a. Orang yang paling pertama dikenal anak adalah orang tuanya,
- b. Orang tua itu seutama-utama pendidik karena dari merekalah si anak belajar dan menyerap banyak hal.
- c. Di rumah tanggallah terjadinya transformasi, pengetahuan dan nilai-nilai.
- d. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak mereka
- e. Berakhlak mulia atau tidaknya anak-anak banyak tergantung kepada pendidikan yang diterima mereka di rumah tangga.
- f. Pembentukan keperibadian Muslim itu dimulai dari rumah tangga.

### **2. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak**

- a. Al Qur'an menjelaskan supaya seseorang menjaga dirinya dan keluarganya agar terhindar dari neraka :  
*"Hai Orang –Orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" ... (at Tahrir ayat 6)*
- b. Hadist Nabi menjelaskan bahwa :” Seseorang dilahirkan berdasarkan atas dasar fitrah, orang tuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi

### **3. Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Orang Tua dalam Mendidik Anak**

- a. Pendidikan telah dimuali sedini mungkin, bahkan ketika anak masih berada dalam kandungan ibunya pendidikan telah dimulai
- b. Ketika anak lahir di azankan atau di qamatkan adalah merupakan media pendidikan paling awal ketika anak telah berada di dunia
- c. mengaqiqah dan memberikan nama yang baik
- d. Pendidikan agama telah bisa dimulai pada saat anak usia dini (balita)
- e. Anak pada usia tujuh tahun telah disuruh melaksanakan shalat
- f. Diberikan pendidikan nilai-nilai kebajikan sedini mungkin

- g. Membiasakan anak-anak untuk melakukan kebajikan-kebajikan
- h. Orangtua mesti menjadi contoh teladan
- i. Suasana rumah tangga diwarnai dengan suasana keislaman, mengucapkan salam, membaca bismillah setiap memulai pekerjaan, mensuasanai rumah tangga dengan bacaan al Qur'an, dan lain-lain.
- j. Melakukan pengawasan terhadap berbagai hal yang merusak akhlak.

## **KESIMPULAN**

Lembaga pendidikan Islam informal, adalah lembaga yang dilaksanakan di lingkungan keluarga atau rumah tangga. Pendidik yang bertanggung jawab adalah orang tua. Lembaga ini sangat menentukan karakter manusia, sebab di lembaga inilah mula pertama sekali anak manusia mengenal pendidikan. Jika pendidikan rumah tangga itu baik, maka peserta didik tersebut akan berpeluang menjadi baik. Karena itulah pendidikan rumah tangga ini menempati posisi penting begitu juga menurut pandangan Islam. Dalam hadis Nabi telah disebutkan bahwa anak itu akan menjadi apa, tergantung dari orang tuanya, jika orang tuanya mendidik dengan baik, maka dia akan menjadi baik pula. Adapun sekolah dan pendidikan di masyarakat adalah pelengkap saja.

Islam telah mengajarkan langkah-langkah untuk mendidik anak, mulai dari mencari jodoh, yang lebih diutamakan adalah akhlaknya (agamanya), seterusnya pendidikan pra kelahiran yang dalam lahir seorang ibu. Pendidikan Islam telah memberi pedoman tentang pendidikan pra kelahiran, seterusnya setelah kelahiran, dimulai dari mengazankan / iqamah anak, mengaqiqah anak dan memberinya nama yang baik, pendidikan masa balita, masa kanak-kanak, remaja dan masa dewasa. Langkah-langkah itu telah ditemukan dalam konsep pendidikan Islam.

## **BAB VII**

# **PENDIDIKAN ISLAM NON FORMAL**

### **A. MENGENAL PENDIDIKAN NONFORMAL**

**P**ada Undang-Undang No 2 tahun 1989, disebutkan bahwa pendidikan itu mempunyai dua jalur yakni jalur sekolah dan luar sekolah, sedangkan pada undang-undang No 20 tahun 2003, memandang bahwa jalur pendidikan itu tidak cukup hanya menyebutkan jalur sekolah dan luar sekolah, karena dalam perakteknya banyak jalur sekolah yang dimasukkan ke dalam jalur luar sekolah, padahal ianya jalur sekolah. Karena perlu ada pembatasan yang rigit berkenaan dengan itu jalur pendidikan tidak lagi hanya dibagi kepada dua saja, tetapi sudah menjadi tiga jalur yaitu formal, non formal dan informal.

Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 26 menjelaskan tentang pendidikan nonformal :

- 1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan / atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- 2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional
- 3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.



- 4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan sejenis.
- 5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan /atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- 6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.

Pendidikan Islam nonformal telah tumbuh di Indonesia, jauh sebelum adanya pendidikan Islam formal. Pengajian-pengajian di masjid, di rumah-rumah para ulama adalah cikal bakal bagi berkembangnya pendidikan Islam nonformal. Di Indonesia, jauh sebelum adanya pendidikan Islam formal di pesantren, sekolah, madrasah dan pendidikan tinggi, telah berlangsung pendidikan non formal. Para muballigh yang berdatangan dari berbagai negara ke Indonesia melaksanakan pendidikan Islam itu secara non formal. Masjid atau tempat-tempat lain merupakan pusat kegiatan pendidikan tersebut.

Pendidikan keagamaan non formal ini ditujukan kepada masyarakat ramai. Sedangkan untuk mendidik murid-murid mereka, mereka melaksanakan dengan cara khusus. Pada saat tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia bermuncullah nama-nama ulama yang terkemuka di Indonesia, misalnya di kerajaan Aceh terkenal beberapa nama yang disamping menjadi muballigh dan guru di masyarakat ianya juga menjadi mufti, di antaranya Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani menjadi mufti di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636M). Sultan Iskandar Thani (1636 – 1641 M) mengangkat Syeikh Naruddin al-Raniry menjadi mufti. Sultan Syafiuddin Syah mengangkat Abdur Rauf Singkil menjadi mufti kerajaan di masa pemerintahannya. Hal ini menunjukkan peran ganda ulama di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada juga diantara ulama (*muballigh*) itu yang berperan sebagai kepala pemerintahan seperti Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

Berdasarkan ini dapat dimaklumi bahwa pada ketika itu terdapat pula pusat pengembangan Islam. Pertama pusat kekuatan politik dan kedua pusat pendidikan Islam. Pusat-pusat pendidikan Islam pada ketika itu telah terpusat di pesantren di Jawa, dayah di Aceh dan surau di Sumatera Barat.

## **B. JENIS –JENIS PENDIDIKAN ISLAM NONFORMAL**

### **1. Majelis Taklim**

Pada saat sekarang tumbuh dan berkembang dengan pesatnnya majelis taklim. Di setiap desa dan kelurahan dapat ditemukan majelis taklim. Kegiatan majelis ta'lim ini adalah bergerak dalam bidang dakwah Islam, lazimnya disampaikan dalam bentuk ceramah, tanya jawab oleh seorang ustadz atau kiyai di hadapan para jamaahnya. Kegiatan ini telah dijadwalkan waktu dan ditentukan tempatnya.

Untuk lebih mendekatkan pemahaman terhadap Majelis Ta'lim ini perlu dinukilkan pengertian Majelis Ta'lim yang dirumuskan oleh Musyawarah Majelis Ta'lim se DKI Jakarta tahun 1980, adalah lembaga pendidikan non formal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT (Nurul Huda, 1984:5).

Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa esensi dari Majelis Ta'lim tersebut : 1). Lembaga pendidikan Islam non formal, 2). Pendidik, 3). Peserta didik (Jamaah), 4). Adanya materi yang disampaikan, 5). Dilaksanakan secara teratur, 6). Tujuan untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah SWT.

Dipandang dari sudut teori pendidikan, bahwa Majelis Ta'lim adalah salah satu di antara pusat pendidikan di samping rumah tangga dan sekolah. Ki Hajar Dewantara menyebutkan ada tiga pusat pendidikan (tri pusat) pendidikan, rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Majelis Ta'lim ini adalah tergolong kepada pendidikan Islam di masyarakat.

Majelis Ta'lim ini telah berkembang di masyarakat, mulai dari masyarakat Islam yang tinggal di pedesaan sampai kepada masyarakat Islam yang



tinggal di perkotaan. Kegiatan ini berlangsung di kantor pemerintah dan swasta, dan juga di badan-badan usaha milik negara, di masjid, di rumah-rumah dan lain sebagainya. Khusus di kalangan remaja telah lama berdiri organisasi Remaja Mesjid yang kegiatannya semacam Majelis Ta'lim, yang dikelola oleh remaja.

Selain dari majelis talim di kalangan remaja muncul pula lembaga pendidikan formal dalam bentuk pesantren kilat. Kegiatan berlangsung satu atau dua minggu, yang lebih tepat dikelompokkan kepada pelatihan.

Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 dijelaskan tentang pendidikan nonformal, Pasal 26: satuan pendidikan nonformal terdiri dari atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

Dengan demikian pendidikan Islam itu bisa dilaksanakan dalam bentuk lembaga kursus, misalnya kursus membaca dan menafsirkan al Qur'an, bisa dalam bentuk pelatihan, misalnya pesantren kilat, bisa dalam bentuk kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat serta yang terbanyak tersebar di masyarakat adalah dalam bentuk majelis taklim.

Sesungguhnya kalau merujuk kepada hakikat pendidikan Islam yang sesungguhnya yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, maka tidaklah cukup jika pendidikan Islam itu dilaksanakan dalam bentuk formal saja mestilah di dampingi dalam bentuk pendidikan non formal. Begitu juga bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat, maka diperlukan kegiatan-kegiatan pendidikan Islam yang menampung pendidikan Islam buat orang dewasa dalam bentuk yang lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan, majelis taklim dikategorikan kepada pendidikan diniyah nonformal.

Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Taklimiyah, atau bentuk lain yang sejenis (PP 55 pasal 21 ayat (1)).

Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta (PP 55 Pasal 23 ayat (1)).



Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu kepada pemahaman terhadap al Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, serta akhlak mulia (PP 55, Pasal 23 ayat (2)

Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, musollah, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

## 2. Majelis Zikir

Dalam beberapa tahun belakangan tumbuh dengan subur di Indonesia Majelis Zikir, yaitu sebuah kegiatan keagamaan yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan berzikir. Berzikir pada hakikatnya adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam, bahkan di dalam surah Arra'du ayat 28, disebutkan bahwa untuk mencari ketenteraman batin laksanakan zikir :

Artinya: *"Orang-orang beriman tenteram hati mereka dengan berzikir, ketahuilah dengan berzikir hati akan menjadi tenteram"* (Arr'adu: 28)

Dengan demikian berzikir adalah aktivitas rutin yang dilakukan oleh seorang Muslim, biasanya dilaksanakan secara perorangan, pribadi-pribadi setelah selesai shalat. Saat sekarang timbul pula fenomena baru zikir di samping kegiatan person juga sudah ada yang terorganisasi. Majelis yang terorganisasi ini di urus atau dimanej oleh sebuah organisasi, ada pengurusnya. Dengan demikian ada petugas-petugasnya, ada yang mempersiapkan tempat, ada yang memimpin zikir dan lain-lain sebagainya.

## 3. Remaja Masjid

Remaja Masjid adalah organisasi keagamaan yang anggotanya terdiri dari pelajar, pemuda, mahasiswa. Kegiatannya adalah kegiatan kepemudaan yang dikaitkan dengan pembinaan jiwa beragama mereka. Di antara kegiatan Remaja Masjid adalah pengajian keagamaan, dengan mendatangkan guru-guru agama yang akan memberi ceramah. Selain dari itu pengajian rutin tersebut, selalu juga remaja masjid melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besara keagamaan, seperti peringatan maulid nabi, peringatan Isra' dan mi'raj Nabi Muhammad, dan untuk memeriahkan kegiatan tersebut, remaja masjid mengadakan berbagai kegiatan sayembara atau musabaqah, dan juga pertandingan oleh raga.

#### 4. Pesantren Kilat

Kegiatan pesantren kilat sudah lazim dilaksanakan oleh pelajar dan mahasiswa. Pada waktu libur sekolah, sekolah-sekolah tertentu melaksanakan pesantren kilat. Bagaimana asal usulnya sehingga disebut dengan pesantren kilat, belum dapat diketahui dengan pasti. Tetapi yang jelas nama ini terambil dari dua kata pesantren dan kilat. Mungkin dapat diinterpretasikan bahwa karena kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pendidikan agama, maka yang dekat dengan pendidikan agama itu adalah kata pesantren. Pengertian pesantren telah banyak disinggung pada bab terdahulu, jadi tidak perlu diulang lagi. Sedangkan kata kilat menunjukkan cepat, hanya dilaksanakan beberapa hari saja, sekitar tiga, tujuh atau lima belas hari saja. Semestinya pendidikan di pesantren itu dilaksanakan bertahun-tahun, paling tidak tiga tahun untuk satu tingkatan. Tingkatan tsanawiyah tiga tahun dan tingkat aliyah juga tiga tahun. Melihat panjangnya durasi pendidikan di pesantren yang sesungguhnya, sedangkan kegiatan ini hanya beberapa hari saja, maka dapat diduga itulah sebabnya disebut dengan pesantren kilat.

Inti dari pelaksanaan pesantren kilat adalah menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik. Di sekolah mereka telah mendapatkan pembekalan agama yang mengisi kognitif mereka, maka di pesantren kilat ditambah dengan kegiatan yang akan mengisi afektif mereka, seperti shalat berjamaah yang dilaksanakan tepat waktu, dilaksanakan pula shalat tahajjud malam hari, dan berbagai bentuk pengisian ranah afektif.

#### 5. Pelatihan (*Training*)

Organisasi mahasiswa pemuda, pelajar, lazim melaksanakan training, dengan berbagai nama, misalnya Basic Training, Intermediate Training, dan *adavenced Tarining*, atau busi juga disebut Latihan Kader (LK). Di dalam pelatihan tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran yang akan membentuk kepribadian mereka. Ada materi keorganisasian, kepemimpinan, keagamaan, dan lain. Tulisan ini lebih memfokuskan kepada materi keagamaan. Materi keagamaan difokuskan kepada tiga hal, memberikan pengetahuan keagamaan yang kemudian didiskusikan, kemudian penghayatan keagamaan dan peraktek keagamaan.

## 6. Kursus-Kursus

Kursus-kursus pendidikan agama juga termasuk kepada pendidikan keagamaan nonformal, misalnya kursus membaca al Qur'an, kursus bahasa Arab, kursus membaca kitab-kitab klasik (kitab kuning), seperti yang tertera pada PP No 55, menjelaskan tentang hal tersebut, seperti yang tertera pada pasal 22 tentang Pengajian Kitab, pasal 24 tentang Pendidikan al Qur'an.

## 7. Tahfizul Qur'an

Saat sekarang tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga pendidikan tahfiz Qur'an di berbagai tempata di Indonesia. Sistem pembelajarannya adanya digabungkan pendidikan formal di tempat tersebut, ada pula yang semata-mata melaksanak tahfiz saja.

## KESIMPULAN

Pendidikan nonformal adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan yang diakui keberadaannnya dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 pada pasal 26, ayat (1) sampai (7). Pendidikan Islam juga memiliki jalur pendidikan nonformal ini, bahkan kalau melihat kepada sejarah pendidikan Islam di Indonesia, maka pendidikan nonformal itu sudah tua sekali usianya, sudah sama tuanya dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Ketika para ulama, ustaz, kyai melaksanakan pendidikan Islam mengajari masyarakat tentang ilmu-ilmu keislaman pada masa awal perekmembangan Islam, seperti belajar membaca dan menulis Alquran, belajar shalat dan laian-lain, tempatnya adalah di lembaga pendidikan nonformal.

Lembaga pendidikan Islam nonformal yang paling awal sekali adalah masjid. Setelah itu baru berkembang lembaga-lembaga pendidikan lainnya; pesantren, dayah dan surau. Di lembaga-lembag pendidikan ini sebelum masuknya ide-ide pembaruan pemikiran pendidikan Islam ke Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan ini juga bersifat nonformal. Setelah masuk ide-ide pembaruan pendidikan Islam, lembaga itu sebagiannya menjadi lembaga pendidikan formal, sedangkan sebagaian lain tetap bertahan sebagai lembaga pendidikan non formal.

Saat sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam nonformal ini berkembang pesat, seperti; majeles taklim, majelis Alquran, pesantren



kilat, kegiatan remaja masjid, kursus-kursus keagamaan, dan lain-lain. Lembaga pendidikan nonformal ini adalah lembaga yang tumbuh di masyarakat, jadi penanggung jawabnya adalah masyarakat dalam hal ini pemimpin masyarakat baik pemimpin formal maupun pemimpin nonformal. Jadi, dengan demikian tri pusat pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah saling lengkap melengkapi antara rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Rumah tangga berbentuk lembaga pendidikan informal, sekolah mengasuh lembaga pendidikan formal dan masyarakat mengayomi lembaga pendidikan nonformal.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'ân Al-Karîm.

Al-Abrâsyî, Muhammad 'Attiyah, *At-Tarbiyyah Al-Islâmiyyah*, Mesir, 'Isa Bâbi al-Halabi, 1964.

\_\_\_\_\_, *At-Tarbiyyah al-Islâmiyyah wa Falasifatuhâ*, Mesir, Isa babi al-Halabi, 1975.

Abdullah, Abdur Rahman Saleh, *Educational Theory A Qur'ânic Out Look*, Makkah al-Mukarramah, Ummu Al-Qur'an, University, tt.

Al-Ahwâni, Ahmâd Fuâd, *Al-Tarbiyyah fî al-Islâm*, Kairo, Dâr al-Ma'ârif, tt.

Al-'Ainaini 'Ali Khalil Abu, *Falsafah At-Tarbiyyah, Al-Islamiyyah fî Al-Qur'ân Al-Karîm*, Kairo, Dar Al-Fikri Al-'Arabi, 1980.

Ashraf, Syed Ali, *New Horizone in Muslim Education*, Cambridge, Hodder and Stoughton, The Islamic Academy, 1985.

Azra, Azyumardi, *The Surau and The Early Reform Movement in Minangkabau*, Bandung, Mizan, 1990. \_\_\_\_\_, *The Rise and Decline of the Minangkabau, Surau, A. Tradisional Islamic Education Institution in West Sumatera During the Dutch Colonial Government*, Colombia University Press, 1988.

\_\_\_\_\_, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Mizan, Bandung, 1994.

Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib, *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah : King Abd. Aziz University, 1979.

\_\_\_\_\_, *The Concept of Education in Islam*, Kuala Lumpur, Muslim Youth Movement of Malaysia, 1983.

Barnadib, Sutari Imam, *Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta, Andi Offcet, 1983.

- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta, FIP IKIP, 1986.
- Benda Harry J, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1980.
- Buku Tahunan, *Institut Agama Islam Negeri Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah 1960-1962*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1962.
- Chirzin, M. Habib, *Impak dan Pengaruh Kegiatan Pondok Pabelan Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Desa, Dalam Pesantren Beberapa Tinjauan dan Pengamatan Tentang Arah Pendidikan Agama*, Jakarta, Badan Litbang Agama, Departemen Agama, tt.
- \_\_\_\_\_, *Agama dan Ilmu Dalam Pesantren*, dalam M. Dawam Rahardjo, ed, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta, LP3ES, 1985.
- Daradjat, Zakiah, *Pembinaan Dimensi Rohaniah Manusia Dalam Pandangan Islam*, Makalah Seminar di IAIN SU Medan, September 1984.
- \_\_\_\_\_, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Pembinaan Madrasah dan Perguruan Agama Lainnya Serta Permasalahannya*, Kertas Kerja pada Musyawarah MP3A, Jakarta, Juli 1977.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Korelasi Kurikulum MIN, MTsN, MAN dan PGA Dengan IAIN*, *Lokakarya Pengembangan Kurikulum IAIN*, Jakarta, Penerbit Dirjen Binbaga Islam, Depag RI, 1979.
- Dasuki, Abdul Hafiz, *The Pondok Pesantren an Account of its Development in Independent Indonesia, 1965 - 1973*, MA, Thesis, McGill University, Montreal, 1974.
- Daulay, Haidar Purtra, *Histarisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Islam dalam Sitem Pendidikan Nasional*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_, *Dinamika Pendidikan Islam*, CitaPustaka Media, Bandung, 2007.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 1984.



- Dobbin, Christine, *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847* Terj. Lilian D, Tedjasudana dari *Islamic Rivivalisme in a Changing Pleasant Economy*, Central Sumatera Utara, 1784-1847, Jakarta, INIS, 1992.
- Ensiklopedi Indonesia*, 4, Jakarta, Ikhtiar Baru, 1983.
- First World conference on Muslim Education*, Jakarta, Inter Islamic University Cooperation of Indonesia, tt.
- Gibb, HAR, and Kramers JH, *Shorter Encyclopedia of Islam*, Lieden, EJ, Brill, 1961.
- Hasjmy, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung, Al-Ma'arif, 1989.
- , *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Jakarta, Beuna, 1983.
- Husein, Syed Sajjed, Syed Ali Ashraf, *Crisis in Muslim Education*, Jeddah, King Abdul Aziz University, 1987.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hidayakarya Agung, 1979
- Kafrawi H, *Pembaharuan Sistem Pondok Pesantren Sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Cemara Indah, 1978.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 370, 372, 373 dan 374 Tahun 1993.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992.
- Langgulong Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta, Al-Husna, cet I, 1987.
- Al-Marâghî, Ahmad Musthafa, *Tafsîr al-Marâghî I*, Mesir, Dâr Al-Fikri, 1974.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren)* Bogor, Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 1989.
- Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V, Buku III.B, *Pengembangan Kurikulum*, Jakarta, Proyek Pengembangan Institut Pendidikan Tinggi, Depdikbud, 1981.
- Madjid, Nurcholis, *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren*, Dalam Dawam Rahardjo, M, ed, *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta, P3M, 1985.

- Muhadjir, Noeng, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1989.
- , *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta, Rake Sarasin, cet I, Edisi IV, 1987.
- Maksum, Madrasah, *Sejarah & Perkembangannya*. Logos, Jakarta, 1999
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid I – IV*, Jakarta, PN, Balai Pustaka, 1984.
- Nasution, Harun, *Pembaharu Dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992.
- Nasution S, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung, Jemmars, 1983.
- Nurul Huda, dkk., *Pedoman Majelis Ta'lim, Proyek Penerangan, Bimbingan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat*, Jakarta, 1983
- Nama dan Data Potensi Pondok Pesantren seluruh Indonesia, Jakarta, Dirjen Binbaga Islam, Departemen Agama RI, 1984/1985.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1980.
- Natsir, M. *Capita Selecta*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973
- Oepen, Manfred dan Wolfgang Karcher (ed), *Dinamika Pesantren, Dampak Pesantren Dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, Jakarta, P3M, 1988.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Panitia Seminar, *Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia*, Medan, 1963.
- Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Aliyah*, Jakarta, Depag RI, Ditjen Binbaga Islam, 1988.
- Pedoman Umum/Pola Tindak Lanjut Latihan Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Pendidikan Agama SLTP dan SLTA Tahun 1989/1990*, Jakarta, Depdikbud, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 1989.
- Pendidikan di Indonesia Dari Zaman ke Zaman*, Jakarta, Depdikbud, Balai Pustaka, 1986.
- Peraturan Pemerintah No. 27, 28, 29 Tahun 1990 dan PP No 73 Tahun 1991, PP 38 Tahun 1992, PP No. 60 Tahun 1999.

- Poerbakawatja Soegarda, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta, Gunung Agung, 1970.
- , *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta, Gunung Agung, 1976.
- Pola Pembangunan Pondok Pesantren Pelita V, Jakarta, Ditjen Binbaga Islam, Depag RI, Jakarta, 1989.
- Proyek Pembinaan dan Bantuan Pondok Pesantren Depag RI, Jakarta, Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren, 1982.
- Rahardjo, M. Dawam (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta, P3M, 1985.
- , *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta, LP3ES, 1985.
- Saefuddin, AM, *Desekularisasi Islam*, Bandung, Mizan, 1987.
- Santoso, Slamet Iman, *Pendidikan di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jakarta, Haji Masagung, 1987.
- Shalaby, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, Mukhtar Yahya, Pent. Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
- Sasromidjaja, R. Madenan, *Pendidikan dan Pengajaran Agama*, Yogyakarta, Badan Wakaf UII, 1952.
- Saridjo, Marwan dkk, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta, Dharma Bhakti, 1980.
- Second World Conference on Muslim Education*, Recommendation, 1980.
- Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Depag RI, Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985.
- Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Depag RI, Ditjen Binbaga Islam, 1985/1986.
- Asy-Syaibani, Umar Muhammad al-Toumy, *Falsafah at-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, Trabulis, Asy-Syirkah al-Ammah, 1975.
- Steenbrink, Karel A, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.
- , *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta, LP3ES, 1986.
- Suryabrata, Sumadi, *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Andi offcet, 1983.



Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975, Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah.

Sumardi, Mulyanto (ed), *Bunga Rampai Pemikiran Tentang Madrasah dan Pesantren*, Jakarta, Pustaka Biru, 1980.

—————, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945 - 1975*, Jakarta, Dharma Bhakti, 1978.

Suminto R, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, LP3ES, 1985.

Sutarai, Imam Barnadib, *Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta, FIP IKPI 1986

Snouck Hurgronje, C, *Aceh Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jakarta, INIS, 1977.

Team Penyunting, *Setengah Abad UII*, Yogyakarta UII Press, 1994

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, Semarang, Tugu Muda, 1989.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

## TENTANG PENULIS

**Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA**, adalah Guru Besar Sejarah Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Lahir di Singkuang Mandailing Natal pada tanggal 6 September 1949. Alumni S-2 Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1988), dalam bidang Pendidikan Islam. Gelar doktor dalam bidang pendidikan Islam juga diraihnya dari tempat yang sama (1991), Pada tahun 1996, memperoleh kesempatan mengikuti kursus Manajment di Universitas McGill Canada. Dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Sejarah Pendidikan Islam pada tahun 1996., tahun 2012, mengikuti kegiatan ARFI (Academic Recharging for Higher Islamic Education) di The National Australian University Canberra- Australia.

Buku-buku karya beliau antara lain: *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah, dan Madrasah*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001; *Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan*, Citapustaka Media, Bandung, 2002. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia*, Cita Putaka Media Bandung, 2004. *Renungan Haji*, Pemko Medan 2004, *Renungan Ramadhan*, Pemko Medan, 2005, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Prenada, Jakarta 2007, 2009, 2012. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Prenada, Jakarta, 2007, 2009, 2012, *Qalibun Salim (Jalan Menuju Pencerahan Rohani)*, Rineka Cipta 2009, Jakarta. *Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Rineka Cipta 2009, Jakarta, *Pemberdayaan Pendidikan Islam, di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2009, *Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa*, Rineka Cipta 2012. *Kapita Selekta Pendidikan Islam Perdana Publishing, Medan, 2012*, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, Prenada, Jakarta, 2013. *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, Prenada, Jakarta, 2014, *Pendidikan Islam di Era Global*, IAIN Press, Medan, 2015, *Pelita Hati*, Manhaji, Medan 2015. *Ramadhan Karim*, Manhaji, Medan, 2015. *Pendikan Islam di Era Global*, Perdana Publishing, Medan, 2015. *Pendidikan Karakter*, CV Manhaji, Medan, 2016.

Dari tahun 1992 s/d 1997 menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan, tahun 1997 sampai 2001 Pembantu Rektor II IAIN Sumatera Utara Medan, dan dari tahun 2001 s/d 2005 sebagai Pembantu Rektor I IAIN Sumatera Utara. Tahun akademi 2009/ 2010, menjadi Guru Besar Tamu (Visiting Professor) pada Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Kuala Lumpur. Aktif sebagai Pengurus Dewan Pendidikan Sumatera Utara Priode 2007-2012.



## TENTANG EDITOR

**Nurussakinah Daulay, M.Psi**, lahir di Medan pada tanggal 9 Desember 1982. Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Psikologi di Universitas Sumatera Utara tahun 2005, gelar Magister (S2) diperolehnya dari Fakultas Psikologi di Universitas Sumatera Utara selesai pada tahun 2008. Pada tahun 2009 telah bergabung sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sumatera Utara Medan. Beliau mengasuh mata kuliah Psikologi Umum, Psikologi Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik. Saat sekarang sedang mengikuti Programa S-3 Pasaca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Adapun sejumlah karya ilmiah yang bersangkutan yang sudah dipublikasikan, yaitu : *Rahasia Otak Kanan pada Anak Usia Dini (Golden Years Old)* (Jurnal *Al Ihyaul Arabiyah*, IAIN SU), *Dampak Psikologis Pada Anak yang Mengalami Kekerasan Fisik dalam Keluarga* (Jurnal *Al-Fikru*, STAIS L.Pakam), *Integrasi Psikologi dengan Islam di Indonesia* (Jurnal *Al Irsyad*, IAIN SU), *Pengaruh Negatif Televisi Terhadap Psikologis dan Akhlak Anak* (Jurnal *Axiom*, IAIN SU), *Manfaat Bermain Bagi Kecerdasan Anak* (Jurnal *Tazkiya*, IAIN SU), *Pelayanan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus* (Jurnal *Paedagogi*, Universitas Negeri Medan), *Peranan Pendidikan Agama terhadap Kecerdasan Spiritual pada Anak Usia Dini* (Jurnal *At-Tarbawi*, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh). *Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Psikologi dan Islam* (Jurnal *Raudhah*, IAIN SU), *Peranan Pendidikan Karakter dalam Melengkapi Kepribadian Anak* (Jurnal *Darul Ilmi*, IAIN Psidempuan). *Fenomena Bullying Pada Anak di Sekolah* (Jurnal *Sarita*, Pempropsu-sedang cetak). Buku "Pengantar Psikologi dan Pandangan Al Quran Tentang Psikologi" (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). *Psikologi Kecerdasan Anak*, (Medan, Perdana Publishing, 2015).



**PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN  
LEMBAGA-LEMBAGA**

# **PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

Buku ini memuat tentang sejarah pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Membahas tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tetap eksis di Indonesia sampai sekarang dan mempunyai peranan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga-lembaga pendidikan dimaksud meliputi: Pesantren, Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga dibicarakan tentang pendidikan Islam informal dan nonformal.

Uraian buku ini antara lain adalah tentang peranan pendidikan pesantren dalam Menciptakan Masyarakat Madani. Dinamika pendidikan pesantren dan prospeknya. Peranan pendidikan pesantren dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Efektifitas pendidikan agama di sekolah. Integrasi pendidikan yang ideal di sekolah. Merumuskan pengertian sekolah yang berciri khas Islam. Kebijakan pendidikan madrasah dan otonomi daerah. Profesionalisme guru madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pembaharuan madrasah di Indonesia. Pengembangan program kurikulum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Perguruan Tinggi Islam di masa depan. Peranan Perguruan Tinggi dalam pengembangan SDM. Kualitas input dan output Pendidikan Tinggi Islam. Pembidangan ilmu pada pendidikan tinggi Islam. Peranan etika akademik di Perguruan Tinggi dalam membentuk sikap ilmiah. Memberdayakan pendidikan agama di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Islam di Indonesia perspektif masa depan.



**PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI**  
Jl. Sosro No.16A Medan 20224, Tel 061-77151020  
Fax 071-7347756 Email. [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)

ISBN 978-602-6462-25-1



9 786026 462251



PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN  
LEMBAGA-LEMBAGA

# PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Buku ini memuat tentang sejarah pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Membahas tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tetap eksis di Indonesia sampai sekarang dan mempunyai peranan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga-lembaga pendidikan dimaksud meliputi: Pesantren, Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga dibicarakan tentang pendidikan Islam informal dan nonformal.

Uraian buku ini antara lain adalah tentang peranan pendidikan pesantren dalam Menciptakan Masyarakat Madani. Dinamika pendidikan pesantren dan prospeknya. Peranan pendidikan pesantren dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Efektifitas pendidikan agama di sekolah. Integrasi pendidikan yang ideal di sekolah. Merumuskan pengertian sekolah yang berciri khas Islam. Kebijakan pendidikan madrasah dan otonomi daerah. Profesionalisme guru madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pembaharuan madrasah di Indonesia. Pengembangan program kurikulum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Perguruan Tinggi Islam di masa depan. Peranan Perguruan Tinggi dalam pengembangan SDM. Kualitas input dan output Pendidikan Tinggi Islam. Pembidangan ilmu pada pendidikan tinggi Islam. Peranan etika akademik di Perguruan Tinggi dalam membentuk sikap ilmiah. Memberdayakan pendidikan agama di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Islam di Indonesia perspektif masa depan.



PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI  
Jl. Soero No.16A Medan 20224, Tel 061-77151020  
Fax 071-7347756 Email, [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)

ISBN 978-602-6462-25-1

